BAB I
PENDAHULUAN

I.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

a. Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap selaku entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :

1) Akuntabilitas

   Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2) Manajemen

   Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

3) Transparansi

   Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

b. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dikelola, dengan :

1) Menyedikan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah
2) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah,
3) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi,
4) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran yang ditetapkan,
5) Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya,
6) Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, dan
7) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan LRA, belanja, transfer, pembiayaan, saldo anggalan lebih, pendapatan LO, beban dan arus kas Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap sebagai suatu entitas pelaporan.

Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap terdiri dari :

1) Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan dan menyajikan unsur-unsur sebagai berikut :

a) Pendapatan
b) Belanja
c) Transfer
d) Surplus/defisit
e) Pembiayaan
f) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran

2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL secara komparatif dengan periode sebelumnya terdiri dari:

a) Saldo Anggaran Lebih awal;
b) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
c) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan (SilPA/SiKPA);
d) Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya;
e) Lain-lain;
f) Saldo Anggaran Lebih akhir.

Disamping itu, pemerintah daerah menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan

3) Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan. Sedangkan ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban entitas pada tanggal laporan.

Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut:

a) Kas dan setara
b) Investasi jangka pendek
c) Piutang pajak dan bukan pajak
d) Persediaan
e) Investasi jangka panjang
f) Aset tetap
g) Aset Lainnya
h) Kewajiban jangka pendek
i) Kewajiban jangka panjang
j) Ekuitas

4) Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan pos-pos sebagai berikut ;

a) Pendapatan LO dari kegiatan operasional
b) Beban dari kegiatan operasional
c) Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional
d) Pos luar biasa
e) Surplus/defisit LO

5) Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan ekuitas menyajikan pos-pos :

a) Ekuitas awal
b) Surplus/defisit LO pada periode bersangkutan
c) Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar.

6) Catatan atas Laporan Keuangan

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, catatan atas laporan keuangan sekurang-kurangnya disajikan dengan runtutan sebagai berikut:

a) Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target, Undang-Undang/Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.

b) Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan.

c) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.

I.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum Catatan atas Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);

b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

c. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

d. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

f. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

g. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

h. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

i. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

j. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);

k. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

l. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

m. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

n. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

o. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

p. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

q. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

r. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Pinjaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

s. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);

t. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

u. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

v. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

w. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2004 Nomor 13, Seri C Nomor 7), sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Perda Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perubahan ketiga atas Perda Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 14);

x. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan lembaran Daerah Nomor 8);

y. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah di Kabupaten Cilacap. (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 167);

z. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2020;

aa. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2020;

I.3. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan Atas Laporan Keuangan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

1. Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan
2. Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan
3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab II Ekonomi Makro dan Kebijakan Keuangan

1. Ekonomi Makro
2. Kebijakan keuangan

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
2. Hambatan dan kendala dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Bab IV Kebijakan Akuntansi

1. Entitas pelaporan
2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP

Bab V Penjelasan Pos - Pos Laporan Keuangan
1. Penjelasan Pos - Pos LRA
2. Penjelasan Pos - Pos Laporan Perubahan SAL
3. Penjelasan Pos - Pos Neraca
4. Penjelasan Pos - Pos Laporan Operasional
5. Penjelasan Pos - Pos Perubahan Ekuitas
6. Penjelasan Pos - Pos Laporan Arus Kas

Bab VI Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan

Bab VII Penutup

BAB II

KERANGKA EKONOMI DAN KEBIJAKAN KEUANGAN

II.1. EKONOMI MAKRO

Situasi ekonomi dunia di tahun 2019 menunjukan adanya masalah dimana sejumlah negara mengalami dampak tekanan finansial dan ketidakpastian politik. Ini mengakibatkan pula pertumbuhan ekonomi di negara berkembang mengalami pelambatan atau turun ke level bawah.

Hambatan tersebut membuat pertumbuhan perdagangan global pada tahun 2019 juga menjadi melemah sejak krisis keuangan satu dekade yang lalu. Perang dagang antara China dan Amerika sebagai dua kekuatan ekonomi dunia membuat negara lain mendapatkan sentimen buruk dalam proses ekspor-impor dan itu dialami pula oleh Indonesia. Poinnya adalah, bahwa di tahun 2019 hampir semua negara menghadapi tantangan yang sama beratnya, yaitu ekonomi dan pasar keuangan global yang semakin sulit diprediksi arahnya.

Berbeda dengan kondisi perekonomian nasional yang menunjukan tren melambat, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah di tahun 2019 justru menunjukan tren yang positif dengan tumbuh sebesar 5,41 persen. Ini berarti ada peningkatan 0,10 persen dibandingkan tahun 2018 yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,31 persen. Kenaikan ini disebabkan oleh meningkatnya produksi di beberapa kategori yang peranannya besar terhadap nilai PDRB Jawa Tengah yaitu Industri Pengolahan serta Perdagangan Besar dan Eceran. Berdasarkan PDRB menurut Pengeluaran, kondisi perekonomian Jawa Tengah masih ditopang oleh Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan juga Ekspor.

Tabel II.1. Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Jawa Tengah Tahun 2014 – 2019 (persen)

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)	
	Nasional	Jawa Tengah
(1)	(2)	(3)
2014	5,01	5,27
2015	4,88	5,47
2016	5,03	5,27
2017	5,07	5,27
2018	5,17	5,31
2019	5,02	5,41

Sumber :Data Dasar Kab. Cilacap

Dari tabel II.1. terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah dalam periode enam tahun terakhir selalu tumbuh diatas pertumbuhan ekonomi Nasional. Peningkatan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah di tahun 2019 ditopang oleh keberadaan kawasan ekonomi baru seperti Kawasan Industri Kendal yang menjadi Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Industri Brebes dan pengembangan kawasan wisata Borobudur.

a. Produk Domestik Bruto (PDRB)

Keberadaan kilang minyak Pertamina Cilacap yang menghasilkan produk utama berupa produk BBM atau gasoline, naphtha, kerosine, avutur, solar LSWR, minyak bakar, LPG dan pelumas dasar masih menjadi penyumbang terbesar dalam pembentukan PDRB Cilacap. Keberadaan kilang minyak ini bernilai strategis karena memasok 34 persen kebutuhan BBM Nasional dan dari total produksi kilang Cilacap, sebesar 60 persen untuk mensuplai kebutuhan BBM Pulau Jawa yang meliputi produk Pertalite, Pertamax ,Solar dan Premium.
Hasil pengolahan kilang minyak ini menjadikan nilai tambah yang dihasilkan pada lapangan usaha Industri Pengolahan memberikan perananan yang cukup besar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Cilacap. Karena besarnya peranan industri pengolahan minyak maka dalam penghitungan maupun penyajian PDRB Kabupaten Cilacap menurut Lapangan Usaha, dibedakan menjadi :

1) PDRB Kabupaten Cilacap menurut Lapangan Usaha ***dengan minyak***
2) PDRB Kabupaten Cilacap menurut Lapangan Usaha ***tanpa minyak***.

Tabel II.2 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Serta Indeks Perkembangan di Kabupaten Cilacap Tahun 2014 – 2019

Tahun	PDRB ADHB		PDRB ADHK	
	Jumlah (juta Rp)	Indeks Perkembangan (%)	Jumlah (juta Rp)	Indeks Perkembangan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2014	92.025.901,06	122,54	83.391.500,18	111,04
2015	98.876.586,98	131,66	88.357.606,68	117,65
2016	99.033.565,66	131,87	92.858.649,85	123,65
2017	103.921.776,03	138,38	95.254.586,69	126,84
2018*)	109.753.607,77	146,15	98.159.047,77	130,71
2019**)	114.194.224,26	152,06	100.445.727,17	133,75

Sumber :Data Dasar Kabupaten Cilacap Tahun 2020
Catatan : Dengan Minyak
*) *Angka sementara*
**) *Angka sangat sementara*

Melalui tabel 2.2. terlihat bahwa tahun 2019 nilai PDRB dengan minyak atas dasar harga berlaku (ADHB) Kabupaten Cilacap mencapai 114,2 triliun atau meningkat sebesar 1,52 kali dari tahun 2010. Sedangkan berdasarkan harga konstan (ADHK) nilai PDRBnya mencapai 100,4 triliun atau meningkat sebesar 1,34 kali dari tahun 2010.

Tabel II.3 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Serta Indeks Perkembangan di Kabupaten Cilacap Tahun 2014 – 2019

Tahun	PDRB ADHB		PDRB ADHK	
	Jumlah (juta Rp)	Indeks Perkembangan (%)	Jumlah (juta Rp)	Indeks Perkembangan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2014	44.419.642,04	149,21	36.693.888,99	123,25
2015	49.064.608,88	164,81	38.729.569,62	130,09
2016	53.316.051,80	179,09	40.699.392,44	136,71
2017	57.306.466,79	192,49	42.868.159,80	143,99
2018*)	61.605.561,56	206,93	45.073.945,04	151,40
2019**)	65.710.008,20	220,72	47.428.133,99	159,31

Sumber :Data Dasar Kabupaten Cilacap Tahun 2020
Catatan : Tanpa Minyak
*) *Angka sementara*
**) *Angka sangat sementara*

Tabel II.3. menunjukan bahwa PDRB Kabupaten Cilacap tanpa minyak pada tahun 2019 atas dasar harga berlaku (ADHB) sebesar 65,7 triliun sedangkan atas dasar harga konstan (ADHK) sebesar 47,4 triliun, sehingga dalam kurun waktu 9 tahun (2010 – 2019), PDRB Kabupaten Cilacap atas dasar harga berlaku tanpa minyak mengalami kenaikan sebesar 2,21 kali dari tahun 2010. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan tanpa minyak mengalami peningkatan menjadi 1,59 kali.

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun 2018-2019 terlihat adanya peningkatan dari 5,31 persen menjadi 5,41 persen, maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cilacap tahun 2019 berdasarkan PDRB ADHK dengan minyak menunjukan tren yang melambat dengan tumbuh sebesar 2,33 persen dibanding tahun 2018 yang tumbuh sebesar 3,05 persen.

Namun apabila dilihat dari PDRB ADHK tanpa minyak, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cilacap di tahun 2019 justru menunjukan adanya peningkatan yaitu dengan tumbuh sebesar 5,22 persen dibandingkan dengan tahun 2018 yang tumbuh sebesar 5,15 persen, masih di bawah angka pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang sebesar 5,41 persen, tetapi di atas pertumbuhan ekonomi Nasional yang hanya tumbuh sebesar 5,02 persen. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cilacap mampu terjaga pada kisaran angka 5 persen lebih. Kondisi ini tentu relatif baik karena didukung suasana daerah yang kondusif dengan iklim invesatsi yang nyaman dan pelayanan yang mudah.

Dari pertumbuhan ekonomi Cilacap sebesar 5,22 persen di tahun 2019, lapangan usaha yang mempunyai andil tertinggi sebagai sumber pertumbuhan adalah lapangan usaha Industri Pengolahan yang memberikan andil sebesar 1,68 persen, sementara lapangan usaha yang lain andil terhadap sumber pertumbuhannya di bawah 1 persen.

Tabel II.4 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Cilacap Tahun 2014 – 2019 (persen)

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (persen)	
	Dengan Minyak	Tanpa Minyak
(1)	(2)	(3)
2014	2,92	5,34
2015	5,96	5,55
2016	5,09	5,09
2017	2,59	5,35
2018*)	3,05	5,15
2019**)	2,33	5,22

Sumber :Data Dasar Kabupaten Cilacap Tahun 2020
*) *Angka sementara* **) *Angka sangat sementara*

Tabel 2.5 menjelaskan laju pertumbuhan ekonomi menurut lapangan usaha dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Pada tahun 2019, lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tinggi adalah lapangan usaha Informasi dan Komunikasi yaitu mencapai 18,38 persen. Pertumbuhan yang tinggi pada lapangan usaha ini seiring dengan meningkatnya penggunaan sarana komunikasi yang menggunakan pulsa maupun jaringan internet. Hal ini dapat dilihat dari hasil penjualan pulsa dan kartu perdana yang menunjukan tren meningkat dari tahun ke tahun sebagai akibat meningkatnya pengguna medsos di semua kalangangan masyarakat. Lapangan usaha dengan pertumbuhan tinggi berikutnya adalah Jasa Lainnya yang tumbuh 10,63 persen, dan Jasa Perusahaan yang tumbuh sebesar 10,19 persen. Secara umum dari 17 lapangan usaha semuanya mengalami pertumbuhan yang positif, kecuali lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang mengalami kontraksi (tumbuh negative 1,94 persen).

Tabel II.5 Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Cilacap Tahun 2015 – 2019 (Persen)

Kategori/Lapangan Usaha	Pertumbuhan (persen)				
	2015	2016	2017	2018*	2019**
1	2	3	4	5	6
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,22	3,01	2,85	1,75	-1,17
B. Pertambangan dan Penggalian	0,33	0,2	2,31	3,94	4,07
C. Industri Pengolahan	3,76	4,65	3,99	3,54	5,35
D. Pengadaan Listrik dan Gas	13,39	9,3	6,14	5,71	5,67
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,1	2,04	6,39	6,21	4,91
F. Konstruksi	7,14	8,7	7,1	6,11	5,89
G. Perdagangan Besar dan Eceran	6,08	6,74	7,63	6,97	4,97
H. Transportasi dan Pergudangan	9,85	5,17	4,78	7,68	7,97
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,32	4,89	6	7,62	8,1
J. Informasi dan Komunikasi	13,04	7,4	15,46	15,51	18,38
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	7,6	8,28	7,12	4,11	4,53
L. Real Estate	7,37	6,2	7,52	5,66	6,72
M,N. Jasa Perusahaan	9,72	7,73	8,83	10,81	10,19
O Adiministrasi Pemerintahan,	6,36	2,41	2,67	3,65	1,45

Kategori/Lapangan Usaha	Pertumbuhan (persen)				
	2015	2016	2017	2018*	2019**
1	2	3	4	5	6
Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib					
P. Jasa Pendidikan	4,04	7,04	7,9	7,95	8,14
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,39	10,24	10,42	10,66	6,59
R,S,T,U. Jasa Lainnya	4,05	6,35	9,01	9,41	10,63
J u m l a h	**5,34**	**5,55**	**5,09**	**5,35**	**5,15**

Catatan : Tanpa Minyak

*) Angka Sementara

**) *Angka sangat sementara*

b. Struktur Ekonomi Kabupaten Cilacap

Keberadaan industri pengilangan minyak di Cilacap menjadikan lapangan usaha Industri Pengolah menjadi lapangan usaha yang paling dominan sumbangannya terhadap total PDRB dengan minyak Kabupaten Cilacap yaitu mencapai di atas 60 persen. Demikian pula dalam penghitungan PDRB Jawa Tengah, PDRB Cilacap memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap pembentukan PDRB Jawa Tengah akibat besarnya peranan hasil pengilangan minyak tersebut. Namun demikian dari tahun ke tahun prosentase peranannya semakin berkurang seiring dengan meningkatnya kontribusi lapangan usaha lain terhadap PDRB Cilacap.

Tabel II.6 Struktur Ekonomi Kabupaten Cilacap Tahun 2015 – 2019
Atas Dasar Harga Berlaku (persen)

Kategori/Lapangan Usaha	Pertumbuhan (persen)				
	2015	2016	2017	2018*	2019**
1	2	3	4	5	6
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8,82	9,37	9,38	9,28	8,94
B. Pertambangan dan Penggalian	3,52	3,74	3,76	3,74	3,78
C. Industri Pengolahan	66,5	63,74	62,82	61,76	60,79
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,06	0,07	0,08	0,08	0,08
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04
F. Konstruksi	5,15	5,71	5,91	6,18	6,46
G. Perdagangan Besar dan Eceran	5,11	5,57	5,85	6,08	6,25
H. Transportasi dan Pergudangan	2,64	2,83	2,86	2,96	3,15
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,02	1,09	1,12	1,15	1,21
J. Informasi dan Komunikasi	1,34	1,44	1,64	1,8	2,07
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	0,88	0,98	1,04	1,06	1,09
L. Real Estate	0,82	0,89	0,94	0,96	1
M,N. Jasa Perusahaan	0,15	0,18	0,19	0,2	0,22
O Adiministrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,17	1,26	1,27	1,26	1,25
P. Jasa Pendidikan	1,7	1,89	2,02	2,12	2,24
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,36	0,4	0,43	0,46	0,48
R,S,T,U. Jasa Lainnya	0,72	0,81	0,85	0,89	0,95
J u m l a h	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Catatan : Dengan Minyak

*) *Angka Sementara*

**) *Angka sangat sementara*

Tabel 2.6 memperlihatkan struktur ekonomi Kabupaten Cilacap tahun 2019 dengan minyak, lapangan usaha Industri Pengolahan memberikan andil sebesar 60,79 persen. Dari andil sebesar itu utamanya disumbang oleh Industri Pengilangan Minyak yang memberikan kontribusi sebesar 42,46 persen terhadap total PDRB Kabupaten Cilacap. Meskipun dari tahun ke tahun sumbangan dari hasil industri pengilangan minyak persentasenya semakin menurun namun tetap masih dominan. Tahun 2015 Industri Pengilangan Minyak memberikan andil sebesar sebesar 50,38 persen, tahun 2016 memberikan andil sebesar 46,16 persen, tahun 2017 memberikan andil 44,86 persen dan tahun 2018 sebesar 43,87 persen. Besarnya nilai tambah dari pengilangan minyak itulah yang menjadikan lapangan usaha Industri Pengolahan menjadi lapangan usaha yang memberikan sumbangan terbesar terhadap struktur PDRB Kabupaten Cilacap.

Demikian pula apabila komponen minyak dikeluarkan, lapangan usaha Industri Pengolahan merupakan lapangan usaha yang memberikan persentase terbesar dalan struktur ekonomi berdasarkan PDRB ADHB Kabupaten Cilacap. Tabel 2.7 memperlihatkan tahun 2019 lapangan usaha Industri Pengolahan memberikan sumbangan terbesar yaitu sebesar 31,86 persen. Selanjutnya diikuti lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang memberikan andil 15,53 persen, lapangan usaha Konstruksi sebesar 11,23 persen kemudian Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang memberikan kontribusi sebesar 10,87 persen.

Tabel II.7 Struktur Ekonomi Kabupaten Cilacap Tahun 2015 – 2019

Atas Dasar Harga Berlaku (persen)

Kategori/Lapangan Usaha	Pertumbuhan (persen)				
	2015	2016	2017	2018*	2019**
1	2	3	4	5	6
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	17,76	17,4	17,01	16,54	15,53
B. Pertambangan dan Penggalian	7,1	6,94	6,81	6,66	6,58
C. Industri Pengolahan	32,49	32,65	32,21	31,87	31,86
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,12	0,13	0,14	0,14	0,14
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,07	0,07	0,06	0,06	0,06
F. Konstruksi	10,38	10,6	10,72	11	11,23
G. Perdagangan Besar dan Eceran	10,29	10,34	10,62	10,82	10,87
H. Transportasi dan Pergudangan	5,32	5,26	5,19	5,28	5,47
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,06	2,03	2,02	2,04	2,1
J. Informasi dan Komunikasi	2,69	2,68	2,98	3,2	3,59
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	1,78	1,82	1,89	1,9	1,89
L. Real Estate	1,66	1,66	1,7	1,7	1,74
M,N. Jasa Perusahaan	0,31	0,33	0,34	0,36	0,38
O Adiministrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,36	2,34	2,3	2,25	2,18
P. Jasa Pendidikan	3,42	3,51	3,67	3,77	3,9
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,73	0,75	0,78	0,82	0,83
R,S,T,U. Jasa Lainnya	1,45	1,5	1,54	1,58	1,65
J u m l a h	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Catatan : Tanpa Minyak

**) Angka Sementara*

***) Angka sangat sementara*

Untuk lebih jelasnya, Struktur Ekonomi Kabupaten Cilacap (tanpa minyak dan dengan minyak) tahun 2019 dapat ditunjukkan dalam gambar II.1 berikut ini.

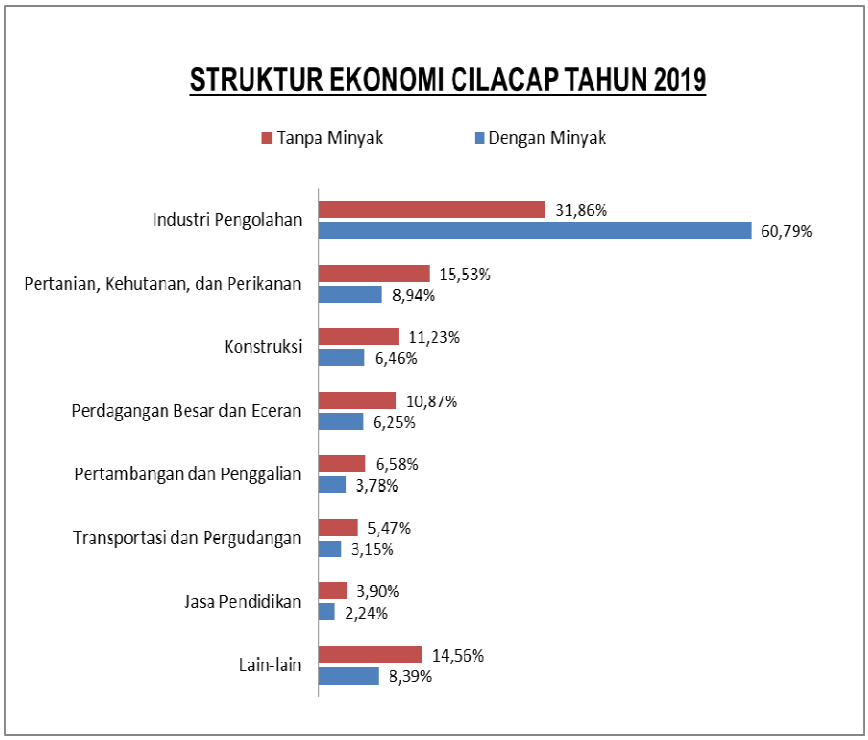

Gambar II.1

c. Pendapatan Perkapita

PDRB perkapita diperoleh dengan cara membagi nominal PDRB berlaku dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Biasanya PDRB perkapita menjadi salah satu proxy pendapatan perkapita meskipun masih secara kasar. PDRB perkapita lebih cenderung sebagai alat ukur produktivitas penduduk di suatu wilayah.

Perkembangan PDRB perkapita di Kabupaten Cilacap ADHB tanpa minyak menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, PDRB perkapita ADHB tanpa minyak Kabupaten Cilacap sebesar 38.045.669,97 rupiah, naik 6,20 persen dari tahun 2018 yang sebesar 35.825.622,64 rupiah. Sedangkan PDRB perkapita ADHK tanpa minyak sebesar 27.460.582,99 rupiah atau mengalami kenaikan 4,76 persen dari tahun 2017 yang tercatatat sebesar 26.211.954,00 rupiah.

Tabel II.8 PDRB Perkapita Tanpa Migas
di Kabupaten Cilacap Tahun 2014 – 2019

Tahun	PDRB per Kapita		Pertumbuhan (persen)	
	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK
1	2	3	4	5
2014	26.352.843,84	21.769.385,83	9.85	4,74
2015	28.953.624,19	22.854.791,46	9,87	4,99
2016	31.302.080,87	23.894.786,48	8,11	4,55
2017	33.481.030,60	25.045.518,43	6,96	4,82
2018*)	35.825.622,64	26.211.954,00	7	4,66

Tahun	PDRB per Kapita		Pertumbuhan (persen)	
	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK
1	2	3	4	5
2019**)	38.045.669,97	27.460.582,99	6,2	4,76

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Cilacap
**) Angka sementara*
***) Angka sangat sementara*

d. Inflasi

Inflasi yang merupakan indikator pergerakan antara permintaan dan penawaran di pasar riil juga terkait erat dengan perubahan tingkat suku bunga, produktivitas ekonomi, nilai tukar rupiah dengan valuta asing, indeksasi anggaran dan parameter ekonomi makro lain. Oleh karena itu, masyarakat, pelaku bisnis, kalangan perbankan, anggota parlemen, dan pemerintah sangat berkepentingan terhadap perkembangan inflasi. Keberhasilan pembangunan tersebut perlu diukur dengan alat yang sesuai/tepat.

Tabel II.9 Laju Inflasi Kabupaten Cilacap
Dirinci Per Bulan Tahun 2015 – 2019 (persen)

Bulan	2016	2017	2018	2019	2020*)
1	2	3	4	5	6
Januari	0,76	1,6	1,33	0,33	-0,03
Februari	-0,11	0,69	0,38	-0,25	0,49
Maret	0,11	-0,11	-0,11	0,32	0,06
April	-0,38	0,01	-0,11	0,26	0,05
Mei	0,15	0,59	-0,08	0,19	0,29
Juni	0,61	0,99	0,76	0,75	0,28
Juli	1,07	-0,44	0,09	0,14	-0,17
Agustus	-0,18	-0,23	-0,12	0,33	-0,09
September	0,05	0,25	-0,13	-0,46	-0,03
Oktober	0,04	0,02	0,41	-0,07	0,12
November	0,54	0,39	0,31	0,16	0,39
Desember	0,09	0,60	0,45	0,50	0,35
Inflasi Tahun Kalender	**2,77**	**4,41**	**3,21**	**2,19**	**1,71**

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Cilacap

Inflasi bulan Desember 2020 sebesar 0,35 persen, lebih rendah bila dibandingkan dengan inflasi bulan Desember 2019 (0,50 persen) dan lebih rendah dari inflasi bulan Desember 2018 (0,45 persen). Tingkat inflasi tahun kalender (Desember 2020 – Desember 2019) sebesar 1,71 persen lebih rendah dibanding inflasi tahun kalender Desember 2019 (2,91 persen) dan inflasi tahun kalender Desember 2018 (3,21 persen).

Apabila dibandingkan dengan perkembangan laju inflasi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional maka laju inflasi Kota Cilacap pada tahun 2020 berada diatas laju inflasi Provinsi Jawa Tengah dan laju inflasi Nasional yakni sebesar 1,71 persen, sementara laju inflasi Jawa Tengah dan Nasional tercatat masing-masing 1,56

persen dan 1,68 persen (*tabel II.10*). Angka inflasi Cilacap pada tahun 2020 lebih rendah dibandingkan tahun 2019. Diharapkan Inflasi tahun kalender 2020 berada di bawah inflasi tahun 2019.

Inflasi tertinggi di Kota Cilacap pada periode Januari-Agustus 2020, tercatat 0,49 persen yang terjadi pada bulan Februari 2020. Tingginya inflasi di bulan Februari 2020 disebabkan oleh adanya kenaikan yang cukup tinggi indeks harga konsumen pada kelompok bahan makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,39 persen.

Tabel II.10 Laju Inflasi Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional dirinci Menurut Bulan Tahun 2020 (persen)
(Tahun 2012=100)

Bulan	Cilacap	Jawa Tengah	Nasional
1	2	3	4
Januari	-0,03	0,09	0,39
Februari	0,49	0,44	0,28
Maret	0,06	0,02	0,10
April	0,05	0,01	0,08
Mei	0,29	0,07	0,07
Juni	0,28	0,2	0,18
Juli	-0,17	-0,09	-0,1
Agustus	-0,09	-0,03	-0,05
September	-0,03	0,04	-0,05
Oktober	0,12	0,17	0,07
November	0,39	0,18	0,28
Desember	0,35	0,46	0,45
Inflasi Tahun Kalender*)	**1,71**	**1,56**	**1,68**

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Cilacap

II.2. KEBIJAKAN KEUANGAN

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, sedangkan Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, serta Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya

Arah Kebijakan Keuangan Daerah menguraikan kebijakan yang akan ditempuh Kabupaten Cilacap berkaitan dengan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

a. Kebijakan Pendapatan Daerah.

Dalam rangka mencapai target pendapatan daerah, diperlukan langkah-langkah dan arah kebijakan keuangan daerah sebagai berikut:

1) Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan tidak memberatkan masyarakat
2) Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah.
3) Meningkatkan kualitas pelayanan publik pada bidang pendapatan daerah, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola pendapatan daerah.
4) Optimalisasi pengelolaan anggaran-anggaran daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja secara efisien, efektif.
5) Peninjauan kembali berbagai kebijakan Pemerintah Kabupaten Cilacap, yang terkait dengan optimalisasi pendapatan daerah dan yang menghambat investasi.
6) Optimalisasi pemanfaatan aset milik pemerintah daerah.

Guna meningkatkan pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah dilakukan upaya antara lain dengan meningkatkan koordinasi kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Hal ini dimaksudkan untuk lebih mengoptimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari APBN dan APBD Provinsi, dalam rangka peningkatan pembangunan sarana dan prasarana perekonomian dan pelayanan publik.

b. Kebijakan Belanja Daerah

Berkaitan kondisi pendapatan sebagaimana diuraikan di atas dikaitkan dengan permasalahan dan isu yang dihadapi maka kebijakan belanja daerah diarahkan sebagai berikut :

1) Belanja daerah dikelola secara tertib dan transparan berbasis akrual sesuai dengan asas efisien, efektif, dan akuntabel.
2) Belanja daerah diutamakan untuk pengalokasian belanja yang bersifat wajib dan mengikat serta prioritas utama, selanjutnya belanja langsung program unggulan kepala daerah, belanja prioritas perangkat daerah, dan belanja tidak langsung diluar belanja yang bersifat wajib dan mengikat serta prioritas utama.
3) Belanja pegawai dianggarkan sesuai regulasi yang berlaku, dan tunjangan pegawai diarahkan pada pada peningkatan kinerja Aparat Sipil Negara (ASN).
4) Belanja hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
5) Belanja bantuan keuangan kepada pemerintahan desa merupakan bentuk distribusi fiskal yang ditentukan berdasarkan proporsi besaran pendapatan asli daerah (pajak daerah dan retribusi daerah) dan dana perimbangan (yang telah dikurangi oleh DAK), sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
6) Belanja bantuan keuangan khusus terhadap pemerintah desa diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah
7) Belanja tidak terduga diarahkan untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat
8) Belanja langsung diarahkan untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar sesuai

kewenangan kabupaten yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah baru dialokasikan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan;

9) Belanja langsung juga diarahkan untuk prioritas pembangunan daerah sesuai visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Cilacap dan mendukung program/ kegiatan strategis provinsi dan nasional sesuai dengan permasalahan yang dihadapi masyarakat luas.

10) Pengalokasian belanja langsung didasarkan pada anggaran berbasis kinerja dengan tolok ukur kinerja yang jelas dan terukur.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a) pendidikan, (b) kesehatan, (c) pekerjaan umum dan penataan ruang, (d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman, (e) ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan (f) sosial. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a) tenaga kerja, (b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, (c) pangan, (d) pertanahan, (e) lingkungan hidup, (f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, (g) pemberdayaan masyarakat dan desa, (h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana, (i) perhubungan, (j) komunikasi dan informatika, (k) koperasi, usaha kecil, dan menengah, (l) penanaman modal, (m) kepemudaan dan olahraga, (n) statistik, (o) persandian, (p) kebudayaan, (q) perpustakaan, dan (r) kearsipan. Urusan pemerintahan pilihan meliputi: (a) kelautan dan perikanan, (b) pariwisata, (c) pertanian, (d) kehutanan, (e) energi dan sumber daya mineral, (f) perdagangan, (g) perindustrian, dan (h) transmigrasi.

Urusan pemerintahan fungsi penunjang meliputi : (a) administrasi pemerintahan, (b) pengawasan, (c) perencanaan, (d) keuangan, (e) kepegawaian, (f) pendidikan dan pelatihan, dan (g) penelitian dan pengembangan

c. Kebijakan anggaran untuk pembiayaan daerah

Kebijakan anggaran untuk pembiayaan daerah dibagi atas dua bagian yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Penerimaan Pembiayaan dapat bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) tahun anggaran 2018, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. Pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk penyertaan modal pada perusahaan daerah.

1) Penerimaan Pembiayaan

a) Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2020 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2020 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

b) Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarannya sesuai peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan.

c) Penerimaan kembali dana bergulir dianggarkan dalam APBD pada akun pembiayaan, kelompok penerimaan pembiayaan daerah, jenis penerimaan kembali investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir dari kelompok masyarakat penerima.

   Dalam kaitan itu, dana bergulir yang belum dapat diterima akibat tidak dapat tertagih atau yang diragukan tertagih, pemerintah daerah harus segera melakukan penagihan dana bergulir dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

d) Pemerintah kabupaten/kota dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dibidang pinjaman daerah. Bagi pemerintah kabupaten/kota yang berencana untuk melakukan pinjaman daerah harus dianggarkan terlebih dahulu dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan sesuai Pasal 35 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah.

e) Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD dapat menerbitkan obligasi daerah untuk membiayai infrastruktur dan/atau investasi yang menghasilkan penerimaan daerah setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri dan persetujuan dari Menteri Keuangan sesuai maksud Pasal 300 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

f) Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman yang berasal dari penerusan pinjaman utang luar negeri dari Menteri Keuangan setelah memperoleh pertimbangan Menteri Dalam Negeri. Perjanjian penerusan pinjaman dilakukan antara Menteri Keuangan dan Kepala Daerah sesuai maksud Pasal 301 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

2) Pengeluaran pembiayaan

a) Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, pemerintah daerah dapat menganggarkan investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir sesuai Pasal 118 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dana bergulir dalam APBD dianggarkan pada akun pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan daerah, jenis penyertaan modal/investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir kepada kelompok masyarakat penerima.

b) Pemerintah Daerah harus menyusun analisis investasi pemerintah daerah sebelum melakukan investasi. Analisis investasi tersebut dilakukan oleh penasehat investasi yang idependen dan professional, dan ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.

c) Pemerintah daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk BUMD sektor perbankan, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna menambah modal inti sebagaimana dipersyaratkan Bank Indonesia dan untuk memenuhi *Capital Adequacy Ratio* (CAR).

d) Dalam rangka mendukung kebijakan paket ekonomi pemerintah terkait dengan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal dan/atau penambahan modal kepada badan Usaha Milik Daerah baik lembaga keuangan perbankan maupun lembaga keuangan non perbankan sesuai peraturan perundangundangan.

e) Dalam rangka mendukung pencapaian target *Sustainable Development Goal's (SDG's)* Tahun 2025 yaitu cakupan pelayanan air perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80% (delapan puluh per seratus) dan di wilayah perdesaan sebanyak 60% (enam puluh per seratus), pemerintah daerah perlu memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Penguatan struktur permodalan tersebut dilakukan dengan menambah penyertaan modal pemerintah daerah yang antara lain bersumber dari pemanfaatan bagian laba bersih PDAM.

f) Pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Dana cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah kecuali dari DAK, pinjaman daerah, dan penerimaan lain-lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu.

g) Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran sebagaimana diamanatkan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 61 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

3) Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan.

a) Pemerintah daerah menetapkan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Anggaran 2020 bersaldo nol.

b) Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, pemerintah daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.

c) Dalam hal perhitungan SILPA Tahun Berjalan negatif, pemerintah daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.

Berikut adalah ringkasan Perubahan APBD 2020 Kabupaten Cilacap

Tabel II.11 Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020

NOMOR URUT	Uraian	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	%
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		
1	2	3	4	5	6
1	**PENDAPATAN**	**3.360.359.382.281,00**	**3.183.974.378.680,00**	**(176.385.003.601,00)**	**(0,06)**
1.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**617.977.383.281,00**	**561.113.709.065,00**	**(56.863.674.216,00)**	**(0,10)**
1.1.1	- Pajak Daerah	226.871.653.300,00	199.810.000.000,00	(27.061.653.300,00)	(0,14)
1.1.2	- Retribusi Daerah	22.059.736.600,00	18.139.721.798,00	(3.920.014.802,00)	(0,22)
1.1.3	- Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan	41.911.101.000,00	45.597.285.958,00	3.686.184.958,00	0,08
1.1.4	- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	327.134.892.381,00	297.566.701.309,00	(29.568.191.072,00)	(0,10)
1.2	**Dana Perimbangan**	**1.996.103.673.000,00**	**1.802.273.521.115,00**	**(193.830.151.885,00)**	**(0,11)**
1.2.1	- Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	60.489.527.000,00	75.607.299.000,00	15.117.772.000,00	0,20
1.2.2	- Dana Alokasi Umum	1.435.978.538.000,00	1.295.279.562.000,00	(140.698.976.000,00)	(0,11)
1.2.3	- Dana Alokasi Khusus	499.635.608.000,00	431.386.660.115,00	(68.248.947.885,00)	(0,16)
1.3	**Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah**	**746.278.326.000,00**	**820.587.148.500,00**	**74.308.822.500,00**	**0,09**
1.3.1	- Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	169.403.600.000,00	205.338.414.500,00	35.934.814.500,00	0,18
1.3.3	- Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda lainnya	214.614.723.000,00	221.664.516.000,00	7.049.793.000,00	0,03
1.3.4	- Dana Penyesuaian Otonomi Khusus	65.459.024.000,00	71.923.322.000,00	6.464.298.000,00	0,09
1.3.5	- Belanja Keuangan dan Provinsi dan Pemda lainnya	0,00	27.767.000.000,00	27.767.000.000,00	1,00
1.3.7	- Alokasi Dana Desa Sumber Dana APBN	296.800.979.000,00	293.893.896.000,00	(2.907.083.000,00)	(0,01)
2	**BELANJA**	**3.552.204.675.002,00**	**3.439.138.324.737,00**	**(113.066.350.265,00)**	**(0,03)**
2.1	**Belanja Tidak Langsung**	**1.844.022.615.192,00**	**1.941.203.239.305,00**	**97.180.624.113,00**	**0,05**
2.1.1	- Belanja Pegawai	1.277.140.564.892,00	1.206.221.904.697,00	(70.918.660.195,00)	(0,06)
2.1.3	- Belanja Subsidi	400.000.000,00	0,00	(400.000.000,00)	∞
2.1.4	- Belanja Hibah	49.428.931.000,00	40.169.512.960,00	(9.259.418.040,00)	(0,23)
2.1.5	- Belanja Bantuan Sosial	7.346.228.000,00	87.876.728.000,00	80.530.500.000,00	0,92
2.1.6	- Belanja Bagi Hasil kepada Prov/Kab/Kota, Pemdes	24.408.140.000,00	24.408.140.000,00	0,00	0,00
2.1.7	- Belanja Bantuan Keuangan kepada Prov/Kab/Kota, Pemdes	479.644.445.300,00	459.714.752.300,00	(19.929.693.000,00)	(0,04)
2.1.8	- Belanja Tidak Terduga	5.654.306.000,00	122.812.201.348,00	117.157.895.348,00	0,95
2.2	**Belanja Langsung**	**1.708.182.059.810,00**	**1.497.935.085.432,00**	**(210.246.974.378,00)**	**(0,14)**
2.2.1	- Belanja Pegawai	224.384.146.440,00	234.742.348.800,00	10.358.202.360,00	0,04
2.2.2	- Belanja Barang dan Jasa	720.663.476.470,00	734.042.891.140,00	13.379.414.670,00	0,02
2.2.3	- Belanja Modal	763.134.436.900,00	529.149.845.492,00	(233.984.591.408,00)	(0,44)
	SURPLUS/ DEFISIT	(191.845.292.721,00)	(255.163.946.057,00)	(63.318.653.336,00)	0,25
3	**PEMBIAYAAN DAERAH**				
3.1	**Penerimaan**	**217.434.292.721,00**	**280.865.946.057,00**	**63.431.653.336,00**	0,23
3.1.1	- SILPA Tahun sebelumnya	217.434.292.721,00	280.865.946.057,00	63.431.653.336,00	0,23
3.2	**Pengeluaran**	**25.589.000.000,00**	**25.702.000.000,00**	**113.000.000,00**	**0,00**
	Jumlah Pembiayaan Netto	**191.845.292.721,00**	**255.163.946.057,00**	**63.318.653.336,00**	**0,25**
	SILPA TAHUN BERKENAAN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri danMenteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.7/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional, ada beberapa hal yang penting dipedomani:

1. Mewajibkan kepada kepala daerah untuk melakukan penyesuaian target pendapatan daerah dalam APBD melalui 2 (dua) cara, yaitu: *Pertama*, penyesuaian pendapatan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD). *Kedua*, penyesuaian pendapatan asli daerah.
2. Kepala daerah harus melakukan penyesuaian belanja daerah dalam rangka pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19 terdiri dari 3 (tiga) cara, yaitu: (1) Belanja bidang kesehatan seperti pengadaan alat pelindung diri (APD) bagi tenaga medis serta penyediaan sarana dan peralatan layanan kepada masyarakat dan penanganan pasien. (2) Penyediaan jaringan pengamanan sosial *(social safety net)* seperti pemberian bantuan sosial kepada masyarakat kurang mampu. (3) Penanganan dampak ekonomi.
3. Kepala daerah harus melakukan pengutamaan penggunaan anggaran dan metode pelaksanaan kegiatan dan anggaran melalui realokasi penggunaan anggaran honorarium, bantuan sosial dan hibah untuk kemudian dialihkan menjadi anggaran bantuan sosial kepada masyarakat miskin yang mengalami penurunan daya beli akibat pandemi Covid-19.

Menindaklanjuti peraturan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap melaksanakan *refocusing* dan realokasi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun anggaran 2020. Proses *refocussing* dan realokasi anggaran pada pemerintah Kabupaten Cilacap diawali dengan merubah Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2020 Tanggal 14 Februari tentang Perubahan pertama Peraturan Bupati tentang penjabaran Peraturan Bupati Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 204 Tahun 2019 Tanggal 26 Desember 2019 telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 6 Tahun 2020 Tanggal 25 September 2020 tentang perubahan APBD Tahun 2020. Terakhir dirubah dengan Peraturan Bupati Nomor 159 Tahun 2020 Tanggal 30 November 2020.

III.1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

a. PENDAPATAN

Sumber Pendapatan Pemerintah Kabupaten Cilacap pada tahun 2020 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah. Pada tahun anggaran 2020 jumlah anggaran Pendapatan adalah sebesar Rp3.183.974.378.680,00 sedangkan realisasinya mencapai Rp3.152.402.455.712,48 atau menunjukkan kinerja sebesar 99,01% dari yang dianggarkan. Pendapatan Asli Daerah memberikan kontribusi sebesar Rp591.343.787.160,48 atau 105,39% dibandingkan anggaran 2020 sebesar Rp561.113.709.065,00. Pendapatan Transfer memberikan kontribusi sebesar Rp2.346.223.145.232,00 atau sebesar 97,05% dibandingkan anggaran 2020 sebesar Rp 2.417.522.255.115,00. Lain-lain Pendapatan yang Sah memberikan kontribusi sebesar Rp214.835.523.320,00 atau 114,63% dari anggaran 2020

sebesar Rp205.338.414.500,00. Hal tersebut ditunjukkan dalam gambar grafik berikut :

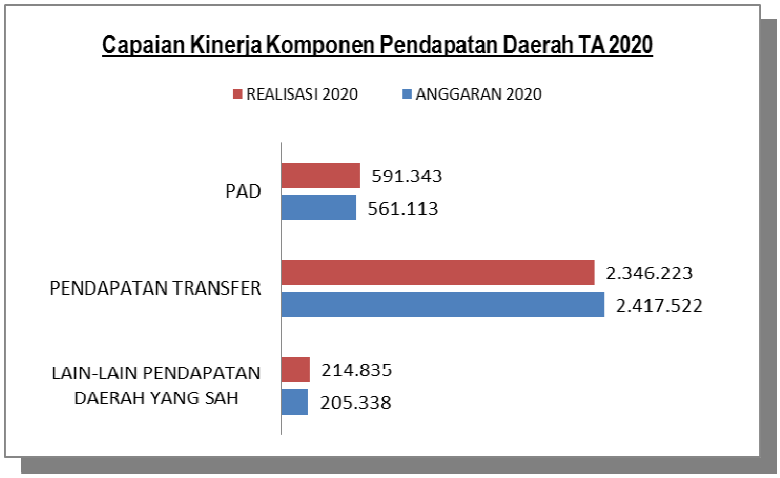

Gambar III.1 Capaian Kinerja Komponen Pendapatan Daerah TA 2020

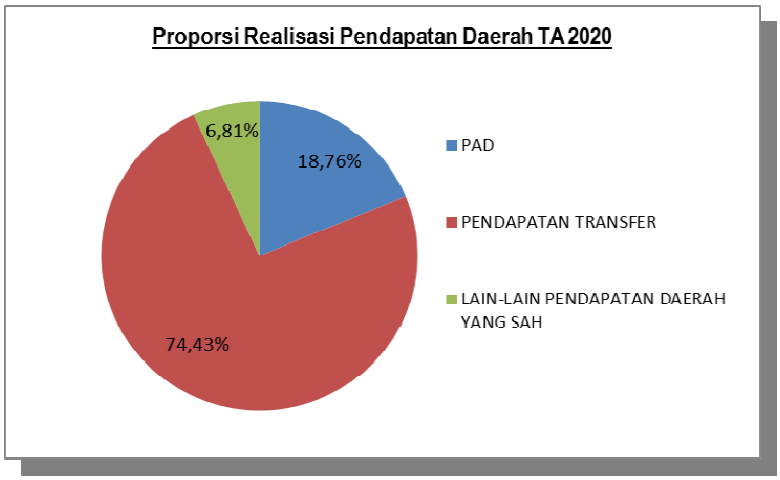

Gambar III.2 Proporsi Realisasi Pendapatan Daerah TA 2020

Dari gambar III.2 dapat dilihat bahwa Pendapatan Transfer masih merupakan penyumbang terbesar Pendapatan Daerah Tahun 2020 yaitu sebesar 74,43%, untuk Pendapatan Asli Daerah 18,76% dan Lain-lain Pendapatan yang Sah memberikan kontribusi 6,81%.

POS – POS PENDAPATAN DAERAH

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pada Tahun Anggaran 2020 anggaran PAD adalah sebesar Rp561.113.709.065,00 sedangkan realisasinya sebesar Rp591.343.787.160,48 atau menunjukkan pencapaian kinerja sebesar 105,39% dari anggaran yang ditetapkan, dengan rincian Pajak Daerah menyumbang Rp 203.188.563.271,00 atau 34,36%, Retribusi Daerah menyumbangkan Rp 19.075.869.519,00 atau 3,21%, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan menyumbangkan Rp44.675.178.661,00 atau 7,55%, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah menyumbangkan Rp324.510.172.109,48 atau 54,88%, seperti gambar berikut:

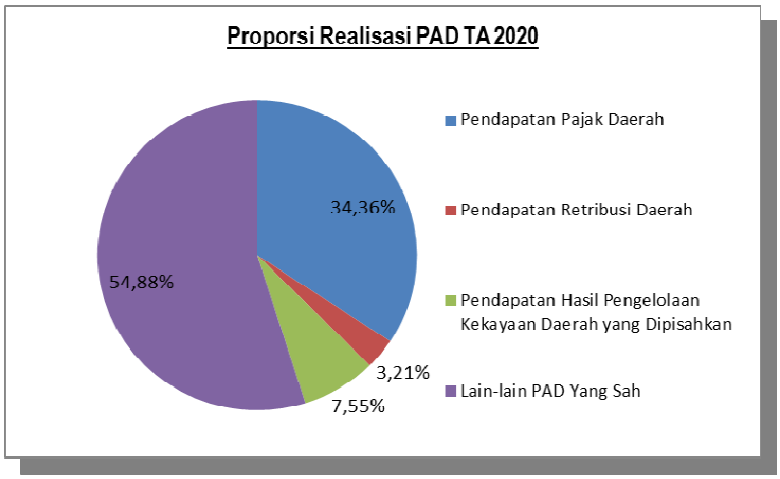

Gambar III.3 Proporsi Realisasi PAD TA 2020

Secara keseluruhan pencapaian kinerja Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber kemampuan fiskal Pemerintah Kabupaten Cilacap selama Tahun Anggaran 2020 atas perbandingannya dengan anggaran ditunjukkan dalam gambar III.4 berikut:

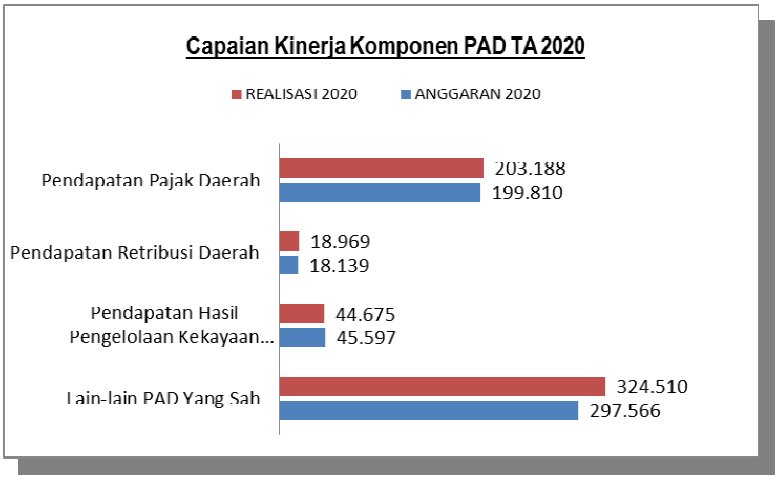

Gambar III.4 Capaian Kinerja Komponen PAD TA 2020

Dari grafik di atas tampak bahwa Anggaran Pendapatan Pajak Daerah adalah sebesar Rp199.810.000.000,00 dengan realisasi Rp203.188.563.271,00 atau mencapai kinerja 101,69% Anggaran Pendapatan Retribusi Daerah adalah sebesar Rp18.139.721.798,00 dengan realisasi Rp 19.075.869.519,00 atau mencapai kinerja 105,16% Anggaran pendapatan hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah sebesar Rp 45.597.285.958,00 dengan realisasi Rp44.675.178.661,00 atau mencapai kinerja 97,98%. Sedangkan Anggaran Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah sebesar Rp297.566.701.309,00 dengan Realisasi Rp324.510.172.109,48 atau mencapai kinerja 109,05%

2) Pendapatan Transfer

Pada Tahun Anggaran 2020 anggaran Pendapatan Transfer adalah sebesar Rp2.417.522.255.115,00 sedangkan realisasinya sebesar Rp2.346.223.145.232,00 atau menunjukkan pencapaian kinerja sebesar 97,05% dari anggaran yang ditetapkan, dengan rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat menyumbang Rp1.757.591.202.654,00 atau 74,91%, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya menyumbangkan

Rp365.817.218.000,00 atau 15,59%, Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya menyumbangkan Rp197.463.851.578,00 atau 8,42%, Bantuan Keuangan menyumbangkan Rp 25.350.873.000,00 atau 1,08%, seperti gambar berikut:

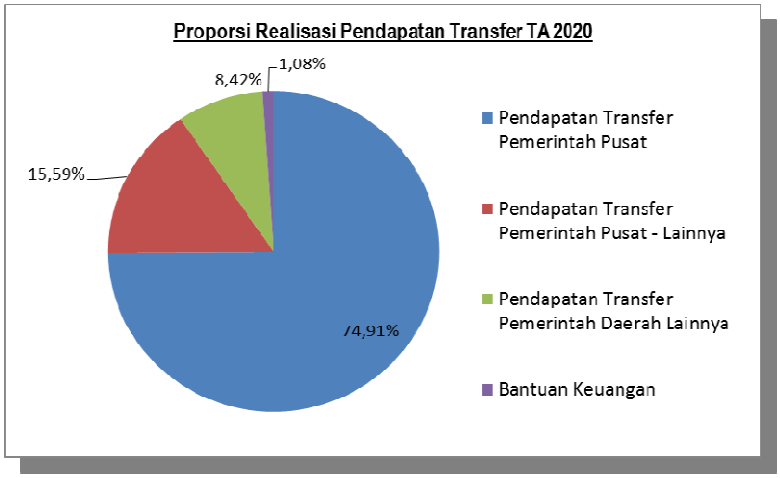

Gambar III.5 Proporsi Realisasi Pendapatan Transfer TA 2020

Secara keseluruhan pencapaian kinerja Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber kemampuan fiskal Pemerintah Kabupaten Cilacap selama Tahun Anggaran 2020 atas perbandingannya dengan anggaran ditunjukkan dalam gambar III.6 berikut:

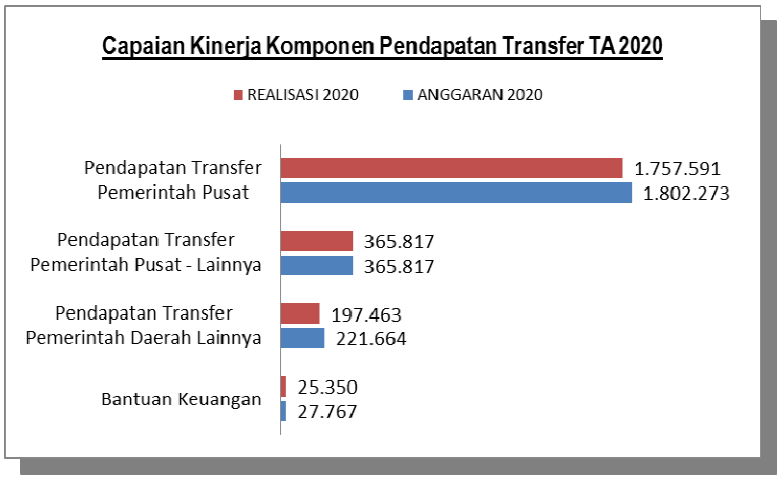

Gambar III.6 Capaian Kinerja Komponen Pendapatan Transfer TA 2020

Dari grafik di atas tampak bahwa Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat adalah sebesar Rp1.802.273.521.115,00 dengan realisasi sebesar Rp1.757.591.202.654,00 atau mencapai kinerja 97,52%. Anggaran Pendapatan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya adalah sebesar Rp365.817.218.000,00 dengan realisasi Rp365.817.218.000,00 atau mencapai kinerja 100,00%. Anggaran Pendapatan Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah - Lainnya adalah sebesar Rp221.664.516.000,00 dengan realisasi Rp197.463.851.578,00 atau mencapai kinerja 89,08%. Anggaran Bantuan Keuangan adalah sebesar Rp 27.767.000.000,00 dengan realisasi Rp25.350.873.000,00 atau mencapai kinerja 91,30%.

3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pada tahun anggaran 2020 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dianggarkan sebesar Rp205.338.414.500,00 sedangkan realisasinya sebesar Rp214.835.523.320,00 atau menunjukkan pencapaian kinerja sebesar 104,63% dari anggaran yang ditetapkan.

b. BELANJA

Pemerintah Kabupaten Cilacap pada APBD TA. 2020 menganggarkan Belanja Daerah sebesar Rp2.955.015.432.437,00 sedangkan realisasinya mencapai Rp2.607.739.427.660,00 atau 88,25%. berdasarkan PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, belanja daerah dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tidak Terduga. Anggaran dan realisasi masing-masing bagian belanja adalah sbb; Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp2.303.053.385.597,00 dapat direalisasikan sebesar Rp2.118.332.170.798,00 Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp529.149.845.492,00 dapat direalisasikan sebesar Rp462.431.933.784,00 dan belanja tak terduga dianggarkan sebesar Rp122.812.201.348,00 direalisasikan sebesar Rp26.975.323.078,00 ditunjukkan dalam gambar grafik sebagai berikut:

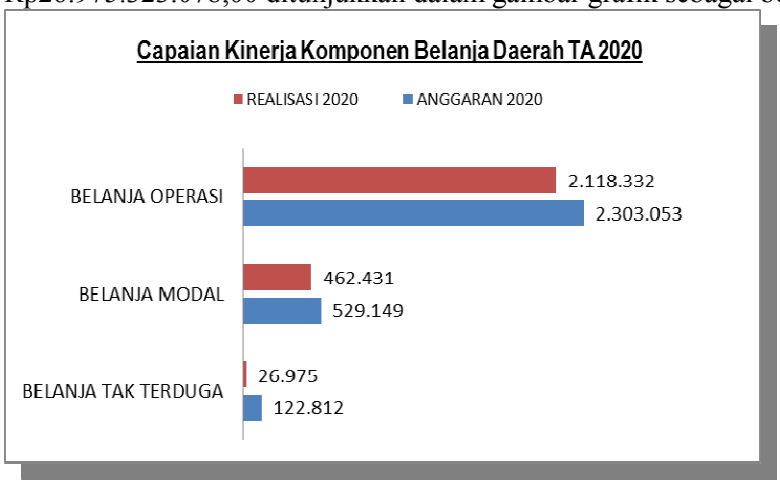

Gambar III.7 Capaian Kinerja Komponen Belanja Daerah TA 2020

Gambar III.8 Proporsi Realisasi Belanja Daerah TA 2019

POS – POS BELANJA DAERAH

1) Belanja Operasi

Perbandingan kinerja pos-pos belanja operasi tahun anggaran 2020 terdiri dari belanja pegawai dianggarkan Rp1.206.226.215.697,00 dapat direalisasikan sebesar Rp1.145.443.814.425,00 atau 94,96% belanja Barang dan Jasa dianggarkan Rp968.780.928.940,00 dapat direalisasikan sebesar Rp881.429.804.126,00 atau 90,98%, Belanja Subsidi dianggarkan Rp0,00 dapat direalisasikan sebesar Rp0,00 atau 0,00%, Belanja Hibah dianggarkan Rp40.169.512.960,00 direalisasikan sebesar Rp40.366.842.247,00 atau 100,49% dan Belanja Bansos dianggarkan Rp87.876.728.000,00 terealisasi sebesar Rp51.091.710.000,00 atau 58,14%. Hal ini dapat dilihat dari gambar grafik berikut :

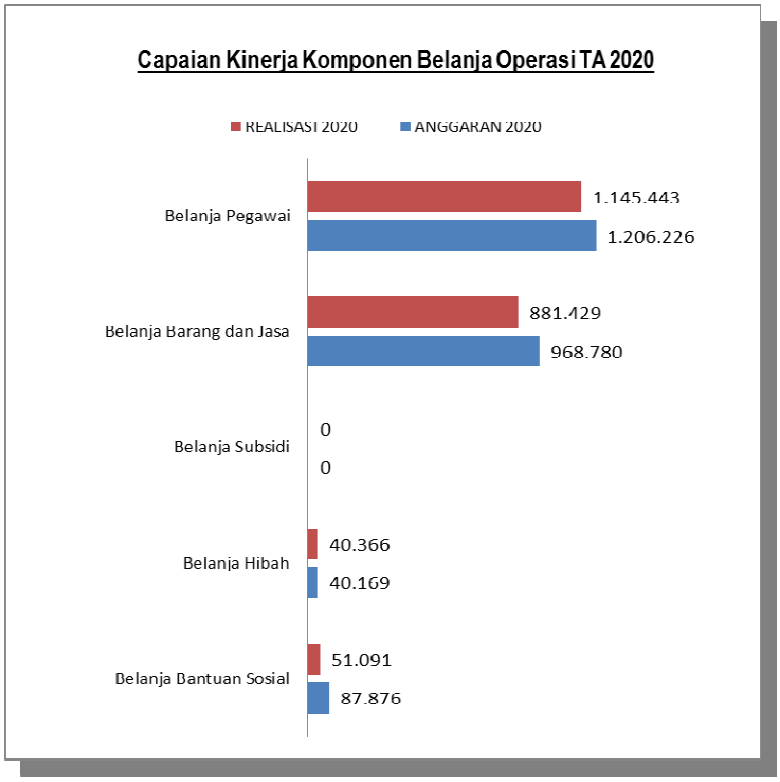

Gambar III.9 Capaian Kinerja Komponen Belanja Operasi TA 2020

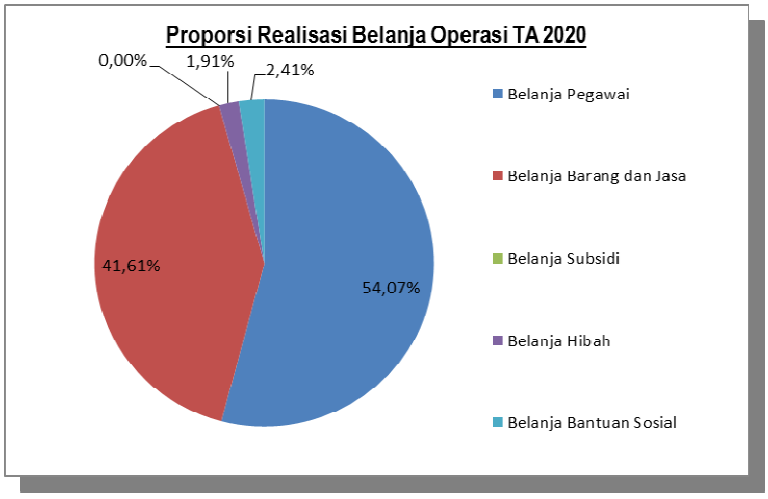

Gambar III.10 Proporsi Belanja Operasi TA 2019

2) Belanja Modal

Belanja Modal terbagi menjadi beberapa komponen antara lain Belanja Modal Tanah dianggarkan Rp25.898.069.100,00 terealisasikan sebesar Rp14.242.054.652,00 atau 54,99%, Peralatan dan Mesin dianggarkan Rp134.057.897.893,00 terealisasi sebesar Rp108.580.137.022,00 atau 80,99% Gedung dan bangunan dianggarkan Rp73.029.906.841,00 terealisasi sebesar Rp63.032.862.639,00 atau 86,31%, Jalan, Irigasi dan Jaringan dianggarkan Rp283.275.664.000,00 terealisasi Rp264.551.341.345,00 atau 93,39%, Belanja Modal Aset tetap lainnya dianggarkan Rp12.702.062.658,00 terealisasikan sebesar Rp11.867.458.126,00 atau 93,43%, Belanja Modal Aset Tak Berwujud dianggarkan Rp186.245.000,00 terealisasi Rp158.080.000,00 atau 84,88%, dapat di jelaskan dalam Grafik sbb :

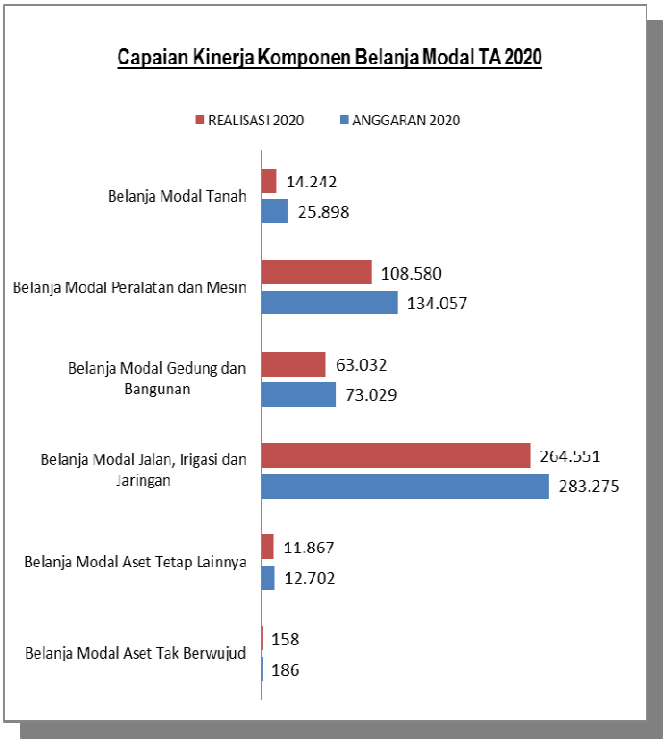

Gambar III.11 Capaian Kinerja Komponen Belanja Modal TA 2020

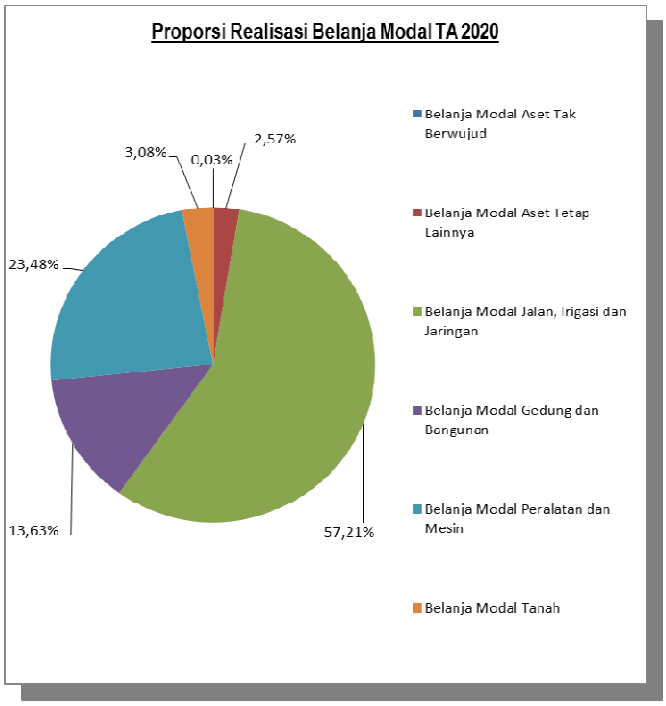

Gambar III.12 Proporsi Belanja Modal TA 2020

3) Belanja Tak Terduga

Belanja tak terduga Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp122.812.201.348,00 terealisasi sebesar Rp26.975.323.078,00 atau 21,96%

c. PEMBIAYAAN

Pada tahun anggaran 2020 jumlah anggaran penerimaan pembiayaan daerah pada pos penggunaan (SiLPA) adalah sebesar Rp280.865.946.057,00 sedangkan realisasinya mencapai Rp280.865.946.057,32 atau menunjukkan kinerja sebesar 100% dari yang dianggarkan. Pengeluaran Pembiayaan daerah pada pos penyertaan modal/Investasi pemerintah daerah dianggarkan sebesar Rp25.702.000.000,00 dengan realisasi Rp19.852.000.000,00 atau 77,24%.

III.2. HAMBATAN DAN KENDALA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN

a. PENDAPATAN

Permasalahan dalam upaya peningkatan pendapatan daerah antara lain :

1) Rendahnya potensi pendapatan akibat dari lemahnya infrastruktur sarana dan prasarana umum sumber Pendapatan Asli Daerah;
2) Tingginya tingkat kebutuhan daerah *(fiscal need)* yang tidak sebanding dengan kapasitas fiskal *(fiscal capacity)* yang dimiliki daerah;
3) Belum optimalnya dalam pengelolaan APBD;
4) Belum optimalnya penarikan Pajak dan Retribusi Daerah;
5) Belum optimalnya penggunaan dan pemanfaatan aset daerah.

Sedangkan solusi yang telah ditempuh antara lain :

1) Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah;
2) Meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan asli daerah dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan;
3) Mendorong berkembangnya BUMD dan sektor swasta;
4) Mendorong perkembangan dan peningkatan ekonomi lokal masyarakat Kabupaten Cilacap
5) sehingga menumbuhkan peran partisipatif dan kesadaran masyarakat dalam ikut membangun Kabupaten Cilacap, salah satunya dengan membayar pajak dan retribusi daerah yang telah menjadi tanggung jawabnya; dan
6) Kerjasama dengan produsen produk-produk dari Kabupaten Cilacap.

b. BELANJA

Dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala dan permasalahan dalam pengelolaan belanja daerah, yakni sebagai berikut :

1) Terbatasnya kemampuan APBD dan bergantung pada dana perimbangan sehingga kemampuan belanja pun terbatas;
2) Belum terkoordinasinya beberapa kegiatan yang menjadi prioritas dalam rangka mewujudkan visi dan misi daerah;
3) Terbatasnya daya dukung pembangunan daerah;
4) Perencanaan anggaran berbasis kinerja yang belum sempurna.

Beberapa langkah solusi untuk mengatasi permasalahan di atas antara lain :

1) Penyusunan kebijakan umum belanja daerah yang memenuhi sarana dan lingkup kebutuhan masyarakat yang dianggap paling penting dan paling luas jangkauannya seperti kesehatan, pendidikan, sarana dan prasarana dasar yang mendukung serta peningkatan kesejahteraan masyarakat;
2) Penyusunan program dan kegiatan belanja yang sesuai dengan skala prioritas berdasarkan kebijakan umum APBD;
3) Penyusunan program dan kegiatan belanja daerah berdasarkan alokasi sumber-sumber penerimaan daerah dapat dilakukan secara ekonomis, efisien dan efektif untuk membiayai pembangunan daerah;
4) Belanja daerah yang ditujukan untuk pengelolaan potensi daerah Kabupaten Cilacap sebagai produk unggulan daerah yang memiliki daya saing dan keunikan tertentu.

c. PEMBIAYAAN

Sisa lebih perhitungan sebagai sumber pembiayaan juga berfungsi sebagai dana *sharing* guna membiayai defisit anggaran pada saat terjadi selisih minus antara pendapatan dengan belanja. Strategi dan prioritas pembiayaan diarahkan dalam rangka penyertaan modal atau investasi pemerintah daerah.

III.3. KINERJA KEUANGAN DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN COVID-19 KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2020

Selama periode berjalan tahun anggaran 2020, Pemerintah Kabupaten Cilacap total telah melakukan perubahan sebanyak 10 (sepuluh) kali atas peraturan Bupati Cilacap tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2020.

Alasan Perubahan Anggaran karena adanya bantuan keuangan dari Provinsi, menjadi pertimbangan perlunya dilakukan beberapa perubahan, antara lain :

1. Perubahan pertama Peraturan Bupati Cilacap Nomor 41 Tahun 2020 Tanggal 14 Februari 2020;
2. Perubahan kedua Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2020 Tanggal 14 Februari 2020 dilaksanakan untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2012 tentang pemotongan penyetoran dan pembayaran iuran jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan perangkat desa;
3. Perubahan ketiga Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2020 tanggal 24 Februari 2020;
4. Perubahan keempat Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2020 Tanggal 30 Maret 2020 sebagai tindaklanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang percepatan penanganan Covid-19;
5. Perubahan kelima Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2020 Tanggal 30 April 2020 sebagai tindaklanjut dari PMK Nomor 35/PMK.07/2020 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan prekonomian Nasional;
6. Perubahan keenam Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2020 Tanggal 28 Mei 2020 sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis BOS reguler Tahun 2020;
7. Perubahan ketujuh Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2020 Tanggal 17 Juli 2020 sebagai tindaklanjut dari PMK Nomor 76/PMK.07/2020 tentang pengelolaan cadangan DAK fisik TA 2020 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 15/KM.7/2020 tentang alokasi BOK tambahan dan tatacara pengelolaan dana cadangan Tahun 2020;
8. Perubahan kedelapan Peraturan Bupati Nomor 124 Tahun 2020 Tanggal 13 Agustus 2020 sebagai tindak lanjut dari PMK Nomor 87/PMK.07/2020 tetang pengelolaan DID tambahan Tahun Anggaran 2020;
9. Perubahan kesembilan yaitu Peraturan Bupati Cilacap Nomor 137 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2020 yang mengatur penyesuaian kembali postur dan rincian APBD Tahun Anggaran 2020 setelah dilakukan *refocusing*;
10. Perubahan yang terakhir dituangkan dalam Peraturan Bupati Cilacap Nomor 159 Tahun 2020 tanggal 30 November 2020 menindaklanjuti keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 25/KM.7/2020 tentang tatacara pengelolaan dan rincian alokasi dana cadangan bantuan oprasional kegiatan (BOK) tambahan gelombang IV Tahun 2020. Perubahan tersebut secara keseluruhan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 137 Tahun 2020 Tanggal 30 November 2020.

Guna menindaklanjuti keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.7/2020 tentang PercepatanPenyesuaian Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional, Pemerintah Kabupaten Cilacap melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing)* Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dengan menggunakan sebagian dari SILPA BLUD untuk penanganan Covid-19 (pengadaan APD, obat-obatan, kebutuhan medis dan lain-lain) dengan berpedoman pada :

a. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona *Virus Disease 2019* (*Covid-19*) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
b. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Pencepatan Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*

Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap melakukan *refocusing* anggaran sebanyak sepuluh kali, SKPD/SKPKD melaksanakan penyesuaian sesuai dengan Peraturan Bupati tersebut, sebagaimana terdapat pada tabel di bawah ini

PENYESUAIAN APBD KABUPATEN CILACAP
TAHUN ANGGARAN 2020

KODE REKENING	URAIAN	PERDA No. 10 TAHUN 2019 TANGGAL 26 Desember 2019	(REVISI PERTAMA) PERBUP No. 41 Tahun 2020 TANGGAL 14 Februari 2020	(REVISI KEDUA) PERBUP No. 43 Tahun 2020 TANGGAL 24 Februari 2020	(REVISI KETIGA) PERBUP No. 46 Tahun 2020 TANGGAL 18 Maret 2020	(REVISI KEEMPAT) PERBUP No. 52 Tahun 2020 TANGGAL 30 Maret 2020 COVID I	(REVISI KELIMA) PERBUP No. 72 Tahun 2020 TANGGAL 30 April 2020 COVID II	(REVISI KENAM) PERBUP No. 84 Tahun TANGGAL 28 Mei 2020	(REVISI KETUJUH) PERBUP No. 105 Tahun 2020 TANGGAL 17 Juli 2020 COVID III	(REVISI KEDELAPAN) PERBUP No. 124 Tahun 2020 TANGGAL 13 Agustus 2020 COVID IV	PERUBAHAN APBD PERDA No. 6 Tahun 2020 TANGGAL 25 September 2020	PERBUP No. 159 Tahun 2020 TANGGAL 30 November 2020 COVID
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.1	**Pendapatan Asli Daerah**											
4.1.1	Hasil Pajak Daerah	226.871.653.300	226.871.653.300	226.871.653.300	226.871.653.300	226.871.653.300	162.821.000.000	162.821.000.000	162.821.000.000	162.821.000.000	199.810.000.000	199.810.000.000
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	22.059.736.600	22.059.736.600	22.059.736.600	22.059.736.600	22.059.736.600	18.750.776.110	18.750.776.110	18.750.776.110	18.750.776.110	18.139.721.798	18.139.721.798
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	41.911.101.000	41.911.101.000	41.911.101.000	41.911.101.000	41.911.101.000	41.911.101.000	41.911.101.000	41.911.101.000	41.911.101.000	45.597.285.958	45.597.285.958
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	327.134.892.381	327.134.892.381	327.134.892.381	327.134.892.381	327.134.892.381	271.924.892.381	271.924.892.381	271.924.892.381	271.924.892.381	297.566.701.309	297.566.701.309
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**617.977.383.281**	**617.977.383.281**	**617.977.383.281**	**617.977.383.281**	**617.977.383.281**	**495.407.769.491**	**495.407.769.491**	**495.407.769.491**	**495.407.769.491**	**561.113.709.065**	**561.113.709.065**
4.2	**Dana Perimbangan**											
4.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	52.829.761.000	52.829.761.000	52.829.761.000	52.829.761.000	52.829.761.000	58.500.412.000	58.500.412.000	58.500.412.000	58.500.412.000	68.920.615.000	68.920.615.000
	Basgu Hasil Bukan Pajak/SDA	7.659.766.000	7.659.766.000	7.659.766.000	7.659.766.000	7.659.766.000	8.005.720.000	8.005.720.000	8.005.720.000	8.005.720.000	6.686.684.000	6.686.684.000
4.2.2	Dana Alokasi Umum	1.435.978.538.000	1.435.978.538.000	1.435.978.538.000	1.435.978.538.000	1.435.978.538.000	1.295.279.562.000	1.295.279.562.000	1.295.279.562.000	1.295.279.562.000	1.295.279.562.000	1.295.279.562.000
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	499.635.608.000	499.635.608.000	499.635.608.000	499.635.608.000	499.635.608.000	388.796.477.000	388.796.477.000	423.541.492.000	423.541.492.000	419.716.705.500	431.386.660.115
	JUMLAH DANA PERIMBANGAN	**1.996.103.673.000**	**1.996.103.673.000**	**1.996.103.673.000**	**1.996.103.673.000**	**1.996.103.673.000**	**1.750.582.171.000**	**1.750.582.171.000**	**1.785.327.186.000**	**1.785.327.186.000**	**1.790.603.566.500**	**1.802.273.521.115**
4.3	**Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**746.278.326.000**	**774.510.326.000**	**774.510.326.000**	**774.510.326.000**	**774.510.326.000**	**694.528.065.400**	**708.744.265.400**	**708.744.265.400**	**722.190.796.400**	**820.587.148.500**	**820.587.148.500**
4.3.1	Pendapatan Hibah	169.403.600.000	169.403.600.000	169.403.600.000	169.403.600.000	169.403.600.000	169.403.600.000	183.619.800.000	183.619.800.000	183.619.800.000	205.338.414.500	205.338.414.500
4.3.2	Dana Darurat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.3	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	214.614.723.000	214.614.723.000	214.614.723.000	214.614.723.000	214.614.723.000	171.691.778.400	171.691.778.400	171.691.778.400	171.691.778.400	221.664.516.000	221.664.516.000
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	65.459.024.000	65.459.024.000	65.459.024.000	65.459.024.000	65.459.024.000	58.476.791.000	58.476.791.000	58.476.791.000	71.923.322.000	71.923.322.000	71.923.322.000
4.3.5	Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya	-	28.232.000.000	28.232.000.000	28.232.000.000	28.232.000.000	1.062.000.000	1.062.000.000	1.062.000.000	1.062.000.000	27.767.000.000	27.767.000.000
4.3.7	Dana Desa	296.800.979.000	296.800.979.000	296.800.979.000	296.800.979.000	296.800.979.000	293.893.896.000	293.893.896.000	293.893.896.000	293.893.896.000	293.893.896.000	293.893.896.000
	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPAAN DAERAH YANG SAH	**746.278.326.000**	**774.510.326.000**	**774.510.326.000**	**774.510.326.000**	**774.510.326.000**	**694.528.065.400**	**708.744.265.400**	**708.744.265.400**	**722.190.796.400**	**820.587.148.500**	**820.587.148.500**
	PENDAPATAN DAERAH	**3.360.359.382.281**	**3.388.591.382.281**	**3.388.591.382.281**	**3.388.591.382.281**	**3.388.591.382.281**	**2.940.518.005.891**	**2.954.734.205.891**	**2.989.479.220.891**	**3.002.925.751.891**	**3.172.304.424.065**	**3.183.974.378.680**
5	**BELANJA DAERAH**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**											
5.1.1	BELANJA PEGAWAI	1.277.140.564.892	1.277.140.564.892	1.277.140.564.892	1.277.140.564.892	1.277.140.564.892	1.233.942.012.892	1.233.942.012.892	1.233.942.012.892	1.233.942.012.892	1.205.549.904.697	1.206.221.904.697
5.1.2	BELANJA BUNGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.3	BELANJA SUBSIDI	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	-	-	-	-	-	-
5.1.4	BELANJA HIBAH	49.428.931.000	49.428.931.000	49.428.931.000	49.578.931.000	49.578.931.000	34.384.384.000	34.384.384.000	34.384.384.000	34.384.384.000	40.169.512.960	40.169.512.960
5.1.5	BELANJA BANTUAN SOSIAL	7.346.228.000	7.346.228.000	7.346.228.000	7.196.228.000	7.196.228.000	94.667.828.000	94.667.828.000	94.667.828.000	101.630.828.000	87.876.728.000	87.876.728.000
5.1.6	BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/ KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	24.408.140.000	24.408.140.000	24.408.140.000	24.408.140.000	24.408.140.000	24.408.140.000	24.408.140.000	24.408.140.000	24.408.140.000	24.408.140.000	24.408.140.000
5.1.7	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	479.644.445.300	480.961.445.300	476.421.835.300	476.421.835.300	476.421.835.300	458.864.752.300	458.864.752.300	458.864.752.300	458.864.752.300	459.714.752.300	459.714.752.300
5.1.8	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.654.306.000	3.754.306.000	3.754.306.000	3.754.306.000	18.819.450.000	116.582.034.348	116.582.034.348	116.495.188.048	116.495.188.048	122.812.201.348	122.812.201.348
	JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG	**1.844.022.615.192**	**1.843.439.615.192**	**1.838.900.005.192**	**1.838.900.005.192**	**1.853.965.149.192**	**1.962.849.151.540**	**1.962.849.151.540**	**1.962.762.305.240**	**1.969.725.305.240**	**1.940.531.239.305**	**1.941.203.239.305**
5.2	**BELANJA LANGSUNG**											
5.2.1	BELANJA PEGAWAI	224.384.146.440	224.468.376.440	224.468.376.440	224.555.951.440	216.432.912.240	207.925.745.300	227.972.915.200	227.972.915.200	227.973.765.200	234.742.348.800	234.742.348.800
5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	720.663.476.470	725.060.315.470	729.599.925.470	739.704.296.470	728.419.656.670	565.754.792.054	577.788.225.048	585.639.662.048	608.398.631.048	723.093.970.525	734.091.925.140
5.2.3	BELANJA MODAL	763.134.436.900	791.629.436.900	791.629.436.900	781.437.490.900	785.780.025.900	395.833.609.718	382.964.868.544	409.945.292.844	393.669.004.844	529.100.811.492	529.100.811.492
	JULAH BELANJA LANGSUNG	**1.708.182.059.810**	**1.741.158.128.810**	**1.745.697.738.810**	**1.745.697.738.810**	**1.730.632.594.810**	**1.169.514.147.072**	**1.188.726.008.792**	**1.223.557.870.092**	**1.230.041.401.092**	**1.486.937.130.817**	**1.497.935.085.432**
	BELANJA DAERAH	**3.552.204.675.002**	**3.584.597.744.002**	**3.584.597.744.002**	**3.584.597.744.002**	**3.584.597.744.002**	**3.132.363.298.612**	**3.151.575.160.332**	**3.186.320.175.332**	**3.199.766.706.332**	**3.427.468.370.122**	**3.439.138.324.737**
	SURPLUS/(DEFISIT)	**(191.845.292.721)**	**(196.006.361.721)**	**(196.006.361.721)**	**(196.006.361.721)**	**(196.006.361.721)**	**(191.845.292.721)**	**(196.840.954.441)**	**(196.840.954.441)**	**(196.840.954.441)**	**(255.163.946.057)**	**(255.163.946.057)**
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**											
6.1	**Penerimaan Pembiayaan Daerah**	**217.434.292.721**	**217.434.292.721**	**217.434.292.721**	**217.434.292.721**	**217.434.292.721**	**217.434.292.721**	**217.434.292.721**	**217.434.292.721**	**217.434.292.721**	**280.865.946.057**	**280.865.946.057**
6.2	**Pengeluaran Pembiayaan Daerah**	**25.589.000.000**	**25.589.000.000**	**25.589.000.000**	**25.589.000.000**	**25.589.000.000**	**25.589.000.000**	**25.589.000.000**	**25.589.000.000**	**25.589.000.000**	**25.702.000.000**	**25.702.000.000**
	PEMBIAYAAN NETTO	**191.845.292.721**	**191.845.292.721**	**191.845.292.721**	**191.845.292.721**	**191.845.292.721**	**191.845.292.721**	**191.845.292.721**	**191.845.292.721**	**191.845.292.721**	**255.163.946.057**	**255.163.946.057**
6.3	**Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan**	**-**	**(4.161.069.000)**	**(4.161.069.000)**	**(4.161.069.000)**	**(4.161.069.000)**	**-**	**(4.995.661.720)**	**(4.995.661.720)**	**(4.995.661.720)**	**-**	**-**

Sebagai tindak lanjut dari Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan No. 119/2813/SJ dan No. 177/PMK-07/2020 tentang percepatan penyesuaian pendapatan dan belanja daerah tahun 2020 dalam rangka penanganan *corona virus disease* 2019 (Covid-19) penanganan serta pencegahan virus covid-19, pemulihan ekonomi dan penanganan covid-19 pada masyarakat, Kabupaten Cilacap telah menganggarkan dan melaksanakan anggaran pencegahan dan/atau penanganan covid-19 Tahun Anggaran 2020 yang terdiri dari 3 (tiga) bidang yaitu bidang kesehatan, bidang penanganan dampak/dukungan ekonomi dan bidang sosial *safety net*/jaringan pengaman sosial, sebagaimana terdapat pada tabel di bawah ini:

Tabel anggaran dan realisasi pencegahan dan penanganan covid-19 Tahun Anggaran 2020

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Penyerapan	Capaian Output	
					Volume	Satuan
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (d /c)	(f)	(g)
I.	**Bidang Kesehatan**					
A.	Pencegahan dan/atau Penangan COVID-19					
1.	**Dinas Kesehatan**	**41.465.675.615**	**34.091.796.559**	**82,22**		
	I. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	**2.725.420.000**	**2.578.926.990**	**94,62**	**10.779**	orang/hari
	Uraian :					
	a. Honor untuk Tenaga Medis dan Paramedis yang diperbantukan/Tambahan di RSUD	**78.000.000**	76.290.323	97,81	37	orang/bulan
	- Perawat Tambahan dengan Perjanjian Kerjasama	40.000.000	40.000.000	1,47	20	orang/bulan
	- PSC Tambahan dengan Perjanjian Kerjasama	8.000.000	8.000.000	100,00	2	orang/bulan
	- Dokter Tambahan dengan Perjanjian Kerjasama	30.000.000	28.290.323	94,30	15	orang/bulan
	b. Insentif Satgas Covid-19 RSUD Majenang dalam rangka Penanggulangan Covid-19	**497.150.000**	497.150.000	100,00	2.643	orang/hari
	- DPJP (Spesialis)	23.400.000	23.400.000	100,00	78	orang/hari
	- Dokter Umum	109.750.000	109.750.000	100,00	439	orang/hari
	- Perawat	224.400.000	224.400.000	100,00	1.122	orang/hari
	- Screening	-		-	-	orang/hari
	- Supervisi	26.400.000	26.400.000	100,00	176	orang/hari
	- Radiologi	26.400.000	26.400.000	100,00	176	orang/hari
	- Laboratorium	39.600.000	39.600.000	100,00	264	orang/hari
	- Gizi	13.200.000	13.200.000	100,00	88	orang/hari
	- IPSRS	11.000.000	11.000.000	100,00	88	orang/hari
	- Farmasi	5.400.000	5.400.000	100,00	36	orang/hari
	- CS	17.600.000	17.600.000	100,00	176	orang/hari
	c. Insentif Satgas Covid-19 RSUD Cilacap dalam rangka Penanggulangan Covid-19	**718.600.000**	718.500.000	99,99	4.113	org/hari
	Perawat	463.200.000	463.200.000	100,00	2.316	org/hari
	Gizi	19.350.000	19.350.000	100,00	129	org/hari
	Radiologi	20.400.000	20.400.000	100,00	136	org/hari
	Sanitasi	8.750.000	8.750.000	100,00	70	org/hari
	Dokter Umum	40.000.000	40.000.000	100,00	160	org/hari
	Dokter Spesialis	32.400.000	32.400.000	100,00	108	org/hari
	IPSRS	12.250.000	12.250.000	100,00	98	org/hari
	Laboratorium	12.900.000	12.900.000	100,00	86	org/hari
	CS	41.800.000	41.800.000	100,00	418	org/hari
	Administrasi	10.800.000	10.800.000	100,00	108	org/hari
	Rekam Medis	8.850.000	8.850.000	100,00	59	org/hari
	TPPGD	5.550.000	5.550.000	100,00	37	org/hari
	Sopir	16.200.000	16.200.000	100,00	162	org/hari
	Security	8.500.000	8.500.000	100,00	85	org/hari
	Epidemiologi	3.750.000	3.750.000	100,00	25	org/hari
	Farmasi	4.500.000	4.400.000	97,78	22	org/hari
	CSSD	4.200.000	4.200.000	100,00	42	org/hari
	Laundry	5.200.000	5.200.000	100,00	52	org/hari
	Pos					
	d. Insentif Satgas Covid-19 Puskesmas dalam rangka Penanggulangan Covid-19	**558.600.000**	558.600.000	100,00	5.320	orang/hari
	- Dokter	79.800.000	79.800.000	100,00	532	orang/hari
	- Satgas Covid	425.600.000	425.600.000	100,00	4.256	orang/hari
	- Sopir	53.200.000	53.200.000	100,00	532	orang/hari
	e. Insentif Satgas Covid-19 Dinkes dalam rangka Penanggulangan Covid-19	**121.920.000**	62.520.000	51,28	262	orang/hari

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Penyerapan	Capaian Output	
					Volume	Satuan
	- PSC 119	38.700.000	38.700.000	100,00	258	orang/hari
	- Supervisor	1.220.000	1.220.000	100,00	3	orang/hari
	- Tim Tracing	82.000.000	22.600.000	27,56	1	orang/hari
f.	Insentif untuk Tenaga Medis dan Paramedis diperbantukan/Tambahan	**219.200.000**	219.200.000	100,00	1.084	orang/hari
	- Perawat Puskesmas	5.400.000	5.400.000	100,00	27	orang/hari
	- Perawat Tambahan dengan Perjanjian Kerjasama	191.800.000	191.800.000	100,00	959	orang/hari
	- PSC Tambahan dengan Perjanjian Kerjasama	22.000.000	22.000.000	100,00	98	orang/hari
	- Dokter Tambahan dengan Perjanjian Kerjasama	-	-	-		
g.	Honor dan Insentif Tenaga Kesehatan dalam penanganan Covid-19	**531.950.000**	446.666.667	83,97	2.090	orang/bulan
	Honor					
	Perawat Relawan Rumah Sakit/PSC/Tempat Isolasi /Puskesmas/Lainnya	106.000.000	105.066.667	99,12	36	orang/bulan
	Insentif	-				
	Perawat Relawan Rumah Sakit	190.000.000	147.800.000	77,79	750	orang/hari
	Perawat Relawan PSC/ Rumah Isolasi/ Puskesmas/Lainnya	115.950.000	73.800.000	63,65	250	orang/hari
	Perawat PSC Dinkes	120.000.000	120.000.000	100,00	600	orang/hari
II.	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	**200.000.000**	**181.804.254**	90,90	3	paket
Uraian :						
	- Sediaan Kaplet Kombinasi (Becefort Tablet Box @ 25 strip)	63.260.000	57.500.000	90,89	500	kotak
	- Sediaan Sirup Kombinasi (Becefort Sirup Botol 60 ml)	10.458.400	9.503.774	90,87	602	botol
	- Sediaan Tablet Kombinasi (Becofort dan Bio ATP Tablet Box	126.281.600	114.800.480	90,91	536	kotak
	@ 10 strip)					
III.	Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat	**100.000.000**	**95.653.000**	**95,65**	**4**	**paket**
Uraian :						
	- Biaya Umum	1.490.000	-	-	1	paket
	- Baliho 4x5 m	4.000.000	3.840.000	96,00	4	buah
	- X Banner/Stand Banner 120x80 cm	41.360.000	40.608.000	98,18	752	unit
	- Leaflet	18.050.000	17.860.000	98,95	38	rim
	- Poster A3	35.100.000	33.345.000	95,00	3.510	lembar
IV.	Peningkatan Surveilance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah	**830.721.000**	**790.191.250**	**95,12**		
Uraian :						
	Biaya Umum (ATK, pulsa, cetak, penggandaan)	46.327.650	45.727.650	98,70	3	paket
	Hand Sanitizer	26.075.000	26.075.000	100,00	745	botol
	Belanja Bahan Penunjang Lab dalam rangka Swab Masif COVID-19	114.661.100	114.399.100	99,77	1	paket
	Belanja Jasa tenaga ahli	5.800.000	5.800.000	100,00	1	paket
	sewa ruang	4.000.000	4.000.000	100,00	1	paket
	Belanja extrafooding	6.600.000	6.600.000	100,00	22	paket
	Konsumsi Koordinasi Teknis Tracing dan Swab Masif	39.600.000	39.600.000	100,00	880	orang/hari
	Gown	5.000.000	5.000.000	100,00	20	pcs
	Pakaian Lapangan Penyelidikan Epidemiologi (Wearpack)	75.156.250	67.802.500	90,22	185	buah
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	218.017.000	218.017.000	100,00	923	orang/hari
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	210.450.000	210.450.000	100,00	252	orang/hari
	kendaraan operasional motor	29.814.000	-	-		
	laptop operasional	13.200.000	13.200.000	100,00	1	paket
	Printer	6.020.000	6.020.000	100,00	1	paket
	Termoscanner gun	30.000.000	27.500.000	91,67	10	pcs
V.	Pengadaan Alat Kesehatan UPT Puskesmas	**9.060.180.000**	**5.487.568.334**	**60,57**	**4**	**paket**
Uraian :						
a.	Biaya Umum	10.533.500	-	-		
b.	Pengadaan Bahan, Perbekalan dan Obat Lainnya untuk Penanganan Covid-19	6.613.348.500	3.886.288.100	58,76	8	paket
	Baju APD Lengkap	763.000.000	163.500.000	100,00	110	set
			599.500.000		850	pcs
	Hazmat	270.000.000	241.150.000	89,31	1.885	pcs
	Hand Sanitizer @ 5 liter	385.700.000	152.453.400	39,53	196	galon
	Hand Sanitizer @ 1 liter	112.500.000	-	-	-	
	Masker Bedah @ 50 pcs	602.000.000	179.676.000	29,85	1.450	boks
	Masker Medis	60.000.000				
	Masker N95	929.850.000	696.000.000	74,85	14.500	pcs
	Masker N95	120.000.000	30.750.000	25,63	500	pcs
	Desinfektan @ 5 liter	505.000.000	172.768.000	34,21	258	galon
	Sarung Tangan Non Steril @ 100 pcs	483.000.000	62.250.000	12,89	510	boks
	Cover Sepatu	1.548.500	-	-	-	

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Penyerapan	Capaian Output	
					Volume	Satuan
	VTM	1.404.390.000	1.066.590.000	75,95	23.870	pcs kit tes
	Kacamata Gogle	22.000.000	16.140.000	73,36	178	pcs
	Sarung Tangan Panjang	16.360.000	1.050.000	6,42	30	pasang
	Sepatu Boot APD	23.000.000	20.625.000	89,67	165	pasang
	Helm APD/Faceshield	240.000.000	15.885.000	6,62	49	pcs
	RDT/Rapid Test	675.000.000	467.950.700	69,33	5.630	pcs
		175.000.000				
	c. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kesehatan	135.500.000	48.750.000	35,98		
	Plastik Kafan	12.500.000	-	-	-	
	Thermogun	123.000.000	48.750.000	39,63	195	pcs
	d. Sewa Gedung untuk Karantina	36.000.000	-	-	-	
	e. Pengadaan Baju Kerja Tenaga Medis dan Paramedis	24.500.000	22.250.000	90,82	445	pcs
	f. Pengadaan Peralatan Alkes Covid-19	744.250.000	157.250.000	21,13	1	paket
	Thermalgun	199.250.000	157.250.000	78,92	101	pcs
	Alat Sprayer	125.000.000	-	-	-	
	Autoclave	420.000.000	-	-	-	
	g. Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan*)					
	- Alat Kesehatan BLUD (Dental Unit, EKG, Hematology Analizer, Urine Analyzer, Autoclave, Suction Bayi	1.496.048.000	1.373.030.234	91,78	27	unit
	VI. Pengadaan Ambulans Puskesmas	**9.250.000.000**	**6.643.889.000**	**71,83**		
	- Biaya Umum	5.595.500	-	-	-	
	- Pengadaan Ambulans Puskesmas*)	1.047.254.500	199.989.000	19,10	3	unit
	- Pengadaan Ambulans Covid-19	8.197.150.000	6.443.900.000	78,61	20	unit
					-	
	VII. Pelayanan Jamkesda	**425.500.000**	**8.756.015**	**2,06**	**6**	**kasus**
	- RS – PDP	345.000.000	-	-	-	
	- Puskesmas - ODP	23.000.000	200.000	0,87	1	kasus
	- Rujukan ke RS	57.500.000	8.556.015	14,88	53	kasus
	VIII. Penyediaan Makanan dan Minuman	**15.900.000**	**15.900.000**	**100,00**	1.272	orang/kali
	- Dinas	7.500.000	7.500.000	100,00	600	orang/kali
	- PSC 119	8.137.500	8.137.500	100,00	651	orang/kali
	- Keamanan	262.500	262.500	100,00	21	orang/kali
	IX Insentif Tenaga Kesehatan Daerah dalam penanganan Covid-19	**18.857.954.615**	**18.289.107.716**	**96,98**	1.070	orang/kali
	(Dana BOK Tambahan)					
	Dokter Spesialis	705.000.000	658.733.777	93,44	97	orang/bln
	Dokter Umum/ dokter gigi	690.000.000	685.000.018	99,28	135	orang/bln
	Bidan / Perawat	4.770.000.000	4.765.178.684	99,90	1.054	orang/bln
	Tenaga Medis Lainnya	1.345.000.000	1.325.584.462	98,56	513	orang/bln
	Tenaga Kesehatan Lainnya/ Dinkes dan Puskemas	11.347.954.615	10.854.610.775	95,65	4.036	orang/bln
2.	**BKPPD**	**675.981.000**	**645.477.500**	**95,49**		
	a. Penyediaan Makanan dan Minuman	**675.981.000**	**645.477.500**	**95,49**		
	Uraian :					
	Penginapan Tenaga Medis dan ODP	112.800.000	111.850.000	99,16	1.088	kmr/mlm
	Jamuan minum dan makanan kecil	91.650.000	83.480.000	91,09	8.393	porsi
	Jamuan makan	458.250.000	440.850.000	96,20	13.773	porsi
	Air mineral : Isi ulang galon	9.306.000	7.355.500	79,04	342	galon
	Air mineral : Gelas/cup	1.750.000	164.500	9,40	5	dus
	Teh celup isi 25	475.000	227.500	47,89	35	pak
	Kopi Bubuk 185 gram	750.000	625.000	83,33	50	bungkus
	Gula Pasir : Kemasan Plastik	1.000.000	925.000	92,50	50	kg
3.	**RSUD CILACAP**	**11.205.500.000**	**9.393.337.453**	**83,83**		
	Pengadaan Ambulance (Covid 19) (RSUD Cilacap)	**626.000.000**	**557.432.573**	**89,05**	1	unit
	- Pengadaan Toyota Hi-Ace untuk Ambulance Khusus	521.000.000	462.482.573	88,77	1	unit
	- Pengadaan Karoseri dan Peralatan Medis untuk Ambulance	105.000.000	94.950.000	90,43	1	unit
	Khusus					
	Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit (Covid 19)	**5.542.500.000**	**4.899.130.334**	**88,39**		
	* Pengadaan APD dan BHP Kesehatan dalam rangka Penanggulangan Corona Virus Disesae 2019 (COVID-19)	**1.969.755.000**	**1.746.090.879**	**88,65**		
	- Baju kerja petugas kamar isolasi	55.539.000,00	49.732.650	89,55	165	pcs
	- Baju pasien isolasi dewasa	25.025.000,00	16.494.855	65,91	125	pcs
	- Kaca mata google	4.207.500,00	3.825.000	90,91	85	pcs
	- Handscoon non steril panjang	582.225.000,00	522.808.713	89,79	23.289	pasang
	- Handscoon non steril pendek	69.498.000,00	56.975.000	81,98	702	box
	- Sepatu leopard / sepatu boots	15.895.000,00	14.450.000	90,91	85	pcs
	- APD coverall	50.700.000,00	45.945.400	90,62	325	pcs
	- Bahan dan pembuatan APD coverall	143.999.900,00	143.999.900	100,00	22	box
	- Helm petugas isolasi	23.842.500,00	21.675.000	90,91	85	pcs
	- Apron	40.164.900,00	36.663.305	91,28	17.463	pcs

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Penyerapan	Capaian Output	
					Volume	Satuan
	- Handrub 5 liter	3.234.000,00	2.940.000	90,91	12	galon
	- Sarung tangan panjang rumah tangga	9.790.000,00	8.900.000	90,91	178	pasang
	- Dekontaminasi hospital furniture	15.572.400,00	14.156.256	90,91	12	galon
	- Disinfektan airbone 5 liter	29.645.000,00	26.950.000	90,91	22	galon
	- Masker bedah	328.020.000,00	273.018.180	83,23	1.020	box
	- Plastik wrapping	4.400.000,00	3.960.000	90,00	11	pack
	- Masker N95	63.525.000,00	57.750.000	90,91	21	box
	- Handrub 500 ml	4.576.000,00	4.160.000	90,91	52	botol
	- Enzimatik dekontaminasi alat	26.438.100,00	24.033.750	90,91	13	galon
	- Desinfektan airbone aman untuk manusia	131.215.800,00	108.460.000	82,66	5	unit
	- Selimut	4.950.000,00	4.500.012	90,91	66	pcs
	- Sprei	7.425.000,00	6.750.018	90,91	99	pcs
	- Sarung bantal	1.485.000,00	1.485.000,00	100,00	99	pcs
	- Bantal	3.150.000,00	2.863.630	90,91	35	pcs
	- Kantong jenazah khusus	13.695.000,00	12.450.000	90,91	83	pcs
	- APD kedap air untuk petugas kamar jenazah	2.244.000,00	1.972.000	87,88	12	pcs
	- Nasi box	59.444.000,00	53.968.000	90,79	2.702	porsi
	- Ekstrafooding	48.222.900,00	43.601.040	90,42	4.871	porsi
	- Sabun mandi cair 500ml	1.987.500,00	1.806.825	90,91	75	pcs
	- Shampoo	1.033.500,00	939.549	90,91	39	pcs
	- Pasta gigi	585.000,00	531.804	90,91	39	pcs
	- Handuk	3.036.000,00	2.760.000	90,91	92	pcs
	- Detergen chemical matic	18.645.000,00	16.950.000	90,91	165	galon
	- Detergen chemical non matic	18.645.000,00	16.950.000	90,91	165	galon
	- Detergen chemical liquid	28.759.500,00	26.145.000	90,91	231	galon
	- Softy liquid	25.740.000,00	23.400.000	90,91	198	galon
	- Handscoon steril panjang	15.030.000,00	13.663.636	90,91	1.002	pasang
	- Plastik bening 10kg	7.683.500,00	6.985.000	90,91	254	pak
	- Plastik bening 15kg	7.683.500,00	6.985.000	90,91	254	pak
	- Sabun cuci tangan	4.812.500,00	4.375.000	90,91	35	galon
	Baju kerja petugas kamar non isolasi	25.500.000,00	23.181.795	90,91	85	pcs
	Baju pasien isolasi anak	3.145.000,00	2.687.875	85,47	17	pcs
	Trimate E	900.000,00	885.000	98,33	5	box
	Becom C	2.640.000,00	2.364.000	89,55	1.600	tablet
	Zinc	10.740.000,00	9.877.846	91,97	179	box
	Vitamin C	5.370.000,00	4.188.600	78,00	17.900	kapsul
	Santa E	19.690.000,00	16.926.240	85,96	179	box
	* Pengadaan Alat Kesehatan Dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)	**2.967.614.000**	**2.624.362.183**	**88,43**		
	Thermo gun infra red	28.875.000,00	23.505.682	81,40	21	pcs
	Hepafilter	360.000.000,00	312.200.000	86,72	4	unit
	Suction pump perawatan	90.000.000,00	80.841.818	89,82	2	unit
	Patient monitor	270.000.000,00	242.727.273	89,90	3	unit
	Automatic pressure sprayer	3.000.000,00	2.700.000	90,00	2	buah
	Tensimeter mobile	9.600.000,00	8.215.816	85,58	4	unit
	Stetoskop	1.800.000,00	1.189.500	66,08	4	unit
	Eyewasher	57.000.000,00	31.800.000	55,79	5	unit
	Stretcher transport patient	374.400.000,00	337.236.364	90,07	8	unit
	Pulse oximetri anak dan dewasa	15.000.000,00	12.482.727	83,22	3	unit
	Pulse oximetri dewasa	5.400.000,00	4.760.236	88,15	6	box
	Bed patient	45.700.000,00	40.333.436	88,26	2	unit
	Bed set patient	327.600.000,00	297.272.730	90,74	30	unit
	Bio safety cabinet level 2	50.000.000,00	43.717.273	87,43	1	unit
	Washer extractor / mesin cuci 43 kg	503.900.000,00	458.052.873	90,90	1	unit
	Washer extractor / mesin cuci 25 kg	265.000.000,00	240.112.453	90,61	1	unit
	Mesin setrika roll	165.000.000,00	150.000.000	90,91	1	unit
	Washer disinfector	130.000.000,00	116.227.273	89,41	1	unit
	Tangga pasien / footstep	26.499.000,00	24.000.009	90,57	33	unit
	Almari pasien / nakas	75.900.000,00	68.999.997	90,91	33	unit
	Manometer set (plus humidifier)	5.940.000,00	5.319.000	89,55	15	unit
	Trolley untuk linen kotor	27.500.000,00	20.574.090	74,81	5	unit
	Trolley untuk linen bersih	42.500.000,00	38.636.365	90,91	5	unit
	Kursi roda	27.000.000,00	23.636.360	87,54	10	unit
	Dressing trolley	60.000.000,00	39.820.908	66,37	6	unit
	* Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)	**605.131.000**	**528.677.272**	**87,37**		
	Almari UV	15.000.000,00	13.545.455	90,30	6	unit
	Termo hidrometer ruangan dan kelembaban	3.000.000,00	2.725.272	90,84	20	buah
	Brankar khusus jenazah pasien isolasi	77.000.000,00	70.000.000	90,91	1	unit
	Trolley barang	1.502.000,00	1.350.000	89,88	1	buah
	Pengukur pencahayaan (luxmeter)	758.000,00	600.000	79,16	1	buah
	Hair dryer	1.800.000,00	1.500.000	83,33	6	buah
	Kursi bulat	7.500.000,00	6.750.000	90,00	30	buah

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Penyerapan	Capaian Output	
					Volume	Satuan
	Handphone nurse station	6.000.000,00	5.400.000	90,00	3	buah
	AC 2 PK	17.800.000,00	16.132.000	90,63	2	unit
	Dispenser	3.600.000,00	3.100.000	86,11	4	buah
	AC 1 PK	4.361.000,00	3.964.000	90,90	1	unit
	Pemasangan jaringan oksigen	361.460.000,00	325.000.000	89,91	1	unit
	Almari pendingin obat	4.000.000,00	3.600.000	90,00	1	buah
	PH meter	6.000.000,00	1.181.818	19,70	1	unit
	PH sensor	2.550.000,00	-	-		
	Trolley makan	21.000.000,00	14.468.273	68,90	1	unit
	Trolley snack	10.000.000,00	7.101.363	71,01	1	unit
	Trolley cleaning service	15.000.000,00	11.250.000	75,00	5	unit
	Aerosol box	4.800.000,00	4.309.091	89,77	6	unit
	Sarana cuci tangan dengan air mengalir	42.000.000,00	36.700.000	87,38	12	paket
	* Pengadaan alat Kesehatan PCR dan Alat Pendukung					
	- Alat PCR dan Alat Pendukung	**3.500.300.000,00**	3.127.027.273	89,34	1	set
	Pembangunan Rumah Sakit					
	- Pembuatan Sarana dan Prasarana Fisik Laboratorium PCR	**1.536.700.000,00**	809.747.273	52,69	1	paket
4.	**RSUD MAJENANG**	**2.187.000.000**	**1.790.257.458**	**81,86**		
	Uraian :					
	a. Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit (Covid 19)	**1.587.000.000**	**1.241.238.151**	**78,21**		
	- Coverall	198.000.000	135.000.000	68,18	900	buah
	- Masker N95	67.500.000	64.350.000	95,33	900	buah
	- Masker Bedah	12.000.000	10.800.000	90,00	6.000	buah
	- Sepatu Boot	4.000.000	3.600.000	90,00	40	buah
	- Sarung Tangan Non Steril	4.500.000	4.050.000	90,00	3.000	buah
	- Sarung Tangan Steril	16.000.000	14.500.000	90,63	2.000	buah
	- Sarung Tangan Panjang	36.000.000	32.724.000	90,90	900	buah
	- Kacamata Google	2.000.000	1.440.000	72,00	40	buah
	- Visor Mask	4.400.000				
	- Haircap	1.500.000	1.113.000	74,20	1.000	buah
	- Shoe Cover	1.500.000	1.350.000	90,00	1.000	buah
	- Baju Dokter	5.850.000				
	- Baju Perawat	5.400.000				
	- Baju Cleaning Service	1.200.000				
	- Baju IPSRS	900.000				
	- Baju Driver	900.000				
	- Baju Radiologi	2.400.000				
	- Baju Lab	1.800.000				
	- Mask With Visor	1.620.000				
	- Stericide Spray	27.000.000	23.760.000	88,00	300	buah
	- Thermometer Infrared	10.000.000	10.000.000	100,00	10	unit
	- Ventilator	402.530.000	398.233.904	98,93	1	unit
	- Bed Monitor	480.000.000	385.461.537	80,30	3	unit
	- Hepa Filter	270.000.000	135.000.000	50,00	3	unit
	- Nebulizer	5.000.000	4.458.255	89,17	5	unit
	- Bed Transfer	25.000.000	15.397.455	61,59	1	unit
	Pengadaan Ambulance (Covid 19) (RSUD Majenang)	600.000.000	549.019.307	91,50	1	unit
5.	**DINAS PERHUBUNGAN**	**235.805.000**	**150.554.075**	**63,85**		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	**235.805.000**	**150.554.075**	**63,85**		
	- Kacamata Geogle	22.275.000	21.326.250	95,74	165	picis
	- Masker Kain	17.150.000	14.927.825	87,04	2.857	picis
	- Masker Sekai Pakai	3.000.000	1.000.000	33,33	1.000	picis
	- Termogun	33.000.000	32.340.000	98,00	12	unit
	- Cuci tangan portable	33.000.000	32.670.000	99,00	11	unit
	- Sprayer	4.000.000	3.440.000	86,00	4	unit
	- Handsanitizer 100 ml gel	44.550.000	12.705.000	28,52	165	botol
	- Handsanitizer 250 ml gel	33.000.000	9.075.000	27,50	50	botol
	- Handsanitizer 500 ml gel	21.000.000	5.940.000	28,29	20	botol
	- Handsanitizer 500 ml cair	15.000.000	7.300.000	48,67	68	botol
	- Pembersih porselin/Bayclin/wipol	1.440.000	1.440.000	100,00	71	buah
	- Sabun cuci tangan	720.000	720.000	100,00	36	botol
	- alat pel lantai	1.820.000	1.820.000	100,00	20	unit
	- Kanebo	1.800.000	1.800.000	100,00	39	buah
	- Sarung tangan	4.050.000	4.050.000	100,00	38	box
6.	**DPUPR**	**2.100.000.000**	**1.863.636.364**	**88,74**	1	paket
	Peningkatan/Penataan/Rehabilitasi Gedung Pemerintah	2.100.000.000	1.863.636.364	**88,74**	1	paket
7.	**BPBD**	**90.000.000**	**89.430.000**	**99,37**		

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Penyerapan	Capaian Output	
					Volume	Satuan
	Pengadaan Logistik Non Permakanan	**90.000.000**	**89.430.000**	**99,37**		
	Uraian :					
	- Tenda Posko Lorong	40.000.000	39.930.000	99,83	2	unit
	- Velbed Aluminium	50.000.000	49.500.000	99,00	50	unit
8.	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**78.365.712.348**	**26.094.851.883**	**33,30**		
	a. Bidang Kesehatan	**78.365.712.348**	**26.094.851.883**	**33,30**		
	1. KESBANGPOL	**175.625.000**	**170.475.000**	**97,07**		
	Uraian :					
	a. Petugas Penggalian dan Penutupan Liang Kubur :	38.750.000	38.050.000	98,19	49	liang
	- Pagi	18.750.000	18.050.000	96,27	23	liang
	- Malam	20.000.000	20.000.000	100,00	26	liang
	Uraian :					
	b Petugas Penggalian dan Penutupan Liang Kubur :	63.125.000	62.275.000	98,65		
	* Biaya Gali Kubur	18.150.000	18.100.000	99,72	45	liang
	- Pagi	16.800.000	17.200.000	102,38	43	liang
	- Malam	1.350.000	900.000	66,67	2	liang
	* Biaya Angkut Jenazah	27.150.000	27.100.000	99,82	45	liang
	- Pagi	25.200.000	25.800.000	102,38	43	liang
	- Malam	1.950.000	1.300.000	66,67	2	liang
	* Biaya Makan Minum Petugas	17.625.000	16.875.000	95,74		
	* Biaya Sewa Genset	200.000	200.000	100,00		
	Uraian :					
	c Penanganan Penguburan Jenazah Terinfeksi Covid-19	73.750.000	70.150.000	95,12		
	* Biaya Gali Kubur	21.250.000	20.350.000	95,76	50	orang
	- Pagi	10.000.000	17.200.000	172,00	43	orang
	- Malam	11.250.000	3.150.000	28,00	7	orang
	* Biaya Angkut Jenazah	31.250.000	30.350.000	97,12	50	orang
	- Pagi	15.000.000	25.800.000	172,00	25	orang
	- Malam	16.250.000	4.550.000	28,00	25	orang
	* Biaya Makan Minum Petugas	18.750.000	18.750.000	100,00	750	orang
	* Biaya Sewa Genset	2.500.000	700.000	28,00	50	jam
	2. SATPOL PP	**5.047.907.490**	**5.032.057.490**	**99,69**		
	Uraian :					
	* Pendirian Pos Pantau Penjaringan Cegah Covid-19	150.000.000	150.000.000	100	10	unit
	* Belanja Makan dan Minum Petugas Posko dan Patroli Penertiban					
	di Tempat Umum I	702.000.000	702.000.000	100		
	- Makan	608.400.000	608.400.000	100	23.400	porsi
	- Snack	93.600.000	93.600.000	100	11.700	porsi
	* Belanja Makan dan Minum Petugas Posko dan Patroli Penertiban	696.600.000	696.600.000	100		
	di Tempat Umum II					
	- Makan	603.720.000	603.720.000	100	24.120	porsi
	- Snack	92.880.000	92.880.000	100	11.610	porsi
	* Belanja Makan dan Minum Petugas Posko dan Patroli Penertiban	696.600.000	696.600.000	100		
	di Tempat Umum II					
	- Makan	603.720.000	603.720.000	100	24.120	porsi
	- Snack	92.880.000	92.880.000	100	11.610	porsi
	* Pendisiplinan Protokol Kesehatan COVID-19	155.749.000	155.749.000	100		
	Administrasi Kesekretariatan	9.479.500	9.479.500	100		
	Biaya dilokasi kegiatan:	146.269.500	146.269.500	100	5	kegiatan
	- Kampung Siaga COVID-19					
	- Pondok Pesantren Siaga COVID-19					
	- Pasar Siaga COVID-19					
	- Pasar Modern Siaga COVID-19					
	- Industri Siaga COVID-19					
	* Pembayaran Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum					
	Protokol Kesehatan Covid-19 di Kabupaten Cilacap	700.524.000	700.524.000	100,00		
	* Pembayaran Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum	583.839.000	568.089.000	97,30		

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Penyerapan	Capaian Output	
					Volume	Satuan
	Protokol Kesehatan Covid-19 di Kabupaten Cilacap					
	* Pembayaran Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum	1.362.595.490	1.362.495.490	99,99		
	Protokol Kesehatan Covid-19 di Kabupaten Cilacap					
	3. BPBD	**679.278.250**	**675.677.938**	99,47		
	Uraian :					
	* Pengadaan Logistik Permakanan dan Non Permakanan	460.872.000	457.272.000	99,22		
	* Pembelian Logistik Permakanan dan Uang Lelah Relawan	218.406.250	218.405.938	100,00		
	4. BLUD RSUD MAJENANG	**3.859.500.000**	**1.684.827.490**	43,65		
	a. Uraian :					
	- Kegiatan Pencegahan dan Penanganan COVID-19 (Alat Kesehatan)	3.859.500.000	1.684.827.490	43,65		
	5. DINAS KESEHATAN	**9.438.816.000**	**9.034.491.174**	95,72		
	a. Uraian :					
	- Pembayaran Insentif bagi Pemulasaran Jenazah	32.500.000	32.500.000	100,00	130	orang
	- Pembayaran Honor Relawan	50.000.000	48.000.000	96,00	25	orang
	- Pengadaan Thermogun	1.754.250.000	1.499.088.490	85,45	2.339	buah
	b. Pemeriksaan PCR Covid-19	909.600.000	909.600.000	100,00	758	orang
	c. Rujukan Pemeriksaan PCR Covid-19 pada RS Pertamina	5.996.100.000	5.994.600.000	99,97	6.302	orang
	d. Belanja honor dan insentif relawan dan pemulasaran jenazah covid-19	696.366.000	550.702.684	79,08		
	6. BLUD RSUD CILACAP	**11.349.919.575**	**9.226.986.791**	**81,30**		
	a. Pengadaan APD, BHP, Alkes dan Sarpras Rumah Sakit (Covid-19)	3.090.445.000	2.614.937.541	84,61		
	b. Uraian :					
	- Pengadaan Pakai Habis Pakai :					
	* Bahan habis pakai laboratorium PCR	285.089.750	106.129.000	37,23		
	* Reagensia Ekstraksi dan Amplifikasi	3.500.526.975	2.439.747.750	69,70		
	- Honorarium Tenaga di Laboratorium PCR :					
	* Tenaga Pelaksana sebanyak 4 orang selama 3 bulan	60.000.000	60.000.000	100,00		
	* Tenaga Administrasi dan Tenaga Kebersihan sebanyak 2 orang	12.600.000	12.600.000	100,00		
	selama 3 bulan					
	c. Uraian :					
	- Pengadaan Bahan Habis Pakai (BHP) Laboratorium PCR	106.942.550	81.128.000	75,86		
	- Pengadaan Reagensia Ekstrasi dan Amplifikasi	4.294.315.300	3.912.444.500	91,11		
	7 BKKPD					
	a. Uraian :	**344.040.000**	**270.336.000**	**78,58**		
	- Penginapan Tenaga Medis dan ODP	26.040.000	17.360.000	66,67	124	kmr/mlm
	- Jamuan minum dan makanan kecil	15.600.000	15.160.000	97,18	1.516	porsi
	- Jamuan makan	302.400.000	237.816.000	78,64	8.028	porsi
	Subsub Total	**136.325.673.963**	**74.119.341.292**	**54,37**		
B.	Dukungan Program Vaksinasi yang Bersumber dari DAU atau DBH					
1	Koordinasi pelaksanaan Vaksinasi COVID-19	**0**	**0**			
2	Dukungan dan fasilitas untuk pelaksanaan Vaksinasi COVID-19	**0**	**0**			
3	Pemantauan dan penanggulangan kejadiaan ikutan pasca Vaksinasi COVID-19	**0**	**0**			
4	Distribusi dan transportasi ke fasilitas kesehatan	**0**	**0**			
	Subsub Total	**0**	**0**			
	Total DAU atau DBH	**0**	**0**			
	Persentase belanja untuk dukungan Program Vakisinasi yang besumber dari DAU atau DBH saja terhadap DAU atau DBH					
	Total Bidang Kesehatan	**136.325.673.963**	**74.119.341.292**	**54,37**		
II.	**Bidang Penanganan Dampak/Dukungan Ekonomi**					
	1. Penanganan Masalah-Masalah Strategis Yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa (Dinas Sosial)	**600.000.000**	**379.205.000**	**63,20**		
	* Bantuan Pangan (Sembako) Dalam Rangka					
	Penanggulangan Covid-19 :					
	- Beras C-4 Super	**150.000.000**	120.000.000	80,00	10.000	kg

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Penyerapan	Capaian Output	
					Volume	Satuan
	- Mie Instan	**215.050.000**	99.950.454	46,48	1.295	dus
	- Kecap ABC Sachet	**21.512.000**	14.363.636	66,77	2.000	sachet
	- Susu Fullcream 400 gr	**116.550.000**	81.636.365	70,04	2.000	dus
	- Sarden	**45.500.000**	31.727.272	69,73	2.000	kaleng
	- Minyak Goreng Kemasan	**45.500.000**	31.527.273	69,29	2.000	liter
	* Biaya Umum	**5.888.000**				
	2. Monitoring Harga Kepokmas dan Kebutuhan Penting Lainnya (DPKUKM)	**100.000.000**	**98.058.182**	**98,06**		
	Uraian :					
	- Beras Medium	**75.650.000**	75.650.000	100		
	- Minyak Goreng Kemasan	**21.360.000**	19.418.182	90,91		
	* Biaya Umum	**2.990.000**	2.990.000	100		
	3. Kegiatan Penyuluhan Peningkatan Disiplin Pedagang Kakilima dan Asongan (DPKUKM)	**1.649.681.000**	**1.507.181.000**	91,36		
	Uraian :					
	- Honorarium PNS	2.350.000	2.350.000	100,00		
	- Pengadaan Tenda PKL	1.420.200.000	1.278.700.000	90,04	526	unit
	- Pengadaan Gerobak PKL	200.000.000	199.000.000	99,50	40	unit
	- Biaya Pendukung	27.131.000	27.131.000	100,00		
	4 Belanja Tidak Terduga (BTT)	**19.396.872.000**				
	Pengamanan ketersediaan pangan :					
	* Beras	15.677.010.000				
	* Minyak goreng	1.685.556.000				
	* Gula pasir	2.034.306.000				
	Total Penanganan Dampak/Dukungan Ekonomi	**21.746.553.000**	**1.984.444.182**	**9,13**		
II.	**Bidang Sosial Safety net/Jaringan Pengaman Social**					
	1. Pemantauan Situasi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Satpol PP)	**834.856.000**	**768.431.850**	**92,04**		
	* Pemberian makan minum dan BBM Operasional bagi petugas penanganan COVID-19					
	- Makan Minum	611.325.000	611.325.000	100,00	12.870	Porsi
	- BBM	223.531.000	157.106.850	70,28	18.480	Liter
	2. Belanja Bantuan Sosial (JPS)	**79.856.000.000**	**43.495.200.000**	54,47	112.200	orang
	* Bantuan Dampak Covid-19 (Dinas Sosial)	22.177.600.000	21.139.200.000	95,32	52.848	orang
	(Diferifikasi 55.444 orang x Rp 200.000 x 2 bulan)					
	* Bantuan Dampak Covid-19 (Dinas Sosial)	23.848.000.000	22.356.000.000	93,74	55.890	orang
	(Diferifikasi 59.620 orang x Rp 200.000 x 2 bulan)					
	* Bantuan Dampak Covid-19 (Dinas Sosial)	1.826.000.000	1.384.800.000	75,84	3.462	orang
	(Diferifikasi 4.565 orang x Rp 200.000 x 2 bulan)					
	3. Belanja Tidak Terduga (BTT)	**18.819.450.000**	**376.650.000**	2,00		
	* Biaya makan minum penyaluran jaminan pengamanan sosial (Dinas Sosial)	383.400.000	376.650.000	98,24		
	Total Bidang Sosial Safety net/Jaringan Pengaman Social	**99.510.306.000**	**44.640.281.850**	**44,86**		
	Total	**257.582.532.963**	**120.744.067.324**	**46,88**		

Berikut tabel pencegahan dan/atau penanganan Covid-19 berdasarkan anggaran dan realisasi masing - masing OPD serta akun – akun yang terkait dengan *refocussing* dan *relokasi* :

Tabel anggaran dan realisasi pencegahan dan/atau penanganan covid-19 Tahun Anggaran 2020 berdasarkan realiasi dan anggaran OPD

OPD		TA 2020		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Dinas Kesehatan	50.904.491.615,00	43.126.287.733,00	84,72
2	BKPPD	1.020.021.000	915.813.500	89,78
3	RSUD Cilacap	22.555.419.575	18.620.324.244	82,55
4	RSUD Majenang	6.046.500.000	3.475.084.948	57,47
5	Dinas Perhubungan	235.805.000	150.554.075	63,85
6	DPUPR	2.100.000.000	1.863.636.364	88,74
7	BPBD	90.000.000	89.430.000	99,37
8	Kesbangpol	175.625.000	170.475.000	97,07
9	Satpol PP	5.882.763.490	5.800.489.340	98,60
10	BPBD	769.278 .250	765.107.938	99,45
11	Dinas Sosial	99.275.450.000	44.251.055.000	44,57
12	DPKUKM	21.146.553.000	1.605.239.182	7,59
13	BPPKAD	47.470..626.303	0,00	0,00
Jumlah		**257.582.532.963**	**120.744.067.324**	**46,88**

Berikut tabel akun-akun yang terkait dengan refocusing dan relokasi pencegahan dan/atau penanganan Covid-19:

Tabel akun – akun terkait dengan refocusing dan relokasi Pencegahan dan Penanganan Covid-19
Tahun Anggaran 2020

No	Kegiatan	Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Keterangan
1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	78.000.000	76.290.323	Bidang Kesehatan
		5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.647.420.000	2.502.636.667	Bidang Kesehatan
2	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat Obatan	200.000.000	181.804.254	Bidang Kesehatan
3	Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat	5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	500.000	-	Bidang Kesehatan
		5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Petugas Pemeriksa Barang/Pekerjaan	400.000	-	Bidang Kesehatan
		5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	428.000	-	Bidang Kesehatan
		5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	162.000	-	Bidang Kesehatan
		5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	98.510.000	95.653.000	Bidang Kesehatan
4	Peningkatan Surveilance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah	5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.889.450	9.889.450	Bidang Kesehatan
		5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	26.075.000	26.075.000	Bidang Kesehatan
		5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Laboratorium	114.661.100	114.399.100	Bidang Kesehatan
		5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	11.000.000	10.400.000	Bidang Kesehatan
		5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.800.000	5.800.000	Bidang Kesehatan
		5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	600.000	600.000	Bidang Kesehatan
		5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	24.838.200	24.838.200	Bidang Kesehatan
		5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	4.000.000	4.000.000	Bidang Kesehatan
		5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	6.600.000	6.600.000	Bidang Kesehatan
		5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	39.600.000	39.600.000	Bidang Kesehatan
		5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	80.156.250	72.802.500	Bidang Kesehatan
		5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	218.017.000	218.017.000	Bidang Kesehatan
		5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	210.450.000	210.450.000	Bidang Kesehatan
		5 . 2 . 3 . 17 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	29.814.000	-	Bidang Kesehatan
		5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	13.200.000	13.200.000	Bidang Kesehatan
		5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	6.020.000	6.020.000	Bidang Kesehatan
		5 . 2 . 3 . 34 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	30.000.000	27.500.000	Bidang Kesehatan
5	Pengadaan Alat Kesehatan UPT Puskesmas	5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.700.000	-	Bidang Kesehatan
		5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Petugas Pemeriksa Barang/Pekerjaan	6.345.000	-	Bidang Kesehatan
		5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.287.000	-	Bidang Kesehatan
		5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	240.000	-	Bidang Kesehatan
		5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	6.613.348.500	3.886.288.100	Bidang Kesehatan
		5 . 2 . 2 . 02 . 13	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kesehatan	12.500.000	-	Bidang Kesehatan
		5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	601.500	-	Bidang Kesehatan
		5 . 2 . 2 . 06 . 04	Belanja Penjilidan	360.000	-	Bidang Kesehatan
		5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	36.000.000	-	Bidang Kesehatan
		5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	24.500.000	22.250.000	Bidang Kesehatan
		5 . 2 . 3 . 35 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan	2.363.298.000	1.579.030.234	Bidang Kesehatan
6	Pengadaan Ambulans Puskesmas	5 . 2 . 3 . 17 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	9.250.000.000	6.643.889.000	Bidang Kesehatan
7	Pelayanan Jamkesda	5 . 2 . 2 . 04 . 01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	425.500.000	8.756.015	Bidang Kesehatan
8	Penyediaan Makanan dan Minuman	5 . 2 . 2 . 11 . 01	Penyediaan Makanan dan Minuman Harian Pegawai	15.900.000	15.900.000	Bidang Kesehatan
9	Insentif Tenaga Kesehatan Daerah dalam penanganan Covid-19	5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18.857.954.615	18.289.107.716	Bidang Kesehatan
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Akomodasi dan Penginapan	112.800.000	111.850.000	Bidang Kesehatan
		5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	563.181.000	533.627.500	Bidang Kesehatan

No	Kegiatan	Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Keterangan
11	Pengadaan Ambulance (Covid 19) (RSUD Cilacap)	5 . 2 . 3 . 17 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	626.000.000	557.432.573	Bidang Kesehatan
	Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit (Covid 19)	5 . 2 . 2 . 02 . 13	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kesehatan	1.969.755.000	1.746.090.879	Bidang Kesehatan
		5 . 2 . 3 . 35 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan	8.609.745.000	7.089.814.001	Bidang Kesehatan
12	Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit (Covid 19)	5 . 2 . 2 . 02 . 13	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kesehatan	394.470.000	292.687.000	Bidang Kesehatan
		5 . 2 . 3 . 35 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan	1.192.530.000	948.551.151	Bidang Kesehatan
13	Pengadaan Ambulance (Covid 19) (RSUD Majenang)	5 . 2 . 3 . 17 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	600.000.000	549.019.307	Bidang Kesehatan
14	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	165.805.000	82.104.075	Bidang Kesehatan
		5 . 2 . 3 . 26 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman	4.000.000	3.440.000	Bidang Kesehatan
		5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	33.000.000	32.340.000	Bidang Kesehatan
		5 . 2 . 3 . 34 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	33.000.000	32.670.000	Bidang Kesehatan
15	Peningkatan/Penataan/Rehabilitasi Gedung Pemerintah	5 . 2 . 3 . 49 . 06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	2.100.000.000	1.863.636.364	Bidang Kesehatan
16	Pengadaan Logistik Non Permakanan	5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	90.000.000	89.430.000	Bidang Kesehatan
17		5 . 1 . 8 . 01 . 01	Belanja Tidak Terduga	78.365.712.348	26.094.851.883	Bidang Kesehatan
18	Penanganan Masalah-Masalah Strategis Yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa	5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	594.112.000	379.205.000	Bid. Penanganan Dampak/Dukungan Ekonomi
		5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Petugas Pengelola Keuangan	4.830.000	-	Bid. Penanganan Dampak/Dukungan Ekonomi
		5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Petugas Pemeriksa Barang/Pekerjaan	1.050.000	-	Bid. Penanganan Dampak/Dukungan Ekonomi
		5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.000	-	Bid. Penanganan Dampak/Dukungan Ekonomi
19	Monitoring Harga Kepokmas dan Kebutuhan Penting Lainnya	5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pihak Ketiga	97.010.000	95.068.182	Bid. Penanganan Dampak/Dukungan Ekonomi
		5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.208.000	1.208.000	Bid. Penanganan Dampak/Dukungan Ekonomi
		5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	12.000	12.000	Bid. Penanganan Dampak/Dukungan Ekonomi
		5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	645.000	645.000	Bid. Penanganan Dampak/Dukungan Ekonomi
		5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	1.125.000	1.125.000	Bid. Penanganan Dampak/Dukungan Ekonomi
20	Kegiatan Penyuluhan Peningkatan Disiplin Pedagang Kakilima dan Asongan	5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	1.620.200.000	1.477.700.000	Bid. Penanganan Dampak/Dukungan Ekonomi
		5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Petugas Pembuat Gambar/Design	600.000	600.000	Bid. Penanganan Dampak/Dukungan Ekonomi
		5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Petugas Pemeriksa Barang/Pekerjaan	1.750.000	1.750.000	Bid. Penanganan Dampak/Dukungan Ekonomi
		5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	993.600	993.600	Bid. Penanganan Dampak/Dukungan Ekonomi
		5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	195.000	195.000	Bid. Penanganan Dampak/Dukungan Ekonomi
		5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.650.000	4.650.000	Bid. Penanganan Dampak/Dukungan Ekonomi
		5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	780.000	780.000	Bid. Penanganan Dampak/Dukungan Ekonomi
		5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	181.800	181.800	Bid. Penanganan Dampak/Dukungan Ekonomi

No	Kegiatan	Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Keterangan
		5 . 2 . 2 . 06 . 04	Belanja Penjilidan	800.000	800.000	Bid. Penanganan Dampak/Dukungan Ekonomi
		5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.324.600	3.324.600	Bid. Penanganan Dampak/Dukungan Ekonomi
		5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	6.750.000	6.750.000	Bid. Penanganan Dampak/Dukungan Ekonomi
		5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	9.456.000	9.456.000	Bid. Penanganan Dampak/Dukungan Ekonomi
21		5 . 1 . 8 . 01 . 01	Belanja Tidak Terduga	19.396.872.000	0	Bid. Penanganan Dampak/Dukungan Ekonomi
22	Pemantauan Situasi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Satpol PP)	5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	611.325.000	611.325.000	Bid. Social Safety Net/Jaringan Pengaman Sosial
		5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bahar Minyak/Gas dan Pelumas	223.531.000	157.106.850	Bid. Social Safety Net/Jaringan Pengaman Sosial
23		5 . 1 . 8 . 01 . 01	Belanja Tidak Terduga	79.856.000.000	43.495.200.000	Bid. Social Safety Net/Jaringan Pengaman Sosial
24		5 . 1 . 8 . 01 . 01	Belanja Tidak Terduga	18.819.450.000	376.650.000	Bid. Social Safety Net/Jaringan Pengaman Sosial
				257.582.532.963	**120.744.067.324**	

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

IV.1. ENTITAS AKUNTANSI

Entitas Akuntansi yang dimaksud dalam laporan keuangan ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap secara keseluruhan, sedangkan pusat-pusat pertanggungjawaban adalah setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap sebagai Entitas akuntansi.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran / pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

IV.2. BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Pada tahun 2015, Pemerintah Kabupaten Cilacap mulai menggunakan basis akrual dalam menyusun laporan keuangan. Kebijakan akuntansi untuk penerapan basis akuntansi tersebut diatur dalam Peraturan Bupati Cilacap Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Cilacap, dan dirubah dengan Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Cilacap, kemudian dirubah lagi dengan Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Cilacap, kemudian dirubah lagi dengan Peraturan Bupati Nomor 124 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Cilacap, kemudian dirubah lagi dengan Peraturan Bupati Nomor 217 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Cilacap, perubahan terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Cilacap sedangkan sistem akuntansinya diatur dalam Peraturan Bupati Cilacap Nomor 60 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Cilacap.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Basis akrual diterapkan pada pos-pos aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan dan beban. Adapun untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran menggunakan basis kas.

IV.3. BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN

Basis pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan meliputi basis pengukuran aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pendapatan-LO dan beban.

a. Pengukuran Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang,

termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

1) Aset Lancar

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas, piutang, dan persediaan. Aset lancar diakui sebagai berikut:

a) Kas dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah diterima atau dikeluarkan;
b) Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan;
c) Piutang dicatat berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value), yakni mengurangkan nilai piutang dengan penyisihan piutang tidak tertagih;

Penyisihan piutang tidak tertagih adalah cadangan yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan umur piutang. Penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan berdasarkan umur piutang, jenis piutang, serta mempertimbangkan keberadaan agunan dan barang sitaan. Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih adalah sebagai berikut:

Jenis Piutang	Kualitas Piutang dan Taksiran Piutang Tidak Tertagih			
	Lancar < 1 tahun	Kurang Lancar 1 s.d. 2 tahun	Diragukan >2 s.d. 5 tahun	Macet >5 tahun
Piutang Pajak Daerah	0,5%	10%	50%	100%

Jenis Piutang	Kualitas Piutang dan Taksiran Piutang Tidak Tertagih			
	Lancar 0 s.d. 1 bulan	Kurang Lancar >1 s.d. 3 bulan	Diragukan >3 s.d. 12 bulan	Macet >12 bulan
Piutang Retribusi Daerah	0,5%	10%	50%	100%

Jenis Piutang	Kualitas Piutang dan Taksiran Piutang Tidak Tertagih			
	Lancar 0 s.d. 1 bulan	Kurang Lancar >1 s.d. 3 bulan	Diragukan >3 s.d. 12 bulan	Macet >12 bulan
Piutang selain Pajak dan Retribusi Daerah	0,5%	10%	50%	100%

d) Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

e) Persediaan dicatat sebesar:

(1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
(2) Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
(3) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

f) Persediaan dinilai dengan menggunakan **Metode Masuk Pertama Keluar Pertama** yang dibuktikan dengan dibuatnya Berita Acara Pemeriksaan Fisik Persediaan per tanggal 31 Desember 2020.

g) Sistem pencatatan persediaan dilakukan menggunakan 2 (dua) metode yaitu :

(1) **Metode Perpetual,** fungsi akuntansi selalu mengkinikan nilai persediaan setiap ada persediaan yang masuk maupun keluar. Metode ini digunakan untuk jenis persediaan yang berkaitan dengan operasional utama di SKPD dan membutuhkan pengendalian yang kuat. Contohnya adalah persediaan obat-obatan di RSUD, persediaan pupuk di dinas pertanian, dan lain sebagainya. Dalam metode perpetual, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan dengan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan.

(2) **Metode Periodik,** fungsi akuntansi tidak langsung mengkinikan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (*stock opname*) pada akhir periode. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan. Metode ini dapat digunakan untuk persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan SKPD, contohnya adalah persediaan ATK di sekretariat SKPD. Dalam metode ini, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

2) Aset Tetap

1) Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

2) Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap terdiri dari:

(1) Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

(2) Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

(3) Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi yang siap dipakai.

(4) Jalan , Irigasi dan Jaringan

Mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap pakai. Jalan, irigasi, dan jaringan tersebut, selain digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah, juga dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

(5) Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

3) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.

Konstruksi dalam pengerjaan yang sudah selesai dibuat atau dibangun dan telah siap dipakai harus segera direklasifikasikan ke dalam aset tetap.

4) Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

a) Berwujud;
b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;

f) Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
g) Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Pemerintah Kabupaten Cilacap telah menerapkan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap, yakni batasan jumlah biaya tertentu yang digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap diatur sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan
1	Tanah	Rp. 0,00
2	Peralatan dan Mesin, terdiri atas :	
2.1	Alat-alat Berat	Rp. 300.000,00
2.2	Alat-alat Angkutan	Rp. 300.000,00
2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	Rp. 300.000,00
2.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	Rp. 300.000,00
2.5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp. 300.000,00
2.6	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	Rp. 300.000,00
2.7	Alat Kedokteran dan Kesehatan	Rp. 300.000,00
2.8	Alat Laboratorium	Rp. 300.000,00
2.9	Alat Persenjataan	Rp. 300.000,00
2.10	Komputer	Rp. 300.000,00
2.11	Alat Eksplorasi	Rp. 300.000,00
2.12	Alat Pengeboran	Rp. 300.000,00
2.13	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	Rp. 300.000,00
2.14	Alat Bantu Eksplorasi	Rp. 300.000,00
2.15	Alat Keselamatan Kerja	Rp. 300.000,00
2.16	Alat Peraga	Rp. 300.000,00
2.17	Peralatan Proses/Produksi	Rp. 300.000,00
2.18	Rambu-Rambu	Rp. 300.000,00
2.19	Peralatan Olah Raga	Rp. 300.000,00
3	Gedung dan Bangunan, yang terdiri atas:	
3.1	Bangunan Gedung	Rp. 10.000.000,00
3.2	Monumen	Rp. 10.000.000,00
3.3	Bangunan Menara	Rp. 10.000.000,00
3.4	Tugu titik Kontrol/Pasti	Rp. 10.000.000,00
4	Jalan, Jaringan dan Irigasi, yang terdiri atas:	
4.1	Jalan dan Jembatan	Rp. 0,00
4.2	Bangunan Air/Irigasi	Rp. 0,00
4.3	Instalasi	Rp. 0,00
4.4	Jaringan	Rp. 0,00
5	Aset Tetap Lainnya, yang terdiri atas:	
5.1	Bahan Perpustakaan	Rp. 0,00
5.2	Barang Bercorak Kesenian / Kebudayaan /Olahraga	Rp. 0,00
5.3	Hewan	
5.4	Biota Perairan	Rp. 0,00
5.5	Tanaman	Rp. 0,00
5.6	Barang Koleksi Non Budaya	Rp. 0,00
5.7	Aset Tetap dalam Renovasi	Rp. 0,00

No.	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp. 0,00

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan. Sedangkan, nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. Nilai wajar digunakan untuk mencatat aset tetap yang bersumber dari donasi/hibah atau rampasan/sitaan yang tidak diketahui nilai perolehannya.

Biaya perolehan aset terdiri dari:

a) Harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk bea impor dan pajak pembelian, setelah dikurangi dengan diskon dan/atau rabat;
b) Seluruh biaya lainnya yang secara langsung dapat dihubungkan/diatribusikan kepada aset sehinggga dapat membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Demikian juga pengeluaran untuk belanja perjalanan dan jasa yang terkait dengan perolehan Aset Tetap atau aset lainnya. Hal ini meliputi biaya konsultan perencana, konsultan pengawas, dan pengembangan perangkat lunak (*software*), dan harus ditambahkan pada nilai perolehan. Contoh biaya yang secara langsung dapat dihubungkan/diatribusikan dengan aset, antara lain:

a) Biaya persiapan tempat;
b) Biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan bongkar muat (*handling cost*);
c) Biaya pemasangan (installation cost);
d) Biaya professional seperti arsitek dan insinyur;
e) Biaya konstruksi;
f) Biaya pengujian aset untuk menguji apakah aset telah berfungsi dengan benar (*testing cost*).

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu Aset Tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan (*carrying amount*). Pengeluaran lainnya yang timbul setelah perolehan awal selain pengeluaran yang memberi nilai manfaat tersebut serta yang tidak memenuhi Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap diakui sebagai beban pengeluaran (*expenses*) pada periode dimana beban pengeluaran tersebut terjadi dan tidak menambah nilai Aset Tetap yang bersangkutan.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu Aset Tetap dapat dikapitalisasi pada nilai aset hanya jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a) Pengeluaran tersebut mengakibatkan bertambahnya masa manfaat atau kapasitas, atau kualitas, dan atau volume aset yang telah dimiliki; dan

b) Pengeluaran tersebut memenuhi batasan minimal Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap.

Terkait dengan kriteria pertama di atas, perlu diketahui tentang pengertian atau istilah berikut ini:

a) Pertambahan masa manfaat adalah bertambahnya umur ekonomis yang diharapkan dari Aset Tetap yang sudah ada. Misalnya sebuah gedung semula diperkirakan mempunyai umur ekonomis 10 tahun. Pada tahun ke-7 dilakukan renovasi dengan harapan gedung tersebut masih dapat digunakan 8 tahun lagi. Dengan adanya renovasi tersebut maka umur gedung berubah dari 10 tahun menjadi 15 tahun. (Sesuai Peraturan Bupati Kabupaten Cilacap Bab X Perubahan Kedua Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Cilacap)
b) Peningkatan kapasitas adalah bertambahnya kapasitas atau kemampuan Aset Tetap yang sudah ada. Misalnya, sebuah generator listrik yang mempunyai output 200 KW dilakukan renovasi sehingga kapasitasnya meningkat menjadi 300 KW.
c) Peningkatan kualitas aset adalah bertambahnya kualitas dari Aset Tetap yang sudah ada. Misalnya, jalan yang masih berupa tanah ditingkatkan menjadi jalan aspal.
d) Pertambahan volume aset adalah bertambahnya jumlah atau satuan ukuran aset yang sudah ada, misalnya penambahan luas bangunan suatu gedung dari 400 m2 menjadi 500 m2.

5) Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan.
6) Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
   Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
   Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati. Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke pemerintah. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus.

3) Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.

Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Jangka Panjang, Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR), Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

1) Tagihan Jangka Panjang

Tagihan jangka panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah.

a) Tagihan Penjualan Angsuran
Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan perorangan dinas kepada kepala daerah dan penjualan rumah golongan III.

b) Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah
Ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada negara/daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

c) Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K).

2) Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, pemerintah daerah diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini dapat berupa:

a) Kemitraan dengan Pihak Ketiga - Sewa
Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan-sewa.

b) Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)
Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah dan sumber pembiayaan lainnya. Kerjasama pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/ kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi asset lainnya kerjasama-pemanfaatan (KSP).

c) Bangun Guna Serah – BGS (*Build, Operate, Transfer – BOT*)
Bangun Guna Serah (BGS) adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan asset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, kemudian menyerahkan kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak.
BGS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset

BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

d) Bangun Serah Guna– BSG (*Build, Transfer, Operate – BTO*)
Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.
BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/ investor kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

3) Aset Tak Berwujud (ATB)

Aset tak berwujud (ATB) adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas.
Definisi ATB mensyaratkan bahwa ATB harus memenuhi kriteria dapat diidentifikasi, dikendalikan oleh entitas, dan mempunyai potensi manfaat ekonomi masa depan.

Tagihan Penjualan Angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dinilai sebesar nilai nominal dalam SKP2K dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM).

Kemitraan dengan Pihak Ketiga Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

Kemitraan dengan Pihak Ketiga Kerjasama pemanfaatan (KSP) dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.

Kemitraan dengan Pihak Ketiga Bangun Guna Serah – BGS (*Build, Operate, Transfer – BOT*) dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut.

Kemitraan dengan Pihak Ketiga Bangun Serah Guna – BSG (*Build, Transfer, Operate – BTO*) dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan

pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

Aset Tak Berwujud pada awalnya diukur dengan harga perolehan, kecuali ketika ATB diperoleh dengan cara selain pertukaran diukur dengan nilai wajar.

Perolehan ATB dari pertukaran aset yang dimiliki entitas dinilai sebesar nilai wajar dari aset yang diserahkan. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama sehingga pengukuran dinilai sebesar aset yang dipertukarkan ditambah dengan kas yang diserahkan.

Perolehan ATB dari hasil kerjasama antar dua entitas atau lebih disajikan berdasarkan biaya perolehannya dan dicatat pada entitas yang menerima ATB tersebut sesuai dengan perjanjian dan/atau peraturan yang berlaku.

Perolehan ATB yang diperoleh dari donasi/hibah harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Penyerahan ATB tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

Aset Tak Berwujud yang diperoleh dari pengembangan secara internal, misalnya hasil dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, nilai perolehannya diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak ditetapkannya ATB tersebut memiliki masa manfaat di masa yang akan datang sampai dengan ATB tersebut telah selesai dikembangkan.

Amortisasi adalah alokasi harga perolehan ATB secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi ATB sama prinsipnya seperti penyusutan dalam aset tetap. Untuk menerapkan amortisasi, sebuah entitas harus menilai apakah masa manfaat suatu aset tak berwujud adalah terbatas atau tak terbatas. Jika terbatas, entitas harus menentukan jangka waktu atau jumlah produksi atau jumlah unit yang dihasilkan, selama masa manfaat. Suatu aset tidak berwujud diakui entitas memiliki masa manfaat tak terbatas jika, berdasarkan analisis dari seluruh faktor relevan, tidak ada batas yang terlihat pada saat ini atas periode yang mana aset diharapkan menghasilkan arus kas bersih (*neto*) bagi entitas.

Amortisasi setiap periode akan diakui sebagai beban amortisasi dan penyesuaian atas akun ATB. Beban amortisasi ATB disajikan dalam Laporan Operasional. Penyesuaian akun ATB dapat dilakukan secara langsung dengan mengurangi ATB atau membentuk akun lawan akumulasi amortisasi ATB. Amortisasi Untuk Aset Tak Berwujud Dengan Masa Manfaat Terbatas

Amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus yang dilakukan setiap akhir periode dengan masa manfaat selama 4 (empat) tahun.

Amortisasi Untuk Aset Tak Berwujud Dengan Masa Manfaat Tak Terbatas seperti goodwill tidak boleh diamortisasi.

4) Aset Lain-lain

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah, yang disebabkan rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Salah satu yang termasuk dalam kategori dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya.

Aset moneter dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

b. Pengukuran Kewajiban

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

c. Pengukuran Pendapatan-LRA

1) Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah; atau pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan yang sebagai pendapatan daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD; atau pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan yang sebagai pendapatan daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD; atau pendapatan kas yang diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan daerah; atau pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan daerah; atau pendapatan kas yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.
2) Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto.
3) Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan periode pelaporan keuangan.
4) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode terjadi.
5) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya, dibukukan sebagai

pengurang ekuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

d. Pengukuran Belanja

1) Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
2) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
3) Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi.
4) Adapun Klasifikasi Belanja yang digunakan:

Belanja Operasi

Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai (belanja langsung maupun belanja tidak langsung), belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial.

Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal antara lain belanja untuk pengadaan tanah, peralatan dan mesin, bangunan dan gedung, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Belanja Tidak Terduga

Belanja lain-lain/tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya, yang didukung dengan bukti-bukti yang sah.

e. Pengukuran Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak Pemerintah Daerah dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak Pemerintah Daerah untuk menagih atas suatu pendapatan (*earnaed*) atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*). Secara lebih rinci, pengaturan pengakuan atas Pendapatan-LO adalah sebagai berikut:

1) Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan yaitu pada saat diterbitkannya surat ketetapan oleh pejabat yang berwenang atau adanya dokumen sumber yang menunjukkan Pemerintah Daerah memiliki hak untuk menagih pendapatan tersebut. Contoh dari Pendapatan-LO ini adalah pada saat diterbitkannya surat ketetapan pajak oleh pejabat yang berwenang yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan harus dibayar oleh wajib pajak. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi pemerintah dan utang bagi wajib pajak.

2) Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan yaitu setelah diserahterimakannnya barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga. Contoh dari Pendapatan-LO ini adalah pendapatan yang diterima dari biaya pengurusan dokumen perijinan seperti IMB.
3) Pendapatan-LO yang diperoleh dari adanya aliran masuk sumber daya ekonomi, diakui pada saat diterimanya kas atau aset non kas yang menjadi hak Pemerintah Daerah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan. Contoh dari Pendapatan-LO ini adalah pendapatan kas yang diterima dari pembayaran pajak restoran dari wajib pajak berdasarkan prinsip *self assessment*.
4) Pengakuan Pendapatan-LO Berdasarkan Jenis Pendapatan

   Entitas Pemerintah Daerah menyajikan Pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut jenis pendapatan. Pengaturan pengakuan pendapatan LO berdasarkan jenis pendapatan adalah sebagai berikut:

   a) Pendapatan Asli Daerah-LO

      (1) Pendapatan Pajak Daerah-LO

      Pendapatan Pajak Daerah-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang berasal dari pendapatan perpajakan yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

      Mekanisme pencatatan Pendapatan Pajak Daerah-LO berdasarkan metode pemungutan pajak mengikuti peraturan sebagai berikut:

      (a) Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah-LO dengan metode *self assessment*.

      Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah-LO yang dipungut dengan metode *self assessment* diakui pada saat realisasi kas diterima di Kas Daerah tanpa terlebih dahulu Pemerintah Daerah menerbitkan surat ketetapan. Dokumen sumber pencatatan Pendapatan Pajak Daerah-LO adalah bukti pembayaran yang telah dilakukan baik dengan menggunakan formulir maupun bukti transaksi lainnya yang telah mendapatkan validasi diterimanya setoran pada Kas Daerah.

      (b) Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah-LO dengan metode *official assessment.*

      Pendapatan Pajak Daerah-LO yang dipungut dengan metode official *assessment* diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan dimaksud. Timbulnya hak menagih adalah pada saat otoritas perpajakan telah menerbitkan surat ketetapan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan harus dibayar oleh wajib pajak sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Surat ketetapan tersebut menjadi dokumen sumber untuk mencatat Pendapatan Pajak Daerah-LO. Pendapatan pajak yang menggunakan metode *official assessment* meliputi: Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Reklame, dan Pajak Air Tanah.

      Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas Pendapatan Pajak Daerah-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai

pengurang pendapatan pada periode akuntansi pembayaran pengembalian.

(2) Pendapatan Retribusi Daerah-LO

Pendapatan retribusi yang didahului dengan ketetapan diakui pada saat diterbitkannya dokumen Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau yang dipersamakan. Pendapatan retribusi pada kelompok ini meliputi retribusi perijinan tertentu, antara lain: Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Ijin Gangguan (HO), Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, dan Ijin Trayek.

Pendapatan rertribusi yang ditetapkan berdasarkan perjanjian sewa diakui berdasarkan prinsip terhimpunnya (accrued) pendapatan. Pendapatan pada kelompok ini antara lain: sewa pemakaian kekayaan daerah berupa tanah dan bangunan.

Pendapatan retribusi selain tersebut di atas diakui ketika pembayaran telah diterima Bendahara Penerimaan atau Kas Daerah.

(3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

Pendapatan dividen diakui ketika telah terbit pengumuman pembagian laba BUMD.

(4) Lain-lain PAD yang Sah-LO

(a) Lain-lain PAD yang Sah-LO melalui Penetapan

PAD yang masuk ke dalam kategori ini adalah Tuntutan Ganti Kerugian Daerah. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika telah diterbitkan Surat Ketetapan atas pendapatan terkait.

(b) Lain-lain PAD yang Sah-LO tanpa Penetapan

PAD yang masuk ke dalam kategori ini antara lain Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah, Pendapatan dari Pengembalian, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan, Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, dan Pendapatan Denda Retribusi. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika pihak terkait telah melakukan pembayaran langsung ke RKUD.

(c) Lain-lain PAD yang Sah-LO dari Hasil Eksekusi Jaminan

Pendapatan hasil eksekusi jaminan diakui saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya.

Pengakuan pendapatan ini dilakukan pada saat dokumen eksekusi yang sah telah diterbitkan.

Lain-lain PAD yang Sah-LO yang ditetapkan dengan perjanjian sewa diakui berdasarkan prinsip terhimpunnya (*accrued*) pendapatan.

(5) Pendapatan Transfer-LO

Pendapatan transfer diakui bersamaan dengan diterimanya kas pada RKUD atau pada saat terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi, jika itu terkait dengan kurang salur.

(6) Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO

Merupakan kelompok pendapatan lain yang tidak termasuk dalam kategori pendapatan sebelumnya. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi pendapatan hibah, dana darurat, dan pendapatan lainnya.

Pendapatan hibah pada LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan hibah tersebut atau terdapat aliran masuk sumber daya ekonomi, mana yang lebih dahulu.

Pendapatan dana darurat dan pendapatan lainnya diakui ketika terdapat penerimaan di RKUD *(realized)*.

(7) Pendapatan Non Operasional

Pendapatan Non Operasional mencakup antara lain Surplus Penjualan Aset Nonlancar, Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang, Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya.

Pendapatan Non Operasional diakui ketika dokumen sumber berupa Berita Acara kegiatan (misal: Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus Penjualan Aset Non lancar) telah diterima.

f. Pengukuran Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa termasuk potensi pendapatan yang hilang, atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode pelaporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi atau timbulnya kewajiban.

1) Beban Pegawai

Beban pegawai dicatat sebesar nilai nominal yang terdapat dalam dokumen sumber seperti dokumen kepegawaian, daftar gaji, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang menjadi dasar pengeluaran daerah kepada pegawai dimaksud.

2) Beban Barang

a) Beban Persediaan

Beban persediaan diakui berdasarkan pendekatan beban dan aset. Dengan pendekatan beban, setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan.

b) Beban Jasa, Pemeliharaan, dan Perjalanan Dinas

Beban jasa, pemeliharaan dan perjalanan dinas dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen tagihan dari pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah mendapatkan persetujuan dari kuasa pengguna anggaran/pejabat pembuat komitmen.

3) Beban Hibah

Pengukuran

Beban hibah dalam bentuk uang dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam nota perjanjian hibah. Beban hibah dalam bentuk barang/jasa dicatat sebesar nilai wajar barang/jasa tersebut saat terjadinya transaksi.

4) Beban Bantuan Sosial

Pengukuran

Beban bantuan sosial dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam

dokumen keputusan pemberian bantuan sosial berupa uang atau dokumen pengadaan barang/jasa oleh Pihak Ketiga.

5) Beban penyusutan aset tetap/amortisasi

Pengakuan

Beban penyusutan aset tetap/amortisasi dilakukan dengan cara mengakui Beban Penyusutan berdasarkan metode penyusutan.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus.

Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Harga Perolehan}}{\text{Masa manfaat (dalam bulan)}}$$

Perkiraan masa manfaat untuk setiap aset tetap adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	MASA MANFAAT
1	**ALAT BESAR**	
-	ALAT BESAR DARAT	10
-	ALAT BESAR APUNG	8
-	ALAT BANTU	7
2	**ALAT ANGKUTAN**	
-	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	7
-	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	2
-	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR	10
-	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR	3
-	ALAT ANGKUTAN BERMOTOR UDARA	20
3	**ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR**	
-	ALAT BENGKEL BERMESIN	10
-	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	5
-	ALATUKUR	5
4	**ALAT PERTANIAN**	
-	ALAT PENGOLAHAN	4
5	**ALAT KANTOR & RUMAH TANGGA**	
-	ALAT KANTOR	5
-	ALAT RUMAH TANGGA	5
6	**ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR**	
-	ALAT STUDIO	5
-	ALAT KOMUNIKASI	5
-	PERALATAN PEMANCAR	10

NO	URAIAN	MASA MANFAAT
-	PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI	15
7	**ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN**	
-	ALAT KEDOKTERAN	5
-	ALAT KESEHATAN UMUM	5
8	**ALAT LABORATORIUM**	
-	UNIT ALAT LABORATORIUM	8
-	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	15
-	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	15
-	ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI UNGKUNGAN	10
-	RADIATION APPLICATION & NON DESTRUCTIVE TESTING	10
-	LABORATORY	
-	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	7
-	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	15
-	ALAT LABORATORIUM STANDARSASI KALIBRASI &	10
-	INSTRUMENTASI	
9	**ALAT PERSENJATAAN**	
-	SENJATA API	10
-	PERSENJATAAN NON SENJATA API	3
-	SENJATA SINAR	5
-	ALAT KHUSUS KEPOUSIAN	4
10	**KOMPUTER**	
-	KOMPUTER UNIT	4
-	PERALATAN KOMPUTER	4
11	**ALAT EKSPLORASI**	
-	ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI	5
-	ALAT EKSPLORASI GEO FISIKA	10
12	**ALAT PENGEBORAN**	
-	ALAT PENGEBORAN MESIN	10
-	ALAT PENGEBORAN NON MESIN	10
13	**ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN**	
-	PERALATAN SUMUR	10
-	PERALATAN PRODUKSI	10
-	PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	15
14	**ALAT BANTU EKSPLORASI**	
-	ALAT BANTU EKSPLORASI	10
-	ALAT BANTU PRODUKSI	10
15	**ALAT KESELAMATAN KERJA**	

NO	URAIAN	MASA MANFAAT
-	ALAT DETEKSI	5
-	ALAT PELINDUNG	5
-	ALAT SAR	2
-	ALAT KERJA PENERBANGN	10
-	ALAT KEAMANAN LAIN	5
16	**ALAT PERAGA**	
-	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN	10
17	**PERALATAN PROSES/PRODUKSI**	
-	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	8
18	**RAMBU-RAMBU**	
-	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	7
-	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA	5
-	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS LAUT	15
19	**PERALATAN OLAH RAGA**	
-	PERALATAN OLAH RAGA	3
20	**BANGUNAN GEDUNG**	
-	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	50
-	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	50
22	**MONUMEN**	
-	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	50
23	**TUGU TITIK KONTROL/PASTI**	
-	TUGU/TANDA BATAS	50
24	**JALAN DAN JEMBATAN**	
-	JALAN	10
-	JEMBATAN	50
25	**BANGUNAN AIR**	
-	BANGUNAN AIR IRIGASI	50
-	BANGUNAN AIR PENGAIRAN PASANG SURUT	50
-	BANGUNAN AIR PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER	25
-	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI DAN	10
	PENANGGULANGAN BENCANAALAM	
-	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH	30
-	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	40
-	BANGUNAN AIR KOTOR	40
26	**INSTALASI**	
-	INSTALASI AIR BERSIH/AIR BAKU	30
-	INSTALASI AIR KOTOR	30

NO	URAIAN	MASA MANFAAT
-	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH	10
-	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN	10
-	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	40
-	INSTALASI GARDU LISTRIK	40
-	INSTALASI PERTAHANAN	30
-	INSTALASI GAS	30
-	INSTALASI PENGAMAN	20
-	INSTALASI LAIN	5
27	**JARINGAN**	
-	JARINGAN AIR MINUM	30
-	JARINGAN LISTRIK	40
-	JARINGAN TELEPON/KOMPUTER/INTERNET	20
-	JARINGAN GAS	30
28	**ASET TETAP LAINNYA**	
-	ASET TETAP RENOVASI	10

Selain tanah, konstruksi dalam pengerjaan dan aset tetap lainnya berupa buku perpustakaan, hewan dan tumbuhan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.
Terhadap aset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti garis lurus, dengan masa manfaat selama 4 (empat) tahun.

Pengukuran

Nilai beban penyusutan/amortisasi diukur dengan cara mengalokasikan beban penyusutan aset tetap atau amortisasi untuk periode pelaporan.

6) Beban Penyisihan Piutang

Pengakuan

Beban penyisihan piutang tak tertagih dilakukan dengan metode penyisihan piutang. Metode ini dilakukan dengan cara mengakui Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih.

Pengukuran

Nilai beban penyisihan piutang tak tertagih diukur dengan cara mengestimasi besarnya piutang yang kemungkinan tak tertagih sesuai ketentuan yang berlaku.

7) Beban Transfer

Pengakuan

Beban transfer diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari RKUD atau pada saat terbitnya dokumen pengeluaran yang sah (SP2D).

Pengukuran

Beban Transfer diukur sebesar nilai nominal yang tercantum dalam dokumen sumber penetapan nilai transfer.

8) Beban Lain-lain

Beban Lain-lain digunakan untuk mencatat beban Pemerintah Daerah yang sifat pengeluarannya tidak dapat diklasifikasikan ke dalam pos-pos pengeluaran jenis beban lainnya. Pengeluaran ini bersifat tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah.

Beban lain-lain diukur sebesar nilai nominal pertanggungjawaban pengeluaran yang telah mendapatkan pengesahan dari BUD.

Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai historis dalam mata uang rupiah.

IV.4. PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH.

Beberapa penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah sebagai berikut:

a. Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

   Untuk menerapkan pernyataan standar ini, belanja yang dikeluarkan berdasarkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) diakui sebagai belanja pada saat diterbitkannya perintah pencairan dana (SP2D) atas SPM tersebut. Sedangkan untuk pengeluaran melalui Uang Persediaan (UP) yang dikelola oleh bendahara pengeluaran akan diakui sebagai belanja setelah terbitnya pengesahan atas pengeluaran melalui bendahara pengeluaran tersebut yang berbentuk SP2D Ganti Uang Persediaan (GU) maupun SP2D Nihil.

b. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik dengan nilai sebesar harga perolehan terakhir.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

V.1. PENJELASAN POS - POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

V.1.a. PENDAPATAN – LRA

Pengelolaan keuangan daerah mulai Triwulan II Bulan Maret tahun 2020 sangat dipengaruhi oleh adanya pandemi Covid-19. Pendapatan daerah baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah maupun Dana Transfer mengalami penurunan yang cukup signifikan. Perubahan kerangka keuangan daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2020 dikarenakan Pemerintah Pusat dan atau Provinsi juga mengalami penurunan. Dampak pandemi Covid-19 adanya relokasi dan *refocusing* kegiatan perangkat daerah, kontraksi pertumbuhan ekonomi sampai ke minus di tingkat nasional, ternyata berdampak pada pendapatan baik yang berasal dari PAD serta dana transfer dari Pusat maupun Provinsi.

Pendapatan Daerah Kabupaten Cilacap meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, dengan nilai anggaran dan realisasi pada TA 2020 dan TA 2019 sebagai berikut:

Pendapatan Daerah		TA 2020			TA 2019	Naik/(Turun) (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	561.113.709.065,00	591.343.787.160,48	105,39	574.276.795.303,59	17.066.991.856,89
2	Pendapatan Transfer	2.417.522.255.115,00	2.346.223.145.232,00	97,05	2.517.433.595.490,00	(171.210.450.258,00)
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	205.338.414.500,00	214.835.523.320,00	104,63	191.087.575.517,00	23.747.947.803,00
Jumlah		**3.183.974.378.680,00**	**3.152.402.455.712,48**	**99,01**	**3.282.797.966.310,59**	**(130.395.510.598,11)**

Realisasi Pendapatan Daerah TA 2020 sebesar Rp3.152.402.455.712,48, yaitu 99,01% dari anggaran pada TA 2020 sebesar Rp3.183.974.378.680,00 dan 96,03% dari realisasi pada TA 2019 sebesar Rp3.282.797.966.310,59 menurunnya realisasi pendapatan daerah pada Tahun 2020 dikarenakan :

1. Daya beli masyarakat yang menurun dan berlakunya pembatasan sosial berskala besar untuk meredam penyebaran virus covid 19
2. Tindak lanjut rasionalisasi/refocussing dan realokasi sesuai PMK No. 35/PMK.07/2020 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka pandemi corona virus disease 2019 (Covid 19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional.

Rincian Pendapatan Daerah antara lain sebagai berikut:

V.1.a.1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA

Rekening ini menggambarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk periode TA 2020 dan TA 2019, dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan Asli Daerah (PAD)		TA 2020			TA 2019	Naik/(Turun) (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
1	Pajak Daerah	199.810.000.000,00	203.188.563.271,00	101,69	209.475.848.896,00	(6.287.285.625,00)
2	Retribusi Daerah	18.139.721.798,00	18.969.873.119,00	104,58	44.740.277.398,00	(25.770.404.279,00)
3	Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	45.597.285.958,00	44.675.178.661,00	97,98	26.190.072.040,00	18.485.106.621,00

Pendapatan Asli Daerah (PAD)		TA 2020			TA 2019	Naik/(Turun) (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
4	Lain-lain PAD yang Sah	297.566.701.309	324.510.172.109,48	109,05	293.870.596.969,59	30.639.575.139,89
Jumlah		**561.113.709.065,00**	**591.343.787.160,48**	**105,39**	**574.276.795.303,59**	**17.066.991.856,89**

Realisasi PAD TA 2020 sebesar Rp591.343.787.160,48, yaitu 105,39% dari anggaran pada TA 2020 sebesar Rp561.113.709.065 dan 102,97% dari realisasi pada TA 2019 sebesar Rp574.276.795.303,59.

Realisasi masing-masing jenis PAD TA 2020 dan TA 2019 disajikan sebagai berikut :

V.1.a.1)a) Pendapatan Pajak Daerah-LRA

Pajak Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah di Kabupaten Cilacap, diundangkan tanggal 30 Desember 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Cilacap Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah di Kabupaten Cilacap, diundangkan tanggal 7 Agustus 2012. Dan diubah dengan Perda Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah di Kabupaten Cilacap diundangkan tanggal 12 November 2018.

Pemungutan, penerimaan dan pengelolaan pendapatan Pajak Daerah dikelola oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Cilacap, dengan realisasi selama TA 2020 dan TA 2019 sebagai berikut:

Pendapatan Pajak Daerah		TA 2020			TA 2019	Naik/(Turun) (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
1	Hotel-LRA	3.000.000.000,00	3.457.754.589,00	115,26	6.876.803.420,00	(3.419.048.831,00)
2	Restoran-LRA	3.000.000.000,00	3.685.331.994,00	122,84	4.063.309.080,00	(377.977.086,00)
3	Hiburan-LRA	820.000.000,00	620.334.204,00	75,65	1.365.729.432,00	(745.395.228,00)
4	Reklame-LRA	1.900.000.000,00	2.030.256.485,00	106,86	1.870.666.280,00	159.590.205,00
5	Penerangan Jalan-LRA	80.000.000.000,00	74.972.642.285,00	93,72	72.396.411.139,00	2.576.231.146,00
6	Parkir-LRA	440.000.000,00	442.309.100,00	100,52	549.408.000,00	(107.098.900,00)
7	Pajak Air Tanah-LRA	650.000.000,00	697.068.938,00	107,24	757.686.451,00	(60.617.513,00)
8	Sarang Burung walet-LRA	0,00	1.694.060,00	-	6.709.080,00	(5.015.020,00)
9	Mineral Bukan Logam dan Batuan-LRA	21.000.000.000,00	21.616.172.796,00	102,93	25.653.498.048,00	(4.037.325.252,00)
10	PBB Pedesaan dan Perkotaan-LRA	75.000.000.000,00	76.771.075.330,00	102,36	72.771.009.597,00	(4.000.065.733,00)
11	BPHTB-LRA	14.000.000.000,00	18.893.923.490,00	134,96	23.164.618.369,00	(4.270.694.879,00)
Jumlah		**199.810.000.000,00**	**203.188.563.271,00**	**101,69**	**209.475.848.896,00**	**(6.287.285.625,00)**

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2020 sebesar Rp203.188.563.271,00, yaitu 101,69% dari anggaran pada TA 2020 sebesar Rp199.810.000.000,00 dan 96,99% dari realisasi pada TA 2019 sebesar Rp209.475.848.896,00.

(1) Realisasi Pendapatan Pajak Hotel - LRA TA 2020 yang ditetapkan dengan tarif sebesar 10% dari pendapatan hotel, dapat dirinci sebagai berikut :

Pajak Hotel		TA 2020			TA 2019	Naik/(Turun) (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
1	Hotel – LRA	2.925.237.000,00	3.348.584.889,00	114,47	6.764.538.420,00	(3.415.953.531,00)
2	Losmen – LRA	74.763.000,00	109.169.700,00	146,02	112.265.000,00	(3.095.300,00)
Jumlah		**3.000.000.000,00**	**3.457.754.589,00**	**115,26**	**6.876.803.420,00**	**(3.419.048.831,00)**

Realisasi Pendapatan Pajak Hotel TA 2020 sebesar Rp3.457.754.589,00, yaitu 115,26% dari anggaran pada TA

2020 sebesar Rp3.000.000.000,00 dan 50,28% dari realisasi pada TA 2019 sebesar Rp6.876.803.420,00.

(2) Realisasi Pendapatan Pajak Restoran - LRA TA 2020 yang diatur dengan tarif sebesar 10% dari penerimaan restoran, dapat dirinci sebagai berikut :

Pajak Restoran		TA 2020			TA 2019	Naik/(Turun)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	(Rp)
1	Restoran-LRA	1.269.180.000,00	1.700.513.823,00	133,99	1.625.979.713,00	74.534.110,00
2	Rumah Makan-LRA	894.195.000,00	929.052.887,00	103,90	957.666.736,00	(28.613.849,00)
3	Kafetaria-LRA	253.836.000,00	619.546.396,00	244,07	624.754.158,00	(5.207.762,00)
4	Kantin – LRA	0,00	3.191.500,00	0,00	4.310.500,00	(1.119.000,00)
5	Warung Makan-LRA	438.564.000,00	427.834.488,00	97,55	388.043.589,00	39.790.899,00
6	Jasa Boga/ Katering - LRA	144.225.000,00	5.192.900,00	3,60	462.554.384,00	(457.361.484,00)
Jumlah		**3.000.000.000,00**	**3.685.331.994,00**	**122,84**	**4.063.309.080,00**	**(377.977.086,00)**

Realisasi Pendapatan Pajak Restoran TA 2020 sebesar Rp3.685.331.994,00 , yaitu 122,84% dari anggaran pada TA 2020 sebesar Rp3.000.000.000,00 dan 90,70% dari realisasi pada TA 2019 sebesar Rp4.063.309.080,00.

(3) Realisasi Pendapatan Pajak Hiburan - LRA TA 2020 dan TA 2019 yang antara lain dengan tarif pajak panti pijat sebesar 35% dari penerimaan, permainan ketangkasan sebesar 20% dari penerimaan dan bilyard 35% dari penerimaan, dapat dirinci sebagai berikut :

Pajak Hiburan		TA 2020			TA 2019	Naik/(Turun)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	(Rp)
1	Tontonan Film/ Bioskop-LRA	242.607.000,00	106.399.000,00	43,86	460.184.500,00	(353.785.500,00)
2	Pagelaran Kesenian/ Musik/Tari/Busana-LRA	1.025.000,00	0,00	0,00	900.000,00	(900.000,00)
3	Diskotik, Karaoke, Klab Malam dan Sejenisnya-LRA	275.410.000,00	254.953.290,00	92,57	443.088.795,00	(188.135.505,00)
4	Sirkus/Akrobat/Sulap-LRA	5.126.000,00	6.000.000,00	117,05	1.150.050,00	4.849.950,00
5	Permainan Bilyar, Golf, Bowling-LRA	3.480.000,00	8.708.000,00	250,23	17.611.300,00	(8.903.300,00)
6	Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, Permainan Ketangkasan-LRA	82.646.000,00	102.420.696,00	123,93	169.716.720,00	(67.296.024,00)
7	Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/ Spa dan Pusat Kebugaran (Fitnes Center)-LRA	75.260.000,00	64.467.768,00	85,66	106.871.827,00	(42.404.059,00)
8	Pertandingan Olahraga-LRA	134.446.000,00	77.385.450,00	57,56	166.206.240,00	(88.820.790,00)
Jumlah		**820.000.000,00**	**620.334.204,00**	**75,65**	**1.365.729.432,00**	**(745.395.228,00)**

Realisasi Pendapatan Pajak Hiburan TA 2020 sebesar Rp620.334.204,00, yaitu 75,65% dari anggaran pada TA 2020 sebesar Rp820.000.000,00 dan 45,42% dari realisasi pada TA 2019 sebesar Rp1.365.729.432,00, tidak tercapainya pajak hiburan di Kabupaten Cilacap dikarenakan pajak hiburan adalah salah satu jenis pajak yang terdampak secara langsung oleh pandemi covid-19.

(4) Realisasi Pendapatan Pajak Reklame - LRA TA 2020 dan TA 2019 dengan tarif sebesar 25% dari dasar pengenaan pajak, dapat dirinci sebagai berikut :

Pajak Reklame		TA 2020			TA 2019	Naik/(Turun)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	(Rp)
1	Reklame Papan/Bill Board/Videotron/ megatron – LRA	1.605.500.000,00	1.746.363.285,00	108,77	1.574.549.998,00	171.813.287,00
2	Reklame Kain – LRA	190.000.000,00	191.036.700,00	100,55	182.896.450,00	8.140.250,00
3	Reklame Melekat/ Stiker – LRA	15.200.000,00	22.166.400,00	145,83	41.281.000,00	(19.114.600,00)
4	Reklame Selebaran-LRA	950.000,00	0,00	0,00	225.000,00	(225.000,00)
5	Reklame Berjalan-LRA	4.750.000,00	6.312.000,00	132,88	6.864.000,00	(552.000,00)
6	Reklame Udara-LRA	0,00	0,00	0,00	500.000,00	(500.000,00)
7	Reklame Bando-LRA	83.600.000,00	64.378.100,00	77,01	64.349.832,00	28.268,00
Jumlah		**1.900.000.000,00**	**2.030.256.485,00**	**106,86**	**1.870.666.280,00**	**159.590.205,00**

Realisasi Pendapatan Pajak Reklame TA 2020 sebesar Rp2.030.256.485,00, yaitu 106,86% dari anggaran pada TA 2020 sebesar Rp1.900.000.000,00 dan 108,54% dari realisasi pada TA 2019 sebesar Rp1.870.666.280,00.

(5) Realisasi Pendapatan Pajak Penerangan Jalan-LRA (PPJ) TA 2020 dan TA 2019, dengan tarif untuk non industri sebesar 9% dari pembayaran, dipungut melalui PT PLN. Sedangkan tarif untuk industri sebesar 10% dari pembayaran, dipungut oleh BPPKAD, dapat dirinci sebagai berikut :

Pajak Penerangan Jalan		TA 2020			TA 2019	Naik/(Turun) (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
1	Pajak Penerangan Jalan PLN-LRA	71.492.000.000,00	65.864.739.192,00	92,13	68.015.116.134,00	(2.150.376.942,00)
2	Pajak Penerangan Jalan Non PLN-LRA	8.508.000.000,00	9.107.903.093,00	107,05	4.381.295.005,00	4.726.608.088,00
	Jumlah	**80.000.000.000,00**	**74.972.642.285,00**	**93,72**	**72.396.411.139,00**	**2.576.231.146,00**

Pendapatan PPJ TA 2020 sebesar Rp74.972.642.285,00, yaitu 93,72% dari anggaran pada TA 2020 sebesar Rp80.000.000.000,00 dan 103,56% dari realisasi pada TA 2019 sebesar Rp72.396.411.139,00. Tidak tercapai pajak penerangan jalan dikarenakan dampak kebijakan PLN untuk pemberian stimulus selama covid 19 untuk konsumen daya 450 VA dan 950 VA dalam 2 periode bulan April s/d Juni 2020 dan dilanjutkan s/d bulan Desember tahun 2020.

(6) Realisasi Pendapatan Pajak Parkir - LRA dengan tarif 20% dari penerimaan, untuk TA 2020 sebesar Rp442.309.100,00, yaitu 100,52% dari anggaran pada TA 2020 sebesar Rp440.000.000,00 dan 80,51% dari realisasi pada TA 2019 sebesar Rp549.408.000,00.

(7) Realisasi Pendapatan Pajak Air Tanah - LRA dengan tarif 20% dari dasar pengenaan Pajak Air Tanah yaitu Nilai Perolehan Air Tanah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Harga Dasar Air (HDA) dengan volume yang dinyatakan dalam rupiah dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berupa jenis sumber air, tujuan pengembalian dan/atau pemanfaatan air, volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan, kualitas air dan tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengembalian dan/atau pemanfaatan air, dengan realisasi penerimaan TA 2020 sebesar Rp697.068.938,00, yaitu 107,24% dari anggaran pada TA 2020 sebesar Rp650.000.000,00 dan 92% dari realisasi pada TA 2019 sebesar Rp757.686.451,00.

(8) Realisasi Pendapatan Pajak Sarang Burung Walet - LRA dengan tarif 10% dari dasar pengenaan pajak sarang burung walet yaitu nilai jual sarang burung walet, dengan realisasi penerimaan TA 2020 sebesar Rp1.694.060,00, yaitu 0% dari anggaran pada TA 2020 sebesar Rp0,00 dan 25,25% dari realisasi pada TA 2019 sebesar Rp6.709.080,00.

(9) Realisasi Pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LRA, dapat dirinci sebagai berikut :

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan		TA 2020			TA 2019	Naik/(Turun) (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
1	Batu Kapur – LRA	19.164.317.000,00	19.879.440.293,00	103,73	23.948.633.982,00	(4.069.193.689,00)
2	Bentonit-LRA	0,00	13.068.000,00	0,00	0,00	13.068.000,00
3	Granit/Andesit – LRA	148.770.000,00	631.205.000,00	424,28	521.573.200,00	109.631.800,00
4	Pasir dan kerikil – LRA	568.150.000,00	19.072.060,00	3,36	56.105.600,00	(37.033.540,00)
5	Tanah Liat – LRA	1.095.135.000,00	1.066.019.443,00	97,34	1.059.973.266,00	6.046.177,00
6	Tanah Urug – LRA	23.628.000,00	7.368.000,00	31,18	67.212.000,00	(59.844.000,00)
	Jumlah	**21.000.000.000,00**	**21.616.172.796,00**	**102,93**	**25.653.498.048,00**	**(4.037.325.252,00)**

Pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan TA 2020 sebesar Rp21.616.172.796,00, yaitu 102,93% dari anggaran pada TA 2020 sebesar Rp21.000.000.000,00 dan 84,26% dari realisasi pada TA 2019 sebesar Rp25.653.498.048,00.

(10) Realisasi Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan - LRA TA 2020 sebesar Rp 76.771.075.330,00, yaitu 102,36% dari anggaran pada TA 2020 sebesar Rp75.000.000.000,00 dan 105,50% dari realisasi pada TA 2019 sebesar Rp72.771.009.597,00.

(11) Realisasi penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan - LRA TA 2020 sebesar Rp18.893.923.490,00, yaitu 134,96% dari anggaran pada TA 2020 sebesar Rp14.000.000.000,00 dan 81,56% dari realisasi pada TA 2019 sebesar Rp23.164.618.369,00. Besaran Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp60.000.000,00 untuk setiap wajib pajak. Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat kebawah dengan pemberi wasiat, termasuk suami/istri, Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00.

V.1.a.1)b) Pendapatan Retribusi Daerah-LRA

Pendapatan Retribusi Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Perda, dan terkait langsung dengan pelayanan umum yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap. Pemungutan dan pengelolaan pendapatan Retribusi Daerah dilakukan oleh masing-masing satker penghasil, dengan realisasi selama TA 2020 dan TA 2019 sebagai berikut :

Pendapatan Retribusi Daerah - LRA		TA 2020			TA 2019	Naik/(Turun) (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
Retribusi Jasa Umum						
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan-LRA	500.000.000,00	403.545.500,00	80,71	22.459.596.293,00	(22.056.050.793,00)
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan-LRA	974.000.000,00	1.012.955.600,00	104,00	966.466.000,00	46.489.600,00
3	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat – LRA	19.000.000,00	36.450.000,00	191,84	20.710.000,00	15.740.000,00
4	Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum-LRA	715.499.155,00	678.490.579,00	94,83	2.006.017.200,00	(1.327.526.621,00)
5	Retribusi Pelayanan Pasar-LRA	3.500.000.000,00	3.767.680.307,00	107,65	4.052.114.904,00	(284.434.597,00)
6	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LRA	1.500.000.000,00	1.161.920.000,00	77,46	1.916.428.800,00	(754.508.800,00)
7	Penyediaan dan atau Penyedotan Kakus-LRA	43.000.000,00	62.840.000,00	146,14	70.015.000,00	(7.175.000,00)
8	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang – LRA	125.800.000,00	134.520.500,00	106,93	152.304.000,00	17.783.500,00
9	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi-LRA	942.753.450,00	1.060.521.475,00	112,49	960.726.325,00	99.795.150,00
	Jumlah	**8.320.052.605,00**	**8.318.923.961,00**	**99,99**	**32.604.378.522,00**	**(24.249.887.561,00)**
Retribusi Jasa Usaha						
10	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LRA	3.100.721.765,00	3.468.729.147,00	111,87	4.133.320.837,00	(664.591.690,00)

Pendapatan Retribusi Daerah - LRA		TA 2020			TA 2019	Naik/(Turun) (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
11	Retribusi Terminal-LRA	220.000.000,00	239.410.500,00	108,82	355.541.500,00	(116.131.000,00)
12	Retribusi Tempat Khusus Parkir-LRA	1.783.462.053,00	1.627.018.014,00	91,23	1.364.675.400,00	262.342.614,00
13	Retribusi Rumah Potong Hewan-LRA	120.000.000,00	120.768.000,00	100,64	135.229.000,00	(14.461.000,00)
14	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan-LRA	40.321.000,00	67.137.500,00	166,51	60.726.000,00	6.411.500,00
15	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga-LRA	353.154.375,00	213.573.872,00	60,48	422.856.992,00	(209.283.120,00)
16	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-LRA	334.500.000,00	336.346.250,00	100,55	346.599.000,00	(10.252.750,00)
	Jumlah	**5.952.159.193,00**	**6.072.983.283,00**	**102,03**	**6.818.948.729,00**	**(745.965.446,00)**
Retribusi Perijinan Tertentu						
17	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan-LRA	3.235.000.000,00	3.257.662.875,00	100,70	4.918.435.347,00	(1.660.772.472,00)
18	Retribusi Izin Trayek-LRA	12.250.000,00	15.589.000,00	127,26	26.883.800,00	(11.294.800,00)
19	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing – LRA	620.260.000,00	1.304.714.000,00	210,35	371.631.000,00	933.083.000,00
	Jumlah	**3.867.510.000,00**	**4.577.965.875,00**	**118,37**	**5.316.950.147,00**	**(738.984.272,00)**
	Jumlah Retribusi	**18.139.721.798,00**	**18.969.873.119,00**	**104,58**	**44.740.277.398,00**	**(25.770.404.279,00)**

Realisasi pendapatan retribusi daerah- LRA TA 2020 sebesar Rp18.969.873.119,00 yaitu 104,58% dari anggaran pada TA 2020 sebesar Rp18.139.721.798,00 dan 42,40% dari realisasi pada TA 2019 sebesar Rp44.740.277.398,00.

Realisasi masing-masing pendapatan retribusi daerah TA 2020 dan TA 2019, dapat dijelaskan sebagai berikut:

(1) Pelayanan Kesehatan-LRA diatur dengan:

Perda Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Pelayanan dan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis dan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Cilacap, diundangkan tanggal 18 November 2011.

Realisasi pendapatan tersebut pada TA 2020 sebesar Rp403.545.500,00, yaitu 80,71% dari anggaran pada TA 2020 sebesar Rp500.000.000,00 dan 1,80% dari realisasi pada TA 2019 sebesar Rp22.459.596.293,00. Rincian pelayanan kesehatan ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Retibusi Pelayanan Kesehatan-LRA		TA 2020			TA 2019	Naik/(Turun) (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
1	Labkesda	500.000.000,00	403.545.500,00	**80,71**	612.066.500,00	(208.521.000,00)
2	Puskesmas	0,00	0,00	0,00	4.176.597.500,00	(4.176.597.500,00)
3	Dana Non Kapitasi	0,00	0,00	0,00	17.339.582.293,00	(17.339.582.293,00)
4	Calon Pengantin	0,00	0,00	0,00	331.350.000,00	(331.350.000,00)
Jumlah		**500.000.000,00**	**403.545.500,00**	**80,71**	**22.459.596.293,00**	**(22.056.050.793)**

(a) Pendapatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) diatur dengan Perda Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Pelayanan dan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis dan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Cilacap. Realisasi pendapatan tersebut pada TA 2020 sebesar Rp403.545.000,00, yaitu 80,71% dari anggaran pada TA 2020 sebesar Rp500.000.000,00 dan 65,93% dari realisasi pada TA 2019 sebesar Rp612.066.500,00.

(b) Pelayanan Kesehatan di Puskesmas diatur dengan Perda Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Pelayanan dan Retribusi Pelayanan

Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis dan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Cilacap. Realisasi Pendapatan tersebut pada TA 2020 sebesar Rp0,00, yaitu 0% dari anggaran pada TA 2020 sebesar Rp0,00 dan 0% dari realisasi pada TA 2019 sebesar Rp4.176.597.500,00 meliputi 38 Puskesmas se-Kabupaten Cilacap, dengan rincian sebagai berikut :

Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas		TA 2020			TA 2019	Naik/(Turun)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	(Rp)
1	Cilacap Selatan I	0,00	0,00	0,00	153.014.000	(153.014.000)
2	Cilacap Selatan II	0,00	0,00	0,00	60.494.000	(60.494.000)
3	Cilacap Tengah I	0,00	0,00	0,00	97.877.000	(97.877.000)
4	Cilacap Tengah II	0,00	0,00	0,00	55.656.000	(55.656.000)
5	Cilacap Utara I	0,00	0,00	0,00	111.498.000	(111.498.000)
6	Cilacap Utara II	0,00	0,00	0,00	53.271.000	(53.271.000)
7	Kesugihan I	0,00	0,00	0,00	76.200.000	(76.200.000)
8	Kesugihan II	0,00	0,00	0,00	119.443.000	(119.443.000)
9	Jeruklegi I	0,00	0,00	0,00	111.079.500	(111.079.500)
10	Jeruklegi II	0,00	0,00	0,00	88.668.500	(88.668.500)
11	Kawunganten	0,00	0,00	0,00	132.549.500	(132.549.500)
12	Bantarsari	0,00	0,00	0,00	94.972.500	(94.972.500)
13	Kroya I	0,00	0,00	0,00	239.699.500	(239.699.500)
14	Kroya II	0,00	0,00	0,00	105.327.000	(105.327.000)
15	Adipala I	0,00	0,00	0,00	107.416.500	(107.416.500)
16	Adipala II	0,00	0,00	0,00	80.432.000	(80.432.000)
17	Maos	0,00	0,00	0,00	100.661.000	(100.661.000)
18	Sampang	0,00	0,00	0,00	160.927.000	(160.927.000)
19	Binangun	0,00	0,00	0,00	117.244.000	(117.244.000)
20	Nusawungu I	0,00	0,00	0,00	70.761.000	(70.761.000)
21	Nusawungu II	0,00	0,00	0,00	44.227.500	(44.227.500)
22	Sidareja	0,00	0,00	0,00	280.068.500	(280.068.500)
23	Cipari	0,00	0,00	0,00	269.581.500	(269.581.500)
24	Kedungreja	0,00	0,00	0,00	179.485.000	(179.485.000)
25	Patimuan	0,00	0,00	0,00	75.899.500	(75.899.500)
26	Gandrungmangu I	0,00	0,00	0,00	135.046.000	(135.046.000)
27	Gandrungmangu II	0,00	0,00	0,00	92.563.500	(92.563.500)
28	Karangpucung I	0,00	0,00	0,00	94.048.000	(94.048.000
29	Karangpucung II	0,00	0,00	0,00	46.621.000	(46.621.000)
30	Majenang I	0,00	0,00	0,00	124.811.000	(124.811.000)
31	Majenang II	0,00	0,00	0,00	67.883.000	(67.883.000)
32	Cimanggu I	0,00	0,00	0,00	110.334.000	(110.334.000)
33	Cimanggu II	0,00	0,00	0,00	76.384.500	(76.384.500)
34	Wanareja I	0,00	0,00	0,00	155.025.500	(155.025.500)
35	Wanareja II	0,00	0,00	0,00	80.270.000	(80.270.000)
36	Dayeuhluhur I	0,00	0,00	0,00	126.950.000	(126.950.000)
37	Dayeuhluhur II	0,00	0,00	0,00	58.448.000	(58.448.000)
38	Kampunglaut	0,00	0,00	0,00	21.760.000	(21.760.000)
Jumlah		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.176.597.500,00**	**(4.176.597.500,00)**

(c) Realisasi pendapatan BPJS non Kapitasi pada TA 2020 sebesar Rp0,00, yaitu 0% dari anggaran pada TA 2020 sebesar Rp0,00 dan 0% dari realisasi pada TA 2019 sebesar Rp17.339.582.293,00 terdiri dari :

Dana Non Kapitasi Puskesmas		Realisasi TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)
1	Dayeuhluhur I	0,00	669.821.160
2	Dayeuhluhur II	0,00	333.104.800
3	Wanareja I	0,00	839.185.240
4	Wanareja II	0,00	70.579.920
5	Majenang I	0,00	343.849.120
6	Majenang II	0,00	53.939.620
7	Cimanggu I	0,00	525.341.083
8	Cimanggu II	0,00	173.281.750
9	Karangpucung I	0,00	400.046.100
10	Karangpucung II	0,00	166.447.350

Dana Non Kapitasi Puskesmas		Realisasi TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)
11	Cipari	0,00	882.391.450
12	Sidareja	0,00	1.796.236.420
13	Kedungreja	0,00	833.697.200
14	Patimuan	0,00	728.325.860
15	Gandrungmangu I	0,00	1.099.945.210
16	Gandrungmangu II	0,00	124.013.580
17	Bantarsari	0,00	404.536.170
18	Kawunganten	0,00	1.063.298.940
19	Jeruklegi I	0,00	818.562.880
20	Jeruklegi II	0,00	228.140.280
21	Kesugihan I	0,00	271.902.830
22	Kesugihan II	0,00	153.832.220
23	Adipala I	0,00	810.202.410
24	Adipala II	0,00	105.884.370
25	Maos	0,00	508.893.340
26	Sampang	0,00	511.686.160
27	Kroya I	0,00	1.289.146.030
28	Kroya II	0,00	233.628.300
29	Binangun	0,00	670.301.340
30	Nusawungu I	0,00	264.003.530
31	Nusawungu II	0,00	453.760.820
32	Cilacap Selatan I	0,00	22.211.840
33	Cilacap Selatan II	0,00	13.979.350
34	Cilacap Tengah I	0,00	33.596.570
35	Cilacap Tengah II	0,00	8.214.000
36	Cilacap Utara I	0,00	196.469.400
37	Cilacap Utara II	0,00	26.921.590
38	Kampunglaut	0,00	210.204.060
JUMLAH		**0,00**	**17.339.582.293**

(d) Realisasi pendapatan Pemeriksaan Calon Pengantin di Puskesmas pada TA 2020 sebesar Rp0,00, yaitu 0% dari anggaran pada TA 2020 sebesar Rp0,00 dan 0% dari realisasi pada TA 2019 sebesar Rp331.350.000,00 meliputi 38 Puskesmas se-Kabupaten Cilacap, dengan rincian sebagai berikut :

Pemeriksaan Calon Pengantin		TA 2020			TA 2019	Naik/(Turun) (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
1	Cilacap Selatan I	0,00	0,00	0,00	9.080.000	(9.080.000)
2	Cilacap Selatan II	0,00	0,00	0,00	7.220.000	(7.220.000)
3	Cilacap Tengah I	0,00	0,00	0,00	7.460.000	(7.460.000)
4	Cilacap Tengah II	0,00	0,00	0,00	7.060.000	(7.060.000)
5	Cilacap Utara I	0,00	0,00	0,00	7.920.000	(7.920.000)
6	Cilacap Utara II	0,00	0,00	0,00	5.220.000	(5.220.000)
7	Kesugihan I	0,00	0,00	0,00	11.920.000	(11.920.000)
8	Kesugihan II	0,00	0,00	0,00	12.980.000	(12.980.000)
9	Jeruklegi I	0,00	0,00	0,00	8.660.000	(8.660.000)
10	Jeruklegi II	0,00	0,00	0,00	4.560.000	(4.560.000)
11	Kawunganten	0,00	0,00	0,00	17.660.000	(17.660.000)
12	Bantarsari	0,00	0,00	0,00	14.460.000	(14.460.000)
13	Kroya I	0,00	0,00	0,00	14.210.000	(14.210.000)
14	Kroya II	0,00	0,00	0,00	7.340.000	(7.340.000)
15	Adipala I	0,00	0,00	0,00	10.560.000	(10.560.0000)
16	Adipala II	0,00	0,00	0,00	7.620.000	(7.620.000)
17	Maos	0,00	0,00	0,00	9.360.000	(9.360.0000)
18	Sampang	0,00	0,00	0,00	7.040.000	(7.040.000)
19	Binangun	0,00	0,00	0,00	13.320.000	(13.320.000)
20	Nusawungu I	0,00	0,00	0,00	5.720.000	(5.720.000)
21	Nusawungu II	0,00	0,00	0,00	3.200.000	(3.200.000)
22	Sidareja	0,00	0,00	0,00	14.020.000	(14.020.000)
23	Cipari	0,00	0,00	0,00	12.700.000	(12.700.000)
24	Kedungreja	0,00	0,00	0,00	16.360.000	(16.360.000)
25	Patimuan	0,00	0,00	0,00	7.520.000	(7.520.000)
26	Gandrungmangu I	0,00	0,00	0,00	6.680.000	(6.680.000)
27	Gandrungmangu II	0,00	0,00	0,00	5.580.000	(5.580.000)
28	Karangpucung I	0,00	0,00	0,00	9.260.000	(9.260.000)
29	Karangpucung II	0,00	0,00	0,00	3.500.000	(3.500.000)
30	Majenang I	0,00	0,00	0,00	18.720.000	(18.720.000)
31	Majenang II	0,00	0,00	0,00	6.520.000	(6.520.000)

Pemeriksaan Calon Pengantin		TA 2020			TA 2019	Naik/(Turun) (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
32	Cimanggu I	0,00	0,00	0,00	6.280.000	(6.280.000)
33	Cimanggu II	0,00	0,00	0,00	7.820.000	(7.820.000)
34	Wanareja I	0,00	0,00	0,00	9.220.000	(9.220.000)
35	Wanareja II	0,00	0,00	0,00	4.860.000	(4.860.000)
36	Dayeuhluhur I	0,00	0,00	0,00	5.000.000	(5.000.000)
37	Dayeuhluhur II	0,00	0,00	0,00	2.640.000	(2.640.000)
38	Kampunglaut	0,00	0,00	0,00	2.100.000	(2.100.000)
Jumlah		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**331.350.000,00**	**(331.350.000,00)**

(2) Pelayanan Persampahan/Kebersihan-LRA diatur dengan Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kabupaten Cilacap, diundangkan tanggal 11 Oktober 2011. Realisasi pendapatan tersebut pada TA 2020 sebesar Rp1.012.955.600,00, yaitu 104% dari anggaran pada TA 2020 sebesar Rp974.000.000,00 dan 104,81% dari realisasi pada TA 2019 sebesar Rp966.466.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Persampahan/Kebersihan-LRA		TA 2020			TA 2019	Naik/(Turun) (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
1	DLH Cilacap	597.280.600,00	604.194.600,00	101,16	582.597.500,00	21.597.100,00
2	UPT DLH Kroya	123.960.000,00	125.547.000,00	101,28	120.270.000,00	5.277.000,00
3	UPT DLH Sidareja	119.001.400,00	127.104.000,00	106,81	119.281.000,00	7.823.000,00
4	UPT DLH Majenang	133.758.000	156.110.000,00	116,71	144.317.500,00	11.792.500,00
Jumlah		**974.000.000,00**	**1.012.955.600,00**	**104,00**	**966.466.000,00**	**46.489.600,00**

(3) Pendapatan Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat-LRA diatur dengan Perda Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat di Kabupaten Cilacap. Realisasi pendapatan Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat pada TA 2020 sebesar Rp36.450.000,00, yaitu 191.84% dari anggaran pada TA 2020 sebesar Rp19.000.000,00 dan 176% dari realisasi pada TA 2019 sebesar Rp20.710.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Pemakaman/ Pengabuan Mayat-LRA		TA 2020			TA 2019	Naik/(Turun) (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
1	TPU Karangsuci	16.900.000,00	33.305.000,00	197,07	18.135.000,00	15.170.000,00
2	TPU Kerkop	2.100.000,00	3.485.000,00	165,95	2.575.000,00	910.000,00
Jumlah		**19.000.000,00**	**36.450.000,00**	**191,84**	**20.710.000,00**	**15.740.000,00**

(4) Pendapatan Parkir - LRA diatur dengan Perda Kabupaten Cilacap Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Perubahan Perda Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum di Kabupaten Cilacap. Realisasi pendapatan tersebut pada TA 2020 sebesar Rp.678.490.579,00 yaitu 94,83% dari anggaran pada TA 2020 sebesar Rp715.499.155,00 dan 33,82% dari realisasi pada TA 2019 sebesar Rp2.006.017.200,00.

(5) Pendapatan Retribusi Pasar-LRA diatur dengan Perda Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar yang ditetapkan tanggal 11 Oktober 2011 dan Perda Kabupaten Cilacap Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pasar di Kabupaten Cilacap. Realisasi pendapatan tersebut pada TA 2020 sebesar Rp3.767.680.307,00, yaitu 107,65% dari anggaran pada TA 2020 sebesar Rp3.500.000.000,00 dan 92,98% dari realisasi pada TA 2019 sebesar Rp4.052.114.904,00.

Retribusi Pelayanan Pasar-LRA		TA 2020			TA 2019	Naik/(Turun) (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
1	Pasar Gede Cilacap	992.500.000,00	1.052.866.128,00	106,08	1.736.345.004,00	(683.420.876,00)
2	Pasar Sidodadi	290.000.000,00	302.049.854,00	104,16	281.853.500,00	20.196.354,00
3	Pasar Gumilir	15.000.000,00	16.196.000,00	107,97	15.821.000,00	375.000,00
4	Pasar Kesugihan	30.000.000,00	30.160.000,00	100,53	38.332.800,00	(8.172.800,00)
5	Pasar Karangkandri	15.000.000,00	12.195.000,00	81.30	23.180.000,00	(10.985.000,00)
6	Pasar Lebeng	75.000.000,00	79.050.000,00	105,40	71.830.800,00	7.219.200,00
7	Pasar Kawunganten	125.000.000,00	127.026.000,00	101,62	116.071.000,00	10.955.000,00
8	Pasar Sarwadadi	11.500.000,00	12.052.000,00	104,80	11.030.000,00	1.022.000,00
9	Pasar Maos Kidul	30.000.000,00	35.079.500,00	116,93	33.545.000,00	1.534.500,00
10	Pasar Maos Lor	16.000.000,00	17.062.000,00	106,64	13.218.000,00	3.844.000,00
11	Pasar Adipala	160.000.000,00	162.040.000,00	101,28	156.266.200,00	5.773.800,00
12	Pasar Sampang	148.000.000,00	150.200.000,00	101.49	25.565.500,00	124.634.500,00
13	Pasar Kroya	270.000.000,00	280.683.500,00	103.96	244.757.500,00	35.926.000,00
14	Pasar Sikampuh	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	4.191.000,00	809.000,00
15	Pasar Binangun	38.000.000,00	36.778.600,00	96,79	35.062.700,00	1.715.900,00
16	Pasar Kemojing	29.000.000,00	30.007.000,00	103,47	30.001.000,00	6.000,00
17	Pasar Nusawungu	50.000.000,00	54.112.000,00	108,22	50.790.000,00	3.322.000,00
18	Pasar Karangputat	20.000.000,00	21.014.500,00	105,07	18.104.000,00	2.910.500,00
19	Pasar Banjareja	28.000.000,00	30.055.000,00	107,34	27.325.500,00	2.729.500,00
20	Pasar Gandrungmangu	160.500.000,00	173.062.000,00	107,83	161.044.000,00	12.018.000,00
21	Pasar Sidareja	147.000.000,00	189.059.875,00	128,61	134.396.000,00	54.663.875,00
22	Pasar Klumprit	5.000.000,00	5.105.000,00	102,10	5.115.000,00	(10.000,00)
23	Pasar Sentolo Baru	26.500.000,00	29.698.000,00	112,07	28.017.500,00	1.680.500,00
24	Pasar Cipari	85.500.000,00	88.233.000,00	103,20	81.081.500,00	7.151.500,00
25	Pasar Majenang	250.000.000,00	311.090.000,00	124,44	247.450.500,00	63.639.500,00
26	Pasar Hewan Majenang	21.000.000,00	22.460.000,00	106,95	19.949.000,00	2.511.000,00
27	Pasar Panimbang	28.000.000,00	30.604.500,00	109,30	27.291.500,00	3.313.000,00
28	Pasar Wanareja	140.000.000,00	150.401.500,00	107,43	130.806.000,00	19.595.500,00
29	Pasar Ikan Cilacap	36.500.000,00	38.876.000,00	106,51	34.413.000,00	4.463.000,00
30	Pasar Tanjungsari	75.000.000,00	81.148.750,00	108,20	73.853.800,00	7.294.950,00
31	Pasar Pelemgading	67.000.000,00	69.354.000,00	103,51	66.168.800,00	3.185.200,00
32	Pasar Saliwangi	60.000.000,00	62.516.000,00	104,19	57.212.800,00	5.303.200,00
33	Pasar Cinyawang	50.000.000,00	57.092.000,00	114,18	52.025.000,00	5.067.000,00
Jumlah		**3.500.000.000,00**	**3.767.680.307,00**	**107,65**	**4.052.056.904,00**	**(284.376.597,00)**

(6) Pendapatan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LRA diatur dengan Perda Kabupaten Cilacap Nomor 11Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Cilacap Nomor 08 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Cilacap. Realisasi pendapatan retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor pada TA 2020 yang dikelola oleh Dinas Perhubungan sebesar Rp1.161.920.00,00, yaitu 77,46% dari anggaran pada TA 2020 sebesar Rp1.500.000.000,00 dan 60,62% dari realisasi pada TA 2019 sebesar Rp1.916.428.800,00 yang dapat dirinci sebagai berikut :

Pengujian Kend. Bermotor-LRA		TA 2020			TA 2019	Naik/(Turun) (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
1	Pendaftaran Kend. Bermotor Wajib Uji Baru	87.900.000,00	27.633.600,00	31,44	116.570.000,00	(88.936.000,00)
2	Pengujian Berkala dan Numpang Uji Masuk	1.340.480.000,00	1.076.540.000,00	80,31	1.676.430.000,00	(599.890.000,00)
3	Sanksi Administrasi	45.870.000,00	57.746.400,00	125,89	77.428.800,00	(19.682.400,00)
4	Penggantian Buku Uji yang Hilang	25.750.000,00	0,00	0,00	46.000.000,00	(46.000.000,00)
Jumlah		**1.500.000.000,00**	**1.161.920.000,00**	**77,46**	**1.916.428.800,00**	**(754.508.800,00)**

(7) Pendapatan Retribusi Penyediaan dan/atau Jasa usaha Penyedotan Kakus - LRA diatur dengan Perda Kabupaten Cilacap Nomor 06 Tahun 2012 tentang Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus di Kabupaten Cilacap. Realisasi pendapatan tersebut pada TA 2020 sebesar Rp62.840.000,00, yaitu 146,14% dari anggaran pada TA 2020 sebesar Rp43.000.000,00 dan 89,75% dari realisasi pada TA 2019 sebesar Rp70.015.000,00.

(8) Pendapatan Retribusi Pelayanan Tera Ulang - LRA diatur dengan Perda Kabupaten Cilacap Nomor 12 Tahun 2017 diundangkan tanggal 4 Desember 2017. Realisasi pendapatan tersebut pada TA 2020 sebesar Rp134.520.500,00, yaitu 106,93% dari anggaran pada TA 2020 sebesar Rp125.800.000,00 dan 88,32% dari realisasi pada TA 2019 sebesar Rp152.304.000,00.

(9) Pendapatan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LRA diatur dengan Perda Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penataan Menara Telekomunikasi dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, diundangkan tanggal 20 Mei 2013. Realisasi pendapatan tersebut pada TA 2020 sebesar Rp1.060.521.475,00, yaitu 112,49% dari anggaran pada TA 2020 sebesar Rp942.753.450,00 dan 110,38% dari realisasi pada TA 2019 sebesar Rp960.726.325,00.

(10) Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA diatur dengan Perda Kabupaten Cilacap Nomor 04 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Kabupaten Cilacap, diundangkan tanggal 24 Januari 2012. Realisasi pendapatan tersebut pada TA 2020 sebesar Rp3.468.729.147,00, yaitu 111,87% dari anggaran pada TA 2020 sebesar Rp3.100.721.765,00 dan 83,92% dari realisasi pada TA 2019 sebesar Rp4.133.320.837,00 yang dapat dirinci sebagai berikut :

Pemakaian Kekayaan Daerah-LRA		TA 2020			TA 2019	Naik/(Turun) (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
1	Dinas Perikanan	120.000.000,00	120.000.000,00	100	120.000.000,00	0,00
2	BPPKAD	390.094.375,00	501.183.740,00	128,48	657.730.475,00	(156.546.735,00)
3	DPUPR	1.025.000.000,00	1.332.551.800,00	130,01	1.774.447.400,00	(441.895.600,00)
4	Disperkimta	628.329.000,00	653.007.252,00	103,93	641.215.332,00	11.791.920,00
5	DISNAKERIN	27.600.000,00	9.200.000,00	33,33	28.000.000,00	(18.800.000,00)
6	DLH	135.000.000,00	165.640.000,00	122,70	217.297.000,00	(51.657.000,00)
7	Kec. Cilacap Tengah	222.408.640,00	222.408.640,00	100	234.143.400,00	(11.734.760,00)
8	Kec. Cilacap Utara	268.850.000,00	251.528.100,00	93,56	210.505.500,00	41.022.600,00
9	Kec. Cilacap Selatan	151.439.750,00	152.129.615,00	100,46	137.731.730,00	14.397.885,00
10	Kec. Bantarsari	100.000.000,00	55.000.000,00	55,00	102.500.000,00	(47.500.000,00)
11	Kec Dayeuhluhur	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Badan Kepegawaian , Pendidikan Dan Pelatihan Daerah	7.000.000,00	6.080.000,00	86,86	9.750.000,00	(3.670.000,00)
Jumlah		**3.100.721.765,00**	**3.468.729.147,00**	**111,87**	**4.133.320.837,00**	**(664.591.690,00)**

(11) Pendapatan Retribusi Terminal - LRA diatur dengan Perda Kabupaten Cilacap Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Cilacap Nomor 09 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal di Kabupaten Cilacap. Realisasi pendapatan tersebut pada TA 2020 sebesar Rp239.410.500,00, yaitu 108,82% dari anggaran pada TA 2020 sebesar Rp220.000.000,00 dan 67,33% dari realisasi TA 2019 sebesar Rp355.541.500,00 dengan rincian sebagai berikut :

Retribusi Terminal Bus-LRA		TA 2020			TA 2019	Naik/(Turun) (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
1	Adipala	26.350.000	28.946.500	109,85	41.579.500,00	(12.633.000,00)
2	Kroya	14.340.000	17.682.000	123,31	25.436.000,00	(7.754.000,00)
3	Kawunganten	33.502.500	38.553.000	115,07	44.421.500,00	(5.868.500,00)
4	Sampang	13.870.000	14.332.500	103,33	24.876.000,00	(10.543.500,00)
5	Karangpucung	50.070.000	55.670.500	111,19	84.787.000,00	(29.116.500,00)
6	Wanareja	7.665.000	8.189.000	106,84	15.149.000,00	(6.960.000,00)

Retribusi Terminal Bus-LRA		TA 2020			TA 2019	Naik/(Turun) (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
7	Sidareja	37.905.000	39.623.000	104,53	59.502.500,00	(19.879.500,00)
8	Majenang	36.297.500	36.414.000	100,32	59.790.000,00	(23.376.000,00)
Jumlah		**220.000.000,00**	**239.410.500,00**	**108,82**	**355.541.500,00**	**(116.131.000,00)**

(12) Pendapatan Retribusi Tempat Khusus Parkir - LRA diatur dengan Perda Kabupaten Cilacap Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Cilacap Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir di Kabupaten Cilacap. Realisasi pendapatan tersebut pada TA 2020 sebesar Rp1.627.018.014,00, yaitu 91,23% dari anggaran pada TA 2020 sebesar Rp1.783.462.053,00 dan 119% dari realisasi TA 2019 sebesar Rp1.364.675.400,00.

(13) Pendapatan Retribusi Rumah Potong Hewan - LRA diatur dengan Perda Kabupaten Cilacap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan di Kabupaten Cilacap, diundangkan tanggal 24 Januari 2012. Realisasi pendapatan tersebut pada TA 2020 sebesar Rp120.768.000,00, yaitu 100,64% dari anggaran pada TA 2020 sebesar Rp120.000.000,00 dan 89,30% dari realisasi TA 2019 sebesar Rp135.229.000,00.

(14) Pendapatan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan - LRA dengan Perda Kabupaten Cilacap Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Cilacap Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan di Kabupaten Cilacap. Realisasi pendapatan tersebut pada TA 2020 sebesar Rp67.137.500,00, yaitu 166,51% dari anggaran pada TA 2020 sebesar Rp40.321.000,00 dan 110,55% dari realisasi TA 2019 sebesar Rp60.726.000,00 yang dapat dirinci sebagai berikut :

Retribusi Pelayanan Kepelabuhan-LRA		TA 2020			TA 2019	Naik/(Turun) (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
1	Jasa Sandar Kapal	0,00	0,00	0,00	2.021.000,00	(2.021.000,00)
2	TM Pelabuhan	0,00	0,00	0,00	43.243.000,00	(43.243.000,00)
3	Penumpukan Barang	16.801.000 ,00	29.183.500,00	173,70	0,00	29.183.500,00
4	Sewa Ruangan	0,00	0,00	0,00	13.803.000,00	(13.803.000,00)
5	MCK/ Toilet	14.400.000,00	14.770.000,00	102,57	639.000,00	14.131.000,00
6	Penitipan Kend. Sepeda Motor	4.200.000,00	3.152.000,00	75,05	1.020.000,00	2.132.000,00
7	Jasa Pelayanan Dermaga	1.230.000,00	1.749.000,00	142,20	0,00	(1.749.000,00)
8	Penggunaan Tanah	2.700.000,00	14.400.000,00	533,33	0,00	14.400.000,00
9	Jasa Pelayanan Dermaga	990.000,00	3.883.000,00	392,22	0,00	3.883.000,00
Jumlah		**40.321.000,00**	**67.137.500,00**	**166,51**	**60.726.000,00**	**6.411.500,00**

(15) Pendapatan Retribusi Jasa Usaha Tempat Rekreasi dan Olah Raga - LRA diatur dengan Perda Kabupaten Cilacap Nomor 74 Tahun 2018 tentang perubahan lampiran Perda Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga di Kabupaten Cilacap. Realisasi pendapatan tersebut pada TA 2020 sebesar Rp213.573.872,00, yaitu 60,48% dari anggaran pada TA 2020 sebesar Rp353.154.375,00 dan 50,51% dari realisasi TA 2019 sebesar Rp422.856.992,00, tidak tercapainya pendapatan retribusi jasa usasha rekreasi dan olah raga di Kabupaten Cilacap dikarenakan ada penutupan tempat rekreasi dan olahraga akibat pandemi covid-19 yang dapat dirinci sebagai berikut :

Jasa Usaha Tempat Rekreasi & OR-LRA		TA 2020			TA 2019	Naik/(Turun)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	(Rp)
1	Pantai Teluk Penyu	0,00	0,00	0,00	88.364.800,00	(88.364.800,00)
2	Benteng Pendem	0,00	0,00	0,00	23.889.400,00	(23.889.400,00)
3	Hutan Payau	55.000.000,00	19.758.428,00	56,45	49.671.512,00	(29.913.084,00)
4	Pantai Widara Payung	0,00	0,00	0,00	26.521.600,00	(26.521.600,00)
5	Pantai Ketapang Indah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Air Panas Cipari	205.000.000,00	128.122.000,00	77,64	211.242.200,00	(83.120.200,00)
7	Curug Cimendaway	1.000.000,00	4.510.680,00	451,07	3.194.400,00	1.316.280,00
8	Srandil	2.000.000,00	308.000,00	15,40	2.203.750,00	(1.895.750,00)
9	Pantai Bunton	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Pantai Sodong	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Pantai Sidayu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Pantai Jetis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Pantai Karangpakis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Curug Geulis	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Curug Giriwangi Cipari	1.500.000,00	1.332.000,00	88,80	2.561.280,00	(1.229.280,00)
16	Gunung Selok	73.154.375,00	59.542.764,00	90,37	15.208.050,00	44.334.714,00
17	Pantai Menganti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Kubangkangkung	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		**353.154.375,00**	**213.573.872,00**	**60,48**	**422.856.992,00**	**(209.283.120,00)**

(16) Pendapatan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LRA diatur dengan Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang diundangkan tanggal 28 April 2016. Realisasi pendapatan tersebut pada TA 2020 sebesar Rp334.500.000,00, yaitu 100,55% dari anggaran pada TA 2020 sebesar Rp dan 97,04% dari realisasi TA 2019 sebesar Rp346.599.000,00 yang terdiri dari :

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-LRA		TA 2020			TA 2019	Naik/(Turun)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	(Rp)
1	Dinas Perikanan (BBI)	134.500.000,00	136.286.250,00	101,33	146.199.000,00	(9.912.750,00)
2	Dinas Pertanian	200.000.000,00	200.060.000,00	100,03	200.400.000,00	(340.000,00)
Jumlah		**334.500.000,00**	**336.346.250,00**	**100,55**	**346.599.000,00**	**(10.252.750,00)**

(17) Pendapatan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan - LRA diatur dengan Perda Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, diundangkan tanggal 6 Pebruari 2014. Realisasi pendapatan tersebut pada TA 2020 sebesar Rp3.257.662.875.00, yaitu 100,70% dari anggaran pada TA 2020 sebesar Rp3.235.000.000,00 dan 66,23% dari realisasi TA 2019 sebesar Rp4.918.435.347,00 dengan rincian sebagai berikut :

Ijin Mendirikan Bangunan-LRA			TA 2020			TA 2019	Naik/(Turun)
			Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	(Rp)
1	BPMPT		2.400.000.000,00	2.546.442.777,00	106,10	4.343.609.945,00	(1.797.167.168,00)
2	Kecamatan		835.000.000,00	711.220.098,00	85,18	574.825.402,00	136.394.696,00
	a)	Cilacap Selatan	75.000.000,00	88.367.841,00	117,82	60.268.925,00	28.098.916,00
	b)	Cilacap Tengah	75.000.000,00	22.750.424,00	30,33	52.462.196,00	(29.711.772,00)
	c)	Cilacap Utara	75.000.000,00	72.036.000,00	96,05	79.845.900,00	(7.809.900,00)
	d)	Kesugihan	30.000.000,00	43.662.545,00	145,54	55.519.728,00	(11.857.183,00)
	e)	Jeruklegi	25.000.000,00	26.543.744,00	106,17	15.031.346,00	11.512.398,00
	f)	Kawunganten	25.000.000,00	25.489.150,00	101,96	4.145.000,00	21.344.150,00
	g)	Bantarsari	25.000.000,00	25.540.220,00	102,16	8.086.450,00	17.453.770,00
	h)	Kampung Laut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	i)	Kroya	50.000.000,00	16.085.700,00	32,17	26.071.450,00	(9.985.750,00)
	j)	Adipala	25.000.000,00	30.554.860,00	122,22	25.671.147,00	4.883.713,00
	k)	Maos	25.000.000,00	21.260.364,00	85,04	22.401.960,00	(1.141.596,00)
	l)	Sampang	35.000.000,00	13.639.000,00	38,97	15.695.000,00	(2.056.000,00)
	m)	Binangun	25.000.000,00	25.116.076,00	100,46	20.251.465,00	4.864.611,00
	n)	Nusawungu	25.000.000,00	25.707.000,00	102,83	20.904.400,00	4.802.600,00
	o)	Sidareja	50.000.000,00	22.025.000,00	44,05	11.570.600,00	10.454.400,00
	p)	Cipari	20.000.000,00	20.250.000,00	101,25	10.027.500,00	10.222.500,00
	q)	Kedungreja	25.000.000,00	26.094.000,00	104,38	15.002.551,00	11.091.449,00
	r)	Patimuan	20.000.000,00	20.778.000,00	103,89	10.602.750,00	10.175.250,00

Ijin Mendirikan Bangunan-LRA		TA 2020			TA 2019	Naik/(Turun) (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
s)	Gandrungmangu	35.000.000,00	13.697.615,00	39,14	17.795.090,00	(4.097.475,00)
t)	Karangpucung	35.000.000,00	30.418.840,00	86,91	14.869.529,00	15.549.311,00
u)	Cimanggu	25.000.000,00	25.444.185,00	101,78	20.649.745,00	4.794.440,00
v)	Majenang	75.000.000,00	75.232.000,00	100,31	40.540.220,00	34.691.780,00
w)	Wanareja	35.000.000,00	16.365.250,00	46,76	12.210.450,00	4.154.800,00
x)	Dayeuhluhur	0,00	24.162.284,00	0,00	15.202.000,00	8.960.284,00
Jumlah		**3.235.000.000,00**	**3.257.662.875,00**	**100,70**	**4.918.435.347,00**	**(1.660.772.472,00)**

(18) Pendapatan Retribusi Izin Trayek - LRA diatur dengan Perda Kabupaten Cilacap Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Cilacap Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek di Kabupaten Cilacap. Realisasi pendapatan tersebut pada TA 2020 sebesar Rp15.589.000,00, yaitu 127,26% dari anggaran pada TA 2020 sebesar Rp12.250.000,00 dan 57,98% dari realisasi TA 2019 sebesar Rp26.883.800,00 dengan rincian sebagai berikut :

Izin Trayek-LRA		TA 2020			TA 2019	Naik/(Turun) (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
1	SK Trayek Baru Angkutan Jalan	1.300.000,00	4.840.000,00	372	4.410.000,00	430.000,00
2	Daftar Ulang Trayek Angkutan Jalan	9.050.000,00	7.840.000,00	86,63	15.610.000,00	(7.770.000,00)
3	Izin Insidentil	400.000,00	225.000,00	56,25	665.000,00	(440.000,00)
4	Pendapatan Teknis Izin Trayek	1.500.000,00	1.240.000,00	82,67	4.400.000,00	(3.160.000,00)
5	Sk Trayek Baru Angkutan Sungai	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
6	Sangsi Admisnistrasi	0,00	1.444.0000	0,0	1.798.800,00	(12.641.200,00)
Jumlah		**12.250.000,00**	**15.589.000,00**	**127,26**	**26.883.800,00**	**(11.294.800,00)**

(19) Pendapatan Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Asing diatur dengan Perda Nomor 1 Tahun 2016 yang diundangkan tanggal 5 Pebruari 2016. Realisasi pendapatan tersebut pada TA 2020 sebesar Rp1.304.714.000,00, yaitu 210,35% dari anggaran pada TA 2020 sebesar Rp620.260.000 dan 351,08% dari realisasi TA 2019 sebesar Rp371.631.000,00.

V.1.a.1)c) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Dipisahkan - LRA

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Dipisahkan - LRA merupakan PAD yang bersumber dari pembagian laba atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMPD) pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah (PD/BUMD), BUMN, Lembaga Keuangan-Bank, Lembaga Keuangan - Non Bank, dan pihak ketiga lainnya. Pendapatan ini diterima dan dikelola melalui Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap, dengan realisasi TA 2020 dan TA 2019 sebagai berikut:

Bagian Laba PD/BUMD-LRA:		TA 2020			TA 2019	Naik/(Turun) (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
1	PT BPD Jawa Tengah	14.714.392.341,00	14.714.392.341,00	100	14.644.983.297,00	69.409.044,00
2	PD Cahaya Husada	116.447.755,00	116.447.755,00	100	82.873.171,00	33.574.584,00
3	PT BPR BKK Cilacap	3.449.122.000,00	3.449.122.869,00	100	2.983.696.230,00	465.426.639,00
4	PT BKK Jateng	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	PDAM Tirta Wijaya	14.304.549.000,00	14.304.549.913,00	100	5.863.641.734,00	8.440.908.179,00
6	PD Grafika Indah	0,00	0,00	0,00	769.874.409,00	(769.874.409,00)
7	PT KIW	949.244.862,00	0,00	0,00	921.694.677,00	(921.694.677,00)
8	PD KIC	11.999.000.000,00	11.999.000.757,00	100	923.308.522,00	11.075.692.235,00
9	PD Serba Usaha	64.530.000,00	87.266.676,00	135,23	0,00	87.266.676,00
10	PT PRPP	0,00	4.398.350,00	0,00	0,00	4.398.350,00
Jumlah		**45.597.285.958,00**	**44.675.178.661,00**	**97,98**	**26.190.072.040,00**	**18.485.106.621,00**

Realisasi Bagian Laba Perusda pada TA 2020 sebesar Rp44.675.178.661,00, yaitu 97,98% dari anggaran pada TA 2020 sebesar Rp45.597.285.958,00 dan 170,58% dari realisasi TA 2019 sebesar Rp26.190.072.040,00.

Pembagian laba masing-masing PD/BUMD TA 2020 dan TA 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut:

(1) Realisasi pembagian laba PT Bank Jateng pada Tahun 2020 sebesar Rp14.714.392.341,00, yaitu 100% dari anggaran pada TA 2020 sebesar Rp14.714.392.341,00 dan 100,47% dari realisasi TA 2019 sebesar Rp14.644.983.297,00. Pembagian laba PT Bank Jateng diatur dan ditetapkan dalam RUPS PT Bank Jateng tentang Pengesahan Laporan Keuangan dan Penggunaan Laba, yang dilakukan setiap tahun setelah laporan keuangan diaudit oleh pihak yang ditunjuk oleh RUPS.

(2) Realisasi pembagian laba PD Cahaya Husada pada TA 2020 sebesar Rp116.447.755,00, yaitu 100% dari anggaran pada TA 2020 sebesar Rp116.447.755,00 dan 140,51% dari realisasi TA 2019 sebesar Rp82.873.171,00. Adapun perhitungan adalah sebagai berikut:

JENIS PENERIMAAN PENDAPATAN	ANALISA PERHITUNGAN / POTENSI RII	REALISASI PENDAPATAN DAERAH TH. 2020
Perusda Cahaya Husada	Rumus = Laba Bersih Thn. 2019 x Prosentase Deviden (55,00%) = 211.723.191,00 X 0,55 = = **116.447.755,00 (Pembulatan)**	**116.447.755,00**

Pembagian laba PD Cahaya Husada yang disetor ke Kas Daerah sebesar 55% diatur dalam Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang PD Cahaya Husada Kabupaten Cilacap yang menggantikan Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang PD Apotek Cahaya Husada Kabupaten Cilacap.

(3) Realisasi pembagian laba PT BPR BKK Cilacap pada TA 2020 sebesar Rp3.449.122.869,00, yaitu 100% dari anggaran pada TA 2020 sebesar Rp3.449.122.000,00 dan 115,60% dari realisasi TA 2019 sebesar Rp2.983.696.230,00. Adapun perhitungannya adalah sebagai berikut:

JENIS PENERIMAAN PENDAPATAN	ANALISA PERHITUNGAN / POTENSI RII	REALISASI PENDAPATAN DAERAH TH. 2020
Deviden PT. BPR BKK Cilacap :	Rumus = Laba Bersih Thn. 2019 x Prosentase Deviden x Komposisi Mdl Disetor = 11.930.552.990,00 x 0,59 X 0,49 = **3.449.122.869,00 (Pembulatan)**	**3.449.122.869,00**

Pembagian laba PT BPR-BKK Cilacap diatur dalam Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah, diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Jateng Tahun 2012 Nomor 39, pada Pasal 41 ayat (1) huruf a, yaitu untuk dividen sebesar 59% dari laba bersih setelah diperhitungkan pajak dan telah disahkan oleh

RUPS. Adapun Hak Kepemilikan Pemerintah Kabupaten Cilacap terhadap PT. BPR BKK Cilacap adalah sebesar 49%.

(4) Realisasi pembagian laba PD BKK Jateng pada TA 2020 sebesar Rp0,00. Adapun hal ini disebabkan pada tahun 2019, PD BKK Jateng mengalami kerugian sebesar Rp61.773.770.949,00

(5) Realisasi setoran laba PDAM Tirta Wijaya pada TA 2020 sebesar Rp14.304.549.913,00, yaitu 100% dari anggaran pada TA 2020 sebesar Rp14.304.549.000,00 dan 243,95% dari realisasi TA 2019 sebesar Rp5.863.641.734,00. Adapun perhitungan hak atau yang diterima Pemkab Cilacap sebagai berikut:

JENIS PENERIMAAN PENDAPATAN	ANALISA PERHITUNGAN / POTENSI RII					REALISASI PENDAPATAN DAERAH TH. 2020
PDAM	Rumus	=	Laba Bersih Thn. 2019 x Prosentase Deviden (55,00%)			
		=	26.008.272.569,75	X	0,55	14.304.549.913,00
		=				
		=	14.304.549.913,00	**(Pembulatan)**		

Bagian laba Pemerintah Kabupaten Cilacap atas Penyertaan Modal pada PDAM Tirta Wijaya diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang PDAM Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap pada Pasal 47 yaitu sebesar 55% dari laba bersih setelah dikurangi dengan pajak.

(6) Realisasi pembagian laba PD Percetakan Grafika Indah pada TA 2020 sebesar Rp0,00, yaitu 0% dari anggaran pada TA 2020 sebesar Rp0,00 dan 0% dari realisasi TA 2019 sebesar Rp769.874.409,00. Hal ini disebabkan pada tahun 2019 PD Percetakan Grafika Indah mengalami kerugian sebesar Rp499.535.193,00, sehingga tidak menyetorkan bagian laba kepada Pemerintah Kabupaten Cilacap.

(7) Realisasi Bagian Laba PT Kawasan Industri Wijayakusuma (KIW) pada TA 2020 sebesar Rp0,00, yaitu 0% dari anggaran pada TA 2020 sebesar Rp949.244.862,00 dan 0% dari realisasi TA 2019 sebesar Rp921.694.677,00. Pembagian laba diatur dan ditetapkan dalam RUPS tentang Pengesahan Laporan Keuangan dan Penggunaan Laba, yang dilakukan setiap tahun setelah laporan keuangan diaudit oleh pihak yang ditunjuk oleh RUPS.

(8) Realisasi pembagian laba PD Kawasan Industri Cilacap (KIC) pada TA 2020 sebesar Rp11.999.000.757,00, yaitu 100% dari anggaran pada TA 2020 sebesar Rp11.999.000.000,00 dan 1.299,57% dari realisasi pada TA 2019 sebesar Rp923.308.522,00.

JENIS PENERIMAAN PENDAPATAN	ANALISA PERHITUNGAN / POTENSI RII					REALISASI PENDAPATAN DAERAH TH. 2020
PD KIC	Rumus	=	Laba Bersih Thn. 2019x Prosentase Deviden (55,00%)			**11.999.000.757,00**
		=	21.816.365.012,00	x	0,55	
		=				
		=	11.999.000.757,00	**(Pembulatan)**		

Pembagian laba PD KIC diatur dalam Perda Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kawasan Industri Cilacap diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 10 Tahun 2008, pada pada Bagian Ketiga Belas Pasal 72 ayat (1), yaitu sebesar 55% dari laba bersih setelah dikurangi cadangan tujuan dan disetor ke Kas Umum Daerah, setelah disahkan oleh Bupati Cilacap.

(9) Realisasi pembagian laba PD Serba Usaha pada TA 2020 sebesar Rp87.266.676,00, yaitu 135,23% dari anggaran pada TA 2020 sebesar Rp64.530.000,00,00 dan 0% dari realisasi pada TA 2019 sebesar Rp0,00.

JENIS PENERIMAAN PENDAPATAN	ANALISA PERHITUNGAN / POTENSI RII					REALISASI PENDAPATAN DAERAH TH. 2020
PD. Serba Usaha	Rumus	=	Laba Bersih Thn. 2019	x	Prosentase Deviden (55,00%)	**87.266.676,00**
		=	158.666.684,00	x	0,55	
		=				
		=	87.266.676,00		**(Pembulatan)**	

Pembagian laba PD Serba Usaha diatur dalam Perda Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Serba usaha Kabupaten Cilacap, pada pada Pasal 34 ayat (1), yaitu sebesar 55% dari laba bersih setelah dikurangi cadangan tujuan dan disetor ke Kas Umum Daerah, setelah disahkan oleh Bupati Cilacap.

(10) Realisasi pembagian laba PT PRPP pada TA 2020 sebesar Rp4.398.350,00, adapun realisasi pada TA 2019 sebesar Rp0,00.

V.1.a.1)d) Lain-lain PAD yang Sah - LRA

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LRA merupakan PAD dari berbagai sumber yang bersifat tidak tetap/rutin, dengan realisasi selama TA 2020 dan TA 2019 sebagai berikut:

Lain-lain PAD yang Sah-LRA		TA 2020			TA 2019	Naik/(Turun) (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
1	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan – LRA	113.000.000,00	1.543.356.097,00	1.365,80	885.792.861,00	657.563.236,00
2	Penerimaan Jasa Giro – LRA	9.790.000.000,00	9.389.757.795,00	95,91	18.034.637.854,07	(8.644.880.059,07)
3	Pendapatan Bunga – LRA	12.000.000.000,00	14.174.657.517,00	118,12	10.528.195.223,00	3.646.462.294,00
4	Pendapatan Denda Pajak – LRA	0,00	702.208.111,00	0	376.689.115,00	325.518.996,00
5	Pendapatan Denda Retribusi – LRA	410.850.000,00	529.137.404,00	128,79	1.638.611.000,00	(1.109.473.596,00)
6	Pendapatan dari Pengembalian – LRA	0,00	3454.286.966,48	0	2.281.160.762,52	1.173.126.203,96
7	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah – LRA	0,00	0,00	0	65.469.300,00	(65.469.300,00)
8	Pendapatan BLUD – LRA	199.227.396.728,00	221.651.121.844,00	11,26	181.819.677.854,00	39.831.443.990,00
9	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya – LRA	0,00	0,00	0	166.579.731,00	(166.579.731,00)
10	Pendapatan Dana Kapitasi JKN – LRA	76.025.454.581,00	73.065.646.375,00	96,11	78.073.783.269,00	(5.008.136.894,00)
Jumlah		**297.566.701.309,00**	**324.510.172.109,48**	**109,05**	**293.870.596.969,59**	**30.639.575.139,89**

Realisasi Lain-lain PAD yang Sah – LRA pada TA 2020 sebesar Rp324.510.172.109,48, yaitu 109,05% dari anggaran pada TA 2020

sebesar Rp297.566.701.309,00 dan 110,43% dari realisasi TA 2019 sebesar Rp293.870.596.969,59 dengan rincian sebagai berikut:

(1) Realisasi Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan - LRA pada TA 2020 sebesar Rp1.543.356.097,00, yaitu 1.365,80% dari anggaran pada TA 2020 sebesar Rp113.000.000,00 dan 173,65% dari realisasi TA 2019 sebesar Rp885.792.861,00. Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan meliputi hasil penjualan atas barang-barang sebagai berikut:

Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak Dipisahkan-LRA		TA 2020			TA 2019	Naik/(Turun) (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
1	Hasil Penjualan Tanah - LRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Hasil Penjualan Peralatan/Mesin - LRA	78.000.000,00	1.414.970.497,00	1.814,06	601.519.761,00	813.450.736,00
3	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan - LRA	35.000.000,00	8.190.000,00	23,40	284.273.100,00	(276.083.100,00)
4	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya- LRA	0,00	120.195.600,00	0	0,00	120.195.600,00
Jumlah		**113.000.000,00**	**1.543.356.097,00**	**1.365,80**	**885.792.861,00**	**657.563.236,00**

(2) Realisasi Pendapatan Jasa Giro - LRA pada TA 2020 sebesar Rp9.389.757.795,00, yaitu 95,91% dari anggaran pada TA 2020 sebesar Rp9.790.000.000,00 dan 52,07% dari realisasi TA 2019 sebesar Rp18.034.637.854,07.

(3) Realisasi Pendapatan Bunga - LRA pada TA 2020 sebesar Rp14.174.657.517,00, yaitu 118,12% dari anggaran pada TA 2020 sebesar Rp12.000.000.000,00 dan 134,64% dari realisasi TA 2019 sebesar Rp10.528.195.223,00 dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan Bunga - LRA		TA 2020			TA 2019	Naik/(Turun) (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
1	Deposito pada Bank Rakyat Indonesia (BRI)	0,00	0,00	0,00	536.876.751,00	(536.876.751,00)
2	Rekening Deposito Pada BNI	0,00	0,00	0,00	147.996.573,00	(147.996.573,00)
3	Rekening Deposito Pada Bank Jateng	12.000.000.000,00	14.174.657.517,00	118,12	9.843.321.899,00	4.331.335.618,00
Jumlah		**12.000.000.000,00**	**14.174.657.517,00**	**118,12**	**10.528.195.223,00**	**3.646.462.294,00**

(4) Realisasi Pendapatan Denda Pajak - LRA pada TA 2020 sebesar Rp702.208.111,00, yaitu 0% dari anggaran pada TA 2020 sebesar Rp0,00 dan 186,42% dari realisasi TA 2019 sebesar Rp376.689.115,00 dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan Denda Pajak - LRA		TA 2020			TA 2019	Naik/(Turun) (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
1	Denda Pajak Hotel	0,00	13.244.346,00	0,00	7.887.144,00	5.357.202,00
2	Denda Pajak Restoran	0,00	13.398.062,00	0,00	23.962.209,00	(10.564.147,00)
3	Denda Pajak Hiburan	0,00	6.426.191,00	0,00	6.678.690,00	(252.499,00)
4	Denda Pajak Reklame	0,00	15.474.099,00	0,00	10.216.003,00	5.258.096,00
5	Denda Pajak Penerangan Jalan	0,00	31.648.361,00	0,00	24.071.436,00	7.576.925,00
6	Denda Pajak Parkir	0,00	4.511.794,00	0,00	2.874.134,00	1.637.660,00
7	Denda Pajak Air Tanah	0,00	4.761.841,00	0,00	5.429.077,00	(667.236,00)
8	Denda Pajak Sarang Burung Walet	0,00	0,00	0,00	49.000,00	(49.000,00)
9	Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0,00	4.217.626,00	0,00	4.336.191,00	(118.565,00)
10	Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	0,00	608.525.791,00	0,00	291.159.668,00	317.366.123,00
11	Denda Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	25.563,00	(25.563,00)
Jumlah		**0,00**	**702.208.111,00**	**0,00**	**376.689.115,00**	**325.518.996,00**

(5) Realisasi Pendapatan Denda Retribusi - LRA pada TA 2020 sebesar Rp423.141.004,00, yaitu 102,99% dari anggaran pada TA 2020 sebesar Rp410.850.000,00 dan 25,82% dari realisasi TA 2019 sebesar Rp1.638.611.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan Denda Retribusi - LRA		TA 2020			TA 2019	Naik/(Turun) (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
1	Denda Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil	410.850.000,00	410.850.000,00	100	1.638.050.000,00	(1.227.200.000,00)
2	Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	0,00	0,00	561.000,00	(561.000,00)
3	Denda Retribusi Tempat Khusus Parkir	0,00	8.468.836,00	0,00	0,00	8.468.836,00
4	Denda Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	0,00	3.022.368,00	0,00	0,00	3.022.368,00
5	Denda Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	0,00	799.800,00	0,00	0,00	799.800,00
6	Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00	105.996.400,00	0,00	0,00	105.996.400,00
Jumlah		**410.850.000,00**	**529.137.404,00**	**128,79**	**1.638.611.000,00**	**(1.109.473.596,00)**

(6) Pendapatan dari Pengembalian - LRA merupakan pendapatan yang bersumber dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan. Realisasi pendapatan tersebut pada TA 2020 sebesar Rp3.454.286.966,48, yaitu 0% dari anggaran pada TA 2020 sebesar Rp0 dan 151,43% dari realisasi pengembalian pada TA 2019 sebesar Rp2.281.160.762,52 dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan dari Pengembalian - LRA		TA 2020			TA 2019	Naik/(Turun) (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
1	Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	0,00	508.656.113,00	0,00	349.276.609,00	159.379.504,00
2	Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	376.471.742,00	(376.471.742,00)
3	Pengembalian Kelebihan Pembayaran Uang Duka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pengembalian Pihak Ketiga	0,00	893.090.913,48	0,00	1.555.412.411,52	(662.321.498,00)
5	Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang dan Jasa	0,00	2.052.539.940,00	0,00	0,00	2.052.539.940,00
Jumlah		**0,00**	**3.454.286.966,48**	0,00	**Rp2.281.160.762,52**	**1.173.126.203,00**

(7) Realisasi Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah - LRA pada TA 2020 sebesar Rp0,00, yaitu 0% dari anggaran pada TA 2020 sebesar Rp0,00 dan 0% dari realisasi TA 2019 sebesar Rp65.469.300,00.

(8) Pendapatan dari BLUD - LRA terdiri dari BLUD RSUD Cilacap dan RSUD Majenang diatur dengan Perda Nomor 1 Tahun 2008 tentang pembentukan dan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Realisasi pendapatan TA 2020 sebesar Rp221.651.121.844,00, yaitu 111,26% dari anggaran pada TA 2020 sebesar Rp199.227.396.728,00 dan 121,91% dari realisasi TA 2019 sebesar Rp181.819.677.854,00. Pendapatan BLUD TA 2020 dapat dirinci sebagai berikut:

Pendapatan BLUD - LRA		TA 2020			TA 2019	Naik/(Turun) (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
1	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD - LRA	196.752.385.728,00	218.754.755.838,00	111,18	179.927.398.570,00	38.827.357.268,00
2	Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD - LRA	199.377.000,00	228.314.200,00	114,51	513.660.650,00	(285.346.450,00)
3	Pendapatan Lain-lain BLUD	2.275.634.000,00	2.668.051.806,00	117,24	1.378.618.634,00	1.289.433.172

Pendapatan BLUD - LRA	TA 2020			TA 2019	Naik/(Turun)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	(Rp)
– LRA					
Jumlah	**199.227.396.728,00**	**221.651.121.844,00**	**111,26**	**181.819.677.854,00**	**39.831.443.990,00**

(9) Realisasi Pendapatan Dana Kapitasi JKN - LRA pada FKTP TA 2020 terealisasi sebesar Rp73.065.646.375,00, yaitu 96,11% dari anggaran pada TA 2020 sebesar Rp76.025.454.581,00 dan 93,59% dari realisasi TA 2019 sebesar Rp78.073.783.269,00. Pendapatan Dana Kapitasi JKN dapat dirinci sebagai berikut :

Pendapatan Dana Kapitasi JKN-LRA		TA 2020			TA 2019	Naik/(Turun)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	(Rp)
1	Cilacap Selatan I	1.668.098.300,00	1.283.202.300,00	76,93	1.333.630.900,00	(50.428.600,00)
2	Cilacap Selatan II	1.212.000.000,00	1.179.694.600,00	97,33	1.195.021.950,00	(15.327.350,00)
3	Cilacap Tengah I	1.221.116.200,00	1.134.989.700,00	92,95	1.205.190.750,00	(70.201.050,00)
4	Cilacap Tengah II	1.213.740.000,00	1.196.400.700,00	98,57	1.199.558.350,00	(3.157.650,00)
5	Cilacap Utara I	1.174.469.260,00	1.277.260.300,00	108,75	1.271.997.200,00	(5.263.100,00)
6	Cilacap Utara II	805.000.000,00	762.287.850,00	94,69	821.301.750,00	(59.013.900,00)
7	Kesugihan I	2.524.144.320,00	2.487.203.400,00	98,54	2.495.676.650,00	(8.473.250,00)
8	Kesugihan II	1.817.286.600,00	1.826.474.050,00	100,51	2.115.323.100,00	(288.849.050,00)
9	Jeruklegi I	1.932.092.400,00	1.984.463.100,00	102,71	1.872.963.450,00	111.499.650,00
10	Jeruklegi II	1.299.800.000,00	1.103.931.500,00	84,93	1.230.931.250,00	(126.999.750,00)
11	Kawunganten	3.000.000.000,00	3.100.823.775,00	103,36	3.617.842.700,00	(517.018.925,00)
12	Bantarsari	2.791.000.000,00	2.756.803.900,00	98,77	3.026.938.950,00	(270.135.050,00)
13	Kroya I	2.964.000.000,00	2.932.068.700,00	98,92	3.028.616.600,00	(96.547.900,00)
14	Kroya II	1.799.845.200,00	1.790.951.700,00	99,51	1.994.173.350,00	(203.221.650,00)
15	Adipala I	2.060.000.000,00	2.057.547.600,00	99,88	2.254.026.455,00	(196.478.855,00)
16	Adipala II	1.300.000.000,00	1.174.482.300,00	90,34	1.281.838.350,00	(107.356.050,00)
17	Maos	1.680.000.000,00	1.672.717.950,00	99,57	1.643.985.201,00	28.732.749,00
18	Sampang	1.929.986.685,00	1.684.010.925,00	87,26	1.706.254.660,00	(22.243.735,00)
19	Binangun	2.577.201.691,00	2.990.124.600,00	116,02	3.053.307.300,00	(63.182.700,00)
20	Nusawungu I	1.677.166.000,00	1.842.875.700,00	109,68	1.697.437.525,00	145.438.175,00
21	Nusawungu II	1.930.618.800,00	1.828.672.200,00	94,72	1.930.021.934,00	(101.349.734,00)
22	Sidareja	3.000.000.000,00	3.045.268.200,00	101,51	3.199.149.750,00	(153.881.550,00)
23	Cipari	3.000.000.000,00	2.861.983.800,00	95,40	3.135.435.600,00	(27.3451.800,00)
24	Kedungreja	3.192.000.000,00	3.289.301.350,00	103,05	3.429.002.250,00	(139.700.900,00)
25	Patimuan	2.376.000.000,00	2.169.668.550,00	91,32	2.177.366.551,00	(7.698.001,00)
26	Gandrungmangu I	2.805.600.000,00	2.597.924.800,00	92,60	2.792.273.300,00	(194.348.500,00)
27	Gandrungmangu II	2.129.380.000,00	1.634.312.200,00	76,75	1.832.377.200,00	(198.065.000,00)
28	Karangpucung I	2.200.000.000,00	2.141.850.600,00	97,36	2.326.841.922,00	(18.4991.322,00)
29	Karangpucung II	1.091.189.000,00	890.400.575,00	81,60	962.175.767,00	(71.775.192,00)
30	Majenang I	4.516.520.400,00	4.366.265.100,00	96,67	4.666.515.300,00	(300.250.200,00)
31	Majenang II	1.432.182.000,00	1.417.382.100,00	98,97	1.585.776.054,00	(168.393.954,00)
32	Cimanggu I	2.455.552.000,00	2.317.956.600,00	94,40	2.479.930.150,00	(161.973.550,00)
33	Cimanggu II	1.846.350.000,00	1.662.139.175,00	90,02	1.915.931.287,00	(253.792.112,00)
34	Wanareja I	2.743.507.200,00	2.720.815.200,00	99,17	2.912.126.456,00	(191.311.256,00)
35	Wanareja II	1.234.200.000,00	1.020.603.700,00	82,69	1.042.319.225,00	(21.715.525,00)
36	Dayeuhluhur I	1.642.960.000,00	1.392.691.550,0	84,77	1.719.815.750,00	(327.124.200,00)
37	Dayeuhluhur II	942.448.525,00	897.254.025,00	95,20	1.166.171.800,00	(268.917.775,00)
38	Kampunglaut	840.000.000,00	572.842.000,00	68,20	754.536.532,00	(181.694.532,00)
Jumlah		**76.025.454.581,00**	**73.065.646.375,00**	**96,11**	**78.073.783.269,00**	**(5.008.136.894,00)**

V.1.a.2) Pendapatan Transfer - LRA

Pendapatan Transfer merupakan pendapatan daerah yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Tengah, dengan realisasi dalam TA 2020 dan TA 2019 sebagai berikut:

Pendapatan Transfer		TA 2020			TA 2019	Naik/(Turun)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	(Rp)
1	Transfer Pem. Pusat-LRA	1.802.273.521.115,00	1.757.591.202.654,00	97,52	1.928.670.863.364,00	(171.079.660.710,00)
2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LRA	365.817.218.000,00	365.817.218.000,00	100	333.319.805.800,00	32.497.412.200,00
3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LRA	221.664.516.000,00	197.463.851.578,00	89,08	222.481.485.326,00	(25.017.633.748,00)
4	Bantuan Keuangan-LRA	27.767.000.000,00	25.350.873.000,00	91,30	32.961.441.000,00	(7.610.568.000,00)
Jumlah		**2.417.522.255.115,00**	**2.346.223.145.232,00**	**97,05**	**2.517.433.595.490,00**	**(171.210.450.258,00)**

Realisasi Pendapatan Transfer TA 2020 sebesar Rp2.346.223.145.232,00, yaitu 97,05% dari anggaran pada TA 2020 sebesar Rp2.417.522.255.115,00 dan 93,19% dari realisasi TA 2019 sebesar Rp2.517.433.595.490,00 yang dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

V.1.a.2)a) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA merupakan pendapatan daerah yang berasal dari Pemerintah Pusat yang meliputi Bagi Hasil Pajak-LRA, Bagi Hasil Sumber Daya Alam-LRA, Dana Alokasi Umum-LRA, Dana Alokasi Khusus Fisik-LRA, Dana Alokasi Khusus Non Fisik-LRA, dengan realisasi dalam TA 2020 dan TA 2019 sebagai berikut:

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA		TA 2020			TA 2019	Naik/(Turun) (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
1	Bagi Hasil Pajak-LRA	68.920.615.000,00	52.212.580.388,00	75,76	60.515.821.787,00	(8.303.241.399,00)
2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam – LRA	6.686.684.000,00	1.931.834.025,00	28,89	1.158.788.035,00	773.045.990,00
3	Dana Alokasi Umum-LRA	1.295.279.562.000,00	1.281.940.170.000,00	98,97	1.423.200.397.000,00	(141.260.227.000,00)
4	Dana Alokasi Khusus Fisik-LRA	88.484.457.000,00	78.604.415.067,00	88,83	112.757.938.381,00	(34.153.523.314,00)
5	Dana Alokasi Khusus Non Fisik-LRA	342.902.203.115,00	342.902.203.174,00	100	331.037.918.161,00	11.864.285.013,00
Jumlah		**1.802.273.521.115,00**	**1.757.591.202.654,00**	**97,52**	**1.928.670.863.364,00**	**(171.079.660.710,00)**

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2020 sebesar Rp1.757.591.202.654,00, yaitu 97,52% dari anggaran pada TA 2020 sebesar Rp1.802.273.521.115,00 dan 91,12% dari realisasi TA 2019 sebesar Rp1.928.670.863.364,00 yang dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

(1) Bagi Hasil Pajak - LRA

Penerimaan Bagi Hasil Pajak-LRA adalah sesuai dengan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) Menteri Keuangan RI. Realisasi Bagi Hasil Pajak – LRA TA 2020 sebesar Rp52.212.580.388,00, yaitu 75,76% dari anggaran pada TA 2020 sebesar Rp68.920.615.000,00 dan 86,28% dari realisasi TA 2019 sebesar Rp60.515.821.787,00. Rincian realisasi bagi hasil pajak dari Pemerintah Pusat TA 2020 dan TA 2019, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bagi Hasil Pajak-LRA		TA 2020			TA 2019	Naik/(Turun) (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
1	PBB sektor Pertambangan-LRA	8.257.515.000,00	7.400.539.785,00	89,62	8.720.397.476,00	(1.319.857.691,00)
2	PBB sektor Perkebunan-LRA	2.548.780.000,00	1.019.512.000,00	40,00	2.370.698.636,00	(1.351.186.636,00)
3	PBB sektor Perhutanan-LRA	3.075.001.000,00	3.568.854.932,00	116,06	2.397.231.720,00	1.171.623.212,00
4	Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 – LRA	48.282.240.000,00	34.058.509.236,00	70,54	40.538.289.299,00	(64.79.780.063,00)
5	Cukai Hasil Tembakau-LRA	6.757.079.000,00	6.165.164.435,00	91,24	6.489.204.656,00	(324.040.221,00)
Jumlah		**68.920.615.000,00**	**52.212.580.388,00**	**75,76**	**60.515.821.787,00**	**(8.303.241.399,00)**

(2) Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam-LRA

Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam pada TA 2020 sebesar Rp1.931.834.025,00, yaitu 28,89% dari anggaran pada TA 2020 sebesar Rp6.686.684.000,00 dan 166,71% dari

realisasi TA 2019 sebesar Rp1.158.788.035,00. Bagi hasil sumber daya alam dapat dirinci sebagai berikut:

Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam-LRA		TA 2020			TA 2019	Naik/(Turun) (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
1	Provisi Sumber Daya Hutan-LRA	2.823.392.000,00	317.257.920,00	11,24	0,00	317.257.920,00
2	Iuran Tetap/ Landrent-LRA	45.476.000,00	22.181.788,00	48,78	9.037.562,00	13.144.226,00
3	Iuran Eksploitasi dan iuran Eksploitasi (Royalty)-LRA	(17.045.000,00)	17.390.150,00	(102,02)	4.663.522,00	12.726.628,00
4	Pungutan Hasil Perikanan-LRA	0,00	788.276.289,00	0,00	590.155.800,00	198.120.489,00
	Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan - LRA	1.647.661.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi – LRA	2.058.924.000,00	56.090.685,00	2,72	95.052.100,00	(38.961.415,00)
6	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi – LRA	0,00	711.359.243,00	0,00	419.934.900,00	291.424.343,00
7	Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi – LRA	128.276.000,00	19.277.950,00	15,03	39.944.151,00	(20.666.201,00)
Jumlah		**6.686.684.000,00**	**1.931.834.025,00**	**28,89**	**1.158.788.035,00**	**773.045.990,00**

(3) Dana Alokasi Umum (DAU)-Pemerintah Pusat -LRA

Penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rician APBN Tahun 2019. Realisasi TA 2020 sebesar Rp1.281.940.170.000,00, yaitu 98,97% dari anggaran pada TA 2020 sebesar Rp1.295.279.562.000,00 dan 90,07% dari realisasi TA 2019 sebesar Rp1.423.200.217.000,00.

(4) Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK)-Pemerintah Pusat -LRA

Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Pemerintah Pusat diatur Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik. Realisasi dana DAK pada TA 2020 adalah sebesar Rp78.604.415.067,00, yaitu 88,83% dari anggaran pada TA 2020 sebesar Rp88.484.457.000,00 dan 69,71% dari realisasi TA 2019 sebesar Rp112.757.938.381,00. Realisasi Dana Lokasi Khusus TA 2020 terdiri dari:

Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK) - LRA		TA 2020			TA 2019	Naik/(Turun) (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
1	DAK Bidang Infrastruktur Jalan – LRA	0,00	0,00	0,00	22.641.014.566,00	(22.641.014.566,00)
2	DAK bidang Infrastruktur Irigasi-LRA	4.942.225.000,00	3.725.079.000,00	75,37	6.645.803.000,00	(2.920.724.000,00)
3	DAK Bidang Infrastruktur Air Minum - LRA	0,00	0,00	0,00	2.110.454.000,00	(2.110.454.000,00)
4	DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi- LRA	18.632.752.000,00	18.632.751.300,00	100	5.497.700.000,00	13.135.051.300,00
5	DAK Bidang Keluarga Berencana- LRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman – LRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	DAK bidang Kesehatan-LRA	31.133.932.000,00	24.992.833.187,00	80,28	38.882.315.171,00	(13.889.481.984,00)
8	DAK bidang Kelautan dan Perikanan-LRA	762.343.000,00	703.612.000,000	92,30	1.231.688.705,00	(528.076.705,00)
9	DAK Bidang Prasarana Pemerintahan - LRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	DAK Bidang Perdagangan-LRA	0,00	0,00	0,00	1.181.598.150,00	(1.181.598.150,00)
11	DAK Bidang Lingkungan Hidup – LRA	0,00	0,00	0,00	729.000.000,00	(729.000.000,00)
12	DAK Bidang Pertanian - LRA	1.638.400.000,00	1.604.993.700,00	97,96	5.835.262.040,00	(4.230.268.340,00)
13	DAK Bidang Pendidikan-LRA	30.465.510.000,00	28.945.145.880,00	95,01	28.003.102.749,00	942.043.131,00

Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK) - LRA		TA 2020			TA 2019	Naik/(Turun)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	(Rp)
14	DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat - LRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	DAK Bidang Kepariwisataan – LRA	909.295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		**88.484.457.000,00**	**78.604.415.067,00**	**88,83**	**112.757.938.381,00**	**(34.153.523.314,00)**

(5) Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK)-Pemerintah Pusat - LRA

Penerimaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK) Realisasi TA 2020 sebesar Rp342.902.203.174,00, yaitu 99,99% dari anggaran pada TA 2020 sebesar Rp342.902.203.115,00 dan 103,58% dari realisasi TA 2019 sebesar Rp331.037.918.161,00 dengan rincian sebagai berikut:

Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK) – LRA		TA 2020			TA 2019	Naik/(Turun)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	(Rp)
1	Tunjangan Profesi Guru PNSD-LRA	246.974.540.000,00	246.974.540.000,00	100	263.131.642.089,00	(16.157.102.089,00)
2	Tambahan Penghasilan Guru PNSD-LRA	672.000.000,00	672.000.000,00	100	303.962.500,00	368.037.500,00
3	Bantuan Oprasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini – LRA	21.817.200.000,00	21.817.200.000,00	100	21.841.200.000,00	(24.000.000,00)
4	Bantuan Operasional Kesehatan – LRA	49.435.176.604,00	57.250.987.604,00	115,81	28.882.291.790,00	28.368.695.814,00
5	Akreditasi Puskesmas – LRA	2.165.974.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Jaminan Persalinan – LRA	5.593.998.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Bantuan Operasional Keluarga Berencana – LRA	6.443.647.916,00	6.443.647.975,00	100	6.414.087.150,00	29.560.825,00
8	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan – LRA	5.304.814.945,00	5.304.814.945,00	100	4.125.898.632,00	1.178.916.313,00
9	Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan	330.864.800,00	330.864.800,00	100	5.717.100.000,00	(5.386.235.200,00)
10	Dana Pelayanan Kepariwisataan	417.358.000,00	417.358.000,00	100	621.736.000,00	(204.378.000,00)
11	Pengawasan Obat dan Makanan – LRA	55.839.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan – LRA	3.690.789.850,00	3.690.789.850,00	100	0,00	3.690.789.850,00
Jumlah		**342.902.203.115,00**	**342.902.203.174,00**	**99,99**	**331.037.918.161,00**	**11.864.285.013,00**

V.1.a.2)b) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya - LRA

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LRA TA 2020 sebesar Rp365.817.218.000,00, yaitu 100% dari anggaran pada TA 2020 sebesar Rp365.817.218.000,00 dan 109,75% dari realisasi TA 2019 sebesar Rp333.319.805.800,00. Realisasi pendapatan dari pemerintah pusat lainnya dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA		TA 2020			TA 2019	Naik/(Turun)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	(Rp)
1	Dana Insentif Daerah - LRA	71.923.322.000,00	71.923.322.000,00	100	46.363.857.000,00	25.559.465.000,00
2	Dana Desa - LRA	293.893.896.000,00	293.893.896.000,00	100	286.955.948.800,00	6.937.947.200,00
Jumlah		**365.817.218.000,00**	**365.817.218.000,00**	**100**	**333.319.805.800,00**	**32.497.412.200,00**

V.1.a.2)c) Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah-Lainnya - LRA

Realisasi pendapatan transfer pemerintah daerah lainnya TA 2020 hanya terdiri dari Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebesar Rp197.463.851.578,00 atau 89,08% dari anggarannya sebesar Rp221.664.516.000,00 dan 88,76% dari realisasi TA 2019 sebesar Rp222.481.485.326,00. Secara rinci Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebagai berikut:

Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA		TA 2020			TA 2019	Naik/(Turun)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	(Rp)
1	Bagi Hasil Dari Pajak	58..245.609.000,00	48.958.862.318,00	84,06	57.705.015.670,00	(8.746.153.352,00)

Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA		TA 2020			TA 2019	Naik/(Turun) (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
	Kendaraan Bermotor – LRA					
2	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor – LRA	39.704.679.000,00	26.253.861.143,00	66,12	43.123.568.302,00	(16.869.707.159,00)
3	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor – LRA	53.227.524.000,00	41.261.488.816,00	77,52	59.341.756.913,00	(18.080.268.097,00)
4	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan – LRA	1.266.059.000,00	1.383.235.039,00	109,26	1.207.623.638,00	175.611.401,00
5	Bagi Hasil dari Pajak Rokok – LRA	69.220.645.000,00	79.606.404.262,00	115,00	61.103.520.803,00	18.502.883.459,00
Jumlah		**221.664.516.000,00**	**197.463.851.578,00**	**89,08**	**222.481.485.326,00**	**(25.017.633.748,00)**

V.1.a.2)d) Bantuan Keuangan-LRA

Bantuan Keuangan - LRA terdiri dari Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya, yaitu dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp 25.350.873.000,00 yaitu 91,30% dari anggaran pada TA 2020 sebesar Rp27.767.000.000,00 dan 76,91% dari realisasi TA 2019 sebesar Rp32.961.441.000,00.

V.1.a.3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada TA 2020 sebesar Rp214.835.523.320,00, yaitu 104,63% dari anggaran pada TA 2020 sebesar Rp205.338.414.500,00 dan 112,43% dari realisasi TA 2019 sebesar Rp191.087.575.517,00, dengan rincian sebagai berikut :

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA		TA 2020			TA 2019	Naik/(Turun) (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
1	Pendapatan Hibah – LRA	205.338.414.500,00	214.835.523.320,00	104,63	191.087.575.517,00	23.747.947.803,00
2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya – LRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dana Desa – LRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		**205.338.414.500,00**	**214.835.523.320,00**	**104,63**	**191.087.575.517,00**	**23.747.947.803,00**

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya - LRA dan Dana Desa - LRA TA 2019 disajikan pada di Lain-lain Pendapatan yang Sah – LRA, namun Sesuai dengan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, pada TA 2020 disajikan sebagai Pendapatan Transfer - LRA sebagai berikut:

a) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya – LRA TA 2020 disajikan pada Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LRA sebesar Rp197.463.851.578,00,00 yang dijelaskan pada catatan nomor V.1.a.2)c);

b) Dana Desa - LRA TA 2020 disajikan pada Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya – LRA sebesar Rp293.893.896.000,00 yang dijelaskan pada catatan nomor V.1.a.2)b).

V.1.a.3)a) Pendapatan Hibah-LRA

Realisasi Pendapatan Hibah pada TA 2020 sebesar Rp214.835.523.320,00 yaitu 104,63% dari anggaran pada TA 2020 sebesar Rp205.338.414.500,00 dan 112,42% dari realisasi TA 2019 sebesar sebesar Rp191.087.575.517,00 yang secara rinci dijelaskan sebagai berikut.

Pendapatan Hibah - LRA		TA 2020			TA 2019	Naik/(Turun) (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah – LRA	8.000.000.000,00	16.809.907.746,00	210,12	21.967.390.590,00	(5.157.482.844,00)
2	Pendapatan Dana BOS	197.338.414.500,00	197.759.461.670,00	100,22	169.120.184.927,00	28.639.276.743,00
3	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri – LRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan - LRA	0,00	266.153.904,00	0,00	0,00	266.153.904,00
Jumlah		**205.338.414.500,00**	**214.835.523.320,00**	**104,63**	**191.087.575.517,00**	**23.747.947.803,00**

V.1.a.3)a)1. Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LRA

Realisasi Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat TA 2020 sebesar Rp16.809.907.746,00 yaitu 210,12% dari anggaran pada TA 2020 sebesar Rp8.000.000.000,00 dan 76,52% dari realisasi TA 2019 sebesar Rp21.967.390.590,00.

V.1.a.3)a)2. Pendapatan Hibah dari Kelompok masyarakat/Perorangan – LRA

Realisasi Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dana BOS TA 2020 sebesar Rp266.153.904, yaitu 0,00% dari anggaran pada TA 2020 sebesar Rp0,00 dan realisasi TA 2019 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan-LRA	Realisasi TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)
1	Puskesmas Cilacap Tengah I	10.300.000,00	0,00
2	Puskesmas Cilacap Tengah II	5.700.000,00	0,00
3	Puskesmas Cilacap Utara I	4.672.000,00	0,00
4	Puskesmas Dayehluhur I	9.000.000,00	0,00
5	Puskesmas Dayehluhur II	5.000.000,00	0,00
6	Puskesmas Gandrungmangu I	5.000.000,00	0,00
7	Puskesmas Gandrungmangu II	5.000.000,00	0,00
8	Puskesmas Jeruklegi I	15.000.000,00	0,00
9	Puskesmas Kampung Laut	6.000.000,00	0,00
10	Puskesmas Kedungreja	5.700.000,00	0,00
11	Puskesmas Kroya I	5.000.000,00	0,00
12	Puskesmas Maos	10.651.000,00	0,00
13	Puskesmas Maos	1.900.000,00	0,00
14	Puskesmas Wanareja II	5.000.000,00	0,00
15	BLUD RSUD Cilacap	3.630.904,00	0,00
16	Dinas Sosial	8.500.000,00	0,00
17	Sekretariat Daerah	157.000.000,00	0,00
18	Kecamatan Patimuan	3.100.000,00	0,00
Jumlah		**266.153.904,00**	**0,00**

V.1.a.3)a)3. Pendapatan Dana BOS

Realisasi Pendapatan Dana BOS TA 2020 sebesar Rp197.759.461.670,00, yaitu 100,22% dari anggaran pada TA 2020 sebesar Rp197.338.414.500,00 dan 116,94% dari realisasi TA 2019 sebesar Rp169.120.184.927,00 dengan rincian sebagai berikut :

Pendapatan Dana BOS - LRA		TA 2020			TA 2019	Naik/(Turun) (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
1	Pendapatan Dana BOS Wilayah Kecamatan Adipala – LRA	8.783.247.343,00	8.786.053.084,00	100,03	7.730.920.000,00	1.055.133.084,00
2	Pendapatan Dana BOS Wilayah Kecamatan Bantarsari – LRA	7.799.391.600,00	7.816.661.600,00	100,22	6.076.144.385,00	1.740.517.215,00
3	Pendapatan Dana BOS Wilayah Kecamatan Binangun – LRA	6.825.930.061,00	6.830.023.133,00	100,06	5.797.080.000,00	1.032.943.133,00
4	Pendapatan Dana BOS Wilayah Kecamatan Cilacap Selatan – LRA	8.328.115.331,00	8.306.250.000,00	99,74	8.385.984.750,00	(79.734.750,00)

Pendapatan Dana BOS - LRA		TA 2020			TA 2019	Naik/(Turun)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	(Rp)
5	Pendapatan Dana BOS Wilayah Kecamatan Cilacap Tengah – LRA	8.416.700.000,00	8.340.780.000,00	99,10	8.085.400.000,00	255.380.000,00
6	Pendapatan Dana BOS Wilayah Kecamatan Cilacap Utara – LRA	7.314.214.471,00	7.297.600.000,00	99,77	7.206.040.000,00	91.560.000,00
7	Pendapatan Dana BOS Wilayah Kecamatan Cimanggu – LRA	10.463.971.000,00	10.511.641.000,00	100,46	8.366.880.000,00	2.144.761.000,00
8	Pendapatan Dana BOS Wilayah Kecamatan Cipari – LRA	6.866.085.000,00	6.877.975.000,00	100,17	5.405.155.000,00	1.472.820.000,00
9	Pendapatan Dana BOS Wilayah Kecamatan Dayeuhluhur – LRA	6.209.400.000,00	6.436.510.000,00	103,66	4.438.340.000,00	1.998.170.000,00
10	Pendapatan Dana BOS Wilayah Kecamatan Gandrungmangu – LRA	10.573.606.000,00	10.587.876.000,00	100,13	8.756.751.809,00	1.831.124.191,00
11	Pendapatan Dana BOS Wilayah Kecamatan Jeruklegi – LRA	7.929..160.000,00	7.940.880.000,00	100,15	6.918.926.750,00	1.021.953.250,00
12	Pendapatan Dana BOS Wilayah Kecamatan Kawunganten – LRA	8.334.733.807,00	8.336.033.807,00	100,02	7.207.753.000,00	1.128.280.807,00
13	Pendapatan Dana BOS Wilayah Kecamatan Karangpucung – LRA	9.434.900.000,00	9.466.430.000,00	100,33	7.290.650.817,00	2.175.779.183,00
14	Pendapatan Dana BOS Wilayah Kecamatan Kampunglaut – LRA	2.655.550.000,00	2.648.643.000,00	99,74	1.744.283.904,00	904.359.096,00
15	Pendapatan Dana BOS Wilayah Kecamatan Kedungreja – LRA	9.053.350.000,00	9.073.800.000,00	100,23	7.285.220.000,00	1.788.580.000,00
16	Pendapatan Dana BOS Wilayah Kecamatan Kesugihan – LRA	11.033.665.251,00	11.074.871.000,00	100,37	9.838.655.000,00	1.236.216.000,00
17	Pendapatan Dana BOS Wilayah Kecamatan Kroya – LRA	11.653.730.000,00	11.674.420.000,00	100,18	10.033.520.000,00	1.640.900.000,00
18	Pendapatan Dana BOS Wilayah Kecamatan Majenang – LRA	13.724.931.000,00	13.755.971.000,00	100,23	11.404.714.000,00	2.351.257.000,00
19	Pendapatan Dana BOS Wilayah Kecamatan Maos – LRA	5.261.421.500,00	5.279.821.046,00	100,35	5.373.025.805,00	(93.204.759,00)
20	Pendapatan Dana BOS Wilayah Kecamatan Nusawungu – LRA	9.053.028.496,00	9.089.808.800,00	100,41	7.871.280.000,00	1.218.528.800,00
21	Pendapatan Dana BOS Wilayah Kecamatan Patimuan – LRA	4.945.201.640,00	4.948.439.200,00	100,07	4.264.720.000,00	683.719.200,00
22	Pendapatan Dana BOS Wilayah Kecamatan Sampang – LRA	4.734.850.000,00	4.740.970.000,00	100,13	4.146.800.000,00	594.170.000,00
23	Pendapatan Dana BOS Wilayah Kecamatan Sidareja – LRA	6.613.250.000,00	6.618.722.000,00	100,08	5.820.216.707,00	798.505.293,00
24	Pendapatan Dana BOS Wilayah Kecamatan Wanareja – LRA	11.329.982.000,00	11.319.282.000,00	99,91	9.671.723.000,00	1.647.559.000,00
Jumlah		**197.338.414.500,00**	**197.759.461.670,00**	**100,22**	**169.120.184.927,00**	**28.639.276.743,00**

V.1.b.BELANJA

Belanja Daerah meliputi Belanja Operasi (BO), Belanja Modal (BM), dan Belanja Tak Terduga (BTT). Anggaran dan realisasi belanja daerah TA 2020 serta realisasi TA 2019 adalah sebagai berikut:

Belanja Daerah		TA 2020			TA 2019	Naik/(Turun)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	(Rp)
1	Belanja Operasi (BO)	2.303.053.385.597,00	2.118.332.170.798,00	91,98	2.116.419.108.705,00	1.913.062.093,00
2	Belanja Modal (BM)	529.149.845.492,00	462.431.933.784,00	87,39	663.321.198.006,20	(200.889.264.222,2,00)
3	Belanja Tak Terduga (BTT)	122.812.201.348,00	26.975.323.078,00	21,96	0,00	26.975.323.078,00
Jumlah		**2.955.015.432.437,00**	**2.607.739.427.660,00**	**88,25**	**2.779.740.306.711,20**	**(172.000.879.051,20)**

Jumlah Realisasi Belanja Daerah pada TA 2020 sebesar Rp2.607.739.427.660,00, yaitu 88,25% dari anggaran pada TA 2020 sebesar Rp2.955.015.432.437,00 dan 93,81% dari realisasi TA 2019 sebesar Rp2.779.740.306.711,20 dapat dijelaskan sebagai berikut:

V.1.b.1) Belanja Operasi (BO)

Belanja Operasi (BO) Pemerintah Kabupaten Cilacap TA 2020 dan TA 2019 meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi /Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten /Kota dan Pemerintahan Desa, yaitu sebagai berikut:

Belanja Operasi (BO)		TA 2020			TA 2019	Naik/(Turun) (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
1	Belanja Pegawai	1.206.226.215.697,00	1.145.443.814.425,00	94,96	1.193.972.479.225,00	(48.528.664.800,00)
2	Belanja Barang dan Jasa	968.780.928.940,00	881.429.804.126,00	90,98	857.565.629.480,00	23.864.174.646,00
3	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	400.000.000,00	(400.000.000,00)
4	Belanja Hibah	40.169.512.960,00	40.366.842.247,00	100,49	58.596.950.000,00	(18.230.107.753,00)
5	Belanja Bantuan Sosial	87.876.728.000,00	51.091.710.000,00	58,14	5.884.050.000,00	45.207.660.000,00
Jumlah		**2.303.053.385.597,00**	**2.118.332.170.798,00**	**91,98**	**2.116.419.108.705,00**	**1.913.062.093,00**

Realisasi Belanja Operasi pada TA 2020 sebesar Rp2.118.332.170.798,00, yaitu 91,98% dari anggaran pada TA 2020 sebesar Rp2.303.053.385.597,00 dan 100,09% dari realisasi TA 2019 sebesar Rp2.116.419.108.705,00. Belanja Operasi dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

V.1.b.1)a) Belanja Pegawai (BP)

Belanja Pegawai (BP) realisasi seluruhnya dalam TA 2020 sebesar Rp1.145.443.814.425,00, yaitu 94,96% dari anggaran pada TA 2020 sebesar Rp1.206.226.215.697,00 dan 95,94% dari realisasi TA 2019 sebesar Rp1.193.972.479.225,00.

Realisasi belanja pegawai pada TA 2020 dan TA 2019 tersebut, dapat dirinci lebih lanjut sebagai berikut:

Belanja Pegawai:		TA 2020			TA 2019	Naik/(Turun) (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
1	Gaji dan tunjangan	1.062.159.699.705,00	1.013.734.728.443,00	95,44	781.290.737.468,00	232.443.990.975,00
2	Tambahan Penghasilan PNS	123.478.668.000,00	112.334.589.305,00	90,97	392.651.071.470,00	(280.316.482.165,00)
3	Belanja Penerimaan Lainnya pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	9.901.070.785,00	9.577.300.000,00	96,73	9.417.000.000,00	160.300.000,00
4	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	4.317.781.765,00	4.103.058.249,00	95,03	8.878.659.045,00	(4.775.600.796,00)
5	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	507.769.687,00	369.603.944,00	72,79	780.122.242,00	(410.518.298,00)
6	Uang lembur	4.311.000,00	0,00	0,00	954.889.000,00	(954.889.000,00)
7	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	5.856.914.755,00	5.324.534.484,00	90,91	0,00	5.324.534.484,00
Jumlah		**1.206.226.215.697,00**	**1.145.443.814.425,00**	**94,96**	**1.193.972.479.225,00**	**(48.528.664.800,00)**

(1) Gaji dan Tunjangan

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan pada TA 2020 sebesar Rp1.013.734.728.443,00, yaitu 95,44% dari anggaran pada TA 2020 sebesar Rp1.062.159.699.705,00 dan 77,07% dari realisasi TA 2019 sebesar Rp781.290.737.468,00 dapat dirinci lebih lanjut sebagai berikut:

Belanja Gaji dan Tunjangan-LRA		TA 2020			TA 2019	Naik/(Turun) (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
1	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	589.991.298.344,00	564.344.077.952,00	95,65	599.686.224.238,00	35.342.146.286,00
2	Tunjangan Keluarga	56.350.615.800,00	51.811.441.255,00	91,94	55.414.232.713,00	(3.602.791.458,00)
3	Tunjangan Jabatan	10.763.480.500,00	10.035.189.650,00	93,23	10.018.263.000,00	16.926.650,00
4	Tunjangan Fungsional	45.425.870.000,00	41.496.825.500,00	91,35	44.546.656.000,00	(3.049.830.500,00)
5	Tunjangan Fungsional Umum	8.107.130.000,00	6.343.984.500,00	78,25	6.740.175.000,00	(396.190.500,00)
6	Tunjangan Beras	27.503.966.702,00	24.837.163.200,00	90,30	26.547.490.396,00	(1.710.327.196,00)
7	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.551.312.784,00	4.052.917.316,00	73,01	4.055.672.450,00	(2.755.134,00)
8	Pembulatan Gaji	16.189.414,00	7.067.287,00	43,65	8.505.420,00	(1.438.133,00)
9	Iuran Jaminan Kesehatan	44.215.372.200,00	38.195.880.757,00	86,39	16.861.806.841,00	21.334.073.916,00
10	Uang Paket	95.508.000,00	93.187.500,00	97,57	94.185.000,00	(997.500,00)
11	Tunjangan Badan Musyawarah	33.799.500,00	32.520.600,00	96,22	29.247.225,00	3.273.375,00
12	Tunjangan Komisi	61.387.200,00	60.199.650,00	98,07	55.540.800,00	4.658.850,00
13	Tunjangan Badan Anggaran	37.088.100,00	31.698.450,00	85,47	29.978.025,00	1.720.425,00
14	Tunjangan Badan Kehormatan	7.856.100,00	7.308.000,00	93,02	7.201.425,00	106.575,00
15	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya	206.085.600,00	44.091.600,00	21,39	44.989.875,00	(898.275,00)

Belanja Gaji dan Tunjangan-LRA		TA 2020			TA 2019	Naik/(Turun) (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
16	Tunjangan Perumahan	5.763.492.000,00	5.585.711.000,00	96,92	5.365.000.000,00	220.711.000,00
17	Uang Jasa Pengabdian	477.540.000,00	6.300.000,00	1,32	460.215.000,00	(453.915.000,00)
18	Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000,00	393.120.000,00	100,00	360.360.000,00	32.760.000,00
19	Asuransi Tenaga Kerja	5.034.392.000,00	4.640.021.960,00	92,17	4.923.294.060,00	(283.272.100,00)
20	Tunjangan Transportasi	4.636.800.000,00	4.544.400.000,00	98,01	4.586.400.000,00	(42.000.000,00)
21	Tunjangan Reses	2.205.000.000,00	2.102.100.000,00	95,33	1.455.300.000,00	646.800.000,00
22	Tambahan Penghasilan Guru PNSD	1.366.825.000,00	1.260.012.500,00	92,19	0,00	1.260.012.500,00
23	Tunjangan Profesi Guru PNSD	253.915.570.461,00	253.809.509.766,00	99,96	0,00	253.809.509.766,00
Jumlah		**1.062.159.699.705,00**	**1.013.734.728.443,00**	**95,44**	**781.290.737.468,00**	**232.443.990.975,00**

(2) Tambahan Penghasilan PNS

Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan PNS pada TA 2020 sebesar Rp112.334.589.305,00, yaitu 90,97% dari anggaran pada TA 2020 sebesar Rp123.478.668.000,00 dan 95,36% dari realisasi TA 2019 sebesar Rp392.651.071.470,00 dapat dirinci lebih lanjut sebagai berikut:

Belanja Tambahan Penghasilan PNS-LRA		TA 2020			TA 2019	Naik/(Turun) (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
1	Tambahan Penghasilan Guru PNSD	0,00	0,00	0,00	1.138.100.510,00	(1.138.100.510,00)
2	Tunjangan Profesi Guru PNSD	0,00	0,00	0,00	281.722.174.691,00	(281.722.174.691,00)
3	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif	0,00	0,00	0,00	109.462.832.269,00	109.462.832.269,00)
4	Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	48.674.176.000,00	44.315.468.322,00	91,05	0,00	44.315.468.322,00)
5	Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas	161.064.000,00	137.488.410,00	85,36	0,00	137.488.410,00
6	Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja	4.818.374.000,00	4.405.408.259,00	91,43	0,00	4.405.408.259,00
7	Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi	216.096.000,00	216.096.000,00	100	0,00	216.096.000,00
8	Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja	69.097.854.000,00	62.947.380.314,00	91,10	0,00	62.947.380.314,00
9	Uang Makan	511.104.000,00	312.748.000,00	61,19	327.964.000,00	(15.216.000,00)
Jumlah		**123.478.668.000,00**	**112.334.589.305,00**	**90,97**	**392.651.071.470,00**	**(280.316.482.165,00)**

(3) Belanja Penerimaan Lainnya pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH

Realisasi Belanja Penerimaan Lainnya pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH pada TA 2020 sebesar Rp9.577.300.000,00, yaitu 96,73% dari anggaran pada TA 2020 sebesar Rp9.901.070.785,00 dan 110,43% dari realisasi TA 2019 sebesar Rp9.417.000.000,00 dapat dirinci lebih lanjut sebagai berikut:

Belanja Penerimaan Lainnya pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH -LRA		TA 2020			TA 2019	Naik/(Turun) (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
1	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	8.982.070.785,00	8.658.300.000,00	96,40	8.673.000.000,00	(14.700.000,00)
2	Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH	919.000.000,00	919.000.000,00	100	744.000.000,00	175.000.000,00
Jumlah		**9.901.070.785,00**	**9.577.300.000,00**	**96,73**	**9.417.000.000,00**	**160.300.000,00**

(4) Insentif Pemungutan Pajak Daerah

Realisasi Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah pada TA 2020 sebesar Rp4.103.058.249,00, yaitu 95,03% dari anggaran pada TA 2020 sebesar Rp4.317.781.765,00 dan 216,40% dari

realisasi TA 2019 sebesar Rp8.878.659.045,00 dapat dirinci lebih lanjut sebagai berikut:

Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah -LRA		TA 2020			TA 2019	Naik/(Turun) (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
1	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hotel	136.843.750,00	109.618.750,00	80,11	197.428.512,00	(87.809.762,00)
2	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Restoran	86.650.000,00	80.737.500,00	93,18	133.617.723,00	(52.880.223,00)
3	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hiburan	29.850.000,00	23.222.500,00	77,80	51.216.891,00	(27.994.391,00)
4	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Reklame	47.625.000,00	46.937.500,00	98,56	81.815.314,00	(34.877.814,00)
5	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Penerangan Jalan	1.684.062.500,00	1.626.437.500,00	96,58	3.291.553.489,00	(1.665.115.989,00)
6	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Parkir	12.128.125,00	11.839.375,00	97,62	16.519.110,00	(4.679.735,00)
7	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Tanah	15.968.750,00	15.625.000,00	97,85	30.474.212,00	(14.849.212,00)
8	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Sarang Burung Walet	0,00	0,00	0,00	185.448,00	(185.448,00)
9	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	255.750.000,00	244.062.500,00	95,43	1.181.744.818,00	(937.682.318,00)
10	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	1.590.250.000,00	1.555.510.351,00	97,82	3.079.476.846,00	(1.523.966.495,00)
11	Insentif Pemungutan Pajak Daerah – BPHTB	458.653.640,00	389.067.273,00	84,83	814.626.682,00	(425.559.409,00)
Jumlah		**4.317.781.765,00**	**4.103.058.249,00**	**95,03**	**8.878.659.045,00**	**(4.775.600.796,00)**

(5) Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

Realisasi Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah pada TA 2020 sebesar Rp369.603.944,00, yaitu 72,79% dari anggaran pada TA 2020 sebesar Rp507.769.687,00 dan 47,38% dari realisasi TA 2019 sebesar Rp780.122.242,00 dapat dirinci lebih lanjut sebagai berikut:

Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah -LRA		TA 2020			TA 2019	Naik/(Turun) (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
1	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kesehatan	1.800.000,00	1.500.000,00	83,33	220.781.436,00	(219.281.436,00)
2	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	10.714.000,00	0,00	0,00	29.500.000,00	(29.500.000,00)
3	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	76.000,00	59.375,00	78,13	750.000,00	(690.625,00)
4	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	8.024.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pasar	184.900.000,00	150.000.000,00	81,12	0,00	150.000.000,00
6	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengujian Kendaraan Bermotor – LRA	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	184.000,00	140.750,00	76,49	846.925,00	(706.175,00)
8	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengendalian Menara Telekomunikasi	5.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah	9.713.316,00	1.963.528,00	20,21	98.384.198,00	(96.420.670,00)
10	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Terminal	1.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Khusus Parkir	5.458.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Rekreasi dan Olah raga	1.345.600,00	0,00	0,00	34.375.000,00	(34.375.000,00)
13	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Mendirikan Bangunan	270.000.000,00	215.940.291,00	79,98	210.530.231,00	5.410.060,00
14	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga	3.024.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah -LRA		TA 2020			TA 2019	Naik/(Turun) (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
	Kerja Asing (IMTA)					
15	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	15.750.000,00	(15.750.000,00)
16	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	0,00	0,00	0,00	50.526.010,00	(50.526.010,00)
17	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	47.525.099,00	(47.525.099,00)
18	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah – Terminal	0,00	0,00	0,00	14.436.002,00	(14.436.002,00)
19	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Khusus Parkir	0,00	0,00	0,00	29.953.106,00	(29.953.106,00)
20	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kepelabuhan	0,00	0,00	0,00	2.489.872,00	(2.489.872,00)
21	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Trayek	0,00	0,00	0,00	1.249.263,00	(1.249.263,00)
22	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Tera/Tera Ulang – LRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengendalian Menara Telekomunikasi - LRA	0,00	0,00	0,00	23.025.100,00	(23.025.100,00)
Jumlah		**507.769.687,00**	**369.603.944,00**	**72,79**	**780.122.242,00**	**(410.518.298,00)**

(6) Uang lembur

Realisasi Belanja Uang Lembur pada TA 2020 sebesar Rp0,00, yaitu 0% dari anggaran pada TA 2020 sebesar Rp4.311.000,00 dan 0% dari realisasi TA 2019 sebesar Rp954.889.000,00 dapat dirinci lebih lanjut sebagai berikut :

Belanja Uang Lembur -LRA		TA 2020			TA 2019	Naik/(Turun) (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
1	Belanja Uang Lembur PNS	669.000,00	0,00	0,00	581.331.000,00	(581.331.000,00)
2	Belanja Uang Lembur Non PNS	3.642.000,00	0,00	0,00	373.558.000,00	(373.558.000,00)
Jumlah		**4.311.000,00**	**0,00**	**0,00**	**954.889.000,00**	**(954.889.000,00)**

(7) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya

Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya pada TA 2020 sebesar Rp5.324.534.484,00, yaitu 90,91% dari anggaran pada TA 2020 sebesar Rp5.856.914.755,00 dan 0% dari realisasi TA 2019 sebesar Rp0,00 dapat dirinci lebih lanjut sebagai berikut :

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya -LRA		TA 2020			TA 2019	Naik/(Turun) (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
1	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Reklame	54.375.000,00	51.876.917,00	95,41	0,00	51.876.917,00
2	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Air Tanah	19.031.250,00	17.890.458,00	94,01	0,00	17.890.458,00
3	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan	2.001.000.000,00	1.998.225.300,00	99,86	0,00	1.998.225.300,00
4	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Hotel	171.281.250,00	98.207.250,00	57,34	0,00	98.207.250,00
5	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Restoran	113.100.000,00	96.321.750,00	85,17	0,00	96.321.750,00
6	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Hiburan	39.150.000,00	21.440.793,00	54,77	0,00	21.440.793,00
7	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	2.128.437.500,00	1.964.575.834,00	92,30	0,00	1.964.575.834,00
8	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	674.250.000,00	635.102.250,00	94,19	0,00	635.102.250,00
9	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Parkir	15.496.875,00	14.545.105,00	93,86	0,00	14.545.105,00
10	Belanja Insentif Pemungutan BPHTB	615.995.959,00	425.973.827,00	69,15	0,00	425.973.827,00
11	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kesehatan	450.000,00	375.000,00	83,33	0,00	375.000,00
12	Belanja Insentif Pemungutan	4.383.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya -LRA		TA 2020			TA 2019	Naik/(Turun) (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
	Retribusi Daerah - Pelayanan Persampahan/ Kebersihan					
13	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	2.006.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pasar	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengujian Kendaraan Bermotor	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengendalian Menara Telekomunikasi	1.312.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah	2.303.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Terminal	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Khusus Parkir	1.364.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Rekreasi dan Olah raga	336.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Mendirikan Bangunan	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Perpanjangan IMTA	756.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		**5.856.914.755,00**	**5.324.534.484,00**	**90,91**	**0,00**	**5.324.534.484,00**

V.1.b.1)b) Belanja Barang dan Jasa (BBJ)

Realisasi Belanja Barang dan Jasa pada TA 2020 sebesar Rp881.429.804.126,00, yaitu 90,98% dari anggaran pada TA 2020 sebesar Rp968.780.928.940,00 dan 102,78% dari realisasi TA 2019 sebesar Rp857.565.629.480,00, dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Barang dan Jasa		TA 2020			TA 2019	Naik/(Turun) (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
1	Belanja bahan pakai habis	16.034.579.449,00	14.828.522.664,00	92,48%	22.232.586.486,00	(7.404.063.822,00)
2	Belanja bahan/material	30.908.076.963,65	27.022.584.230,00	87,43%	16.014.020.595,00	11.008.563.635,00
3	Belanja jasa kantor	127.440.910.938,00	103.744.159.607,00	81,41%	144.054.240.482,00	(40.310.080.875,00)
4	Belanja premi asuransi	40.852.329.295,00	33.221.810.444,00	81,32%	30.457.497.507,00	2.764.312.937,00
5	Belanja perawatan kend. Bermotor	11.120.574.367,00	10.453.747.109,00	94,00%	12.215.015.337,00	(1.761.268.228,00)
6	Belanja cetak dan penggandaan	14.292.298.800,00	12.412.996.194,00	86,85%	14.927.311.315,00	(2.514.315.121,00)
7	Belanja sewa rumah/gedung/ gudang/ parkir	2.033.242.000,00	1.362.485.006,00	67,01%	2.662.916.929,00	(1.300.431.923,00)
8	Belanja sewa sarana mobilitas	627.020.000,00	282.150.000,00	45,00%	1.100.070.000,00	(817.920.000,00)
9	Belanja Sewa Alat Berat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor	1.088.282.000,00	747.322.000,00	68,67%	3.559.865.324,00	(2.812.543.324,00)
11	Belanja makan dan minuman	32.518.965.505,00	28.100.227.163,00	86,41%	40.026.073.745,00	(11.925.846.582,00)
12	Belanja pakaian dinas dan atributnya	474.700.000,00	474.351.750,00	99,93%	1.762.934.600,00	(1.288.582.850,00)
13	Belanja pakaian kerja	576.075.050,00	564.376.250,00	97,97%	360.496.100,00	203.880.150,00
14	Belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu	551.405.000,00	540.780.000,00	98,07%	3.593.409.351,00	(3.052.629.351,00)
15	Belanja perjalanan dinas	40.121.348.779,00	31.347.808.103,00	78,13%	47.652.766.575,00	(16.304.958.472,00)
16	Belanja Pemeliharaan	23.314.654.812,35	22.972.114.187,00	98,53%	24.809.729.398,00	(1.837.615.211,00)
17	Belanja Jasa Konsultasi	1.515.349.850,00	984.022.770,00	64,94%	5.295.914.772,00	(4.311.892.002,00)
18	Belanja Barang yang akan diserahkan Kepada Masyarakat/	20.331.339.800,00	17.355.662.681,00	85,36%	4.667.689.948,00	12.687.972.733,00

Belanja Barang dan Jasa		TA 2020			TA 2019	Naik/(Turun) (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
	Pihak Ketiga					
19	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	87.000.000,00	75.600.000,00	86,90%	96.200.000,00	(20.600.000,00)
20	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan Teknis PNS	8.804.177.750,00	7.130.863.856,00	80,99%	18.342.025.220,00	(11.211.161.364,00)
21	Belanja Honorarium PNS	36.073.905.945,00	31.922.079.150,00	88,49%	32.050.718.050,00	(128.638.900,00)
22	Belanja Honorarium Non PNS	78.863.184.625,00	77.566.551.569,00	98,36%	82.312.806.420,00	(4.746.254.851,00)
23	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat	1.520.000.000,00	1.505.800.000,00	99,07%	1.981.250.000,00	(475.450.000,00)
24	Belanja Pegawai Dana BOS	60.628.537.230,00	59.954.928.603,00	98,89%	24.194.398.914,00	35.760.529.689,00
25	Belanja Barang dan Jasa Dana BOS	105.974.934.380,00	101.679.266.499,00	95,95%	107.162.860.088,00	()5.483.593.589,00)
26	Belanja yang bersumber dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional	0,00	0,00	0,00	17.998.586.249,00	(17.998.586.249,00)
27	Belanja Pegawai BLUD RSUD	59.172.410.000,00	57.635.374.420,00	97,40%	62.413.855.548,00	(4.778.481.128,00
28	Belanja Barang dan Jasa BLUD rumah sakit	214.482.305.451,00	199.490.243.518,00	93,01%	107.200.151.502,00	92.290.092.016,00
29	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/ Masyarakat	37.445.895.950,00	36.328.966.372,00	97,02%	26.491.247.225,00	9.837.719.147,00
30	Belanja Bantuan Sosial Barang Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/ Masyarakat	1.398.950.000,00	1.269.162.980,00	90,72%	1.404.746.800,00	(135.583.820,00)
31	Belanja Hadiah Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga	528.475.000,00	455.847.001,00	86,26%	524.245.000,00	(68.397.999,00)
Jumlah		**968.780.928.940,00**	**881.429.804.126,00**	**90,98**	**857.565.629.480,00**	**23.864.174.646,00**

(1) Belanja Bahan Pakai Habis

Realisasi Belanja Bahan Pakai Habis pada TA 2020 sebesar Rp14.828.522.664,00, yaitu 92,48% dari anggaran pada TA 2020 sebesar Rp16.034.579.449,00 dan 66,70% dari realisasi TA 2019 sebesar Rp22.232.586.486,00 dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Bahan Pakai Habis -LRA		TA 2020			TA 2019	Naik/(Turun) (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
1	Alat Tulis Kantor	5.046.866.665,00	4.772.476.082,00	94,56	6.126.979.598,00	(1.354.503.516,00)
2	Dokumen/Administrasi Tender	3.094.650,00	3.094.650,00	100,00	6.017.450,00	(2.922.800,00)
3	Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.382.613.134,00	2.322.705.770,00	97,49	1.807.445.383,00	515.260.387,00
4	Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	596.701.150,00	458.750.921,00	76,88	401.600.100,00	57.150.821,00
5	Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	4.546.175.750,00	4.136.575.839,00	90,99	2.003.209.044,00	2.133.366.795,00
6	Bahan Bakar Minyak/Gas	2.655.862.900,00	2.412.774.102,00	90,85	1.753.089.174,00	659.684.928,00
7	Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	36.153.900,00	34.929.600,00	96,61	67.907.700,00	(32.978.100,00)
8	Pengisian Tabung Gas	203.964.600,00	187.113.400,00	91,74	221.617.000,00	(34.503.600,00)
9	Bahan Pakai Habis Lainnya	0,00	0,00	0,00	9.416.460.462,00	(9.416.460.462,00)
10	Dokumentasi	232.148.700,00	196.681.100,00	84,72	428.260.575,00	(231.579.475,00)
11	Dekorasi	330.998.000,00	303.421.200,00	91,67	0,00	303.421.200,00
Jumlah		**16.034.579.449,00**	**14.828.522.664,00**	**92,48%**	**22.232.586.486,00**	**(7.404.063.822,00)**

(2) Belanja Bahan Material

Realisasi Belanja Bahan Material pada TA 2020 sebesar Rp27.022.584.230,00, yaitu 87,43% dari anggaran pada TA 2020 sebesar Rp30.908.076.963,65 dan 168,74% dari realisasi TA 2019 sebesar Rp16.014.020.595,00 dapat dirinci lebih lanjut sebagai berikut :

Belanja Bahan/Material -LRA		TA 2020			TA 2019	Naik/(Turun) (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
1	Bahan Baku Bangunan	2.707.071.589,65	2.495.630.665,00	92,19	2.429.877.913,00	65.752.752,00
2	Bahan/Bibit Tanaman	408.482.500,00	404.397.000,00	99,00	312.450.200,00	91.946.800,00
3	Bibit Ternak	259.500.000,00	159.270.000,00	61,38	140.045.000,00	19.225.000,00
4	Bahan obat-obatan	19.395.458.795,00	16.400.885.913,00	84,56	7.908.405.745,00	8.492.480.168,00
5	Bahan Kimia dan pupuk	738.074.800,00	725.489.830,00	98,29	744.910.145,00	(19.420.315,00)
6	Belanja Persediaan Makanan Pokok	3.366.578.100,00	3.253.446.100,00	96,64	880.487.900,00	2.372.958.200,00

Belanja Bahan/Material -LRA		TA 2020			TA 2019	Naik/(Turun) (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
7	Bahan /Material Lainnya	0,00	0,00	0,00	3.484.861.692,00	(3.484.861.692,00)
8	Bahan untuk Pendidikan	233.041.500,00	207.512.500,00	89,05	112.982.000,00	540.704.167,00
9	Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	590.656.850,00	540.704.167,00	91,54	0,00	218.123.125,00
10	Peralatan dan Perlengkapan Laboratorium	218.557.354,00	218.123.125,00	99,80	0,00	315.353.200,00
11	Pakan Ternak	359.123.600,00	315.353.200,00	87,81	0,00	242.600.000,00
12	Peralatan dan Perlengkapan Olahraga	243.300.000,00	242.600.000,00	99,71	0,00	2.059.171.730,00
13	Peralatan dan Perlengkapan Kesehatan	2.388.231.875,00	2.059.171.730,00	86,22	0,00	540.704.167,00
Jumlah		**30.908.076.963,65**	**27.022.584.230,00**	**87,43**	**16.014.020.595,00**	**11.008.563.635,00**

(3) Belanja Jasa Kantor

Realisasi Belanja Jasa Kantor pada TA 2020 sebesar Rp103.744.159.607,00, yaitu 81,41% dari anggaran pada TA 2020 sebesar Rp127.440.910.938,00 dan 72,02% dari realisasi TA 2019 sebesar Rp144.054.240.482,00 dapat dirinci lebih lanjut sebagai berikut :

Belanja Jasa Kantor-LRA		TA 2020			TA 2019	Naik/(Turun) (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
1	Belanja Telepon	1.439.141.686,00	665.334.752,00	46,23	820.015.857,00	(154.681.105,00)
2	Belanja Air	1.283.998.272,00	739.192.620,00	57,57	952.149.939,00	(212.957.319,00)
3	Belanja Listrik	37.741.433.997,00	33.687.857.948,00	89,26	34.468.543.694,00	(780.685.746,00)
4	Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang	25.000.000,00	9.900.000,00	39,60	14.454.000,00	(4.554.000,00)
5	Belanja Surat Kabar/Majalah	786.426.400,00	544.368.763,00	69,22	617.456.000,00	(73.087.237,00)
6	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	5.062.646.008,00	4.847.122.597,00	95,74	5.739.822.675,00	(892.700.078,00)
7	Belanja Paket/Pengiriman	566.250.000,00	284.058.300,00	50,16	233.000,00	283.825.300,00
8	Belanja Sertifikasi	8.076.000.000,00	300.985.400,00	3,73	78.738.400,00	222.247.000,00
9	Belanja Jasa Administrasi Pungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	3.071.700,00	(3.071.700,00)
10	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	280.940.000,00	217.887.617,00	77,56	0,00	214.815.917,00
11	Belanja Jasa Seni dan Olahraga	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	59.500.000,00	(56.500.000,00)
12	Belanja Jasa Pengetikan	45.875.000,00	42.775.000,00	93,24	348.299.000,00	-(305.524.000,00)
13	Belanja Jasa Pihak Ketiga	11.739.112.460,00	10.438.232.571,00	88,92	4.049.539.496,00	6.388.693.075,00
14	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	49.349.824.615,00	44.567.107.706,00	90,31	13.730.138.050,00	30.836.969.656,00
15	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	5.107.327.100,00	2.262.411.933,00	44,30	55.429.760.719,00	(53.167.348.786,00)
16	Belanja Jasa Kantor Lainnya	231.970.400,00	0,00	47,51	26.462.037.505,00	(26.462.037.505,00)
17	Belanja Jasa Dekorasi	280.940.000,00	133.474.400,00	57,54	1.280.480.447,00	(1.147.006.047,00)
18	Transport Lokal (BOK Non Fisik)	3.084.765.000,00	2.395.850.000,00	77,67	0,00	2.395.850.000,00
19	Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Lingkungan RT/RW	2.617.200.000,00	2.604.600.000,00	99,52	0,00	2.604.600.000,00
Jumlah		**127.440.910.938,00**	**103.744.159.607,00**	**81,41**	**144.054.240.482,00**	**40.310.080.875,00**

(4) Belanja Premi Asuransi

Realisasi Belanja Premi Asuransi pada TA 2020 sebesar Rp33.221.810.444,00, yaitu 81,32% dari anggaran pada TA 2020 sebesar Rp40.852.329.295,00 dan 109,08% dari realisasi TA 2019 sebesar Rp30.457.497.507,00 dapat dirinci lebih lanjut sebagai berikut :

Belanja Premi Asuransi -LRA		TA 2020			TA 2019	Naik/(Turun) (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
1	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	39.388.772.395,00	32.630.826.516,00	82,84	29.502.305.192,00	3.128.521.324,00
2	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	322.500.000,00	285.301.569,00	88,47	948.592.315,00	(663.290.746,00)

Belanja Premi Asuransi -LRA		TA 2020			TA 2019	Naik/(Turun) (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
3	Belanja Premi Asuransi Lainnya	0,00	0,00	0,00	6.600.000,00	(6.600.000,00)
4	Belanja Premi Asuransi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	1.111.084.340,00	295.927.192,00	26,63	0,00	295.927.192,00
5	Belanja Premi Asuransi Jaminan Kematian (JKM)	29.972.560,00	9.755.167,00	32,55	0,00	9.755.167,00
Jumlah		**40.852.329.295,00**	**33.221.810.444,00**	**81,32**	**30.457.497.507,00**	**2.764.312.937,00**

(5) Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

Realisasi Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor pada TA 2020 sebesar Rp10.453.747.109,00, yaitu 94% dari anggaran pada TA 2020 sebesar Rp11.120.574.367,00 dan 85,58% dari realisasi TA 2019 sebesar Rp12.215.015.337,00 dapat dirinci lebih lanjut sebagai berikut :

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor-LRA		TA 2020			TA 2019	Naik/(Turun) (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
1	Belanja Jasa Service	2.353.109.000,00	2.245.561.441,00	95,43	865.742.829,00	1.379.818.612,00
2	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.470.706.855,00	2.351.362.003,00	95,17	1.241.202.231,00	1.110.159.772,00
3	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	5.553.855.250,00	5.317.251.605,00	95,74	4.812.818.629,00	504.432.976,00
4	Belanja Jasa KIR	40.341.350,00	4.541.800,00	11,26	5.692.200,00	(1.150.400,00)
5	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	528.293.402,00	382.722.860,00	72,45	301.850.581,00	80.872.279,00
6	Belanja Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	6.227.760,00	2.528.725,00	40,60	0,00	2.528.725,00
7	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	168.040.750,00	149.778.675,00	89,13	318.061.597,00	(168.282.922,00)
8	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor lainnya	0,00	0,00	0,00	4.669.647.270,00	(4.669.647.270,00)
Jumlah		**11.120.574.367,00**	**10.453.747.109,00**	**94**	**12.215.015.337,00**	**(1.761.268.228,00)**

(6) Belanja Cetak dan Penggandaan

Realisasi Belanja Cetak dan Penggandaan pada TA 2020 sebesar Rp12.412.996.194,00, yaitu 120,26% dari anggaran pada TA 2020 sebesar Rp14.292.298.800,00 dan % dari realisasi TA 2019 sebesar Rp14.927.311.315,00 dapat dirinci lebih lanjut sebagai berikut :

Belanja Cetak dan Penggandaan-LRA		TA 2020			TA 2019	Naik/(Turun) (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
1	Belanja Cetak	8.899.819.950,00	7.937.066.359,00	89,18	9.278.214.596,00	(1.341.148.237,00)
2	Belanja Penggandaan	4.920.786.350,00	4.093.145.395,00	83,18	4.852.140.419,00	(758.995.024,00)
3	Belanja Penjilidan	458.372.500,00	369.948.940,00	80,71	532.844.500,00	(162.895.560,00)
4	Belanja Cetak dan Penggandaan Lainnya	0,00	0,00	0,00	249.790.300,00	(249.790.300,00)
5	Belanja Laminating	13.320.000,00	12.835.500,00	96,36	14.321.500,00	(1.486.000,00)
Jumlah		**14.292.298.800,00**	**12.412.996.194,00**	**86,85**	**14.927.311.315,00**	**(2.514.315.121,00)**

(7) Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

Realisasi Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir pada TA 2020 sebesar Rp1.362.485.006,00, yaitu 67,01% dari anggaran pada TA 2020 sebesar Rp2.033.242.000,00 dan 51,17% dari realisasi TA 2019 sebesar Rp2.662.916.929,00 dapat dirinci lebih lanjut sebagai berikut :

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir-LRA		TA 2020			TA 2019	Naik/(Turun) (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
1	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	110.900.000,00	62.260.000,00	56,14	364.650.000,00	(302.390.000,00)
2	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	246.250.000,00	224.300.000,00	91,09	634.198.200,00	(409.898.200,00)
3	Belanja Sewa Tempat Parkir/Uang Tambat/Hanggar Sarana Mobilitas	1.500.000,00	1.500.000,00	100	7.750.000,00	(6.250.000,00)

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir-LRA		TA 2020			TA 2019	Naik/(Turun) (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
4	Belanja Akomodasi dan Penginapan	1.674.592.000,00	1.074.425.006,00	64,16	1.656.318.729,00	(581.893.723,00)
Jumlah		**2.033.242.000,00**	**1.362.485.006,00**	**67,01**	**2.662.916.929,00**	**(1.300.431.923,00)**

(8) Belanja Sewa Sarana Mobilitas

Realisasi Belanja Sewa Sarana Mobilitas pada TA 2020 sebesar Rp282.150.000,00, yaitu 45% dari anggaran pada TA 2020 sebesar Rp627.020.000,00 dan 25,65% dari realisasi TA 2019 sebesar Rp1.100.070.000,00 dapat dirinci lebih lanjut sebagai berikut :

Belanja Sewa Sarana Mobilitas-LRA		TA 2020			TA 2019	Naik/(Turun) (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
1	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	585.200.000,00	247.850.000,00	42,35	1.062.210.000,00	(814.360.000,00)
2	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	41.820.000,00	34.300.000,00	82,02	37.860.000,00	(3.560.000,00)
Jumlah		**627.020.000,00**	**282.150.000,00**	**45**	**1.100.070.000,00**	**(817.920.000,00)**

(9) Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor

Realisasi Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor pada TA 2020 sebesar Rp747.322.000,00, yaitu 68,67% dari anggaran pada TA 2020 sebesar Rp1.088.282.000,00 dan 20,99% dari realisasi TA 2019 sebesar Rp3.559.865.324,00 dapat dirinci lebih lanjut sebagai berikut :

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor-LRA		TA 2020			TA 2019	Naik/(Turun) (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
1	Belanja Sewa Meja Kursi	370.693.000,00	262.598.000,00	70,84	845.984.500,00	(583.386.500,00)
2	Belanja Sewa Komputer dan Printer	10.400.000,00	10.400.000,00	100,00	0,00	10.400.000,00
3	Belanja Sewa Generator	102.478.000,00	94.475.000,00	92,19	167.830.000,00	(73.355.000,00)
4	Belanja Sewa Tenda	604.711.000,00	379.849.000,00	62,81	1.547.555.500,00	(1.167.706.500,00)
5	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	0,00	0,00	0,00	48.700.000,00	(48.700.000,00)
6	Belanja Sewa Perlengkapan Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00	949.795.324,00	(949.795.324,00)
Jumlah		**1.088.282.000,00**	**747.322.000,00**	**68,67**	**3.559.865.324,00**	**(2.812.543.324,00)**

(10) Belanja Makan dan Minuman

Realisasi Belanja Makan dan Minuman pada TA 2020 sebesar Rp28.100.227.163,00, yaitu 86,41% dari anggaran pada TA 2020 sebesar Rp32.518.965.505,00 dan 70,20% dari realisasi TA 2019 sebesar Rp40.026.073.745,00 dapat dirinci lebih lanjut sebagai berikut :

Belanja Makanan dan Minuman-LRA		TA 2020			TA 2019	Naik/(Turun) (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
1	Makanan dan Minuman Harian Pegawai	5.724.799.525,00	5.477.936.240,00	95,69	5.805.216.396,00	(327.280.156,00)
2	Makanan dan Minuman Rapat	13.811.750.780,00	11.431.042.900,00	82,76	13.513.648.219,00	(2.082.605.319,00)
3	Makanan dan Minuman Tamu	3.510.523.200,00	3.360.780.423,00	95,73	2.995.819.400,00	364.961.023,00
4	Makanan dan Minuman Pelatihan	9.471.892.000,00	7.830.467.600,00	82,67	12.365.630.580,00	(4.535.162.980,00)
5	Makanan dan Minuman Lainnya	0,00	0,00	0,00	5.345.759.150,00	(5.345.759.150,00)
Jumlah		**32.518.965.505,00**	**28.100.227.163,00**	**86,41**	**40.026.073.745,00**	**(11.925.846.582,00)**

(11) Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya

Realisasi Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya pada TA 2020 sebesar Rp474.351.750,00, yaitu 99,93% dari anggaran pada TA 2020 sebesar Rp474.700.000,00 dan 26,91% dari realisasi TA 2019 sebesar Rp1.762.934.600,00 dapat dirinci lebih lanjut sebagai berikut :

Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya-LRA		TA 2020			TA 2019	Naik/(Turun) (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
1	Belanja pakaian Dinas KDH dan WKDH	32.250.000,00	32.250.000,00	100	15.900.000,00	16.350.000,00
2	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	282.500.000,00	282.395.000,00	99,96	314.915.000,00	(32.520.000,00)
3	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	27.000.000,00	27.000.000,00	100	131.000.000,00	(104.000.000,00)
4	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	120.450.000,00	120.206.750,00	99,80	1.047.472.600,00	(927.265.850,00)
5	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	12.500.000,00	12.500.000,00	100	7.836.000,00	4.664.000,00
6	Belanja Pakaian Dinas Lainnya	0,00	0,00	0,00	245.811.000,00	(245.811.000,00)
Jumlah		**474.700.000,00**	**474.351.750,00**	**99,93**	**1.762.934.600,00**	**(1.288.582.850,00)**

(12) Belanja Pakaian Kerja

Realisasi Belanja Pakaian Kerja pada TA 2020 sebesar Rp564.376.250,00, yaitu 97,97% dari anggaran pada TA 2020 sebesar Rp576.075.050,00 dan 156,56% dari realisasi TA 2019 sebesar Rp360.496.100,00 dapat dirinci lebih lanjut sebagai berikut :

Belanja Pakaian Kerja-LRA		TA 2020			TA 2019	Naik (Turun) (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
1	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	576.075.050,00	564.376.250,00	97,97	263.683.800,00	300.692.450,00
2	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	0,00	0,00	0,00	96.812.300,00	(96.812.300,00)
Jumlah		**576.075.050,00**	**564.376.250,00**	**97,97**	**360.496.100,00**	**203.880.150,00**

(13) Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu

Realisasi Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu pada TA 2020 sebesar Rp540.780.000, yaitu 98,07% dari anggaran pada TA 2020 sebesar Rp551.405.000,00 dan 15,05% dari realisasi TA 2019 sebesar Rp3.593.409.351,00 dapat dirinci lebih lanjut sebagai berikut :

Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu-LRA		TA 2020			TA 2019	Naik/(Turun) (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
1	Belanja Pakaian KORPRI	450.000,00	450.000,00	100,00	51.250.000,00	(50.800.000,00)
2	Belanja Pakaian adat daerah	114.250.000,00	112.650.000,00	98,60	919.194.050,00	(806.544.050,00)
3	Belanja Pakaian Batik Tradisional	243.600.000,00	236.685.000,00	97,16	1.304.278.001,00	(1.067.593.001,00)
4	Belanja Pakaian Olahraga	193.105.000,00	190.995.000,00	98,91	818.380.200,00	(627.385.200,00)
5	Belanja Pakaian Khusus Lainnya	0,00	0,00	0,00	500.307.100,00	(500.307.100,00)
Jumlah		**551.405.000,00**	**540.780.000,00**	**98,07**	**3.593.409.351,00**	**(3.052.629.351,00)**

(14) Belanja Perjalanan Dinas

Realisasi Belanja Perjalanan Dinas pada TA 2020 sebesar Rp31.347.808.103,00, yaitu 78,13% dari anggaran pada TA 2020 sebesar Rp40.121.348.779,00 dan 65,78% dari realisasi TA 2019 sebesar Rp47.652.766.575,00 dapat dirinci lebih lanjut sebagai berikut :

Belanja Perjalanan Dinas-LRA		TA 2020			TA 2019	Naik/(Turun) (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.164.333.640,00	12.188.611.377,00	80,38	13.817.317.862,00	(1.628.706.485,00)
2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24.835.763.939,00	19.037.945.526,00	76,66	33.509.761.233,00	(14.471.815.707,00)
3	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	121.251.200,00	121.251.200,00	100	325.687.480,00	(204.436.280,00)
Jumlah		**40.121.348.779,00**	**31.347.808.103,00**	**78,13**	**47.652.766.575,00**	**(16.304.958.472,00)**

(15) Belanja Pemeliharaan

Realisasi Belanja Pemeliharaan pada TA 2020 sebesar Rp22.297.211.418,00, yaitu 98,53% dari anggaran pada TA 2020 sebesar Rp23.314.654.812,35 dan 92,59% dari realisasi TA 2019 sebesar Rp24.809.729.398,00 dapat dirinci lebih lanjut

sebagai berikut :

Belanja Pemeliharaan-LRA		TA 2020			TA 2019	Naik/(Turun) (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
1	Belanja PemeliharanTanah	4.391.200,00	4.391.200,00	100	0,00	4.391.200,00
2	Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin	4.216.644.543,35	3.987.560.325,00	94,57	3.762.688.134,00	224.872.191,00
3	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	4.932.148.169,00	4.890.106.998,00	99,15	5.593.057.981,00	(702.950.983,00)
4	Belanja Pemeliharan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	360.996.373,00	(360.996.373,00)
5	Belanja Pemeliharaan Jalan	6.936.650.000,00	6.875.991.626,00	99,13	6.192.421.010,00	683.570.616,00
6	Belanja Pemeliharaan Jembatan	302.000.000,00	296.415.770,00	98,15	0,00	296.415.770,00
7	Belanja Pemeliharan Irigasi dan Drainase	6.922.820.900,00	6.917.648.268,00	99,93	8.900.565.900,00	(1.982.917.632,00)
Jumlah		**23.314.654.812,35**	**22.972.114.187,00**	**98,53**	**24.809.729.398,00**	**(1.837.615.211,00)**

(16) Belanja Jasa Konsultasi

Realisasi Belanja Jasa Konsultasi pada TA 2020 sebesar Rp984.022.770,00, yaitu 64,94% dari anggaran pada TA 2020 sebesar Rp1.515.349.850,00 dan 18,58% dari realisasi TA 2019 sebesar Rp5.295.914.772,00 dapat dirinci lebih lanjut sebagai berikut :

Belanja Jasa Konsultansi-LRA		TA 2020			TA 2019	Naik/(Turun) (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
1	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	312.285.000,00	29.890.000,00	9,57	1.332.840.020,00	(1.302.950.020,00)
2	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.072.159.850,00	929.847.520,00	86,73	3.940.254.752,00	(3.010.407.232,00)
3	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	130.905.000,00	24.285.250,00	18,55	22.820.000,00	1.465.250,00
Jumlah		**1.515.349.850,00**	**984.022.770,00**	**64,94**	**5.295.914.772,00**	**(4.311.892.002,00)**

(17) Belanja Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga

Realisasi Belanja Barang yang akan diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga pada TA 2020 sebesar Rp17.355.662.681,00, yaitu 85,36% dari anggaran pada TA 2020 sebesar Rp20.331.339.800,00 dan 371,83% dari realisasi TA 2019 sebesar Rp4.667.689.948,00 dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga		TA 2020			TA 2019	Naik/(Turun) (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
1	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	20.067.434.500,00	17.116.934.581,00	85,30	4.512.789.948,00	12.604.144.633,00
2	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	263.905.300,00	238.728.100,00	90,46	154.900.000,00	83.828.100,00
Jumlah		**20.331.339.800,00**	**17.355.662.681,00**	**85,36**	**4.667.689.948,00**	**12.687.972.733,00**

(18) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS

Realisasi Belanja Beasiswa Pendidikan PNS pada TA 2020 sebesar Rp 75.600.000,00, yaitu 86,90% dari anggaran pada TA 2020 sebesar Rp87.000.000,00 dan 78,59% dari realisasi TA 2019 sebesar Rp96.200.000,00.

Belanja Beasiswa Pendidikan PNS		TA 2020			TA 2019	Naik/(Turun) (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
1	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	33.000.000,00	24.000.000,00	72,73	29.000.000,00	(5.000.000,00)
2	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	54.000.000,00	51.600.000,00	95,56	67.200.000,00	(15.600.000,00)
Jumlah		**87.000.000,00**	**75.600.000,00**	**86,90**	**Rp96.200.000,00**	**(20.600.000,00)**

(19) Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS

Realisasi Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS pada TA 2020 sebesar Rp 7.130.863.856,00, yaitu 80,99% dari anggaran pada TA 2020 sebesar Rp8.804.177.750,00 dan 38,88% dari realisasi TA 2019 sebesar Rp18.342.025.220,00 dapat dirinci lebih lanjut sebagai berikut:

Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS-LRA		TA 2020			TA 2019	Naik/(Turun) (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
1	Belanja Kursus-kursus Singkat/ Pelatihan	7.535.819.150,00	5.876.815.256,00	77,99	874.317.526,00	5.002.497.730,00
2	Belanja Sosialisasi	1.250.302.700,00	1.236.668.600,00	98,91	62.622.000,00	1.174.046.600,00
3	Belanja Bimbingan Teknis	10.509.900,00	9.988.000,00	95,03	50.529.000,00	(40.541.000,00)
4	Uang Saku Peserta Pelatihan, Sosialisasi, dan Bintek Lainnya	7.546.000,00	7.392.000,00	97,96	9.379.055.000,00	(9.371.663.000,00)
5	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimtek Lainnya	0,00	0,00	0,00	7.975.501.694,00	(7.975.501.694,00)
Jumlah		**8.804.177.750,00**	**7.130.863.856,00**	**80,99**	**18.342.025.220,00**	**(11.211.161.364,00)**

(20) Belanja Honorarium PNS

Realisasi Belanja Honorarium PNS pada TA 2020 sebesar Rp31.922.079.150,00, yaitu 88,49% dari anggaran pada TA 2020 sebesar Rp36.073.905.945,00 dan 99,60% dari realisasi TA 2019 sebesar Rp32.050.718.050,00 dapat dirinci lebih lanjut sebagai berikut:

Belanja Honorarium PNS-LRA		TA 2020			TA 2019	Naik/(Turun) (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
1	Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.969.756.500,00	7.704.886.850,00	85,90	10.354.958.250,00	(2.650.071.400,00)
2	Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.337.000.000,00	1.226.620.000,00	91,74	1.731.462.300,00	(504.842.300,00)
3	Belanja Honorarium PNS Lainnya	9.587.425.000,00	8.536.920.000,00	89,04	5.259.485.000,00	3.277.435.000,00
4	Belanja Honorarium Petugas Pengelola Keuangan	10.894.702.645,00	9.651.849.500,00	88,59	10.781.162.500,00	(1.129.313.000,00)
5	Belanja Honorarium Petugas Pengelola Barang	4.963.980.000,00	4.596.772.800,00	92,60	3.715.800.000,00	880.972.800,00
6	Belanja Honorarium Petugas Pembuat Gambar/Design	12.500.000,00	12.500.000,00	100,00	11.550.000,00	950.000,00
7	Belanja Honorarium Petugas Pemeriksa Barang/ Pekerjaan	308.541.800,00	192.530.000,00	62,40	196.300.000,00	(3.770.000,00)
Jumlah		**36.073.905.945,00**	**31.922.079.150,00**	**88,49**	**32.050.718.050,00**	**(128.638.900,00)**

(21) Belanja Honorarium Non PNS

Realisasi Belanja Honorarium Non PNS pada TA 2020 sebesar Rp77.566.551.569,00, yaitu 98,36% dari anggaran pada TA 2020 sebesar Rp78.863.184.625,00 dan 94,23% dari realisasi TA 2019 sebesar Rp82.312.806.420,00, dapat dirinci lebih lanjut sebagai berikut:

Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS-LRA		TA 2020			TA 2019	Naik/(Turun) (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
1	Belanja Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	31.943.499.360,00	31.116.868.507,00	97,41	82.312.806.420,00	(51.195.937.913,00)
2	Belanja Honorarium Non PNS Lainnya	46.919.685.265,00	46.449.683.062,00	99,00	0,00	46.449.683.062,00
Jumlah		**78.863.184.625,00**	**77.566.551.569,00**	**98,36**	**82.312.806.420,00**	**(4.746.254.851,00)**

(22) Belanja Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat

Realisasi Belanja Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat pada TA 2020 sebesar Rp1.505.800.000,00,

yaitu 99,07% dari anggaran pada TA 2020 sebesar Rp1.520.000.000,00 dan 76% dari realisasi TA 2019 sebesar Rp1.981.250.000,00 dapat dirinci lebih lanjut sebagai berikut:

Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat-LRA		TA 2020			TA 2019	Naik/(Turun) (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
1	Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga	3.600.000,00	0,00	0,00	1.407.000.000,00	(1.407.000.000,00)
2	Belanja Uang untuk Diberikan kepada Masyarakat	1.516.400.000,00	1.505.800.000,00	99,30	574.250.000,00	931.550.000,00
Jumlah		**1.520.000.000,00**	**1.505.800.000,00**	**99,07**	**1.981.250.000,00**	**(475.450.000,00)**

(a) Belanja Uang untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga

Realisasi Belanja Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga TA 2020 dapat dirinci lebih lanjut sebagai berikut:

No	Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga	Realisasi TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	0,00	1.316.500.000,00
2	Dinas Keluarga Berencana , Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	0,00	30.000.000,00
3	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Kepelatihan Daerah	0,00	56.000.000,00
4	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	0,00	4.500.000,00
Jumlah		**0,00**	**1.407.000.000,00**

Realisasi Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga untuk TA 2020 sebesar Rp0,00 atau 0% dari realisasi TA 2019 sebesar Rp1.407.000.000,00.

(b) Belanja Uang untuk Diberikan Kepada Masyarakat

Realisasi Belanja Uang untuk diberikan kepada masyarakat TA 2020 dapat dirinci lebih lanjut sebagai berikut:

No	Belanja Uang untuk Diberikan kepada Masyarakat	Realisasi TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	1.354.000.000,00	102.900.000,00
2	Dinas Kesehatan	0,00	31.800.000,00
3	Dinas Pangan Dan Perkebunan	0,00	20.400.000,00
4	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	55.250.000,00	71.500.000,00
5	Dinas Perhubungan	0,00	3.750.000,00
6	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	21.000.000,00	38.400.000,00
7	Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata	59.400.000,00	197.350.000,00
8	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	0,00	15.750.000,00
9	Sekretariat Daerah	7.500.000,00	76.800.000,00
10	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	15.600.000,00
11	Kecamatan Sidareja	3.500.000,00	0,00
12	Kecamatan Dayeuhluhur	5.150.000,00	0,00
Jumlah		**1.505.800.000,00**	**574.250.000,00**

Realisasi Belanja Uang untuk Diberikan kepada Masyarakat untuk TA 2020 sebesar Rp1.505.800.000,00 atau 262,22% dari realisasi TA 2019 sebesar Rp574.250.000,00.

(23) Belanja Pegawai Dana BOS

Realisasi Belanja Pegawai Dana BOS pada TA 2020 sebesar Rp59.954.928.603,00, yaitu 98,99% dari anggaran pada TA 2020 sebesar Rp60.628.537.230,00 dan 247,80% dari realisasi TA 2019 sebesar Rp24.194.398.914,00.

(24) Belanja Barang dan Jasa Dana BOS

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Dana BOS pada TA 2020 sebesar Rp101.679.266.499,00, yaitu 95,95% dari anggaran pada TA 2020 sebesar Rp105.974.934.380 dan 94,88% dari realisasi TA 2019 sebesar Rp107.162.860.088,00.

(25) Belanja yang bersumber dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional

Realisasi Belanja yang bersumber dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada TA 2020 sebesar Rp0,00 , yaitu 0,00% dari anggaran pada TA 2020 sebesar Rp0,00 adapun realisasi TA 2019 sebesar Rp17.998.586.249,00.

(26) Belanja Pegawai BLUD

Realisasi Belanja Pegawai BLUD pada TA 2020 sebesar Rp57.635.374.420,00, yaitu 97,40% dari anggaran pada TA 2020 sebesar Rp59.172.410.000,00 dan 92,34% dari realisasi TA 2019 sebesar Rp62.413.855.548,00.

(27) Belanja Barang dan Jasa BLUD

Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD pada TA 2020 sebesar Rp199.490.243.518,00, yaitu 93,01% dari anggaran pada TA 2020 sebesar Rp214.482.305.451,00 dan 186,09% dari realisasi TA 2019 sebesar Rp107.200.151.502,00.

(28) Belanja Hibah Barang atau Jasa yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat

Realisasi Belanja Hibah Barang atau Jasa yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat pada TA 2020 sebesar Rp36.328.966.372,00, yaitu 97,02% dari anggaran pada TA 2020 sebesar Rp37.445.895.950,00 dan 137,14% dari realisasi TA 2019 sebesar Rp26.491.247.225,00.

(29) Belanja Bantuan Sosial Barang Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Barang atau Jasa yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat pada TA 2020 sebesar Rp1.269.162.980,00, yaitu 90,72% dari anggaran pada TA 2020 sebesar Rp1.398.950.000,00 dan 90,35% dari realisasi TA 2019 sebesar Rp1.404.746.800,00.

(30) Belanja Hadiah Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga

Realisasi Belanja Hadiah Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga pada TA 2020 sebesar Rp455.847.001,00, yaitu 86,26% dari anggaran pada TA 2020 sebesar Rp528.475.000,00 dan 113,96% dari realisasi TA 2019 sebesar Rp524.245.000,00.

V.1.b.1)c) Belanja Subsidi

Realisasi Belanja Subsidi pada TA 2020 sebesar Rp0,00, yaitu 0,00% dari anggaran pada TA 2020 sebesar Rp 0,00 adapun realisasi TA 2019 sebesar Rp400.000.000,00.

V.1.b.1)d) Belanja Hibah

Realisasi Belanja Hibah TA 2020 sebesar Rp40.366.842.247,00 yaitu 100,49% dari anggaran pada TA 2020 sebesar Rp40.169.512.960,00 dan 68,88% dari realisasi TA 2019 sebesar Rp58.596.950.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Hibah		TA 2020			TA 2019	Naik (Turun)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	(Rp)
1	Belanja Hibah kepada Pemerintah	0,00	1.885.114.979,00	0,00	0,00	1.885.114.979,00
2	Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat	0,00	322.173.268,00	0,00	0,00	322.173.268,00
3	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	14.807.728.960,00	13.912.570.000,00	93,95	32.655.850.000,00	(18.743.280.000,00)
4	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	0,00	0,00	0,00	365.000.000,00	(365.000.000,00)
5	Belanja Hibah kepada Masyarakat/Swasta	22.443.000.000,00	21.328.200.000,00	95,03	20.676.300.000,00	651.900.000,00
6	BOP Pendididkan Kesetaraan	0,00	0,00	0,00	4.899.800.000,00	(4.899.800.000,00)
7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Parpol	2.918.784.000,00	2.918.784.000,00	100	0,00	2.918.784.000,00
Jumlah		**40.169.512.960,00**	**40.366.842.247,00**	**100,49**	**58.596.950.000,00**	**(18.230.107.753,00)**

V.1.b.1)e) Belanja Bantuan Sosial (BBS)

Realisasi Belanja Bantuan Sosial pada TA 2020 sebesar Rp51.091.710.000,00, yaitu 58,14% dari anggaran pada TA 2020 sebesar Rp87.876.728.000,00 dan 868,31% dari realisasi TA 2019 sebesar Rp5.884.050.000,00, dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Bantuan Sosial		TA 2020			TA 2019	Naik (Turun)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	(Rp)
1	Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat	87.876.728.000,00	51.091.710.000,00	58,14	5.884.050.000,00	45.207660.000,00
Jumlah		**87.876.728.000,00**	**51.091.710.000,00**	**58,14**	**5.884.050.000,00**	**45.207660.000,00**

V.1.b.2) Belanja Modal (BM)

Belanja Modal (BM) Pemerintah Kabupaten Cilacap dengan anggaran dan realisasi dalam TA 2020 dan TA 2019, sebagai berikut:

Belanja Modal (BM):		TA 2020			TA 2019	Naik (Turun)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	(Rp)
1	BM-Tanah	25.898.069.100,00	14.242.054.652,00	54,99	6.643.748.180,00	7.598.306.472,00
2	BM-Peralatan & Mesin	134.057.897.893,00	108.580.137.022,00	80,99	108.096.788.800,00	483.348.222,00
3	BM-Gedung & Bangunan	73.029.906.841,00	63.032.862.639,00	86,31	134.459.038.713,00	(71.426.176.074,00)
4	BM-Jalan, Irigasi, & Jaringan	283.275.664.000,00	264.551.341.345,00	93,39	391.540.159.364,00	(126.988.818.019,00)
5	BM-Aset Tetap Lainnya	12.702.062.658,00	11.867.458.126,00	93,43	21.576.305.349,20	(9.708.847.223,20)
6	BM-Aset Tak Berwujud	186.245.000,00	158.080.000,00	84,88	1.005.157.600,00	(847.077.600,00)
Jumlah		**529.149.845.492,00**	**462.431.933.784,00**	**87,39**	**663.321.198.006,20**	**(200.889.264.222,20)**

Realisasi Belanja Modal (BM) pada TA 2020 sebesar Rp462.431.933.784,00, yaitu 87,39% dari anggaran pada TA 2020 sebesar Rp529.149.845.492,00 dan 69,71% dari realisasi TA 2019 sebesar Rp663.321.198.006,20. Rincian Belanja Modal dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

V.1.b.2)a) BM-Tanah

Realisasi BM - Tanah TA 2020 sebesar Rp14.242.054.652,00 , yaitu 54,99% dari anggaran pada TA 2020 sebesar Rp25.898.069.100,00 dan 214,37% dari realisasi TA 2019 sebesar Rp6.643.748.180,00. Realisasi BM – Tanah untuk TA 2020 tersebut dipergunakan untuk pengadaan sebagai berikut:

BM-Tanah		TA 2020			TA 2019	Naik (Turun)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	(Rp)
1	Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	16.797.500.000,00	14.241.516.052,00	84,78	6.643.748.180,00	7.597.767.872,00
2	Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	9.100.569.100,00	538.600,00	0,01	0,00	538.600,00
Jumlah		**25.898.069.100,00**	**14.242.054.652,00**	**54,99**	**6.643.748.180,00**	**7.598.306.472,00**

(1) Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung

Realisasi BM Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung pada TA 2020 sebesar Rp14.241.516.052,00, yaitu 84,78% dari anggaran pada TA 2020 sebesar Rp16.797.500.000,00 dan 214,36% dari realisasi TA 2019 sebesar Rp6.643.748.180,00 dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung-LRA		TA 2020			TA 2019	Naik (Turun) (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
1	Pengadaan Tanah Bangunan Perumahan/G. Tempat Tinggal	0,00	0,00	0,00	507.581.692,00	(507.581.692,00)
2	Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	25.000.000,00	17.039.000,00	68,16	4.888.191.204,00	(4.871.152.204,00)
3	Pengadaan Tanah Kosong	16.492.500.000,00	14.136.777.052,00	85,72	205.283.580,00	13.931.493.472,00
4	Pengadaan Tanah Bangunan Jalan dan Jembatan	280.000.000,00	87.700.000,00	31,32	1.042.691.704,00	(954.991.704,00)
Jumlah		**16.797.500.000,00**	**14.241.516.052,00**	**84,78**	**6.643.748.180,00**	**Rp7.597.767.872,00**

(2) Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung

Realisasi BM Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung pada TA 2020 sebesar Rp538.600,00 dan 0,01% dari anggarannya sebesar Rp9.100.569.100,00 dan realisasi TA 2019 sebesar Rp0,00 dapat dirinci lebih lanjut sebagai berikut:

Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung-LRA		TA 2020			TA 2019	Naik (Turun) (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
1	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Lapangan Olah Raga	569.100,00	538.600,00	0,00	0,00	538.600,00
2	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Lapangan Parkir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Jalan	9.100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		**9.100.569.100,00**	**538.600,00**	**0,01**	**0,00**	**538.600,00**

V.1.b.2)b) BM - Peralatan dan Mesin

Realisasi BM - Peralatan dan Mesin pada TA 2020 sebesar Rp108.580.137.022,00, yaitu 80,99% dari anggaran pada TA 2020 sebesar Rp134.057.897.893,00 dan 100,45% dari realisasi TA 2019 sebesar Rp108.096.788.800,00 dengan rincian sebagai berikut:

BM-Peralatan dan Mesin:		TA 2020			TA 2019	Naik (Turun) (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
1	Alat-Alat Besar Darat	0,00	0,00	0,00	4.879.547.000,00	(4.879.547.000,00)
2	Alat-alat Bantu	823.125.175,00	794.519.450,00	96,52	1.219.172.600,00	(424.653.150,00)
3	Alat-alat Angkutan darat bermotor	26.521.293.800,00	20.025.643.280,00	75,51	18.333.653.055,00	1.691.990.225,00
4	Alat –alat angkutan darat tidak bermotor	225.000.000,00	222.924.000,00	99,08	199.439.300,00	23.484.700,00
5	Alat Angkut Apung Bermotor	39.000.000,00	38.824.000,00	99,55	197.097.500,00	(158.273.500,00)
6	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	0,00	0,00	0,00	102.400.000,00	(102.400.000,00)
7	Alat bengkel bermesin	5.000.000,00	4.930.000,00	98,60	205.390.000,00	(200.460.000,00)
8	Alat Bengkel Tak Bermesin	0,00	0,00	0,00	2.650.000,00	(2.650.000,00)
9	Alat-alat ukur	1.912.933.000,00	1.674.169.830,00	87,52	1.965.141.970,00	(290.972.140,00)
10	Alat-alat pengolahan	453.412.000,00	437.629.227,00	96,52	214.800.000,00	222.829.227,00
11	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpanan	1.995.204.200,00	1.901.866.054,00	95,32	296.853.700,00	1.605.012.354,00
12	Pengadaan peralatan kantor	789.894.450,00	767.030.690,00	97,11	2.567.916.590,00	(1.800.885.900,00
13	Alat Rumah Tangga	4.556.305.885,00	4.184.035.867,00	91,83	6.487.992.045,00	(2.303.956.178,00)
14	Komputer	10.784.211.000,00	6.571.796.640,00	60,94	19.537.766.041,00	(12.965.969.401,00)
15	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	377.338.050,00	373.600.050,00	99,01	455.619.300,00	(82.019.250,00)
16	Alat –alat studio	726.270.400,00	501.600.000,00	69,07	622.275.970,00	(120.675.970,00)
17	Alat-alat komunikasi	56.560.000,00	53.567.520,00	94,71	133.141.500,00	(79.573.980,00)

BM-Peralatan dan Mesin:		TA 2020			TA 2019	Naik (Turun) (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
18	Peralatan Pemancar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Alat-alat kedokteran	3.110.011.092,00	2.932.174.360,00	94,28	7.559.743.360,00	(4.627.569.000,00)
20	Alat kesehatan	12.664.506.528,00	10.605.588.173,00	83,74	7.849.463.647,00	2.756.124.526,00
21	Alat-alat Laboratorium	137.035.000,00	130.500.000,00	95,23	84.235.000,00	46.265.000,00
22	Alat-alat peraga/praktek sekolah	2.967.615.400,00	2.350.825.548,00	79,22	2.756.060.419,00	(405.234.871,00)
23	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	9.000.000,00	8.900.000,00	98,89	9.244.750,00	(344.750,00)
24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	929.970.000,00	(929.970.000,00)
25	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Pengadaan Non Senjata Api	19.979.752,00	19.979.752,00	100	0,00	19.979.752,00
27	Alat keamanan dan perlindungan	13.015.000,00	11.600.000,00	89,13	195.594.950,00	(183.994.950,00)
28	BLUD peralatan mesin	30.344.531.709,00	19.961.016.678,00	65,78	12.789.750.332,00	7.171.266.346,00
29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Dana BOS	35.526.655.452,00	35.007.415.903,00	98,54	18.501.869.771,00	16.505.546.132,00
Jumlah		**134.057.897.893,00**	**108.580.137.022,00**	**80,99**	**108.096.788.800,00**	**483.348.222,00**

(1) Alat-Alat Besar Darat-LRA

Realisasi BM Alat-Alat Besar Darat pada TA 2020 sebesar Rp 0,00, yaitu 0% dari anggaran pada TA 2020 sebesar Rp0,00 dan 0% dari realisasi TA 2019 sebesar Rp4.879.547.000,00 dapat dirinci lebih lanjut sebagai berikut:

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Besar Darat-LRA		TA 2020			TA 2019	Naik (Turun) (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Grader	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Excavator	0,00	0,00	0,00	4.758.067.000,00	(4.758.067.000,00)
3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Compacting Equipment	0,00	0,00	0,00	121.480.000,00	(121.480.000,00)
4	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Proses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.879.547.000,00**	**(4.879.547.000,00)**

(2) Alat-alat Bantu

Realisasi BM Alat-alat Bantu pada TA 2020 sebesar Rp794.519.450,00 , yaitu 96,52% dari anggaran pada TA 2020 sebesar Rp823.125.175,00 dan 65,17% dari realisasi TA 2019 sebesar Rp1.219.172.600,00 dapat dirinci lebih lanjut sebagai berikut:

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu-LRA		TA 2020			TA 2019	Naik (Turun) (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Compressor	143.676.500,00	141.975.000,00	98,82	0,00	141.975.000,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Electric Generating Set	159.254.975,00	144.150.000,00	90,52	370.145.400,00	(225.995.400,00)
3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pompa	436.993.700,00	426.804.450,00	97,67	147.572.200,00	279.232.250,00
4	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit Pemeliharaan Lapangan	83.200.000,00	81.590.000,00	98,06	701.455.000,00	(619.865.000,00)
Jumlah		**823.125.175,00**	**794.519.450,00**	**96,52**	**1.219.172.600,00**	**(424.653.150,00)**

(3) Alat-alat Angkutan darat bermotor

Realisasi BM Alat-alat Angkutan darat bermotor pada TA

2020 sebesar Rp20.025.643.280,00, yaitu 75,51% dari anggaran pada TA 2020 sebesar Rp26.521.293.800,00 dan 109,23% dari realisasi TA 2019 sebesar Rp18.333.653.055,00 dapat dirinci lebih lanjut sebagai berikut:

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor-LRA		TA 2020			TA 2019	Naik (Turun) (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	12.490.543.300,00	8.820.487.800,00	70,62	0,00	8.820.487.800,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00	0,00	0,00	8.020.157.000,00	(8.020.157.000,00)
3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	2.245.950.500,00	2.062.935.500,00	91,85	1.136.350.000,00	926.585.500,00
4	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	11.591.000.000,00	8.953.319.980,00	77,24	2.836.048.567,00	6.117.271.413,00
5	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	127.800.000,00	122.900.000,00	96,17	5.912.792.988,00	(5.789.892.988,00)
6	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	66.000.000,00	66.000.000,00	100,00	428.304.500,00	(362.304.500,00)
Jumlah		**26.521.293.800,00**	**20.025.643.280,00**	**75,51**	**18.333.653.055,00**	**1.691.990.225,00**

(4) Alat –alat angkutan darat tidak bermotor

Realisasi BM Alat–alat Angkutan Darat tidak bermotor pada TA 2020 sebesar Rp222.924.000,00, yaitu 99,08% dari anggaran pada TA 2020 sebesar Rp225.000.000,00 dan 111,78% dari realisasi TA 2019 sebesar Rp199.439.300,00.

(5) Alat Angkut Apung Bermotor

Realisasi BM Alat Angkut Apung Bermotor pada TA 2020 sebesar Rp38.824.000,00, yaitu 99,55% dari anggaran pada TA 2020 sebesar Rp39.000.000,00 dan 19,70% realisasi TA 2019 sebesar Rp197.097.500,00.

(6) Alat Angkut Apung Tak Bermotor

Realisasi BM Alat Angkut Apung Tak Bermotor pada TA 2020 sebesar Rp0,00, yaitu 0% dari anggaran pada TA 2020 sebesar Rp0,00 dan 0% realisasi TA 2019 sebesar Rp102.400.000,00.

(7) Alat bengkel bermesin

Realisasi BM Alat bengkel bermesin pada TA 2020 sebesar Rp4.930.000,00, yaitu 98,60% dari anggaran pada TA 2020 sebesar Rp5.000.000,00 dan 2,40% dari realisasi TA 2019 sebesar Rp205.390.000,00 dapat dirinci lebih lanjut sebagai berikut:

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Bermesin-LRA		TA 2020			TA 2019	Naik (Turun) (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Pondasi	5.000.000,00	4.930.000,00	98,60	0,00	4.930.000,00
2	Belanja Modal Peralatan dan	0,00	0,00	0,00	6.890.000,00	(6.890.000,00)

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Bermesin-LRA		TA 2020			TA 2019	Naik (Turun) (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
	Mesin - Perkakas Bengkel Service					
3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Las	0,00	0,00	0,00	198.500.000,00	(198.500.000,00)
Jumlah		**5.000.000,00**	**4.930.000,00**	**98,60**	**205.390.000,00**	**(200.460.000,00)**

(8) Alat Bengkel Tak Bermesin

Realisasi BM Alat Bengkel Tak Bermesin pada TA 2020 sebesar Rp0,00 , yaitu 0% dari anggaran pada TA 2020 sebesar Rp0,00 dan 0% dari realisasi TA 2019 sebesar Rp2.650.000,00.

(9) Alat-alat ukur

Realisasi BM Alat-alat ukur pada TA 2020 sebesar Rp1.674.169.830,00, yaitu 87,52% dari anggaran pada TA 2020 sebesar Rp1.912.933.000,00 dan 85,19% dari realisasi TA 2019 sebesar Rp1.965.141.970,00 dapat dirinci lebih lanjut sebagai berikut:

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur-LRA		TA 2020			TA 2019	Naik (Turun) (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Universal	69.485.000,00	69.020.000,00	99,33	11.190.000,00	57.830.000,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur /Test Klinis Lain	9.000.000,00	9.000.000,00	100	0,00	9.000.000,00
3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Pembanding	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
4	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Lainnya	1.824.448.000,00	1.586.149.830,00	86,94	1.927.331.970,00	(341.182.140,00)
5	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Timbangan/Blora	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00	(3.400.000,00)
6	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Anak Timbangan/Biasa	0,00	0,00	0,00	23.220.000,00	(23.220.000,00)
Jumlah		**1.912.933.000,00**	**1.674.169.830,00**	**87,52**	**1.965.141.970,00**	**(290.972.140,00)**

(10) Alat-alat pengolahan

Realisasi BM Alat-alat pengolahan pada TA 2020 sebesar Rp437.629.227,00, yaitu 96,52% dari anggaran pada TA 2020 sebesar Rp453.412.000,00 dan 203,74% dari realisasi TA 2019 sebesar Rp214.800.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan-LRA		TA 2020			TA 2019	Naik (Turun) (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Peternakan	111.172.500,00	109.742.600,00	98,71	23.125.000,00	86.617.600,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Procesing	28.524.000,00	25.352.727,00	88,88	0,00	25.352.727,00
3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan Produksi Perikanan	0,00	0,00	0,00	29.000.000,00	(29.000.000,00)
4	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Panen/Pengolahan	104.978.450,00	97.878.450,00	93,24	162.675.000,00	(64.796.550,00)
5	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	208.737.050,00	204.655.450,00	98,04	0,00	204.655.450,00
Jumlah		**453.412.000,00**	**437.629.227,00**	**96,52**	**214.800.000,00**	**222.829.227,00**

(11) Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpanan

Realisasi BM Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpanan pada TA 2020 sebesar Rp1.901.866.054,00, yaitu 95,32% dari anggaran pada TA 2020 sebesar

Rp1.995.204.200,00 dan 640,67% dari realisasi TA 2019 sebesar Rp296.853.700,00 dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan-LRA		TA 2020			TA 2019	Naik (Turun) (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman	282.107.900,00	269.852.800,00	95,66	240.743.000,00	29.109.800,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan	0,00	0,00	0,00	26.500.000,00	(26.500.000,00)
3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium	1.713.096.300,00	1.632.013.254,00	95,27	29.610.700,00	1.602.402.554,00
Jumlah		**1.995.204.200,00**	**1.901.866.054,00**	**95,32**	**296.853.700,00**	**1.605.012.354,00**

(12) Pengadaan Alat Kantor

Realisasi BM Pengadaan peralatan kantor pada TA 2020 sebesar Rp767.030.690,00, yaitu 97,11% dari anggaran pada TA 2020 sebesar Rp78.9894.450,00 dan 29,87% dari realisasi TA 2019 sebesar Rp2.567.916.590,00 dapat dirinci lebih lanjut sebagai berikut:

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor-LRA		TA 2020			TA 2019	Naik (Turun) (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	106.199.000,00	105.365.640,00	99,22	1.201.796.900,00	(1.096.431.260,00)
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	537.695.450,00	516.665.050,00	96,09	1.293.669.690,00	(777.004.640,00)
3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Reproduksi (Pengganda)	146.000.000,00	145.000.000,00	99,32	72.450.000,00	72.550.000,00
Jumlah		**78.9894.450,00**	**767.030.690,00**	**97,11**	**2.567.916.590,00**	**(1.800.885.900,00)**

(13) Alat Rumah Tangga

Realisasi BM Alat Rumah Tangga pada TA 2020 sebesar Rp4.184.035.867,00, yaitu 91,83% dari anggaran pada TA 2020 sebesar Rp4.556.305.885,00 dan 64,49% dari realisasi TA 2019 sebesar Rp6.487.992.045,00 dapat dirinci lebih lanjut sebagai berikut:

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga-LRA		TA 2020			TA 2019	Naik (Turun) (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	3.275.318.700,00	2.914.280.050,00	88,98	3.344.741.300,00	(430.461.250,00)
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengukur Waktu	0,00	0,00	0,00	12.940.000,00	(12.940.000,00)
3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	185.000.000,00	184.305.000,00	99,62	359.710.940,00	(175.405.940,00)
4	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	62.820.000,00	61.600.000,00	98,06	1.210.156.575,00	(1.148.556.575,00)
5	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	29.693.800,00	29.170.000,00	98,24	167.227.950,00	(138.057.950,00)
6	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	787.851.885,00	779.617.617,00	98,95	870.127.780,00	(90.510.163,00)
7	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	215.621.500,00	215.063.200,00	99,74	523.087.500,00	(308.024.300,00)
Jumlah		**4.556.305.885,00**	**4.184.035.867,00**	**91,83**	**6.487.992.045,00**	**(2.303.956.178,00)**

(14) Komputer

Realisasi BM Komputer pada TA 2020 sebesar Rp6.571.796.640,00, yaitu 60,94% dari anggaran pada TA 2020 sebesar Rp10.784.211.000,00 dan 33,64% dari realisasi TA 2019 sebesar Rp19.537.766.041,00 dapat dirinci lebih lanjut sebagai berikut:

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer-LRA		TA 2020			TA 2019	Naik (Turun) (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan	494.050.000,00	407.598.000,00	82,50	1.010.795.400,00	(603.197.400,00)
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	8.239.815.200,00	4.206.902.340,00	51,06	16.482.518.673,00	(12.275.616.333,00)
3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe	938.253.700,00	912.747.000,00	97,28	0,00	912.747.000,00
4	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	56.000.000,00	47.685.600,00	85,15	34.630.000,00	13.055.600,00
5	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	750.518.100,00	699.184.700,00	93,16	704.455.126,00	(5.270.426,00)
6	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	305.574.000,00	297.679.000,00	97,42	1.305.366.842,00	(1.007.687.842,00)
Jumlah		**10.784.211.000,00**	**6.571.796.640,00**	**60,94**	**19.537.766.041,00**	**(12.965.969.401,00)**

(15) Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat

Realisasi BM Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat pada TA 2020 sebesar Rp373.600.050,00, yaitu 99,01% dari anggaran pada TA 2020 sebesar Rp377.338.050,00 dan 82% dari realisasi TA 2019 sebesar Rp455.619.300,00 dapat dirinci lebih lanjut sebagai berikut:

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-LRA		TA 2020			TA 2019	Naik (Turun) (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	176.617.500,00	174.267.500,00	98,67	245.454.800,00	(71.187.300,00)
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	193.520.550,00	192.132.550,00	99,28	26.127.500,00	166.005.050,00
3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat Pejabat	0,00	0,00	0,00	64.155.000,00	0,00
4	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	0,00	0,00	0,00	21.700.000,00	0,00
5	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	7.200.000,00	7.200.000,00	100	98.182.000,00	(90.982.000,00)
Jumlah		**377.338.050,00**	**373.600.050,00**	**99,01**	**455.619.300,00**	**(82.019.250,00)**

(16) Alat –alat Studio

Realisasi BM Alat-alat Studio pada TA 2020 sebesar Rp501.600.000,00, yaitu 69,07% dari anggaran pada TA 2020 sebesar Rp726.270.400,00 dan 80,61% dari realisasi TA 2019 sebesar Rp622.275.970,00 dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio-LRA		TA 2020			TA 2019	Naik (Turun) (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	692.770.400,00	468.180.000,00	67,58	571.335.970,00	(103.155.970,00)
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Video dan Film	33.500.000,00	33.420.000,00	99,76	50.940.000,00	(17.520.000,00)
Jumlah		**726.270.400,00**	**501.600.000,00**	**69,07**	**622.275.970,00**	**(120.675.970,00)**

(17) Alat-alat Komunikasi

Realisasi BM Alat-alat Komunikasi pada TA 2020 sebesar Rp53.567.520,00, yaitu 94,71% dari anggaran pada TA 2020 sebesar Rp56.560.000,00 dan 40,23% dari realisasi TA 2019 sebesar Rp133.141.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi-LRA		TA 2020			TA 2019	Naik (Turun) (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	16.000.000,00	13.550.520,00	84,69	37.543.000,00	(23.992.480,00)
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio SSB	0,00	0,00	0,00	11.038.500,00	(11.038.500,00)
3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio VHF	0,00	0,00	0,00	40.220.000,00	(40.420.000.0)
4	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio UHF	12.480.000,00	12.000.000,00	96,15	33.300.000,00	(21.300.000,00)
5	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Sosial	28.080.000,00	28.017.000,00	99,78	11.040.000,00	16.977.000,00
Jumlah		**56.560.000,00**	**53.567.520,00**	**94,71**	**133.141.500,00**	**(79.573.980,00)**

(18) Alat-alat Kedokteran

Realisasi BM Alat-alat Kedokteran pada TA 2020 sebesar Rp2.932.174.360,00, yaitu 94,28% dari anggaran pada TA 2020 sebesar Rp3.110.011.092,00 dan 38,79% dari realisasi TA 2019 sebesar Rp7.559.743.360,00 dapat dirinci lebih lanjut sebagai berikut:

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran-LRA		TA 2020			TA 2019	Naik/(Turun) (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	1.623.706.092,00	1.554.249.934,00	95,72	733.712.900,00	820.537.034,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Gigi	0,00	0,00	0,00	19.040.000,00	(19.040.000,00)
3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Bedah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	6.000.000,00	6.000.000,00	100	565.404.100,00	(559.404.100,00)
5	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Gawat Darurat	319.000.000,00	303.632.000,00	95,18	0,00	303.632.000,00
6	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Anak	1.161.305.000,00	1.068.292.426,00	91,99	5.600.000,00	1.062.692.426,00
7	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Poliklinik Set	0,00	0,00	0,00	24.445.000,00	(24.445.000,00)
8	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Radiologi	0,00	0,00	0,00	5.487.408.160,00	(5.487.408.160,00)
9	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Gawat Darurat	0,00	0,00	0,00	724.133.200,00	(724.133.200,00)
Jumlah		**3.110.011.092,00**	**2.932.174.360,00**	**94,28**	**7.559.743.360,00**	**(4.627.569.000,00)**

(19) Alat Kesehatan

Realisasi BM Alat-alat kesehatan pada TA 2020 sebesar Rp10.605.588.173,00 , yaitu 83,74% dari anggaran pada TA 2020 sebesar Rp12.664.506.528,00 dan 135,11% dari realisasi TA 2019 sebesar Rp7.849.463.647,00 dapat dirinci lebih lanjut sebagai berikut:

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan-LRA		TA 2020			TA 2019	Naik (Turun) (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan	12.664.506.528,00	10.605.588.173,00	83,74	7.846.663.647,00	2.756.124.526,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan-LRA		TA 2020			TA 2019	Naik (Turun) (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	(2.800.000,00)
Jumlah		**12.664.506.528,00**	**10.605.588.173,00**	**83,74**	**7.849.463.647,00**	**2.756.124.526,00**

(20) Alat-alat Laboratorium

Realisasi BM Alat-alat Laboratorium pada TA 2020 sebesar Rp130.500.000,00, yaitu 95,23% dari anggaran pada TA 2020 sebesar Rp137.035.000,00 dan 154,92% dari realisasi TA 2019 sebesar Rp84.235.000,00 dapat dirinci sebagai berikut:

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium-LRA		TA 2020			TA 2018	Naik (Turun) (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Umum	0,00	0,00	0,00	83.435.000,00	(83.435.000,00)
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Kimia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Lainnya	0,00	0,00	0,00	800.000,00	(800.000,00)
4	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium, Logam, Mesin, Listrik.	13.7035.000,00	130.500.000,00	95,23	0,00	130.500.000,00
Jumlah		**137.035.000,00**	**130.500.000,00**	**95,23**	**84.235.000,00**	**46.265.000,00**

(21) Alat-alat Peraga/Praktek Sekolah

Realisasi BM Alat-alat peraga/praktek sekolah pada TA 2020 sebesar Rp2.350.825.548,00, yaitu 79,22% dari anggaran pada TA 2020 sebesar Rp2.967.615.400,00 dan 85,30% dari realisasi TA 2019 sebesar Rp2.756.060.419,00 dapat dirinci lebih lanjut sebagai berikut:

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek-LRA		TA 2020			TA 2019	Naik (Turun) (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Bahasa Indonesia	115.954.400,00	114.487.733,00	98,74	11.908.800,00	102.578.933,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi :Matematika	112.000.000,00	110.923.995,00	99,04	0,00	110.923.995,00
3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : IPA Dasar	330.000.000,00	228.522.800,00	69,25	0,00	228.522.800,00
4	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : IPS	160.500.000,00	159.054.400,00	99,10	0,00	159.054.400,00
5	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi :Ketrampilan	100.000.000,00	99.200.000,00	99,20	0,00	99.200.000,00
6	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi :Kesenian	1.347.000.000,00	974.815.620,00	72,37	597.976.000,00	376.839.620,00
7	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi :Olah Raga	696.000.000,00	563.760.000,00	81,00	180.153.000,00	383.607.000,00
8	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	106.161.000,00	100.061.000,00	94,25	1.966.022.619,00	(1.865.961.619,00)
Jumlah		**Rp2.967.615.400**	**2.350.825.548,00**	**79,22**	**2.756.060.419,00**	**(405.234.871,00)**

(22) Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan

Realisasi BM Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan pada TA 2020 sebesar Rp8.900.000,00, yaitu 98,89% dari anggaran pada TA 2020 sebesar Rp9.000.000,00 dan 42,19% dari realisasi TA 2019 sebesar Rp9.244.750,00.

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-LRA		TA 2020			TA 2019	Naik (Turun) (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Fisika Kesehatan	3.900.000,00	3.900.000,00	100	0,00	3.900.000,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Kerja	5.100.000,00	5.000.000,00	98,04	0,00	5.000.000,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Proteksi Lingkungan	0,00	0,00	0,00	9.244.750,00	(9.244.750,00)
Jumlah		**9.000.000,00**	**8.900.000,00**	**98,89**	**9.244.750,00**	**(344.750,00)**

(23) Alat Laboratorium Lingkungan Hidup

Realisasi BM Alat Laboratorium Lingkungan Hidup pada TA 2020 sebesar Rp0,00, yaitu0% dari anggaran pada TA 2020 sebesar Rp0,00 dan 0% dari realisasi TA 2019 sebesar Rp929.970.000,00 dapat dirinci lebih lanjut sebagai berikut:

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-LRA		TA 2020			TA 2019	Naik (Turun) (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat laboratorium Kualitas Air dan tanah	0,00	0,00	0,00	731.000.000,00	(731.000.000,00)
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Laboratorium Lingkungan	0,00	0,00	0,00	198.970.000,00	(198.970.000,00)
Jumlah		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**929.970.000,00**	**(929.970.000,00)**

(24) Persenjataan Non Senjata Api

Realisasi BM Persejataan non senjata api pada TA 2020 sebesar Rp19.979.752,00, yaitu 100% dari panggaran pada TA 2020 sebesar Rp19.979.752 dan 0% dari realisasi TA 2019 sebesar Rp.0,00.

(25) Alat keamanan dan perlindungan

Realisasi BM Alat keamanan dan perlindungan pada TA 2020 sebesar Rp11.600.000,00, yaitu 89,13% dari anggaran pada TA 2020 sebesar Rp13.015.000,00 dan 5,93% dari realisasi TA 2019 sebesar Rp195.594.950,00 dapat dirinci lebih lanjut sebagai berikut:

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan-LRA		TA 2020			TA 2019	Naik (Turun) (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bantu Kemanan	13.015.000,00	11.600.000,00	89,13	46.484.450,00	(34.884.450,00)
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Perlindungan	0,00	0,00	0,00	149.110.500,00	(149.110.500,00)
Jumlah		**13.015.000,00**	**11.600.000,00**	**89,13**	**195.594.950,00**	**(183.994.950,00)**

(26) BLUD peralatan mesin

Realisasi BM BLUD peralatan mesin pada TA 2020 sebesar Rp19.961.016.678,00, yaitu 65,78% dari anggaran pada TA 2020 sebesar Rp30.344.531.709,00 dan 156.07% dari realisasi TA 2019 sebesar Rp12.789.750.332,00.

(27) Peralatan Mesin Dana BOS

Realisasi BM Peralatan Mesin Dana BOS pada TA 2020 sebesar Rp 35.007.415.903,00, yaitu 98,54% dari anggaran pada TA 2020 sebesar Rp35.526.655.452,00,00 dan 189,21% dari realisasi TA 2019 sebesar Rp18.501.869.771,00.

V.1.b.2)c) BM-Gedung dan Bangunan

Anggaran dan realisasi belanja modal gedung dan bangunan tahun anggaran 2020 mengalami penurunan signifikan dibandingkan anggaran dan realisasi belanja tahun anggaran 2019. Anggaran beberapa proyek terkait belanja modal gedung dan bangunan harus direalokasi atau ditangguhkan pelaksanaan karena dampak Covid-19. Berikut daftar beberapa proyek terkait belanja gedung dan bangunan yang di*refocusing* anggarannya :

Daftar Proyek terkait Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang Direfocusing Anggarannya

SKPD	KEGIATAN	PEKERJAAN	APBD DEFINITIF	APBD REFOCUSSING	NAIK/ TURUN
Dinas P dan K	Pembangunan Sarpras SD	SD Negeri Rawajaya 08 (Kec. Bantarsari)	50.000.000	1.250.000	(48.750.000)
Dinas P dan K	Pembangunan Sarpras SD	SD Negeri Bulaksari 02 (Kec. Bantarsari)	50.000.000	1.250.000	(48.750.000)
Dinas P dan K	Revitalisasi SD Negeri	Revitalisasi SD Negeri Sindangsari 01	1.000.000.000	500.000.000	(500.000.000)
Dinas P dan K	Rehabilitasi sedang/ berat sarpras SD	Rehabilitasi Talud SD Negeri Tayem Timur 04 (Kec. Karangpucung)	100.000.000	2.500.000	(97.500.000)
Dinas P dan K	Rehabilitasi sedang/ berat sarpras SD	Rehabilitasi sedang/ berat sarpras SD Negeri Sindangbarang 06 (Kec. Karangpucung)	100.000.000	2.500.000	(97.500.000)
Dinas P dan K	Rehabilitasi sedang/ berat ruang kelas SMP	Rehabilitasi sedang/ berat ruang kelas SMP Negeri 1 Jeruklegi	200.000.000	125.000.000	(75.000.000)
Dinas P dan K	Rehabilitasi sedang/ berat ruang kelas sekolah PAUD	Rehabilitasi sedang/ berat ruang kelas sekolah TK Aisyiyah Maos Lor	100.000.000	64.500.000	(35.500.000)
Dinas P dan K	Rehabilitasi sedang/ berat ruang kelas SD	Rehabilitasi sedang/ berat ruang kelas SD Negeri Sawangan 02 (Kec. Jeruklegi)	150.000.000	3.750.000	(146.250.000)
Dinas P dan K	Rehabilitasi sedang/ berat ruang kelas SD	Rehabilitasi sedang/ berat ruang kelas SD Negeri Margasari 01 (Kec. Sidareja)	150.000.000	100.000.000	(50.000.000)
Dinas P dan K	Rehabilitasi sedang/ berat ruang kelas SD	Rehabilitasi sedang/ berat ruang kelas SD Negeri Gunungsimping 04 (Kec. Cilacap Tengah)	200.000.000	100.000.000	(100.000.000)
Dinas P dan K	Rehabilitasi sedang/ berat bangunan SD	Rehabilitasi SD Negeri Jenang 02	200.000.000	100.000.000	(100.000.000)
Dinas P dan K	Rehabilitasi sedang/ berat ruang kelas SD	Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Banjarwaru 04 Desa Banjarwaru Kec.Nusawungu	150.000.000	100.000.000	(50.000.000)
Dinas P dan K	Pengembangan sarana dan prasarana PAUD	Pengembangan sarana dan prasarana TK Diponegoro Sampang Kecamatan Sampang	50.000.000	500.000	(49.500.000)
Dinas P dan K	Pembangunan Sarpras SD	Pembangunan Tempat Parkir SD Negeri Madura 07 (Kec. Wanareja)	30.000.000	750.000	(29.250.000)
Dinas P dan K	Pembangunan Sarpras SD	Pembangunan Tempat Parkir SD Negeri Adimulya 01 (Kec. Wanareja)	30.000.000	750.000	(29.250.000)
Dinas P dan K	Pembangunan Sarpras PAUD	Pembangunan Sarpras PAUD Alam Lestari Desa Karangkemiri Kec.Jeruklegi	50.000.000	1.250.000	(48.750.000)
Dinas P dan K	Penambahan ruang guru SD	Pembangunan Ruang Guru SD Negeri Sidamulya 01 (Kec. Karangpucung)	150.000.000	3.750.000	(146.250.000)
Dinas P dan K	Penambahan ruang kelas SD	Pembangunan RKB SD Negeri Penggalang 06 (Kec. Adipala)	150.000.000	-	(150.000.000)
Dinas P dan K	Penambahan ruang kelas SD	Pembangunan RKB SD Negeri Cilibang 02 (Kec. Jeruklegi)	150.000.000	3.750.000	(146.250.000)
Dinas P dan K	Penambahan ruang kelas sekolah PAUD	Pembangunan RKB PAUD Al Barokah Babakan Kecamatan Karangpucung	120.000.000	3.000.000	(117.000.000)
Dinas P dan K	Pembangunan Sarpras SMP	Pembangunan Pagar SMP Negeri 1 Patimuan	150.000.000	100.000.000	(50.000.000)
Dinas P dan K	Pembangunan Sarpras SD	Pembangunan Pagar SD Negeri Widarapayung Wetan 01 (Kec. Binangun)	100.000.000	2.500.000	(97.500.000)
Dinas P dan K	Pembangunan Sarpras SD	Pembangunan Pagar SD Negeri Rungkang 01 (Kec. Gandrungmangu)	75.000.000	1.875.000	(73.125.000)
Dinas P dan K	Pembangunan Sarpras SD	Pembangunan Pagar SD Negeri Madura 08 (Kec. Wanareja)	50.000.000	1.250.000	(48.750.000)
Dinas P dan K	Pembangunan Sarpras SD	Pembangunan Pagar SD Negeri Karangkemiri 02 (Kec. Jeruklegi)	100.000.000	2.500.000	(97.500.000)
Dinas P dan K	Pembangunan Sarpras SD	Pembangunan Pagar SD Negeri Karanggintung 07 (Kec. Gandrungmangu)	75.000.000	1.875.000	(73.125.000)
Dinas P dan K	Pembangunan Sarpras SD	Pembangunan Pagar SD Negeri Karanggintung 05 (Kec. Gandrungmangu)	100.000.000	2.500.000	(97.500.000)
Dinas P dan K	Pembangunan Sarpras SD	Pembangunan Pagar SD Negeri Kaliwungu 05 (Kec. Kedungreja)	100.000.000	2.500.000	(97.500.000)
Dinas P dan K	Pembangunan Sarpras SD	Pembangunan Pagar SD Negeri Jeruklegi Wetan 01 (Kec. Jeruklegi)	50.000.000	1.250.000	(48.750.000)
Dinas P dan K	Pembangunan Sarpras SD	Pembangunan Pagar SD Negeri Ciwalen 03 (Kec. Dayeuhluhur)	50.000.000	1.250.000	(48.750.000)
Dinas P dan K	Pembangunan Sarpras SD	Pembangunan Pagar SD Negeri Citembong 02 (Kec. Bantarsari)	50.000.000	1.250.000	(48.750.000)
Dinas P dan K	Pembangunan Sarpras SD	Pembangunan Pagar SD Negeri Cinyawang 02 (Kec. Patimuan)	100.000.000	2.500.000	(97.500.000)
Dinas P dan K	Pembangunan Sarpras SD	Pembangunan Pagar SD Negeri Cilibang 01 (Kec. Jeruklegi)	50.000.000	1.250.000	(48.750.000)
Dinas P dan K	Pembangunan Sarpras SD	Pembangunan Pagar SD Negeri Bulusari 02 (Kec. Gandrungmangu)	75.000.000	1.875.000	(73.125.000)
Dinas P dan K	Pembangunan Sarpras SD	Pembangunan Pagar SD Negeri Bulaksari 03 (Kec. Bantarsari)	75.000.000	1.875.000	(73.125.000)
Dinas P dan K	Pembangunan Sarpras SD	Pembangunan Pagar SD Negeri Bantar 05 (Kec. Wanareja)	60.000.000	1.500.000	(58.500.000)
Dinas P dan K	Pembangunan Sarpras SD	Pembangunan Pagar SD Negeri Bantar 01 (Kec. Wanareja)	50.000.000	1.250.000	(48.750.000)
Dinas P dan K	Pembangunan Sarpras SD	Pembangunan Pagar SD Negeri Banjareja 02 (Kec. Nusawungu)	100.000.000	2.500.000	(97.500.000)
Dinas P dan K	Pembangunan Sarpras SD	Pembangunan Mushola SD Negeri Karanganyar 04 (Kec. Gandrungmangu)	75.000.000	-	(75.000.000)
Dinas P dan K	Pembangunan Sarpras SMP	Pembangunan MCK SMP Negeri 6 Cilacap	150.000.000	75.000.000	(75.000.000)
Dinas P dan K	Pembangunan Sarpras SD	Pembangunan MCK SD Negeri Wanareja 04 (Kec. Wanareja)	25.000.000	625.000	(24.375.000)
Dinas P dan K	Pembangunan Sarpras SD	Pembangunan MCK SD Negeri Pahonjean 02 (Kec. Majenang)	25.000.000	625.000	(24.375.000)
Dinas P dan K	Pembangunan Sarpras SD	Pembangunan MCK SD Negeri Madusari 01 (Kec. Wanareja)	30.000.000	750.000	(29.250.000)
Dinas P dan K	Pembangunan Sarpras SD	Pembangunan MCK SD Negeri Kalijaran 01 (Kec. Maos)	50.000.000	1.250.000	(48.750.000)
Dinas P dan K	Pembangunan Sarpras SD	Pembangunan MCK SD Negeri Gintungreja 01 (Kec. Gandrungmangu)	50.000.000	1.250.000	(48.750.000)
Dinas P dan K	Pembangunan Sarpras SD	Pembangunan MCK SD Negeri Gandrungmangu 05 (Kec. Gandrungmangu)	50.000.000	1.250.000	(48.750.000)
Dinas P dan K	Pembangunan Sarpras SD	Pembangunan MCK SD Negeri Bulusari 01 (Kec. Gandrungmangu)	50.000.000	1.250.000	(48.750.000)
Dinas P dan K	Pembangunan Sarpras SD	Pembangunan MCK SD Negeri Brebeg 03 (Kec. Jeruklegi)	50.000.000	1.250.000	(48.750.000)
Dinas P dan K	Pembangunan Sarpras SD	Pembangunan MCK SD Negeri Binangun 06 (Kec. Bantarsari)	50.000.000	1.250.000	(48.750.000)
Dinas P dan K	Pembangunan Sarpras SD	Pembangunan MCK SD Negeri Binangun 04 (Kec. Bantarsari)	50.000.000	1.250.000	(48.750.000)
Dinas P dan K	Pembangunan Sarpras SD	Pembangunan drainase SD Negeri Patimuan 05 (Kec. Patimuan)	150.000.000	3.750.000	(146.250.000)
Dinas P dan K	Pembangunan Sarpras SD	Pavingisasi SD Negeri Kalijaran 02 (Kec. Maos)	50.000.000	1.250.000	(48.750.000)
DPKUKM	Rehabilitasi Pasar Pemda	Rehabilitasi Pasar Gede, Tambakreja Kec. Cilacap Selatan	4.000.000.000	1.650.000.000	(2.350.000.000)
DPKUKM	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	150.000.000	42.367.400	(107.632.600)
DPKUKM	Rehabilitasi Pasar Pemda	Pembangunan drainase Pasar Pelem, Gading Mertasinga Kec. Cilacap Utara	350.000.000	175.000.000	(175.000.000)
DPKUKM	Rehabilitasi Pasar Pemda	Pembangunan drainase Pasar Majenang, Sindangsari Kec. Majenang	350.000.000	175.000.000	(175.000.000)
DPKUKM	Rehabilitasi Pasar Pemda	Pembangunan Los Tambahan Pasar Panimbang	200.000.000	-	(200.000.000)
DPUPR	Pembangunan Gedung Pemerintah	Pembangunan POS TNI Angkatan Laut (AL) Klaces Kec. Kampung Laut	200.000.000	-	(200.000.000)
DPUPR	Peningkatan/Penataan/Rehabilitasi Gedung Pemerintah	Rehabilitasi Kantor Korwil P dan K Karangpucung	100.000.000	-	(100.000.000)
DPUPR	Peningkatan/Penataan/Rehabilitasi Gedung Pemerintah	Rehabilitasi Kantor Kejaksaan Cilacap	10.000.000.000	101.800.000	(9.898.200.000)
DPUPR	Peningkatan/Penataan/Rehabilitasi Gedung Pemerintah	Rehabilitasi Gedung Kantor Bappeda	10.000.000.000	101.800.000	(9.898.200.000)
DPUPR	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	Peningkatan Pembangunan sarana dan prasarana pariwisata Obyek Wisata Air Panas Cipari	4.000.000.000	2.487.122.500	(1.512.877.500)
DPUPR	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga	1.100.000.000	689.778.833	(410.221.167)
DPUPR	Pembangunan Gedung Pemerintah	Penataan Calon Kantor Dinas PU Terpadu	1.250.000.000	998.400.000	(251.600.000)
DPUPR	Pembangunan Gedung Pemerintah	Pembangunan Mall Pelayanan Publik	15.000.000.000	101.800.000	(14.898.200.000)
DPUPR	Pembangunan Gedung Pemerintah	Pembangunan Kantor BPPKAD	14.000.000.000	101.800.000	(13.898.200.000)
Dinas Pertanian	Pengembangan Kawasan Buah Jambusari (KBJ)	Pengembangan Kawasan Buah Jambusari (KBJ)	689.560.200	56.617.500	(632.942.700)
Dinas Pertanian	Pembangunan/Perbaikan Balai Penyuluh Pertanian (BPP) di Kecamatan dan Penyediaan Sarana Pendukung Penyuluhan	Pembangunan/Perbaikan Balai Penyuluh Pertanian (BPP) di Kecamatan dan Penyediaan Sarana Pendukung Penyuluhan	75.000.000	-	(75.000.000)
Disperkimta	Penataan RTH	Penataan RTH Turus Jalan di Kecamatan Sidareja	50.000.000	-	(50.000.000)
Disperkimta	Penataan RTH	Penataan RTH Turus Jalan di Kecamatan Nusawungu	50.000.000	-	(50.000.000)
Disperkimta	Penataan Makam	Penataan Makam Sabuk Janur kel.Kebonmanis kec.Cilacap Utara	150.000.000	-	(150.000.000)
Disperkimta	Penataan Makam	Penataan Makam Cikento Kel. Gunungsimping Kec. Cilacap Tengah	100.000.000	50.000.000	(50.000.000)
DLH	Pembangunan TPS	Pembangunan TPS3R di Kec. Cilacap Utara	200.000.000	-	(200.000.000)
DLH	Pembangunan TPS	Pembangunan TPS3R di Eks Distrik Majenang	200.000.000	-	(200.000.000)
Dispopar	Pengembangan Daerah Tujuan Wisata	Pembangunan destinasi wisata Pulau Pelatar Tengah (Pulau Momongan)	1.104.101.250	373.660.250	(730.441.000)
Dispopar	Pembangunan Destinasi Wisata Pulau Pelatar Tengah (Pulau Momongan) (DAK)	Pembangunan Atraksi (Daya Tarik) Kawasan Pariwisata (DAK)	692.136.356	-	(692.136.356)
BLUD RSUD Majenang	Pembangunan Rumah Sakit	Pembangunan Ruang Rawat Jalan Rumah Sakit (Hemodialisa)	2.500.000.000	-	(2.500.000.000)
BLUD RSUD Majenang	Pembangunan Rumah Sakit	Pembangunan Ruang Rawat Inap Pasca Bedah dan ICU	6.500.000.000	6.000.000.000	(500.000.000)
BLUD RSUD Cilacap (SKPD)	Pembangunan Rumah Sakit	Pembangunan Gedung B (Instalasi Radiologi) RSUD Cilacap	10.000.000.000	-	(10.000.000.000)

Realisasi BM-Gedung dan Bangunan pada TA 2020 sebesar Rp63.032.862.639,00, yaitu 86,31% dari anggaran pada TA 2020 sebesar Rp73.029.906.841,00 dan 46,88% dari realisasi TA 2019 sebesar Rp134.459.038.713,00. Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagai berikut:

BM-Gedung dan Bangunan		TA 2020			TA 2019	Naik (Turun) (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
1	Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	70.880.484.841,00	61.900.845.601,00	87,33	132.886.208.315,00	(70.985.362.714,00)
2	Pengadaan bangunan gedung tempat tinggal	535.878.500,00	532.040.238,00	99,28	837.635.500,00	(305.595.262,00)
3	Pengadaan bangunan menara	840.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pengadaan bangunan bersejarah	410.000.000,00	253.010.000,00	61,71	144.305.250,00	108.704.750,00
5	Pengadaan bangunan tugu peringatan	363.543.500,00	346.966.800,00	95,44	479.582.409,00	(132.615.609,00)
6	Pengadaan bangunan rambu-rambu	0,00	0,00	0,00	111.307.239,00	(111.307.239,00)
Jumlah		**73.029.906.841,00**	**63.032.862.639,00**	**86,31**	**134.459.038.713,00**	**(Rp71.426.176.074,00)**

(1) Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja

Realisasi BM pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja pada TA 2020 sebesar Rp61.900.845.601,00, yaitu 87,33% dari anggaran pada TA 2020 sebesar Rp70.880.484.841,00 dan 46,58% dari realisasi TA 2019 sebesar Rp132.886.208.315,00 dapat dirinci lebih lanjut sebagai berikut:

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tempat Kerja-LRA		TA 2020			TA 2019	Naik (Turun) (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
1	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	11.096.727.850,00	10.298.284.766,00	92,80	20.620.053.620,00	(10.321.768.854,00)
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gudang	162.100.000,00	160.773.300,00	99,18	32.000.000,00	128.773.300,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Laboratorium	0,00	0,00	0,00	882.271.600,00	(882.271.600,00)
4	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Instalasi	1.536.700.000,00	809.747.273,00	52,69	0,00	809.747.273,00
5	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	16.099.908.758,00	14.571.292.814,00	90,51	52.186.839.305,00	(37.615.546.491,00)
6	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Ibadah	175.874.500,00	175.364.500,00	99,71	152.960.000,00	22.404.500,00
7	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	197.445.000,00	196.307.250,00	99,42	297.247.700,00	-100.940.450,00
8	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	27.682.962.450,00	26.259.136.570,00	94,86	38.622.736.967,00	(12.363.600.397,00)
9	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	4.236.527.433,00	3.786.216.639,00	89,37	3.793.373.550,00	(7.156.911,00)
10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	3.825.000.000,00	3.413.468.950,00	89,24	0,00	3.413.468.950,00
11	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	0,00	0,00	0,00	113.864.500,00	809.747.273,00
12	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool	75.000.000,00	74.650.000,00	99,53	309.396.000,00	(37.615.546.491,00)
13	Belanja Modal Gedung dan	56.617.500,00	56.030.000,00	98,96	590.851.000,00	(534.821.000,00)

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tempat Kerja-LRA		TA 2020			TA 2019	Naik (Turun) (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
	Bangunan - Pengadaan Bangunan Kandang Hewan/Ternak					
14	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Perpustakaan	0,00	0,00	0,00	393.101.750,00	(393.101.750,00)
15	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar	248.800.000,00	243.752.350,00	97,97	146.762.300,00	96.990.050,00
16	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	5.486.821.350,00	1.855.821.189,00	33,82	14.744.750.023,00	(12.888.928.834,00)
Jumlah		**70.880.484.841,00**	**61.900.845.601,00**	**87,33**	**132.886.208.315,00**	**(70.985.362.714,00)**

(2) Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal

Realisasi BM Pengadaan Bangunan Gedung Tempat tinggal pada TA 2020 sebesar Rp532.040.238,00, yaitu 99,28% dari anggaran pada TA 2020 sebesar Rp535.878.500,00 dan 63,52% dari realisasi TA 2019 sebesar Rp837.635.500,00.

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Bangunan Gedung Tempat Tinggal-LRA		TA 2020			TA 2019	Naik (Turun) (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
1	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan II	200.000.000,00	199.300.000,00	99,65	0,00	199.300.000,00
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Goloongan III	200.000.000,00	197.800.000,00	98,90	837.635.500	(639.835.500,00)
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	135.878.500,00	134.940.238,00	99,31	0,00	134.940.238,00
Jumlah		**535.878.500,00**	**532.040.238,00**	**99,28**	**837.635.500,00**	**(305.595.262,00)**

(3) Pengadaan Bangunan Menara

Realisasi BM Pengadaan Bangunan Menara pada TA 2020 sebesar Rp0,00, yaitu 0% dari anggaran pada TA 2020 sebesar Rp840.000.000,00 dan 0% dari realisasi TA 2019 sebesar Rp0,00.

(4) Pengadaan Bangunan Bersejarah

Realisasi BM Pengadaan Bangunan Bersejarah pada TA 2020 sebesar Rp253.010.000,00, yaitu 61,71% dari anggaran pada TA 2020 sebesar Rp410.000.000,00 dan 175,33% dari realisasi TA 2019 sebesar Rp144.305.250,00.

(5) Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan

Realisasi BM pengadaan Bangunan tugu peringatan pada TA 2020 sebesar Rp346.966.800,00, yaitu 95,44% dari anggaran pada TA 2020 sebesar Rp363.543.500,00 dan 72,35% dari realisasi TA 2019 sebesar Rp479.582.409,00 dapat dirinci lebih lanjut sebagai berikut:

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan-LRA		Tahun 2020			Tahun 2019	Naik (Turun) (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
1	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan Lainnya	105.000.000,00	89.870.000,00	85,59	283.924.509,00	(194.054.509,00)

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan-LRA		Tahun 2020			Tahun 2019	Naik (Turun) (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan	258.543.500,00	257.096.800,00	99,44	195.657.900,00	61.438.900,00
Jumlah		**363.543.500,00**	**346.966.800,00**	**95,44**	**479.582.409,00**	**(132.615.609,00)**

(6) Pengadaan Bangunan Rambu-rambu

Realisasi BM pengadaan Bangunan rambu-rambu pada TA 2020 sebesar Rp0,00, yaitu 0% dari anggaran pada TA 2020 sebesar Rp0,00 dan 0% dari realisasi TA 2019 sebesar Rp111.307.239,00.

V.1.b.2)d) BM-Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Anggaran dan realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan tahun anggaran 2020 mengalami penurunan signifikan dibandingkan anggaran dan realisasi belanja jalan, irigasi dan jaringan tahun anggaran 2019. Anggaran beberapa proyek terkait belanja modal jalan, irigasi dan jaringan harus direalokasi atau ditangguhkan pelaksanaan karena dampak Covid-19. Berikut daftar proyek terkait Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan yang di*refocusing* anggarannya:

Daftar Proyek terkait Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan yang Direfocusing Anggarannya				
SKPD	**KEGIATAN**	**APBD DEFINITIF**	**APBD REFOCUSSING**	**NAIK/ TURUN**
Dinas PSDA	Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK)	4.701.990.000	-	(4.701.990.000)
Dinas PSDA	Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Pembuang	2.400.000.000	-	(2.400.000.000)
Dinas PSDA	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi	8.000.000.000		(8.000.000.000)
Dinas PSDA	Pembangunan Sumur Bor Dalam Di Kab. Cilacap	750.000.000	-	(750.000.000)
Dinas PSDA	Peningkatan Distribusi Penyediaan Air Baku	1.200.000.000	-	(1.200.000.000)
Dinas PSDA	Peningkatan Daerah Irigasi/ DI	1.700.000.000	-	(1.700.000.000)
Dinas PSDA	Normalisasi saluran pembuang	300.000.000	-	(300.000.000)
Disperkimta	Meterisasi Penerangan area publik (alun-alun,lapangan, taman bermain) di Wilayah Kab.Cilacap	400.000.000	200.000.000	(200.000.000)
Disperkimta	Meterisasi LPJU Abonemen di Wilayah Eks. Distrik Sidareja	4.100.000.000	-	(410.000.000)
Disperkimta	Meterisasi LPJU Abonemen di Wilayah Eks. Distrik Jeruklegi dan Kota Cilacap	1.370.000.000	400.000.000	(970.000.000)
Disperkimta	Meterisasi LPJU Abonemen di Wilayah Eks. Distrik Majenang	1.380.000.000	625.000.000	(755.000.000)
Disperkimta	Meterisasi LPJU Abonemen di Wilayah Eks. Distrik Sidareja	2.230.000.000	900.000.000	(1.330.000.000)
Disperkimta	Meterisasi LPJU Abonemen di Wilayah Eks. Distrik Kroya	1.550.000.000	525.000.000	(1.025.000.000)
Disperkimta	Meterisasi LPJU Jalan Kabupaten di Wilayah Kab.Cilacap	1.000.000.000	350.000.000	(650.000.000)
Disperkimta	Meterisasi LPJU Jalan Provinsi di Wilayah Kab. Cilacap	350.000.000	250.000.000	(100.000.000)
Disperkimta	Meterisasi LPJU Jalan Desa On Jaringan PLN di Wilayah Kab.Cilacap	1.200.000.000	605.000.000	(1.425.000.000)
Disperkimta	Pembangunan Drainase Lingkungan	700.000.000	-	(700.000.000)
Disperkimta	Pemasangan Lampu Tenaga Surya di Wilayah Kabupaten Cilacap	400.000.000	200.000.000	(200.000.000)
Disperkimta	Pembangunan Jalan Lingkungan	1.000.000.000	397.000.000	(99.250.000)
Disperkimta	Pembangunan Talud Jalan Lingkungan	625.000.000	-	(625.000.000)
Disperkimta	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	100.000.000	-	(100.000.000)
Disperkimta	Penataan Lingkungan Permukiman	750.000.000	348.500.000	(501.500.000)
Disperkimta	Peningkatan Jalan Lingkungan	450.000.000	128.175.500	(321.824.500)
Disperkimta	Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase Lingkungan	100.000.000	-	(100.000.000)
Dinas Pertanian	Rehabilitasi dan Pembuatan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani (JITUT)	18.900.000.000	-	(18.900.000.000)
Dinas Pertanian	Pengembangan Kawasan Buah Jambusari (KBJ)	1.400.000.000	725.000.000	(675.000.000)
DPUPR	Pembangunan Fasilitas Publik	5.000.000.000	101.000.000	(4.899.000.000)
DPUPR	Peningkatan Jalan Kabupaten	154.100.000.000	90.500.000.000	(63.600.000.000)
DPUPR	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	1.200.000.000	250.000.000	(950.000.000)
DPUPR	Pembangunan Jembatan	11.100.000.000	10.000.000.000	(1.100.000.000)
DPUPR	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	2.750.000.000	1.100.000.000	(1.650.000.000)
Disporapar	Pengembangan Daerah Tujuan Wisata	895.898.750	149.939.250	(745.959.500)

Realisasi BM-Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada TA 2020 sebesar Rp264.551.341.345,00, yaitu 93,39% dari anggaran pada TA 2020 sebesar Rp283.275.664.000,00 dan 67,57% dari realisasi TA 2019 sebesar Rp391.540.159.364,00 dengan rincian sebagai berikut:

BM-Jalan, Irigasi dan Jaringan		TA 2020			TA 2019	Naik (Turun) (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
1	BM-Konstruksi Jalan	145.132.867.050,00	139.697.036.964,00	96,25	235.579.156.367,00	(95.882.119.403,00)
2	BM-Konstruksi Jembatan	12.610.000.000,00	12.358.533.000,00	98,01	23.051.215.400,00	(10.692.682.400.00)
3	Pengadaan Bangunan Air Irigasi	78.526.990.000,00	73.303.621.702,00	93,35	52.504.821.975,00	20.798.799.727,00
4	Pengadaan Bangunan Air Rawa	100.000.000,00	98.605.000,00	98,61	0,00	Rp98.605.000,00
5	Pengadaan Bangunan	19.699.939.250,00	17.535.615.704,00	89,01	44.493.796.000,00	(26.958.180.296,00)

BM-Jalan, Irigasi dan Jaringan		TA 2020			TA 2019	Naik (Turun) (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
	pengaman sungai dan Penanggulangan BA					
6	Pengadaan Bangunan air bersih/baku	2.500.000.000,00	2.466.257.000,00	98,65	1.826.371.000,00	639.886.000,00
7	Pengadaan Bangunan Air Kotor	6.390.786.900,00	6.254.956.300,00	97,87	6.736.532.522,00	(481.576.222,00)
8	Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	50.000.000,00	50.000.000,00	100	0,00	50.000.000,00
9	Pengadaan Instalasi Air kotor	4.869.760.450,00	504.760.450,00	10,37	627.955.700,00	(123.195.250,00)
10	Pengadaan instalasi pengolahan sampah	10.066.000,00	66.000,00	0,66	0,00	Rp66.000,00
11	Pengadaan Instalasi pengaman	45.150.000,00	44.453.000,00	98,46	0,00	44.453.000,00
12	Pengadaan Jaringan Air Minum	186.229.350,00	183.789.217,00	98,69	192.935.300,00	(9.146.083,00)
13	Pengadaan Jaringan listrik	13.153.875.000,00	12.053.647.008,00	91,64	26.350.660.100,00	(14.297.013.092,00)
14	Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	0,00	0,00	0,00	157.791.000,00	(157.791.000,00)
11	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	0,00	0,00	0,00	18.924.000,00	(18.924.000,00)
Jumlah		**283.275.664.000,00**	**264.551.341.345,00**	**93,39**	**391.540.159.364,00**	**(126.988.818.019)**

(1) BM Jalan

Realisasi BM Konstruksi Jalan pada TA 2020 sebesar Rp139.697.036.964,00, yaitu 96,25% dari anggaran pada TA 2020 sebesar Rp145.132.867.050,00 dan 59,30% dari realisasi TA 2019 sebesar Rp235.579.156.367,00 dapat dirinci lebih lanjut sebagai berikut:

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan-LRA		TA 2020			TA 2019	Naik (Turun) (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
1	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	127.122.964.200,00	122.351.740.102,00	96,25	220.121.052.866,00	(97.769.312.764,00)
2	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	18.009.902.850,00	17.345.296.862,00	96,31	15.458.103.501,00	1.887.193.361,00
Jumlah		**145.132.867.050,00**	**139.697.036.964,00**	**96,25**	**235.579.156.367,00**	**(95.882.119.403,00)**

(2) BM Jembatan

Realisasi BM Konstruksi Jembatan pada TA 2020 sebesar Rp12.358.533.000,00, yaitu 98,01% dari anggaran pada TA 2020 sebesar Rp12.610.000.000,00 dan 53,61% dari realisasi TA 2019 sebesar Rp23.051.215.400,00 dapat dirinci lebih lanjut sebagai berikut :

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan-LRA		TA 2020			TA 2019	Naik (Turun) (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
1	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota	12.485.000.000,00	12.234.033.000,00	97,99	22.962.194.000,00	(10.728.161.000,00)
2	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Khusus	125.000.000,00	124.500.000,00	99,60	89.021.400,00	35.478.600,00
Jumlah		**12.610.000.000,00**	**12.358.533.000,00**	**98,01**	**23.051.215.400,00**	**(10.692.682.400,00)**

(3) Pengadaan Bangunan Air Irigasi

Realisasi BM Pengadaan Bangunan Air Irigasi pada TA 2020 sebesar Rp73.303.621.702,00, yaitu 93,35% dari anggaran pada TA 2020 sebesar Rp78.526.990.000,00 dan

139,61% dari realisasi TA 2019 sebesar Rp52.504.821.975,00 dapat dirinci lebih lanjut sebagai berikut:

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi-LRA		TA 2020			TA 2019	Naik (Turun) (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
1	Pengadaan Bangunan Pengambilan Irigasi	2.625.000.000,00	2.600.303.000,00	99,06	1.935.991.250,00	664.311.750,00
2	Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi	74.976.990.000,00	70.409.143.702,00	93,91	45.584.103.725,00	24.825.039.977,00
3	Pengadaan Bangunan Pembuang Irigasi	0,00	0,00	0,00	173.450.000,00	(173.450.000,00)
4	Pengadaan Bangunan Pengaman Irigasi	925.000.000,00	294.175.000,00	31,80	3.427.626.000,00	(3.133.451.000,00)
5	Pengadaan Bangunan Pelengkap Irigasi	0,00	0,00	0,00	1.383.651.000,00	(1.383.651.000,00)
Jumlah		**78.526.990.000,00**	**73.303.621.702,00**	**93,55**	**52.504.821.975,00**	**20.798.799.727,00**

(4) Pengadaan Bangunan Air Rawa

Realisasi BM Pengadaan Bangunan Air Rawa TA 2020 sebesar Rp98.605.000,00, yaitu 98,61% dari anggaran pada TA 2020 sebesar Rp100.000.000,00 dan 0,22% dari realisasi TA 2019 sebesar Rp44.493.796.000,00 dapat dirinci lebih lanjut sebagai berikut :

(5) Pengadaan Bangunan pengaman sungai dan Penanggulangan BA

Realisasi BM Pengadaan Bangunan pengaman sungai dan Penanggulangan BA pada TA 2020 sebesar Rp 17.535.615.704,00, yaitu 89,01% dari anggaran pada TA 2020 sebesar Rp 19.699.939.250,00 dan 39,41% dari realisasi TA 2019 sebesar Rp44.493.796.000,00 dapat dirinci lebih lanjut sebagai berikut :

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan BA-LRA		TA 2020			TA 2019	Naik (Turun) (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
1	Pengadaan Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	18.950.000.000,00	16.967.127.754,00	89,54	44.493.796.000,00	(27.526.668.246,00)
2	Pengadaan Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai	749.939.250,00	568.487.950,00	75,80	0,00	568.487.950,00
Jumlah		**19.699.939.250,00**	**17.535.615.704,00**	**89,01**	**44.493.796.000,00**	**(26.958.180.296,00)**

(6) Pengadaan Bangunan air bersih/baku

Realisasi BM Pengadaan Bangunan air bersih/baku pada TA 2020 sebesar Rp2.466.257.000,00, yaitu 98,65% dari anggaran pada TA 2020 sebesar Rp2.500.000.000,00 dan 136,57% dari realisasi TA 2019 sebesar Rp1.826.371.000,00 dapat dirinci lebih lanjut sebagai berikut:

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku-LRA		TA 2020			TA 2019	Naik (Turun) (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
1	Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku	2.500.000.000,00	2.466.257.000,00	98,65	1.805.881.000,00	660.376.000,00
2	Pengadaan Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	0,00	0,00	0,00	20.490.000,00	0,00
Jumlah		**2.500.000.000,00**	**2.466.257.000,00**	**98,65**	**1.826.371.000,00**	**660.376.000,00**

(7) Pengadaan Bangunan Air Kotor

Realisasi BM Pengadaan Bangunan Air Kotor pada TA 2020 sebesar Rp6.254.956.300,00, yaitu 97,87% dari anggaran pada TA 2020 sebesar Rp6.390.786.900,00 dan 92,85% dari realisasi TA 2019 sebesar Rp6.736.532.522,00 dapat dirinci lebih lanjut sebagai berikut:

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor-LRA		TA 2020			TA 2019	Naik (Turun) (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
1	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor	6.390.786.900,00	6.254.956.300,00	97,87	6.736.532.522,00	(481.576.222,00)
Jumlah		**6.390.786.900,00**	**6.254.956.300,00**	**97,87**	**6.736.532.522,00**	**(481.576.222,00)**

(8) Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih

Realisasi BM Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih pada TA 2020 sebesar Rp50.000.000,00, yaitu 100% dari anggaran pada TA 2020 sebesar Rp50.000.000,00 dan 264,21% dari realisasi TA 2019 sebesar Rp18.924.000,00.

(9) Pengadaan Instalasi Air Kotor

Realisasi BM Pengadaan Instalasi Air Kotor pada TA 2020 sebesar Rp504.760.450,00, yaitu 10,37% dari anggaran pada TA 2020 sebesar Rp4.869.760.450,00 dan 80,38% dari realisasi TA 2019 sebesar Rp627.955.700,00.

(10) Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah

Realisasi BM Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah pada TA 2020 sebesar Rp66.000,00, yaitu 0,66% dari anggaran pada TA 2020 sebesar Rp10.066.000,00 dapat dirinci lebih lanjut sebagai berikut:

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah-LRA		TA 2020			TA 2019	Naik (Turun) (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
1	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Organik	5.036.000,00	36.000,00	0,71	0,00	(36.000,00)
2	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik	5.030.000,00	30.000,00	0,60	0,00	(30.000,00)
Jumlah		**10.066.000,00**	**66.000,00**	**0,66**	**0,00**	**(66.000)**

(11) Pengadaan Instalasi Pengaman Penangkal Petir

Realisasi BM Pengadaan Instalasi Pengaman Penangkal Petir pada TA 2020 sebesar Rp44.453.000,00 yaitu 98,46% dari anggaran pada TA 2020 sebesar Rp45.150.000,00, dan 7,08% dari realisasi TA 2019 sebesar Rp627.955.700,00.

(12) Pengadaan Jaringan Air Minum

Realisasi BM Pengadaan Jaringan Air Minum pada TA 2020 sebesar Rp183.789.217,00, yaitu 98,69% dari anggaran pada TA 2020 sebesar Rp186.229.350,00 dan 95,26% dari realisasi TA 2019 sebesar Rp192.935.300,00 dapat dirinci lebih lanjut sebagai berikut:

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Air Minum-LRA		TA 2020			TA 2019	Naik (Turun) (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
1	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Pembawa	36.229.350,00	36.228.850,00	99,99	44.655.300,00	(8.426.450,00)
2	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Cabang Distribusi	150.000.000,00	147.560.367,00	98,37	148.280.000,00	(719.633,00)
Jumlah		**186.229.350,00**	**Rp183.789.217,00**	**98,69**	**192.935.300,00**	**(9.146.083,00)**

(13) Pengadaan Jaringan Listrik

Realisasi BM Pengadaan Jaringan listrik pada TA 2020 sebesar Rp12.053.647.008,00, yaitu 91,64% dari anggaran pada TA 2020 sebesar Rp13.153.875.000,00,00 dan 45,74% dari realisasi TA 2019 sebesar Rp26.350.660.100,00 dapat dirinci lebih lanjut sebagai berikut:

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik-LRA		TA 2020			TA 2019	Naik (Turun) (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
1	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Transmisi	0,00	0,00	0,00	89.319.250,00	(89.319.250,00)
2	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Distribusi	13.153.875.000,00	12.053.647.008,00	91,64	26.261.340.850,00	(14.297.013.092,00)
Jumlah		**13.153.875.000,00**	**12.053.647.008,00**	**91,64**	**26.350.660.100,00**	**(14.297.013.092,00)**

V.1.b.2)e) BM-Aset Tetap Lainnya

Realisasi BM-Aset Tetap Lainnya pada TA 2020 sebesar Rp11.867.458.126,00, yaitu 93,43% dari anggaran pada TA 2020 sebesar Rp12.702.062.658,00 dan 55% dari realisasi TA 2019 sebesar Rp21.576.305.349,20 terdiri dari:

BM. Aset Tetap Lainnya		TA 2020			TA 2019	Naik (Turun) (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
1	Pengadaan buku	1.715.974.500,00	1.636.564.234,00	95,37	3.390.604.526,00	(1.754.040.292,00)
2	Pengadaan Terbitan	0,00	0,00	0,00	134.515.000,00	(134.515.000,00)
3	Pengadaan barang bercorak kebudayaan	334.300.000,00	266.070.000,00	79,59	217.827.600,00	48.242.400,00
4	Pengadaan alat olahraga lainnya	9.930.000,00	9.930.000,00	100,	223.605.000,00	(213.675.000,00)
5	Pengadaan Aset Tetap Renovasi	198.000.000,00	198.000.000,00	100	593.266.000,00	(395.266.000,00)
6	Belanja Modal Dana BOS - Aset Tetap Lainnya	10.443.858.158,00	9.756.893.892,00	93,42	17.016.487.223,20	(7.259.593.331,20)
Jumlah		**12.702.062.658,00**	**11.867.458.126,00**	**93,43**	**21.576.305.349,20**	**(9.708.847.223,20)**

(1) Pengadaan buku

Realisasi BM Pengadaan Buku pada TA 2020 sebesar Rp1.636.564.234,00, yaitu 95,37% dari anggaran pada TA 2020 sebesar Rp**1.715.974.500,00** dan 48,27% dari realisasi TA 2019 sebesar Rp3.390.604.526,00 dapat dirinci lebih lanjut sebagai berikut:

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku-LRA		TA 2020			TA 2019	Naik (Turun) (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
1	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	1.713.574.500,00	1.634.164.234,00	95,37	3.385.604.526,00	(1.754.040.292,00)
2	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Sosial	2.400.000,00	2.400.000,00	100	5.000.000,00	(1.751.440.292,00)
Jumlah		**1.715.974.500,00**	**1.636.564.234,00**	**95,37**	**3.390.604.526,00**	**(2.600.000,00)**

(2) Pengadaan Terbitan

Realisasi BM Pengadaan Terbitan pada TA 2020 sebesar Rp0,00, yaitu 0% dari anggaran pada TA 2020 sebesar Rp0,00 dan 0% dari realisasi TA 2019 sebesar Rp134.515.000,00 dapat dirinci lebih lanjut sebagai berikut:

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Terbitan		TA 2020			TA 2019	Naik (Turun) (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
1	Pengadaan Terbitan Berkala	0,00	0,00	0,00	5.775.000,00	(5.775.000,00)
2	Pengadaan Buku Laporan	0,00	0,00	0,00	128.740.000,00	(128.740.000,00)
Jumlah		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**134.515.000,00**	**(134.515.000,00)**

(3) Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan

Realisasi BM Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan pada TA 2020 sebesar Rp266.070.000,00, yaitu 79,59% dari anggaran pada TA 2020 sebesar Rp334.300.000,00 dan 122,15% dari realisasi TA 2019 sebesar Rp217.827.600,00 dapat dirinci lebih lanjut sebagai berikut:

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan-LRA		TA 2020			TA 2019	Naik (Turun) (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
1	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Alat Kesenian	228.800.000,00	161.570.000,00	70,62	137.077.600,00	24.492.400,00
2	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Alat Olah Raga	105.500.000,00	104.500.000,00	99,05	75.250.000,00	75.250.000,00
3	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Benda-benda Bersejarah	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	(5.500.000,00)
Jumlah		**334.300.000,00**	**266.070.000,00**	**79,59**	**217.827.600,00**	**48.242.400,00**

(4) Pengadaan Alat Olahraga Lainnya

Realisasi BM Pengadaan alat olahraga lainnya pada TA 2020 sebesar Rp9.930.000,00, yaitu 100% dari anggaran pada TA 2020 sebesar Rp9.930.000,00 dan 4,44% dari realisasi TA 2019 sebesar Rp223.605.000,00 dapat dirinci lebih lanjut sebagai berikut.

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya-LRA		TA 2020			TA 2019	Naik (Turun) (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
1	Pengadaan Alat Olah Raga Senam	9.930.000,00	9.930.000,00	100	218.605.000,00	(208.675.000,00)
2	Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)
Jumlah		**9.930.000,00**	**9.930.000,00**	**100**	**223.605.000,00**	**(213.675.000,00)**

(5) Pengadaan Aset Tetap Renovasi

Realisasi BM Pengadaan Aset Tetap Renovasi pada TA 2020 sebesar Rp198.000.000,00, yaitu 100% dari anggaran pada TA 2020 sebesar Rp198.000.000,00 dan 33,38% dari realisasi TA 2019 sebesar Rp593.266.000,00.

(6) Belanja Modal Dana BOS –Aset Tetap Lainnya

Realisasi BM Dana BOS –Aset tetap Lainnya pada TA 2020 sebesar Rp9.756.893.892,00, yaitu 93,42% dari

anggaran pada TA 2020 sebesar Rp10.443.858.158,00 dan 57,34% dari realisasi TA 2019 sebesar Rp17.016.487.223,20.

V.1.b.2)f) BM-Aset Tak Berwujud

Realisasi BM-Aset Tak Berwujud TA 2020 sebesar Rp158.080.000,00 , yaitu 84,88% dari anggaran pada TA 2020 sebesar Rp186.245.000,00 dan 15,73% dari realisasi TA 2019 sebesar Rp1.005.157.600,00 dapat dirinci lebih lanjut sebagai berikut :

Belanja Modal Aset Tak Berwujud-LRA		TA 2020			TA 2019	Naik (Turun) (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
1	Belanja Modal Aset Tak Berwujud - Software	186.245.000,00	158.080.000,00	84,88	136.187.000,00	21.893.000,00
2	Belanja Modal Aset Tak Berwujud - Hasil Kajian/Penelitian	0,00	0,00	0,00	868.970.600,00	(868.970.600,00)
Jumlah		**186.245.000,00**	**158.080.000,00**	**84,88**	**1.005.157.600,00**	**(847.077.600,00)**

V.1.b.3) Belanja Tak Terduga (BTT)

Realisasi Belanja Tak Terduga TA 2020 sebesar Rp26.975.323.078,00 dari anggarannya sebesar Rp122.812.201.348,00 dan dari realisasi TA 2019 sebesar Rp0,00. Realisasi Belanja Tak terduga TA 2020 sebesar Rp26.975.323.078,00 terdiri dari:

Uraian Belanja Tidak Terduga		Realisasi (Rp)
1	Pembayaran Belanja Tidak Terduga, dasar Surat Perintah Bupati No.573/2262/40 Tgl.01-04-2020 Perihal Pencairan BTT kepada Eny Sulisningati guna Restitusi Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Tahun 2019.	3.250.000,00
2	Pembayaran Pembuatan Pos Pantau Penjaringan Cegah Covid-19, dasar SK Bupati Cilacap No.954/552/40/TAHUN 2020 tgl.24-04-2020 dan SP Bupati No.900/02634/40 tgl.29-04-2020 (Penanggung Jawab Teknis SATPOL PP Kab.Cilacap)	150.000.000,00
3	Pembayaran belanja makan minum petugas posko dan patroli penertiban di tempat umum cegah covid-19, dasar SP No.900/02854/40 tgl.15-05-2020 (Penanggungjawab Teknis SATPOL PP Kabupaten Cilacap)	702.000.000,00
4	Pembayaran Belanja Tidak Terduga guna pembelian logistik permakanan dan non permakanan dalam rangka pencegahan covid-19, dasar SP Bupati Cilacap No.900/02923/40 tgl.20-05-2020. (Penanggungjawab teknis BPBD Kab.Cilacap)	457.272.000,00
5	Pembayaran belanja makan minum petugas posko dan patroli penertiban di tempat umum cegah covid-19, dasar SP No.900/03392/40 tgl.17-06-2020 (Penanggung jawab Teknis SATPOL PP KAB.CILACAP)	696.600.000,00
6	Pembayaran pendislipinan protokol kesehatan covid-19 melalui pencanangan kampung siaga covid-19, ponpes siaga covid-19, pasar siaga covid-19, pasar modern siaga covid-19 dan industri siaga covid-19 di Kabupaten Cilacap, dasar SP No.900/04407/40 tgl. 06-08-2020	155 749 000,00
7	Pembayaran belanja makan minum petugas pendisiplinan protokol kesehatan covid-19, dasar SP Bupati No.900/04141/40 tgl.24-07-2020.(Penanggujawab teknis SATPOL PP Kabupaten Cilacap)	696.600.000,00
8	Pembayaran Insentif bagi petugas Pemulasaraan Jenasah bulan Mei dan Juni 2020, Honor Relawan bulan Juni 2020 dan Pengadaan Thermgoun, dasar Surat Perintah Bupati No.900/04773/40 Tgl.24-08-2020.(Penanggungjawab Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap).	1.579.588.490,00
9	Pembayaran Penanganan Vocid-19 untuk biaya petugas penggalian dan penutupan liang kubur di Kabupaten Cilacap, dasar Surat Perintah Bupati No.900/02625/40 tgl.28-04-2020 dan Penanggung jawab teknis Badan Kesbangpol Kabupaten Cilacap.	38.050.000,00
10	Pembayaran belanja tidak terduga guna Penanganan Bencana Non Alam Wabah Pandemi COvid-19 di Pondok Pesantren EL-Bayan Kec.Majenang Kab.Cilacap , dasar SP Bupati Cilacap No.900/06263/40 tgl.19-10-2020. (Penanggungjawab teknis BPBD Kab.Cilacap)	218.405.938,00
11	Pembayaran belanja tidak terduga guna penanganan bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Cilacap, dasar Surat Perintah Bupati No.900/07526/40 Tgl.08-12-2020 (Penanggung jawab teknis BPBD Kab.Cilacap)	389.514.100,00
12	Pembayaran Biaya makan minum panitia Desa/Kelurahan penyaluran jaringan pengaman sosial APBD Kabupaten Cilacap Tahun 2020, dasar SP Bupati Cilacap No.900/044380/40 tgl.05-08-2020. (Penanggung jawab Teknis Dinas Sosial Kab.Cilacap)	376.650.000,00
13	Pembayaran Kegiatan Pencegah dan Penanganan covid-19, dasar SP No.900/03707/40 tgl.06-07-2020. (Penanggung jawab Teknis RSUD Majenang Kab.Cilacap)	1.684.827.490,00
14	Pembayaran belanja tidak terduga guna Keg.Penyediaan Penginapan, Makan dan Minum bagi Tenaga Medis dan Relawan Covid-19, dasar SK Bupati No.950/820/40/TAHUN 2020 tgl.14-12-2020 dan SP Bupati No.900/07668/40 tgl.17-12-2020.(Penanggungjawab Teknis SKPD BKPPD)	270.336.000,00
15	Pembayaran belanja tidak terduga guna Pemeriksaan PCR Covid-19, dasar SK Bupati No.950/715/40/TAHUN 2020 tgl.6-10-2020 dan SP Bupati No.900/06197/40 tgl.16-10-2020. (Penanggungjawab Teknis SKPD Dinas Kesehatan Kab.Cilacap)	909.600.000,00
16	Pembayaran belanja tidak terduga untuk Anggaran Belanja Honor dan Insentif Relawan dan Pemulasaraan	550.702.684,00

Uraian Belanja Tidak Terduga		Realisasi (Rp)
	Jenasah Covid-19 pada RSUD Cilacap dan RSUD Majenang bulan Oktober s/d Desember 2020. (Penanggung Jawab Teknis SKPD Dinas Kesehatan Kab.Cilacap)	
17	Pembayaran BTT guna Rujukan Pemeriksaan PCR Covid-19 pada RS.Pertamina, dasar SK Bupati No.950/819/40/TAHUN 2020 tgl.14-12-2020 dan SP Bupati No.900/07680/40 tgl.17-12-2020.(Penanggungjawab Teknis SKPD Dinas Kesehatan Kab.Cilacap)	5.994.600.000,00
18	Pembayaran BTT untuk Pengadaan BHP Laboratorium PCR, Reagensia Ekstraksi dan Amplifikasi dalam rangka Penanggulangan dan Pelayanan pasien Covid-19 RSUD Cilacap, dasar SP Bupati NO.900/07673/40 Tgl.17-12-2020.(Penanggung jawab RSUD Cilacap)	3.993.572.500,00
19	Pembayaran BTT untuk Pengadaan BHP dan Honorarium Tenaga di Lab.PCR pada RSUD Cilacap dalam rangka Penanganan Covid-19, dasar SP Bupati No.900/06250/40 tgl.19-10-2020.(Penanggungjawab Teknis SKPD RSUD Cilacap)	2.618.476.750,00
20	Pembayaran Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Covid-19 di Kabupaten Cilacap, dasar Surat Perintah Bupati No.900/05122/40 Tgl.07-09-2020.(Penanggungjawab Teknis SATPOL PP Kab.Cilacap)	700.524.000,00
21	Pembayaran Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan covid-19, dasar SK Bupati Cilacap No.950/699/40/Tahun 2020 tgl.30-09-2020 dan SP No.900/05872/40 tgl.06-10-2020. (Penanggung jawab Teknis SATPOL PP Kab.Cilacap)	568.089.000,00
22	Pembayaran Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan covid-19, dasar SK Bupati Cilacap No.950/744/40/Tahun 2020 tgl.27-10-2020 dan SP No.900/06711/40 tgl.09-11-2020. (Penanggung jawab Teknis SATPOL PP Kab.Cilacap)	1.362.495.490,00
23	Pembayaran Penanganan Korban Covid-19 untuk Penguburan Jenasah di Kabupaten Cilacap, dasar Surat Perintah Bupati No.900/06870/40 tgl.13-11-2020 dan Penanggung jawab teknis Badan Kesbangpol Kabupaten Cilacap.	62.275.000,00
24	Pembayaran Belanja BTT untuk Pengadaan APD,BHP,Alkes dan Sarpras RS (Covid-19), dasar SK Bupati Cilacap No.950/691/40/Tahun 2020 Tgl.28-09-2020 dan SP Bupati Cilacap No.900/05694/40 Tgl.28-09-2020.	2.614.937.541,00
25	Pembayaran BTT untuk Penanganan Penguburan Jenazah Terinfeksi Covid-19 di Kab.Cilacap, dasar SP Bupati No.900/07731/40 tgl.21-12-2020. (Penanggung Jawab Teknis Badan Kesbangpol Kab.Cilacap)	70.150.000,00
26	Pembayaran BTT untu Pengembalian Sisa Anggaran Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tahun 2020, Dasar Surat Perintah Bupati No.900/07851/40 Tgl.29-12-2020. (Penanggungjawab Teknis BPBD Kabupaten Cilacap)	111.057.095,00
Jumlah		**26.975.323.078,00**

V.1.c. TRANSFER

Realisasi Transfer pada TA 2020 sebesar Rp481.095.392.600,00, yaitu 99,37% dari anggaran pada TA 2020 sebesar Rp484.122.892.300,00 dan 95,53% dari realisasi transfer untuk TA 2019 sebesar Rp503.580.831.175,00. Transfer terdiri dari:

V.1.c.1) Transfer Bagi Hasil Pendapatan

Realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan pada TA 2020 sebesar Rp21.470.790.300,00, yaitu 87,97% dari anggaran pada TA 2020 sebesar Rp 24.408.140.000,00 dan 93,58% dari realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan untuk TA 2019 sebesar Rp22.943.846.000,00. Transfer Bagi Hasil Pendapatan dapat dirinci lebih lanjut sebagai berikut :

Transfer Bagi Hasil Pendapatan-LRA		TA 2020			TA 2019	Naik (Turun) (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
1	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	22.010.000.000,00	19.937.513.000,00	90,58	18.594.428.100,00	1.343.084.900,00
2	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	2.398.140.000,00	1.533.277.300,00	63,94	4.349.417.900,00	(2.816.140.600,00)
Jumlah		**24.408.140.000,00**	**21.470.790.300,00**	**87,97**	**22.943.846.000,00**	**(1.473.055.700,00)**

Transfer Bagi Hasil Pendapatan-LRA TA 2019 disajikan pada Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa pada Belanja Operasi.

Transfer Bagi Hasil Pendapatan TA 2020 secara rinci dapat dilihat pada **Lampiran 3**.

V.1.c.2) Transfer Bantuan Keuangan

Realisasi Transfer Bantuan Keuangan pada TA 2020 sebesar Rp459.624.602.300,00 , yaitu 99,98% dari anggaran pada TA 2020

sebesar Rp459.714.752.300,00 dan 95,63% dari realisasi Transfer Bantuan Keuangan untuk TA 2019 sebesar Rp480.636.985.175,00. Transfer Bantuan Keuangan dapat dirinci lebih lanjut sebagai berikut:

Transfer Bantuan Keuangan-LRA		Tahun 2020			TA 2019	Naik (Turun) (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
1	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	459.714.752.300,00	459.624.602.300,00	99,98	479.268.088.300,00	(19.643.486.000,00)
2	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	0,00	0,00	1.368.896.875,00	(1.368.896.875,00)
Jumlah		**459.714.752.300,00**	**459.624.602.300,00**	**99,98**	**480.636.985.175,00**	**(21.012.382.875,00)**

Transfer Bantuan Keuangan TA 2019 disajikan pada Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa pada Belanja Operasi.

Transfer Bantuan Keuangan TA 2020 secara rinci dapat dilihat pada **Lampiran 3**.

V.1.d.PEMBIAYAAN

Pembiayaan Daerah meliputi Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan, dengan anggaran dan realisasi TA 2020 dan realisasi TA 2019, sebagai berikut:

Pembiayaan Daerah		TA 2020			TA 2019	Naik (Turun) (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
1	Penerimaan Pembiayaan	280.865.946.057,00	280.865.946.057,32	100	302.164.117.632,93	(21.298.171.575,61)
2	Pengeluaran Pembiayaan	25.702.000.000,00	19.852.000.000,00	77,24	20.775.000.000,00	(923.000.0000,00)
Pembiayaan Netto: 1-2		**255.163.946.057,00**	**261.013.946.057,32**	**102,29**	**281.389.117.632,93**	**(20.375.171.576,61)**

Realisasi pembiayaan netto (penerimaan dikurangi pengeluaran daerah) pada TA 2020 sebesar Rp261.013.946.057,32, yaitu 102,29% dari anggaran pada TA 2020 sebesar Rp255.163.946.057,00 dan 92,76% dari realisasi TA 2019 sebesar Rp281.389.117.632,93. Jumlah tersebut berasal dari penerimaan daerah dan pengeluaran daerah, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

V.1.d.1) Penerimaan Pembiayaan

Realisasi Penerimaan Pembiayaan pada TA 2020 sebesar Rp280.865.946.057,32, yaitu 100% dari anggaran pada TA 2020 sebesar Rp280.865.946.057,32 dan 92,95% dari realisasi TA 2019 sebesar Rp302.164.117.632,93. Realisasi tersebut merupakan penggunaan SILPA TA 2020.

V.1.d.2) Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan Daerah TA 2020 dan TA 2019 meliputi pengeluaran untuk penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran pokok hutang, dan pembayaran hutang daerah dengan anggaran dan realisasi. Realisasi pengeluaran pembiayaan pada TA 2020 sebesar Rp19.852.000.000,00, yaitu 77,24% dari anggaran pada TA 2020 sebesar Rp25.702.000.000 dan 95,56% dari realisasi TA 2019 sebesar Rp20.775.000.000,00 berupa penyertaan modal daerah yang dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut

No.	Nomor SP2D	Uraian	Nominal (Rp)
1	933/00004/4.04.01.02/P/2020	Pembayaran Belanja Pembiayaan (Penyertaan modal) utuk PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, dasar Surat Perintah Bupati Cilacap No.573/07064/06 Tgl.19-11-2020 dan Peraturan Daerah Kab. Cilacap No. 19 Tahun 2018 Tgl.6 Desember 2018	113.000.000,00
2	933/0001/4.04.01.02/P/2020	Pembayaran Belanja Pembiayaan (Penyertaan modal) utuk PD.Serba Usaha Kab.Cilacap, dasar Surat Perintah Bupati Cilacap No.573/00861/06 Tgl.10-02-2020 dan Peraturan Daerah Kab. Cilacap No.19 Tahun 2018 Tgl.6 Desember 2018	2.000.000.000,00
3	933/00002/4.04.01.02/P/2020	Pembayaran Belanja Pembiayaan (Penyertaan modal) utuk PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, dasar Surat Perintah Bupati Cilacap No.573/01946/06 Tgl.12-03-2020 dan Peraturan Daerah Kab. Cilacap No.19 Tahun 2018 Tgl.6 Desember 2018	9.739.000.000,00
4	933/00003/4.04.01.02/P/2020	Pembayaran Belanja Pembiayaan (Penyertaan modal) utuk PERUMDAM TIRTA WIJAYA Kabupaten Cilacap, dasar Surat Perintah Bupati Cilacap No.573/02231/06 Tgl.31-03-2020 dan Peraturan Daerah Kab. Cilacap No.19 Tahun 2018 Tgl.6 Desember 2018	8.000.000.000,00
Jumlah Pencairan			**19.852.000.000,00**

V.1.e. SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGARAN (SiLPA)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran merupakan Sisa Lebih Perhitungan APBD (SiLPA) atau Sisa Kurang Perhitungan APBD (SiKPA), yang menunjukkan kelebihan atau kekurangan pendapatan dan penerimaan dibanding belanja dan pengeluaran daerah. Perhitungan SiLPA TA 2020 dan TA 2019 adalah sebagai berikut:

Uraian		TA 2020		%	TA 2019	Naik (Turun) (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)	
1	Pendapatan Daerah	3.183.974.378.680,00	3.171.856.613.763,48	99,62	3.282.797.966.310,59	(110.941.352.547,11)
2	Belanja dan Transfer Daerah	3.439.138.324.737,00	3.108.288.978.311,00	90,38	3.283.321.137.886,20	(175.032.159.575,20)
3	**Surplus (Defisit): 1-2**	**(255.163.946.057)**	**63.567.635.452**	**(24,91)**	**(523.171.575,61)**	**64.090.807.028,09**
4	Penerimaan Pembiayaan	280.865.946.057,00	280.865.946.057,32	100	302.164.117.632,93	(21.298.171.575,61)
5	Pengeluaran Pembiayaan	25.702.000.000,00	19.852.000.000,00	77,24	20.775.000.000,00	(923.000.000,00)
6	**Pembiayaan Neto: 4-5**	**255.163.946.057,00**	**261.013.946.057,32**	**102,29**	**281.389.117.632,93**	**(20.375.171.575,61)**
7	**SiLPA (SiKPA): 3 + 6**	**0,00**	**324.581.581.509,80**	**0,00**	**280.865.946.057,32**	**43.715.635.452,48**

Sisa lebih perhitungan APBD (SiLPA) pada TA 2020 dan TA 2019 masing-masing sebesar Rp324.581.581.509,80 dan Rp280.865.946.057,32 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian			Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
1	**Kas di Kasda**		**271.885.939.063,00**	**247.048.250.524,00**
	a.	Rekening giro bank	271.885.939.063,00	247.048.250.524,00
	b.	Tabungan	0,00	0,00
	c.	Deposito	0,00	0,00
	d.	Deposito (Investasi Jangka Pendek)	0,00	0,00
2	**Kas di Bendahara**		**52986740746,80**	**35.526.385.676,23**
	a.	Kas di Bendahara Pengeluaran SKPD (sisa UP)	3.628.065,00	876.877.830,27
	b.	Kas di Bendahara Penerimaan SKPD	4.735.500,00	54.786.350,52
	c.	Kas di Bendahara FKTP(JKN)	0,00	21.654.660.567,00
	d.	Kas di BLUD	46.660.956.266,00	725.958.882,00
	e.	Kas/Bank Dana BOS	6.317.420.915,80	5.680.472.108,44
3	**Komponen pengurang silpa**		**(291.098.300,00)**	**(1.708.690.142,91)**
	h	Utang Pajak dan Utang Pihak Ketiga (Dana DAK)	(1.822.727,00)	(819.006.415,27)
	i	Utang Pajak dan Pihak Ketiga Dana BOS	(3.043.423,00)	(684.810.388,64)
	j	Utang Pihak Ketigak RSUD Cilacap	(58.595.212,00)	(163.853.536,00)
	k	Utang Pihak Ketiga RSUD Majenang	(225.831.600,00)	(4.000.000,00)
	l	Utang titipan Potongan Pegawai	(1.805.338,00)	(31.555.467,00)
	m	Utang titipan sumbangan sukarela siswa SMP 5 Kroya	(0,00)	(5.464.336,00)
Jumlah SILPA			**324.581.581.509,80**	**280.865.946.057,32**

Saldo Kas di Kas Daerah berupa rekening giro sebesar Rp271.885.939.063,00 termasuk dana-dana sebagai berikut.

1) Sisa DAK Fisik tahun 2020 sebesar Rp1.163.084.046,00
2) Sisa DAK sebelum Tahun 2020 sebesar Rp2.248.000,00
3) Sisa DBHCHT sebesar Rp3.054.749.786,00
4) Sisa DID sebesar Rp7.729.229.577,00
5) Sisa DID Tambahan sebesar Rp1.100.225.454,00
6) Dana Desa sebesar Rp0,00
7) Sisa Bantuan Propinsi (2P.0.A) sebesar Rp 10.815.685.000,00
8) Silpa DAK non Fisik
   a) SILPA DAK non Fisik PAUD sebesar Rp1.209.744.250,00
   b) SILPA DAK non Fisik BOK KB sebesar Rp890.220.900,00
   c) SILPA DAK non Fisik BOK sebesar Rp9.707.278.787,00
   d) SILPA DAK non Fisik Adminduk sebesar Rp565.946.461,00
   e) SILPA DAK non Fisik Kesetaraan sebesar Rp37.995.000,00
   f) SILPA DAK non Fisik P2UKM sebesar Rp259.951.100,00
   g) SILPA DAK non Fisik BOK Tambahan sebesar Rp568.846.899,00
   h) SILPA DAK Fisik non Tunjangan Profesi Guru sebesar Rp415.015.094,00
   i) SILPA DAK non Fisik Tunjangan Penghasilan Guru sebesar Rp106.812.500,00
9) Sisa sumbangan uang dan bunga rekening yang berasal dari sumbangan masyarakat untuk Covid-19 sebesar Rp. 8.455.756,00

V.2. PENJELASAN POS - POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL)

V.2.a. Penggunaan SAL sebagai Pembiayaan Tahun Berjalan

Saldo Anggaran Lebih (SAL) TA 2019 sebesar 280.865.946.057,32 ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2019. Jumlah SAL tersebut telah direalisasikan sebagai penggunaan SiLPA TA 2020 dari yang dianggarkan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan APBD TA 2020 sebesar Rp280.865.946.057,32.

V.2.b. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

V.2.b.1) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2020

Berdasarkan surplus Anggaran sebesar Rp63.567.635.452,48 dan realisasi Pembiayaan Netto sebesar Rp261.013.946.057,32 sebagaimana diuraikan di atas, maka terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2020 sebesar Rp324.581.581.509,8. SiLPA TA 2020 tersebut berasal dari kelebihan penerimaan pendapatan, sisa anggaran belanja, transfer, dan kelebihan pembiayaan netto, sebagaimana diuraikan berikut ini.

a) Dari target pendapatan sebesar Rp3.183.974.378.680,00 realisasinya sebesar Rp3.152.402.455.712,48 sehingga terdapat kekurangan target pendapatan sebesar (Rp31.571.922.967,52). Kekurangan target Pendapatan terdiri atas rincian sebagai berikut:

   (1) Pelampauan target PAD sebesar Rp30.230.078.095,48 ;

(2) Kekurangan target Pendapatan Transfer sebesar (Rp71.299.109.883,00)
(3) Pelampauan target Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp9.497.108.820,00.

b) Dari anggaran belanja sebesar Rp2.955.015.432.437,00 realisasinya sebesar Rp2.607.739.427.660,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar (Rp347.276.004.777,00). Sisa belanja tersebut terdiri dari:

(1) Sisa anggaran belanja operasi sebesar (Rp184.721.214.799,00)
(2) Sisa anggaran belanja modal sebesar (Rp66.717.911.708,00)
(3) Sisa anggaran belanja tidak terduga sebesar (Rp95.836.878.270,00)

c) Dari anggaran Transfer sebesar Rp484.122.892.300,00 realisasinya sebesar Rp481.095.392.600,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar (Rp3.027.499.700,00).

d) Pembiayaan Netto berasal dari hasil pengurangan Penerimaan Pembiayaan dengan Pengeluaran Pembiayaan yang rinciannya sebagai berikut:

(1) Dari anggaran penerimaan pembiayaan sebesar Rp280.865.946.057,00, realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp280.865.946.057,32 sehingga terdapat kelebihan penerimaan pembiayaan sebesar Rp0,32).
(2) Dari anggaran pengeluaran pembiayaan sebesar Rp25.702.000.000,00 realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp19.852.000.000,00, terdapat kekurangan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp5.850.000.000,00
(3) Dari anggaran pembiayaan netto sebesar Rp255.163.946.057,00 realisasi pembiayaan netto sebesar Rp261.013.946.057,32,00 sehingga terdapat kelebihaan pembiayaan netto sebesar Rp5.850.000.000,32.

V.2.b.2) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2019

Berdasarkan Defisit Anggaran sebesar minus Rp523.171.575,61 dan realisasi Pembiayaan Netto sebesar Rp281.389.117.632,93 sebagaimana diuraikan di atas, maka terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2019 sebesar Rp280.865.946.057,32. SiLPA TA 2019 tersebut berasal dari kelebihan penerimaan pendapatan, sisa anggaran belanja, transfer, dan kelebihan pembiayaan netto, sebagaimana diuraikan berikut ini.

a) Dari target pendapatan sebesar Rp3.289.004.349.418,00 realisasinya sebesar Rp3.282.797.966.310,59 sehingga terdapat kekurangan target pendapatan sebesar Rp(6.206.383.107,41). Kekurangan target Pendapatan terdiri atas rincian sebagai berikut:

(1) Pelampauan target PAD sebesar Rp20.370.158.942,59;
(2) Kekurangan target Pendapatan Transfer sebesar Rp(43.826.117.567,00)
(3) Pelampauan target Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp17.249.575.517,00.

b) Dari anggaran belanja sebesar Rp3.062.812.635.876,00 realisasinya sebesar Rp2.779.740.306.711,20 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp(283.072.329.164,80). Sisa belanja tersebut terdiri dari :

(1) Sisa anggaran belanja operasi sebesar Rp(154.842.382.960,00).
(2) Sisa anggaran belanja modal sebesar Rp(122.933.596.204,80).
(3) Sisa anggaran belanja tidak terduga sebesar Rp(5.296.350.000,00).

c) Dari anggaran Transfer sebesar Rp503.580.831.175,00 realisasinya sebesar Rp503.580.831.175,00 sehingga tidak terdapat sisa anggaran.

d) Pembiayaan Netto berasal dari hasil pengurangan Penerimaan Pembiayaan dengan Pengeluaran Pembiayaan yang rinciannya sebagai berikut:

(1) Dari anggaran penerimaan pembiayaan sebesar Rp302.164.117.633,00, realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp302.164.117.632,93, sehingga terdapat kekurangan penerimaan pembiayaan sebesar Rp(0,07)
(2) Dari anggaran pengeluaran pembiayaan sebesar Rp24.775.000.000,00 realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp20.775.000.000,00, terdapat kekurangan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp(4.000.000.000,00)
(3) Dari anggaran pembiayaan netto sebesar Rp277.389.117.633,00 realisasi pembiayaan netto sebesar Rp281.389.117.632,93 sehingga terdapat kelebihaan pembiayaan netto sebesar Rp3.999.999.999,93

V.2.c. Saldo Anggaran Lebih Akhir (SAL)

Jumlah SAL per 31 Desember 2020 sebesar Rp324.581.581.509,80 terdiri atas saldo Kas di Kas Daerah sebesar Rp271.885.939.063,00; Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp3.628.065,00; Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp4.735.500; Kas di BLUD sebesar Rp46.660.956.266; Kas di Bendahara FKTP (JKN) sebesar Rp0,00; Kas di bendahara BOS dinas P dan K sebesar Rp6.317.420.915,80; dan dikurangi dengan utang pajak dan utang Pihak Ketiga (DAK) (Rp1.822.727,00) dikurangi dengan Utang Pajak dan Pihak Ketiga Dana BOS (Rp3.043.423,00); dikurangi dengan Utang Pihak Ketiga RSUD Cilacap (Rp58.595.212,00); dikurangi dengan Utang Pihak Ketiga RSUD Majenang (Rp225.831.600,00); dikurangi dengan Utang titipan Potongan Pegawai (Rp1.805.338,00).

V.3. PENJELASAN POS-POS NERACA

V.3.a. ASET LANCAR

V.3.a.1) Kas di Kas Daerah

Rekening ini menggambarkan saldo Kas Daerah yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah/Pemegang Kas Daerah (BUD/PKD) pada BPPKAD Kabupaten Cilacap. Saldo per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing dengan rincian sebagai berikut:

	Rekening Kas di Kasda	Per 2020 (Rp)	Per 2019 (Rp)
1	Giro Bank Jateng A/C No.1-012-05000-1	271.885.939.063,00	247.048.250.524,00
2	Giro Bank Jateng A/C No.1-012-02511-3	0,00	0,00
	Jumlah	**271.885.939.063,00**	**247.048.250.524,00**

Rincian Kas dapat dilihat di **Lampiran 4**.

Saldo Kas Daerah sesuai pembukuan BUD per 31 Desember 2020 sebesar Rp271.885.939.063,00 seluruhnya merupakan komponen SILPA dan 2019 sebesar Rp247.048.250.524,00. Sesuai saldo di rekening giro sebesar Rp.271.899.555.479,00 selisih sebesar Rp.13.616.416,00 merupakan jasa giro BLUD RSUD Majenang yang dipindahbukukan oleh Bank Jateng karena kesalahan Bank.
Saldo Kas Daerah sebesar Rp271.885.939.063,00 termasuk penyetoran sisa sumbangan Covid-19 berupa uang sebesar Rp8.455.504,00 dan bunga bank rekening Covid-19 sebesar Rp.252,00.

Penempatan uang di Bank Tahun 2020 sesuai dengan keputusan Bupati Cilacap sebagai berikut:

1) Keputusan Bupati Cilacap Nomor No. 900/02/40/Tahun 2020 tentang Penunjukan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Cilacap Sebagai Bank Penyimpan Uang Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2020.

V.3.a.2) Kas di Bendahara Penerimaan

Rekening ini menggambarkan saldo Kas Daerah yang masih berada dalam penguasaan Bendahara Penerimaan pada SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap dan belum disetorkan ke Kas Daerah per tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp4.735.500,00 dan per 31 Desember 2019 sebesar Rp54.786.350,52 sebagai berikut:

No	Nama SKPD	Kode Rek	Pendapatan	Tahun 2020		Tahun 2019	
				Jumlah (Rp)	Tgl Disetor	Jumlah (Rp)	Tgl Disetor
1	Dinas Kesehatan	4.1.2.01.01	Pusk Nusawungu I			74.000,00	27-Feb-20
2	Disporapar	4.1.2.23.04	OW. Gunung Selok			15.208.050,00	30-Jan-20
3	Disperkimta	4.1.2.01.01	Retribusi Layanan Makam (TPU Karangsuci & TP. Aritmatea/Kerkop)			340.000,00	29-Jan-20
4	BPPKAD	4.1.4.13.07	Pendapatan Lain-lain dari Pengembalian			39.164.300,52	
5	Dinas Perhubungan	4.1.2.02.04	Retribusi Terminal	546.500,00	4 Jan 2021		
		4.1.2.02.09	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	33.500,00	4 Jan 2021		
6	Disporapar	4.1.2.02.01	Retribusi Tempat Rekreasi	36.000,00	5 Jan 2021		

No	Nama SKPD	Kode Rek	Pendapatan	Tahun 2020		Tahun 2019	
				Jumlah (Rp)	Tgl Disetor	Jumlah (Rp)	Tgl Disetor
7	DPKUKM	4.1.2.01.06	Retribusi Pelayanan Pasar	4.119.500,00	4 Jan 2021		
JUMLAH				**4.735.500,00**		**54.786.350,52**	

Rincian Kas dapat dilihat di **Lampiran 4**.

V.3.a.3) Kas di Bendahara Pengeluaran

Rekening ini menggambarkan saldo Kas Daerah yang masih berada dalam penguasaan Bendahara Pengeluaran pada SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap dan belum disetorkan ke Kas Daerah per tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp3.628.065,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Per 2020	Per 2019
		Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	819.006.415,27
2	SMP Negeri 5 Kroya	0,00	5.464.336,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	50.000,00
4	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	0,00	13.780.360,00
5	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	0,00	19.916.800,00
6	Sekretariat Daerah	0,00	832.452,00
7	Sekretariat DPRD	1.822.727,00	4.153.847,00
8	Kecamatan Cilacap Selatan	0,00	5.552.120,00
9	Kecamatan Cilacap Tengah	0,00	398.000,00
10	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (SKPD)	0,00	7.723.500,00
11	Kecamatan Cilacap Tengah	1.800.000,00	0,00
12	Kecamatan Sidareja	5.338,00	0,00
	Jumlah	**3.628.065,00**	**876.877.830,27**

Rincian Kas dapat dilihat di **Lampiran 4**.

V.3.a.4) Kas di BLUD

Rekening ini menggambarkan kas pada BLUD di Kabupaten Cilacap per 31 Desember 2020 sebesar Rp46.660.956.266,00 dan per 31 Desember 2019 sebesar Rp7.259.588.820,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Per 2020 Jumlah (Rp)	Per 2019 Jumlah (Rp)
1	RSUD Cilacap	17.484.038.233,00	7.018.528.659,00
2	RSUD Majenang	2.573.790.228,00	241.060.161,00
3	Puskesmas Adipala I	826.507.922,00	-
4	Puskesmas Adipala II	97.492.575,00	-
5	Puskesmas Bantarsari	1.526.577.155,00	-
6	Puskesmas Binangun	987.933.668,00	-
7	Puskesmas Cilacap Selatan I	148.040.731,00	-

No	Uraian	Per 2020 Jumlah (Rp)	Per 2019 Jumlah (Rp)
8	Puskesmas Cilacap Selatan II	311.994.668,00	-
9	Puskesmas Cilacap Tengah I	155.078.784,00	-
10	Puskesmas Cilacap Tengah II	235.934.297,00	-
11	Puskesmas Cilacap Utara I	251.600.697,00	-
12	Puskesmas Cilacap Utara II	112.725.300,00	-
13	Puskesmas Cimanggu I	596.593.247,00	-
14	Puskesmas Cimanggu II	152.752.370,00	-
15	Puskesmas Cipari	821.871.205,00	-
16	Puskesmas Dayehluhur I	221.154.003,00	-
17	Puskesmas Dayehluhur II	271.320.580,00	-
18	Puskesmas Gandrungmangu I	541.459.564,00	-
19	Puskesmas Gandrungmangu II	561.910.675,00	-
20	Puskesmas Jeruklegi I	516.272.910,00	-
21	Puskesmas Jeruklegi II	280.388.486,00	-
22	Puskesmas Kampung Laut	19.840.625,00	-
23	Puskesmas Karangpucung I	520.896.106,00	-
24	Puskesmas Karangpucung II	171.056.762,00	-
25	Puskesmas Kawunganten	686.644.467,00	-
26	Puskesmas Kedungreja	975.471.357,00	-
27	Puskesmas Kesugihan I	937.405.236,00	-
28	Puskesmas Kesugihan II	634.393.538,00	-
29	Puskesmas Kroya I	2.613.395.005,00	-
30	Puskesmas Kroya II	431.707.149,00	-
31	Puskesmas Majenang II	258.084.967,00	-
32	Puskesmas Majenang I	5.403.204.472,00	-
33	Puskesmas Maos	602.056.559,00	-
34	Puskesmas Nusawungu I	248.759.421,00	-
35	Puskesmas Nusawungu II	657.974.790,00	-
36	Puskesmas Patimuan	780.531.619,00	-
37	Puskesmas Sampang	831.485.541,00	-
38	Puskesmas Sidareja	1.697.612.820,00	-
39	Puskesmas Wanareja I	432.332.004,00	-
40	Puskesmas Wanareja II	82.666.530,00	-
	Jumlah	**46.660.956.266,00**	**7.259.588.820,00**

Saldo kas di BLUD Kabupaten Cilacap sebesar Rp46.660.956.266,00 terdiri dari Kas Bank di Rekening BLUD sebesar Rp46.596.876.027,00, ditambah saldo Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp63.788.014,00, ditambah Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp292.225,00.

Rincian Kas dapat dilihat di **Lampiran 4**.

V.3.a.5) Kas di Bendahara FKTP

Rekening ini menggambarkan kas di Bendahara FKTP/JKN pada SKPD Dinas Kesehatan per 31 Desember 2020 sebesar Rp 0,00 dan per 31 Desember 2019 sebesar Rp21.654.660.567,00, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Per 2020	Per 2019
		Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	**Dinas Kesehatan :** - Kas/Bank di Bendahara FKTP (JKN)	0,00	21.654.660.567,00
	Jumlah	**0,00**	**21.654.660.567,00**

Kas di Bendahara FKTP/JKN pada SKPD Dinas Kesehatan per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00 sedangkan kas di Bendahara FKTP/JKN per 31 Desember 2019 sebesar Rp21.654.660.567,00. Pada tahun 2020 semua Puskesmas menjadi BLUD sehingga kas di Bendahara FKTP/JKN di reklas di Kas BLUD.

V.3.a.6) Kas di Bendahara BOS

Rekening ini menggambarkan sisa Dana BOS pada masing-masing sekolah penerima BOS per 31 Desember 2020 sebesar Rp6.317.420.915,80 dan per 31 Desember 2019 sebesar Rp5.680.472.108,44. Sisa dana BOS per 31 Desember 2020 terdiri dari saldo kas bank BOS sebesar Rp6.294.803.125,00 dan saldo tunai sebesar Rp.22.617.790,80. Dapat dijelaskan lebih lanjut pada **Lampiran 5**.

V.3.a.7) Piutang Pendapatan

Rekening ini menggambarkan piutang pendapatan per 31 Desember 2020 sebesar Rp105.749.180.527,64 dan per 31 Desember 2019 sebesar Rp59.793.492.490,88.

Piutang Pendapatan		Per 31 Des. 2020 (Rp)	Per 31 Des. 2019 (Rp)
a)	Piutang Pajak Daerah	17.793.532.251,64	13.028.323.671,88
b)	Piutang Retribusi	734.333.170,00	1.748.715.755,00
c)	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	43.630.888.442,00	27.079.647.722,00
d)	Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	43.590.426.664,00	17.936.805.342,00
e)	Piutang Pendapatan Lainnya	0,00	0,00
f)	Piutang Denda atas Kertelambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	0,00
g)	Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah / BUMD	0,00	0,00
Jumlah		**105.749.180.527,64**	**59.793.492.490,88**

V.3.a.7)a) Piutang Pajak Daerah

Rekening ini menggambarkan hak pemerintah daerah atas penerimaan pendapatan pajak daerah sesuai dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp17.793.532.251,64 dengan rincian sebagai berikut:

Piutang Pajak Daerah		Per 31 Des. 2020 (Rp)	Per 31 Des. 2019 (Rp)
a.	Piutang Pajak Hotel	515.914.811,00	407.636.010,00
b.	Piutang Pajak Restoran	1.709.054.088,80	1.335.825.254,00
c.	Piutang Pajak Hiburan	59.776.826,50	32.938.450,00
d.	Piutang Pajak Reklame	596.483.997,64	417.800.167,88
e.	Piutang Penerangan Jalan	123.318.130,36	371.425.485,00
f.	Piutang Pajak Parkir	57.193.175,00	26.624.800,00
g.	Piutang Pajak Air Tanah	167.842.286,80	102.665.983,00
h.	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	82.538.804,80	68.434.220,00
i.	Piutang PBB-P2	14.362.311.257,34	10.173.358.784,00
j.	Piutang BPHTB	119.098.873,40	91.614.518,00
	Total Piutang Pajak	***17.793.532.251,64***	***13.028.323.671,88***
k.	Penyisihan Piutang Tak Tertagih Pajak Hotel	(55.166.558,62)	(3.746.405,05)
l.	Penyisihan Piutang Tak Tertagih Pajak Restoran	(174.074.733,55)	(16.293.340,71)
m.	Penyisihan Piutang Tak Tertagih Pajak Hiburan	(10.487.708,65)	(2.763.795,00)
n.	Penyisihan Piutang Tak Tertagih Pajak Reklame	(200.943.750,72)	(122.153.359,85)
o.	Penyisihan Piutang Penerangan Jalan	(616.590,65)	(1.857.127,43)
p.	Penyisihan Piutang Tak Tertagih Pajak Parkir	(7.677.930,96)	(5.392.309,00)
q.	Penyisihan Piutang Tak Tertagih Pajak Air Tanah	(41.015.104,88)	(22.021.657,86)
r.	Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	(2.713.774,18)	(6.651.795,60)
s.	Penyisihan Piutang Tak Tertagih PBB-P2	(7.899.151.443,43)	(5.038.177.345,21)
t.	Penyisihan Piutang Tak Tertagih BPHTB	(119.098.873,40)	(91.614.518,00)
	Total Penyisihan Piutang Tak Tertagih	***(8.510.946.469,04)***	***(5.310.671.653,71)***
Nilai Piutang Pajak NRV {e)-j)}		**9.282.585.782,60**	**7.717.652.018,17**

Saldo Piutang Pajak Daerah yang tersaji dalam Neraca Daerah per 31 Desember 2020 dan 2019 didasarkan pada rumusan: (Saldo Awal + SKPD tahun berkenaan) - Penerimaan tahun berkenaan - Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.

Terdapat penambahan Piutang Pajak sebesar Rp.4.526.753.933,76 yang berasal dari denda pajak yang dengan rincian sebagai berikut :

Uraian Piutang Pajak Daerah	Penambahan Piutang
Piutang Pajak Hotel	106.649.798,00
Piutang Pajak Restoran	349.379.574,80
Piutang Pajak Hiburan	11.832.876,50
Piutang Pajak Reklame	116.196.311,76
Piutang Penerangan Jalan	18.809.379,36
Piutang Pajak Parkir	9.708.925,00
Piutang Pajak Air Tanah	27.333.283,80
Piutang PBB-P2	14.478.404,80
Piutang BPHTB	3.844.881.024,34
Jumlah Koreksi Penambahan Piutang Pajak	**4.526.753.933,76**

(1) Piutang Pajak Hotel

Piutang Pajak Hotel per 31 Desember 2020 sebesar Rp515.914.811,00 sedangkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp407.636.010,00. Rincian Piutang Pajak Hotel per 31 Desember 2020 dan penyisihannya sebagai berikut:

No.	Tahun	Umur Piutang	Piutang Pajak Hotel (Rp)	Penyisihan	Nilai Penyisihan (Rp)	Nilai Piutang NRV (Rp)
1	2016	4 TH	39.000,00	50%	19.500,00	19.500,00
2	2017	3 TH	20.800.000,00	50%	10.400.000,00	10.400.000,00
3	2018	2 TH	2.372.500,00	10%	237.250,00	2.135.250,00
4	2019	1 TH	442.592.548,00	10%	44.259.254,80	398.333.293,20
5	2020	UMUR 0-1 TH	50.110.763,00	0,5%	250.553,82	49.860.209,19
		Saldo Akhir	**515.914.811,00**		**55.166.558,62**	**460.748.252,39**

(2) Piutang Pajak Restoran

Piutang Pajak Restoran per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.709.054.088,80 sedangkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.335.825.254,00. Rincian Piutang Pajak Restoran per 31 Desember 2020 dan penyisihannya sebagai berikut:

No.	Tahun	Umur Piutang	Piutang Pajak Restoran (Rp)	Penyisihan	Nilai Penyisihan (Rp)	Nilai Piutang NRV (Rp)
1	2016	4 TH	2.483.000,00	50%	1.241.500,00	1.241.500,00
2	2017	3 TH	37.717.617,60	50%	18.858.808,80	18.858.808,80
3	2018	2 TH	80.420.080,00	10%	8.042.008,00	72.378.072,00
4	2019	1 TH	1.452.528.945,20	10%	145.252.894,52	1.307.276.050,68
5	2020	UMUR 0-1 TH	135.904.446,00	0,5%	679.522,23	135.224.923,77
		Saldo Akhir	**1.709.054.088,80**		**174.074.733,55**	**1.534.979.355,25**

(3) Piutang Pajak Hiburan

Piutang Pajak Hiburan per 31 Desember 2020 sebesar Rp59.776.826,50 sedangkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp32.938.450,00. Rincian Piutang Pajak Hiburan per 31 Desember 2020 dan penyisihannya sebagai berikut:

No.	Tahun	Umur Piutang	Piutang Pajak Hiburan (Rp)	Penyisihan	Nilai Penyisihan (Rp)	Nilai Piutang NRV (Rp)
1	2016	4 TH	682.500,00	50%	341.250,00	341.250,00
2	2017	3 TH	15.401.750,00	50%	7.700.875,00	7.700.875,00
3	2018	2 TH	16.608.735,00	10%	1.660.873,50	14.947.861,50
4	2019	1 TH	6.834.641,50	10%	683.464,15	6.151.177,35
5	2020	UMUR 0-1 TH	20.249.200,00	0,5%	101.246,00	20.147.954,00
		Saldo Akhir	**59.776.826,50**		**10.487.708,65**	**49.289.117,85**

(4) Piutang Pajak Reklame

Saldo Piutang Pajak Reklame per 31 Desember 2020 sebesar Rp596.483.997,64 sedangkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp417.800.167,88. Rincian Piutang Pajak Reklame per 31 Desember 2020 dan penyisihannya sebagai berikut:

No.	Tahun	Umur Piutang	Piutang Pajak Reklame (Rp)	Penyisihan	Nilai Penyisihan (Rp)	Nilai Piutang NRV (Rp)
1	2011	9 TH	18.943.974,40	100%	18.943.974,40	0,00
2	2012	8 TH	16.412.515,60	100%	16.412.515,60	0,00
3	2013	7 TH	26.236.814,50	100%	26.236.814,50	0,00
4	2014	6 TH	44.541.258,94	100%	44.541.258,94	0,00
5	2015	5 TH	99.924.854,90	50%	49.962.427,45	49.962.427,45
6	2016	4 TH	23.051.289,30	50%	11.525.644,65	11.525.644,65
7	2017	3 TH	24.101.962,30	50%	12.050.981,15	12.050.981,15
8	2018	2 TH	92.365.172,90	10%	9.236.517,29	83.128.655,61
9	2019	1 TH	113.464.062,80	10%	11.346.406,28	102.117.656,52
10	2020	UMUR 0-1 TH	137.442.092,00	0,5%	687.210,46	136.754.881,54
		Saldo Akhir	**596.483.997,64**		**200.943.750,72**	**395.540.246,92**

(5) Piutang Pajak Penerangan Jalan

Piutang Pajak Penerangan Jalan per 31 Desember 2020 sebesar Rp123.318.130,36 sedangkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp371.425.485,00. Rincian Piutang Pajak Penerangan Jalan per 31 Desember 2020 dan penyisihannya sebagai berikut:

No.	Tahun	Umur Piutang	Piutang Pajak Penerangan Jalan (Rp)	Penyisihan	Nilai Penyisihan (Rp)	Nilai Piutang NRV (Rp)
1	2020	0-1 TH	123.318.130,36	0,5%	616.590,65	122.701.539,71
		Saldo Akhir	**123.318.130,36**		**616.590,65**	**122.701.539,71**

(6) Piutang Pajak Parkir

Piutang Pajak Parkir per 31 Desember 2020 sebesar Rp57.193.175,00 sedangkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp26.624.800,00. Rincian Piutang Pajak Parkir per 31 Desember 2020 dan penyisihannya sebagai berikut:

No.	Tahun	Umur Piutang	Piutang Pajak Parkir (Rp)	Penyisihan	Nilai Penyisihan (Rp)	Nilai Piutang NRV (Rp)
1	2016	4 TH	13.565.500,00	50%	6.782.750,00	6.782.750,00
2	2017	3 TH	-	50%	-	-
3	2018	2 TH	1.284.400,00	10%	128.440,00	1.155.960,00
4	2019	1 TH	5.842.364,00	10%	584.236,40	5.258.127,60
5	2020	UMUR 0-1 TH	36.500.911,00	0,5%	182.504,56	36.318.406,45
		Saldo Akhir	**57.193.175,00**		**7.677.930,96**	**49.515.244,05**

(7) Piutang Pajak Air Tanah

Piutang Pajak Air Tanah per 31 Desember 2020 sebesar Rp167.842.286,80 sedangkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp102.665.983,00. Rincian Piutang Pajak Air Tanah per 31 Desember 2020 dan penyisihannya sebagai berikut:

No.	Tahun	Umur Piutang	Piutang Pajak Air Tanah (Rp)	Penyisihan	Nilai Penyisihan (Rp)	Nilai Piutang NRV (Rp)
1	2011	9 TH	5.962.205,60	100%	5.962.205,60	0,00
2	2012	8 TH	7.446.947,30	100%	7.446.947,30	0,00
3	2013	7 TH	10.467.383,50	100%	10.467.383,50	0,00
4	2014	6 TH	7.291.159,20	100%	7.291.159,20	0,00
5	2015	5 TH	4.354.048,40	50%	2.177.024,20	2.177.024,20
6	2016	4 TH	2.417.376,00	50%	1.208.688,00	1.208.688,00
7	2017	3 TH	3.118.011,00	50%	1.559.005,50	1.559.005,50
8	2018	2 TH	17.054.676,60	10%	1.705.467,66	15.349.208,94
9	2019	1 TH	27.879.700,20	10%	2.787.970,02	25.091.730,18
10	2020	UMUR 0-1 TH	81.850.779,00	0,5%	409.253,90	81.441.525,11
		Saldo Akhir	**167.842.286,80**		**41.015.104,88**	**126.827.181,93**

(8) Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan per 31 Desember 2020 sebesar Rp82.538.804,80 sedangkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp68.434.220,00. Rincian Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan per 31 Desember 2020 dan penyisihannya sebagai berikut:

No.	Tahun	Umur Piutang	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Rp)	Penyisihan	Nilai Penyisihan (Rp)	Nilai Piutang NRV (Rp)
1	2018	2 TH	22.835.230,00	10%	2.283.523,00	20.551.707,00
2	2019	1 TH	1.386.666,40	10%	138.666,64	1.247.999,76
3	2020	UMUR 0-1 TH	58.316.908,40	0,50%	291.584,54	58.025.323,86
		Saldo Akhir	**82.538.804,80**		**2.713.774,18**	**79.825.030,62**

(9) Piutang Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Perdesaaan (PBB P2)

Piutang PBB P2 per 31 Desember 2020 sebesar Rp14.362.311.257,34 sedangkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp10.173.358.784,00. Rincian Piutang PBB P2 per 31 Desember 2020 dan penyisihannya sebagai berikut:

No.	Tahun	Umur Piutang	Piutang PBB-P2 (Rp)	Penyisihan	Nilai Penyisihan (Rp)	Nilai Piutang NRV (Rp)
1	1995	24 TH	10.950,52	100%	10.950,52	0,00
2	1996	24 TH	10.367,40	100%	10.367,40	0,00
3	1997	23 TH	147.507,16	100%	147.507,16	0,00
4	1998	22 TH	1.469.986,32	100%	1.469.986,32	0,00
5	1999	21 TH	1.357.660,24	100%	1.357.660,24	0,00

No.	Tahun	Umur Piutang	Piutang PBB-P2 (Rp)	Penyisihan	Nilai Penyisihan (Rp)	Nilai Piutang NRV (Rp)
6	2000	20 TH	34.984.247,40	100%	34.984.247,40	0,00
7	2001	19 TH	134.671.287,24	100%	134.671.287,24	0,00
8	2002	18 TH	1.161.300.581,40	100%	1.161.300.581,40	0,00
9	2003	17 TH	-	100%	-	0,00
10	2004	16 TH	66.111.989,24	100%	66.111.989,24	0,00
11	2005	15 TH	65.636.744,96	100%	65.636.744,96	0,00
12	2006	14 TH	111.971.747,28	100%	111.971.747,28	0,00
13	2007	13 TH	155.727.677,92	100%	155.727.677,92	0,00
14	2008	12 TH	115.757.371,20	100%	115.757.371,20	0,00
15	2009	11 TH	777.020.077,68	100%	777.020.077,68	0,00
16	2010	10 TH	859.575.561,04	100%	859.575.561,04	0,00
17	2011	9 TH	825.165.794,88	100%	825.165.794,88	0,00
18	2012	8 TH	1.070.751.107,44	100%	1.070.751.107,44	0,00
19	2013	7 TH	506.521.399,00	100%	506.521.399,00	0,00
20	2014	6 TH	530.377.438,00	100%	530.377.438,00	0,00
21	2015	5 TH	391.443.238,00	50%	195.721.619,00	195.721.619,00
22	2016	4 TH	672.237.686,00	50%	336.118.843,00	336.118.843,00
23	2017	3 TH	1.247.762.365,00	50%	623.881.182,50	623.881.182,50
24	2018	2 TH	1.396.480.457,00	10%	139.648.045,70	1.256.832.411,30
25	2019	1 TH	1.726.664.914,00	10%	172.666.491,40	1.553.998.422,60
26	2020	0-1 TH	2.509.153.101,02	0,50%	12.545.765,51	2.496.607.335,51
		Total	**14.362.311.257,34**		**7.899.151.443,43**	**6.463.159.813,91**

(10) Piutang Bea Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Piutang BPHTB per 31 Desember 2020 sebesar Rp119.098.873,40 sedangkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp91.614.518,00. Rincian Piutang BPHTB per 31 Desember 2020 dan penyisihannya sebagai berikut:

No.	Tahun	Umur Piutang	Piutang BPHTB (Rp)	Penyisihan	Nilai Penyisihan (Rp)	Nilai Piutang NRV (Rp)
1	2006	14 TH	38.377.083,00	100%	38.377.083,00	0,00
2	2007	13 TH	21.540.647,00	100%	21.540.647,00	0,00
3	2008	12 TH	1.073.088,00	100%	1.073.088,00	0,00
4	2009	11 TH	0,00	100%	0,00	0,00
5	2010	10 TH	30.623.700,00	100%	30.623.700,00	0,00
6	2011	9 TH	0,00	100%	0,00	0,00
7	2012	8 TH	0,00	100%	0,00	0,00
8	2013	7 TH	0,00	100%	0,00	0,00
9	2014	6 TH	0,00	100%	0,00	0,00
10	2015	5 TH	0,00	50%	0,00	0,00
11	2016	4 TH	0,00	50%	0,00	0,00
12	2017	3 TH	0,00	50%	0,00	0,00
13	2018	2 TH	0,00	10%	0,00	0,00
14	2019	1 TH	0,00	10%	0,00	0,00
15	2020	Sanksi/ Denda	27.484.355,40	100%	27.484.355,40	0,00
		Saldo Akhir	**119.098.873,40**		**119.098.873,40**	**0,00**

V.3.a.7)b) Piutang Retribusi

Rekening ini menggambarkan hak Pemerintah Daerah atas penerimaan pendapatan retribusi daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019. Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2020 sebesar Rp734.333.170,00 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp1.748.715.755,00, dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN		Per 31 Des. 2020 (Rp)	Per 31 Des. 2019 (Rp)
1	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	0,00	985.391.475,00
2	Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	695.958.170,00	695.958.170,00
3	Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	26.675.000,00	26.675.000,00
4	Piutang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	0,00	31.691.110,00
5	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	11.700.000,00	9.000.000,00
JUMLAH		**734.333.170,00**	**1.748.715.755,00**

(1) Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan

Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp985.391.475,00 Pada tahun 2020 Puskesmas menjadi BLUD sehingga Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di reklas menjadi Piutang BLUD

(2) Piutang Retribusi Pasar

Piutang Retribusi Pasar per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp695.958.170,00 dan Rp695.958.170,00 pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah merupakan piutang kepada PT Tata Daerah Mandiri untuk Pasar Kroya dan CV Sadhya Anutama untuk Pasar Sampang. Perhitungan penyisihan piutang tak tertagih piutang tersebut per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2020 (Rp)	Umur Piutang (tahun)	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih (Rp)	Nilai Piutang NRV (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Piutang Retribusi Pasar Sampang, CV Sadhya Anutama	89.110.000,00	13	89.110.000,00	0,00
2	Piutang Retribusi Pasar Kroya, PT Tata Daerah Mandiri	606.848.170,00	13	606.848.170,00	0,00
Jumlah		**695.958.170,00**		**695.958.170,00**	**0,00**

(3) Piutang Retribusi Menara Telekomunikasi

Piutang Retribusi Menara Telekomunikasi per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp26.675.000,00 dan Rp26.675.000,00.

(4) Piutang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga

Piutang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga pada

Disporapar per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp31.691.110,00

(5) Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp11.700.000,00 dan Rp9.000.000,00, dengan rincian sebagai berikut :

Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdapat piutang atas Retribusi Sewa Tanah dan Retribusi Gedung/Bangunan Kantor Lainnya sebesar Rp11.700.000,00.

V.3.a.7)c) Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Piutang lain-lain PAD yang sah per 31 Desember 2020 dapat dirinci sebagai berikut:

No	Jenis Piutang	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
1	Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	108.533.330,00	149.607.750,00
2	Piutang BLUD	43.522.355.112,00	26.930.039.972,00
Jumlah		**43.630.888.442,00**	**27.079.647.772,00**

(1) Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah merupakan piutang yang disebabkan kehilangan aset daerah tahun 2020 sebesar Rp108.533.330,00, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama/NIP/SKPD	Jml. Kerugian Daerah (Rp)	S/d Des 2019 (Rp)	Thn 2020 (Rp)	S/d 2020 (Rp)	Sisa (Rp)
1	Rachmanto Adhi, S.Pd.P.Pd	49.500.000,00	28.875.000,00	20.625.000,00	20.625.000,00	0,00
2	Wuryanto, S.Sos	11.700.000,00	487.500,00	11.212.500,00	11.212.500,00	0,00
3	Dra. Bening Siwi Prabaningsih	5.750.000,00	3.600.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00
4	Pamularsih, S.Pd	4.750.000,00	1.584.000,00	3.166.000,00	3.166.000,00	0,00
5	Moh. Chanif M, S.Ag	37.750.000,00	18.900.000,00	18.850.000,00	18.850.000,00	0,00
6	Toyo, S.Pd	26.600.000,00	4.400.000,00	22.200.000,00	22.200.000,00	0,00
7	Taufiq, S.Pd, SD	11.382.000,00	5.227.750,00	6.154.250,00	6.154.250,00	0,00
8	Sarijan, S.Pd	8.920.000,00	0,00	8.920.000,00	8.920.000,00	0,00
9	Sayekti Agustinah, S.Pd,SD	5.570.000,00	3.858.000,00	1.712.000,00	1.712.000,00	0,00
10	Tri Murdiyani, S.Pd	19.916.000,00	10.777.000,00	9.139.000,00	9.139.000,00	0,00
11	Endang Sarworini, S.Pd. M.Pd	20.220.000,00	2.527.500,00	17.692.500,00	17.692.500,00	0,00
12	Gimin, S.Pd, I	10.055.000,00	5.434.000,00	4.621.000,00	4.621.000,00	0,00
13	Saleh, S.Pd	29.812.500,00	14.916.000,00	14.896.500,00	14.896.500,00	0,00
14	dr. Budi Prayoga, M.Si	12.077.000,00	3.808.000,00	8.269.000,00	8.269.000,00	0,00
15	Ir. Tanri Marhaeningrum, M.Si	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
16	Endi Anwandi, S.Pd	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
17	Toyo, S.Pd	0,00	0,00	108.533.330,00	0,00	108.533.330,00
	Jumlah	**254.002.500,00**	**104.394.750,00**	**266.141.080,00**	**157.607.750,00**	**108.533.330,00**

(2) Piutang BLUD
Piutang BLUD per 31 Desember 2020 sebesar Rp43.522.355.112,00 dan Per 31 Desember 2019 sebesar Rp26.930.039.972,00.

No	Jenis Piutang	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
1	BLUD RSUD Cilacap	31.617.316.617,00	15.528.444.479,00
2	BLUD RSUD Majenang	10.379.503.437,00	11.401.595.493,00
3	Puskesmas Adipala I	89.775.225,00	0,00
4	Puskesmas Adipala II	10.325.700,00	0,00
5	Puskesmas Bantarsari	61.277.100,00	0,00
6	Puskesmas Binangun	50.595.000,00	0,00
7	Puskesmas Cilacap Selatan I	300.000,00	0,00
8	Puskesmas Cilacap Selatan II	1.465.000,00	0,00
9	Puskesmas Cilacap Tengah I	5.465.000,00	0,00
10	Puskesmas Cilacap Tengah II	2.435.000,00	0,00
11	Puskesmas Cilacap Utara I	9.839.200,00	0,00
12	Puskesmas Cilacap Utara II	7.745.000,00	0,00
13	Puskesmas Cimanggu I	28.533.250,00	0,00
14	Puskesmas Cimanggu II	34.386.850,00	0,00
15	Puskesmas Cipari	82.335.000,00	0,00
16	Puskesmas Dayehluhur I	103.133.775,00	0,00
17	Puskesmas Dayehluhur II	22.234.000,00	0,00
18	Puskesmas Gandrungmangu I	89.050.000,00	0,00
19	Puskesmas Gandrungmangu II	5.955.000,00	0,00
20	Puskesmas Jeruklegi I	50.162.325,00	0,00
21	Puskesmas Jeruklegi II	31.581.700,00	0,00
22	Puskesmas Kampung Laut	27.694.975,00	0,00
23	Puskesmas Karangpucung I	52.050.000,00	0,00
24	Puskesmas Karangpucung II	32.043.600,00	0,00
25	Puskesmas Kawunganten	130.790.545,00	0,00
26	Puskesmas Kedungreja	40.265.885,00	0,00
27	Puskesmas Kesugihan I	24.895.000,00	0,00
28	Puskesmas Kesugihan II	6.269.353,00	0,00
29	Puskesmas Kroya I	123.141.450,00	0,00
30	Puskesmas Kroya II	7.489.575,00	0,00
31	Puskesmas Majenang II	15.430.000,00	0,00
32	Puskesmas Majenang I	39.290.000,00	0,00
33	Puskesmas Maos	30.015.375,00	0,00
34	Puskesmas Nusawungu I	12.153.600,00	0,00
35	Puskesmas Nusawungu II	19.413.975,00	0,00
36	Puskesmas Patimuan	65.327.000,00	0,00
37	Puskesmas Sampang	80.282.650,00	0,00
38	Puskesmas Sidareja	85.082.000,00	0,00
39	Puskesmas Wanareja I	40.401.750,00	0,00
40	Puskesmas Wanareja II	6.904.200,00	0,00
Jumlah		**43.522.355.112,00**	**26.930.039.972,00**

(3) Piutang BLUD RSUD Cilacap

No	Jenis Piutang	Per 31 Des. 2020 (Rp)	Per 31 Des. 2019 (Rp)
a)	Piutang Pasien Umum	7.312.170.718,00	6.513.759.877,00
b)	Piutang Pasien Perusahaan	277.559.780,00	409.105.824,00
c)	Piutang JKN/BPJS	7.091.047.543,00	8.512.754.654,00
d)	Piutang Askes	0,00	0,00
e)	Piutang Askes Inhealth	1.045.576,00	92.824.124,00
f)	Piutang Pasien Covid	16.935.493.000	0,00
g)	***Total Piutang RSUD Cilacap***	***31.617.316.617,00***	***15.528.444.479,00***
h)	Penyisihan Piutang Tak Tertagih Pasien Umum	(6.771.636.728,00)	(5.684.589.675,00)

i)	Penyisihan Piutang Tak Tertagih Pasien Perusahaan	(56.118.910,00)	(38.907.249,00)
j)	Penyisihan Piutang Tak Tertagih JKN/BPJS	(899.611.586,00)	(851.275.465,00)
k)	Penyisihan Piutang Tak Tertagih Askes	0,00	0,00
l)	Penyisihan Piutang Tak Tertagih Askes Inhealth	(5.228,00)	(9.282.412,00)
m)	Penyisihan Piutang Tak Tertagih Pasien Covid	(1.693.549.300,00)	0,00
n)	***Total Penyisihan Piutang Tak Tertagih RSUD Cilacap***	**(9.420.921.752,00)**	**(6.584.054.801,00)**
	Nilai Piutang Retribusi NRV {g)-n)}	**22.196.394.865,00**	**8.944.389.678,00**

piutang Penyisihan piutang tak tertagih - piutang bukan pajak merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang pelayanan berdasarkan cara bayar.

(a) Piutang Pasien Umum per 31 Desember 2020 sebesar Rp7.312.170.718,00 merupakan piutang kepada pasien yang telah menikmati pelayanan kesehatan, namun sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 belum melunasi kewajibannya untuk membayar retribusi pelayanan kesehatan. Penyisihan piutang tersebut sebesar Rp6.771.338.438,00, sehingga saldo NRV-nya sebesar Rp540.533.990,00.

(b) Piutang Pasien Perusahaan per 31 Desember 2020 sebesar Rp277.559.780,00 merupakan piutang perusahaan yang belum direalisasikan pembayarannya sampai dengan tanggal 31 Desember 2019. Penyisihan piutang tersebut sebesar Rp56.118.910,00, sehingga saldo NRV-nya sebesar Rp221.440.870,00.

(c) Piutang JKN/BPJS per 31 Desember 2020 sebesar Rp7.091.041.543,00 merupakan piutang JKN/BPJS yang telah melalui proses verifikasi petugas JKN/BPJS di RSUD Cilacap sampai dengan tanggal 31 Desember 2019. Penyisihan piutang tersebut sebesar Rp899.611.586,00, sehingga saldo NRV-nya sebesar Rp6.191.435.957,00.

(d) Piutang Askes *Inhealth* per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.045.576,00 merupakan piutang pelayanan *inhealth* yang telah melalui proses verifikasi petugas *inhealth* di RSUD Cilacap. Penyisihan piutang tersebut sebesar Rp5.228,00 sehingga saldo NRV-nya sebesar Rp1.040.348,00.

(e) Piutang Pasien Covid per 31 Desember 2020 sebesar Rp16.935.493.000,00 merupakan piutang Pasien Covid yang telah melalui proses verifikasi Kementerian Kesehatan. Penyisihan piutang tersebut sebesar Rp1.693.549.300,00, sehingga saldo NRV-nya sebesar Rp15.241.943.700,00.

(4) Piutang BLUD RSUD Majenang

No	Uraian	Per 31 Des. 2020 (Rp)	Per 31 Des. 2019 (Rp)
a)	Piutang Pasien Umum	274.508.877,00	318.888.074,00
b)	Piutang BPJS	5.960.423.400,00	11.018.465.871,00
c)	Piutang Pasien Perusahaan	45.279.460,00	0,00
d)	Piutang Inhealth	0,00	0,00
e)	Piutang Pegawai	0,00	11.776.860,00
f)	Piutang Pasien Jasa Raharja	0,00	2.234.466,00
g)	Piutang BPJS Tenaga Kerja	0,00	20.836.462,00
h)	Piutang Iur Bayar BPJS	0,00	13.018.760,00
i)	Piutang TCM (Tes Cepat Molekuler)	0,00	16.375.000,00
j)	Piutang Pasien Covid	4.099.291.700,00	0,00
k)	***Total Piutang RSUD Majenang***	***10.379.503.437,00***	***11.401.595.493,00***
l)	Penyisihan Piutang Tak Tertagih Pasien Umum	(238.571.018,00)	(264.523.322,00)
m)	Penyisihan Piutang Tak Tertagih BPJS	(29.802.117,00)	(739.781.843,00)
n)	Penyisihan Piutang Tak Tertagih Pasien Perusahaan	(12.777.950,00)	
o)	Penyisihan Piutang Tak Tertagih Inhealth	0,00	0,00
p)	Penyisihan Piutang Tak Tertagih Pegawai	0,00	(648.134,00)
q)	Penyisihan Piutang Tak Tertagih Pasien Jasa Raharja	0,00	(11.172,00)
r)	Penyisihan Piutang Tak Tertagih BPJS Tenaga Kerja	0,00	(2.083.646,00)
s)	Penyisihan Piutang Tak Tertagih Iur Bayar BPJS	0,00	(10.705.745,00)
t)	Penyisihan Piutang Tak Tertagih TCM	0,00	(81.875,00)
u)	Penyisihan Piutang Pasien Covid	(413.894.073,00)	0,00
v)	***Total Penyisihan Piutang Tak Tertagih RSUD Majenang***	**(695.045.158,00)**	**(1.017.835.737,00)**
Nilai Piutang Retribusi NRV {i)-r)}		**9.684.458.279,00**	**10.383.759.756,00**

Penyisihan piutang tak tertagih - piutang bukan pajak merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang pelayanan berdasarkan cara bayar.

(a) Piutang Pasien Umum sebesar Rp274.508.877,00 merupakan piutang kepada pasien yang telah menikmati pelayanan kesehatan, namun sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 belum melunasi kewajibannya untuk membayar retribusi pelayanan kesehatan. Penyisihan piutang tersebut sebesar Rp238.571.018,00, sehingga saldo NRV-nya sebesar Rp35.937.859,00.

(b) Piutang BPJS per 31 Desember 2020 sebesar Rp5.960.423.400,00 merupakan piutang BPJS yang telah melalui proses verifikasi petugas BPJS di RSUD Majenang. Penyisihan piutang tersebut sebesar Rp29.802.117,00 sehingga saldo NRV-nya sebesar Rp5.930.621.283,00

(c) Piutang Pasien Perusahaan per 31 Desember 2020 sebesar Rp45.279.460,00.Penyisihan piutang tersebut sebesar Rp12.777.950,00, sehingga saldo NRV-nya sebesar Rp32.501.510,00.

(d) Piutang Pasien Covid per 31 Desember 2020 sebesar Rp.4.099.291.700,00. Penyisihan piutang tersebut sebesar Rp413.894.073,00 sehingga saldo NRV-nya sebesar Rp.3.685.397.627,00.

V.3.a.7)d) Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan per 31 Desember 2020 Rp43.590.426.664,00 sedangkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp17.936.805.342,00, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Per 31 Des. 2020 (Rp)	Per 31 Des. 2019 (Rp)
1	**Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan (Provinsi)**	**0,00**	**5.758.882.053,00**
	a. PKB	0,00	3.366.700.476,00
	b. BBNKB	0,00	2.367.176.435,00
	c. PBBKB	0,00	4.403.736,00
	d. PAP	0,00	20.601.406,00
	e. Pajak Rokok	0,00	0,00
	f. Kapal Cepat Kartini	0,00	0,00
2	**Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan (Pusat)**	**43.590.426.664,00**	**12.177.923.289,00**
	a. Piutang Bagi Hasil Pajak	42.174.677.530,00	11.392.438.096,00
	b. Piutang Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam	1.415.749.134,00	785.485.193,00
Jumlah		**43.590.426.664,00**	**17.936.805.342,00**

V.3.a.8) Penyisihan Piutang

Penyisihan piutang per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp19.359.589.049,04 dan Rp13.644.353.817,26 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Per 31 Des. 2020 (Rp)	Per 31 Des. 2019 (Rp)
1	**Penyisihan Piutang Tak Tertagih Pajak**	**(8.510.946.469,04)**	**(5.310.671.653,71)**
	Penyisihan Piutang Tak Tertagih Pajak Reklame	(200.943.750,72)	(122.153.359,85)
	Penyisihan Piutang Tak Tertagih Pajak Air Tanah	(41.015.104,88)	(22.021.657,86)
	Penyisihan Piutang Tak Tertagih Pajak Hotel	(55.166.558,62)	(3.746.405,05)
	Penyisihan Piutang Tak Tertagih Pajak Hiburan	(10.487.708,65)	(2.763.795,00)
	Penyisihan Piutang Tak Tertagih Pajak Restoran	(174.074.733,55)	(16.293.340,71)
	Penyisihan Piutang Tak Tertagih Pajak Parkir	(7.677.930,96)	(5.392.309,00)
	Penyisihan Piutang Tak Tertagih BPHTB	(119.098.873,40)	(91.614.518,00)
	Penyisihan Piutang Tak Tertagih PBB-P2	(7.899.151.443,43)	(5.038.177.345,22)
	Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	(2.713.774,18)	(6.651.795,60)
	Penyisihan Piutang Penerangan Jalan	(616.590,65)	(1.857.127,43)
2	**Penyisihan Piutang Tak Tertagih Retribusi**	**(8.743.162.124,00)**	**(8.333.682.163,54)**
	- BPPKAD	**(10.042.500,00)**	**(9.000.000,00)**
	Penyisihan Piutang Tak Tertagih Sewa Tanah	(10.042.500,00)	(9.000.000,00)
	- RSUD CILACAP	**(9.420.921.752,00)**	**(6.584.054.801,00)**
	Penyisihan Piutang Tak Tertagih Pasien Umum	(6.771.636.728,00)	(5.684.589.675,00)
	Penyisihan Piutang Tak Tertagih Pasien Perusahaan	(56.118.910,00)	(38.907.249,00)

No	Uraian	Per 31 Des. 2020 (Rp)	Per 31 Des. 2019 (Rp)
	Penyisihan Piutang Tak Tertagih JKN/BPJS	(899.611.586,00)	(851.275.465,00)
	Penyisihan Piutang Tak Tertagih Askes	0,00	0,00
	Penyisihan Piutang Tak Tertagih Askes Inhealth	(5.228,00)	(9.282.412,00)
	Penyisihan Piutang Tak Tertagih Pasien Covid	(1.693.549.300,00)	0,00
	- RSUD MAJENANG	***(695.045.158,00)***	**(1.017.835.737,00)**
	Penyisihan Piutang Tak Tertagih Pasien Umum	(238.571.018,00)	(264.523.322,00)
	Penyisihan Piutang Tak Tertagih Pasien Perusahaan	(12.777.950,00)	0,00
	Penyisihan Piutang Tak Tertagih JKN/BPJS	(29.802.117,00)	(739.781.843,00)
	Penyisihan Piutang Tak Tertagih Inhealth	0,00	0,00
	Penyisihan Piutang Pegawai	0,00	(648.134,00)
	Penyisihan Piutang Pasien Jasa Raharja	0,00	(11.172,00)
	Penyisihan Piutang BPJS Tenaga Kerja	0,00	(2.083.646,00)
	Penyisihan Piutang Iur Bayar BPJS	0,00	(10.705.745,00)
	Penyisihan Piutang TCM	0,00	(81.875,00)
	Penyisihan Piutang Pasien Covid	(413.894.073,00)	0,00
	- DISPORAPAR	**0,00**	**(158.455,54)**
	Penyisihan Piutang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	0,00	(158.455,54)
	- DPKUKM	**(695.958.170,00)**	**(695.958.170,00)**
	Penyisihan Piutang Retribusi Pasar Sampang, CV Sadhya Anutama	(89.110.000,00)	(89.110.000,00)
	Penyisihan Piutang Retribusi Pasar Kroya, PT Tata Daerah Mandiri	(606.848.170,00)	(606.848.170,00)
	- DISKOMINFO	**(26.675.000,00)**	**(26.675.000,00)**
	Penyisihan Menara Telekomunikasi	(26.675.000,00)	(26.675.000,00)
	JUMLAH	**(19.359.589.049,04)**	**(13.644.353.817,26)**

V.3.a.9) Piutang Lainnya

Piutang Lainnya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp7.880.000.000,00.

Berdasarkan hasil konfirmasi dan Surat Pernyataan dari Kejaksaan Negeri Cilacap yang menyatakan bahwa uang pengganti sebesar Rp7.880.000.000,00 sudah dicatat sebagai piutang di Kejaksaan maka dilakukan penghapusan piutang dari neraca Laporan Keuangan Kabupaten Cilacap.

V.3.a.10) Beban Dibayar Dimuka

Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp194.461.102,97 dan Rp475.988.830,00 merupakan beban dibayar dimuka atas pembayaran premi asuransi yang dimiliki Pemerintah Daerah pada SKPD Sekretariat DPRD dan BPPKAD yang masih memiliki masa manfaat kedepan (setelah tanggal neraca). Rincian Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	Premi Asuransi Kendaraan Dinas Pemda				
	- SETWAN	18.184.266,67	105.547.543,00	101.792.052,50	21.939.757,17
	- BPPKAD	215.154.896,66	137.740.410,00	242.702.978,66	110.192.328,00

No	Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
2	Premi Asuransi Gedung Kantor				
	- BPPKAD	122.898.000,00	42.013.616,00	131.300.723,20	33.610.892,80
3	Premi Asuransi Gedung Olahraga				
	- BPPKAD	89.996.666,67	0,00	89.996.666,67	0,00
4	Beban Pemeliharaan Dibayar Dimuka (Oracle)				
	- BPPKAD	29.755.000,00	68.923.500,00	69.960.375,00	28.718.125,00
Jumlah		**475.988.830,00**	**354.225.069,00**	**635.752.796,03**	**194.461.102,97**

V.3.a.10)a) Premi Asuransi Aset Pemda, terdiri dari:

(1) Beban Dibayar Dimuka Asuransi Kendaraan Dinas pada Sekretariat DPRD per 31 Desember 2020 sebesar Rp21.939.757,17.
(2) Beban Dibayar Dimuka Asuransi Kendaraan Dinas pada BPPKAD per 31 Desember 2020 sebesar Rp110.192.328,00.

V.3.a.10)b) Beban Dibayar Dimuka Asuransi Gedung Kantor pada BPPKAD per 31 Desember 2020 sebesar Rp33.610.892,80.

V.3.a.10)c) Beban Dibayar Dimuka Asuransi Gedung Olahraga pada BPPKAD per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00.

V.3.a.10)d) Beban Pemeliharaan Dibayar Dimuka pada BPPKAD untuk perpanjangan lisensi oracle (software) per 31 Desember 2020 sebesar Rp28.718.125,00.

V.3.a.11) Persediaan

Saldo rekening ini menggambarkan harga perolehan persediaan barang yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat yang masih berada di Satuan Kerja dengan rincian saldo per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebagai berikut:

No.	Uraian	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
1	**Persediaan Alat Tulis Kantor**	**547.307.381,00**	**318.099.216,00**
2	**Persediaan Alat Listrik dan Elektronik**	**1.255.556.015,00**	**2.561.901.809,00**
3	**Persediaan Bahan Makanan Kering**	**2.105.250,00**	**2.536.900,00**
4	**Persediaan Bibit Tanaman/Ternak/Ikan**	**132.134.982,00**	**132.942.700,00**
	a. Persediaan Bahan/Bibit Tanaman	3.801.100,00	4.071.800,00
	b. Persediaan Bibit Ternak	122.120.382,00	128.870.900,00
	c. Persediaan Pakan Ternak	6.213.500,00	0,00
5	**Persediaan Bahan Obat-obatan**	24.795.496.144,65	**25.957.993.178,56**
6	**Persediaan Barang Cetakan**	**2.867.674.852,00**	**1.011.528.748,00**
	a. Persediaan Brg Cetakan (KTP & KK) (Disdukcapil)	0,00	109.821.250,00

No.	Uraian	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
	b. Persediaan Brg Cetakan Kepend.Lain (Disdukcapil)	2.592.550.795,00	475.720.285,00
	c. Persediaan KTM (Disporapar)	3.878.450,00	84.413.540,00
	d. Persediaan Karcis (DPPKAD)	50.024.290,00	927.220,00
	e. Persediaan Buku Uji, Plat Uji (Dishub)	109.950.000,00	169.290.975,00
	f. Persediaan Barang Cetakan Lainnya	111.271.317,00	171.355.478,00
7	**Persediaan Dekorasi**	**5.786.750,00**	**0**
8	**Persediaan Bahan Makanan Pokok**	38.389.004,00	27.302.878,00
9	**Persediaan Perangko,Materai dan Benda Pos lainnya**	13.525.500,00	12.297.000,00
10	**Persediaan Lainnya**	**1.780.999.189,00**	497.990.515,00
	a. Persediaan Bahan Baku Bangunan	73.196.030,00	220.081.080,00
	b. Persediaan Bahan Kimia	269.037.117,00	140.402.456,00
	c. Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	327.389.495,00	137.506.979,00
	d. Persediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	111.558.000,00	0,00
	e. Persediaan Peralatan dan Perlengkapan Kesehatan	999.818.547,00	0,00
11	**Persediaan Barang yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga**	**76.205.500,00**	**0,00**
12	**Persediaan Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat**	**776.001.082,00**	**8.193.499.165,00**
	a. SETDA	50.045.000,00	0,00
	b. DISPERKIMTA	448.928.000,00	7.918.802.550,00
	c. BPBD	89.664.450,00	139.321.875,00
	d. DINSOS	187.363.632,00	135.374.740,00
13	**Persediaan Bahan/Material Lainnya**	**94.228.183,00**	**34.814.745,00**
14	**Persediaan Bahan Habis Pakai Lainnya**	**511.584.002,40**	**642.509.280,00**
15	**Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas**	**16.551.450,00**	**5.486.282,00**
16	**Persediaan Isi Tabung Pemadam Kebakaran**	**15.700.000,00**	**10.840.000,00**
17	**Persediaan Isi Tabung Gas**	**12.114.500,00**	**575.000,00**
	JUMLAH	**32.941.359.785,05**	**39.410.317.416,56**

Mutasi persediaan secara rinci disajikan pada **Lampiran 10**.

Nilai persediaan yang disajikan tersebut belum termasuk persediaan dalam kondisi kadaluarsa, rusak atau usang yang secara rinci disajikan lebih lanjut pada **Lampiran 12**.

V.3.b. INVESTASI JANGKA PANJANG

V.3.b.1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Rekening ini menggambarkan nilai atas investasi jangka panjang yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap per 31 Desember 2020 dan 2019 merupakan Saldo Investasi Permanen per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.298.408.087.105,85 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp1.328.788.561.186,08 kepada BUMN dan BUMD dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	31 Desember 2020 (Rp)	31 Deseber 2019 (Rp)
1	Penyertaan Modal kepada PT BPR BKK	9.400.000.000,00	9.400.000.000,00

No.	Uraian	31 Desember 2020 (Rp)	31 Deseber 2019 (Rp)
	Jateng		
2	Penyertaan Modal pada PT KIW	2.203.000.000,00	2.203.000.000,00
3	Penyertaan Modal Permerintah pada PT Bank Jateng	84.521.000.000,00	74.669.000.000,00
4	Penyertaan Modal Pemerintah pada PD Apotik Cahaya Husada	3.094.344.772,57	3.824.439.339,00
5	Penyertaan Modal Pemerintah pada PD Percetakan Grafika Indah	1.676.960.762,02	5.281.771.384,00
6	Penyertaan Modal Pemerintah pada PT PRPP	516.200.000,00	516.200.000,00
7	Penyertaan Modal Pemerintah pada PD KIC	916.276.757.637,55	971.281.920.473,00
8	Penyertaan Modal Pemerintah pada PD Serba Usaha	3.352.068.831,00	1.063.481.521,00
9	Penyertaan Modal Pemerintah pada PDAM Tirta Wijaya	246.884.820.127,00	231.103.979.501,00
10	Penyertaan Modal pada PT BPR BKK Cilacap	30.482.934.975,71	29.444.768.968,08
Jumlah		**1.298.408.087.105,85**	**1.328.788.561.186,08**

Penyertaan modal pada BUMD dan BUMN dengan prosentase kepemilikan dibawah 20% disajikan menggunakan metode biaya, sedangkan prosentase kepemilikan diatas 20% sampai 50%, atau prosentase kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan disajikan menggunakan metode ekuitas, dan prosentase kepemilikan lebih dari 50% disajikan menggunakan metode ekuitas.

Beberapa hal yang perlu dijelaskan terkait Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Cilacap sebagai berikut:

1. Penyertaan modal pada PT Bank Jateng sebesar Rp9.852.000.000,00 Terdiri dari penyertaan modal sebesar Rp9.739.000.000,00 Berdasar Surat Perintah Bupati Cilacap No.573/01946/06 Tanggal 12-03-2020 dan penyertaan modal sebesar Rp113.000.000,00 Berdasar Surat Perintah Bupati Cilacap No.573/07064/06 Tanggal 19-12-2020.
2. Penyertaan modal pada PD Serba Usaha sebesar Rp3.352.068.831,00 Berdasar Surat Perintah Bupati Cilacap No.573/02231/06 Tanggal 31-03-2020.
3. Penyertaan modal pada PDAM Tirtawijaya sebesar Rp8.000.000.000,00 Berdasar Surat Perintah Bupati Cilacap No.573/00861/06 Tanggal 10-02-2020.

Rekonsiliasi pencatatan metode biaya dengan perhitungan metode ekuitas Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Cilacap per 31 Desember 2020, dapat dijelaskan lebih lanjut pada **Lampiran 17.**

V.3.c. ASET TETAP

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah mencatat aset tetap pada Neraca Awal Tahun Anggaran 2003 berdasarkan nilai wajar. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Aset tetap yang diadakan pada Tahun 2004 sampai dengan 2015 dicatat berdasarkan biaya perolehan. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk

memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau kontruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Adapun perkembangan kegiatan tersebut di atas sampai dengan sekarang sebagai berikut:

Pelaksanaan rekonsiliasi aset tetap dari bulan Januari s.d. Desember 2020 antara pengurus barang dan bendahara pengeluaran/PPK SKPD pada masing-masing SKPD di lingkungan Kabupaten Cilacap.

Kegiatan ini melaksanakan rekonsiliasi aset tetap perolehan Tahun 2020 antara pengurus barang dan bendahara pengeluaran/PPK SKPD pada masing-masing SKPD di lingkungan Kabupaten Cilacap untuk mendapatkan kesesuaian catatan barang SKPD pada KIB dan aset tetap pada Neraca SKPD.

Selanjutnya Hasil rekonsiliasi ini digunakan untuk pedoman pencatatan aset tetap oleh Bendahara Pengeluaran/PPK SKPD dengan membuat jurnal penyesuaian dan atau jurnal koreksi dalam aplikasi SIMDA Keuangan, dan Pengurus Barang juga akan melaksanakan entry barang daerah dalam aplikasi SIMDA BMD berdasarkan hasil rekonsiliasi.

SIMDA Keuangan dan SIMDA BMD yang dipakai Pemerintah Kabupaten Cilacap sudah menggunakan jaringan online, sehingga setiap SKPD melaksanakan transaksi pada aplikasi SIMDA Keuangan sudah otomatis bisa terbaca di induk. Hal ini akan memudahkan dalam pengendalian intern penatausahaan aset daerah.

Nilai Aset Tetap di Neraca per 31 Desember 2020 diperoleh dari nilai Neraca per 31 Desember 2019 (audited) ditambah dengan mutasi selama Tahun 2020 berdasarkan hasil rekonsiliasi aset tetap di masing-masing SKPD dan jurnal koreksi berdasarkan hasil inventarisasi ulang BMD sampai dengan 31 Desember 2020.

BPPKAD selaku Konsolidator Laporan Keuangan SKPD akan mencatat perolehan Aset Tetap Tahun Anggaran berkenaan berdasarkan hasil konsolidasi dari Neraca masing-masing SKPD di Kabupaten Cilacap dan dituangkan dalam Neraca Daerah.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2020 sudah mengimplementasikan Permendagri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah.

Pada tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Cilacap menindaklanjuti Permendagri 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah. Dengan melakukan pemetaan (mapping) kode rekening dari permendagri 17 Tahun 2007 ke kode rekening permendagri 108 tahun 2016. Dari hasil mapping tersebut mengakibatkan perpindahan (migrasi) aset pada Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan dan Aset Tetap Lainnya yang secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Aset Tetap	Saldo Awal Sebelum Migrasi	Migrasi 108	Saldo Akhir Setelah Migrasi
1.	Tanah	676.000.963.496,42	0,00	676.000.963.496,42
2.	Peralatan dan Mesin	852.243.174.738,62	8.665.353.806,04	860.908.528.544,66
3.	Gedung dan Bangunan	1.660.084.205.936,78	(2.777.627.739,00)	1.657.306.578.197,78
4.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.153.804.152.486,79	0,00	2.153.804.152.486,79

No	Aset Tetap	Saldo Awal Sebelum Migrasi	Migrasi 108	Saldo Akhir Setelah Migrasi
5.	Aset Tetap Lainnya	129.296.758.699,47	(5.887.726.067,04)	123.409.032.632,43
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	32.264.810.832,00	0,00	32.264.810.832,00
7.	Aset Tak Berwujud	10.816.735.632,00	0,00	10.816.735.632,00
8.	Aset Lain-lain	139.354.611.397,04	0,00	139.354.611.397,04
JUMLAH		**5.653.865.413.219,12**	**0,00**	**5.653.865.413.219,12**

Komposisi rekening Aset Tetap Tahun 2020 dan 2019 dapat disajikan sebagai berikut:

No.	Aset Tetap	Per 31 Des. 2020 (Rp)	Per 31 Des. 2019 (Rp)
1	Tanah	732.140.872.536,92	676.000.963.496,42
2	Peralatan dan Mesin	967.191.357.092,24	852.243.174.738,62
3	Gedung dan Bangunan	1.719.747.611.063,33	1.660.084.205.936,78
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.510.546.578.254,66	2.153.804.152.486,79
5	Aset Tetap Lainnya	133.073.927.891,43	129.296.758.699,47
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	19.042.647.467,00	32.264.810.832,00
7	Akumulasi Penyusutan	(1.887.682.014.918,42)	(1.584.836.959.428,29)
JUMLAH		**4.194.060.979.387,16**	**3.918.857.106.761,79**

Rincian per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 13**.

Mutasi Aset Tetap Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

KODE	NAMA REKENING	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR
1.3.1	Tanah	676.000.963.496,42	63.785.586.955,50	(7.645.677.915,00)	732.140.872.536,92
1.3.2	Peralatan dan Mesin	852.243.174.738,62	163.685.879.685,04	(48.737.697.331,42)	967.191.357.092,24
1.3.3	Gedung dan Bangunan	1.660.084.205.936,78	81.914.795.576,00	(22.251.390.449,45)	1.719.747.611.063,33
1.3.4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.153.804.152.486,79	357.100.416.767,87	(357.991.000,00)	2.510.546.578.254,66
1.3.5	Aset Tetap Lainnya	129.296.758.699,47	11.958.850.220,00	(8.181.681.028,04)	133.073.927.891,43
1.3.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	32.264.810.832,00	2.660.662.933,00	(15.882.826.298,00)	19.042.647.467,00
1.3.7	Akumulasi Penyusutan	(1.584.836.959.428,29)	(267.075.263.435,59)	(35.769.792.054,54)	(1.887.682.014.918,42)
	TOTAL ASET TETAP	**3.918.857.106.761,79**	**414.030.928.701,82**	**(138.827.056.076,45)**	**4.194.060.979.387,16**

Mutasi per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 14**.

V.3.c.1) Tanah

Saldo Tanah per 31 Desember 2020 sebesar Rp732.140.872.536,92 sedangkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp676.000.963.496,42. Hal tersebut menunjukkan adanya kenaikan sebesar Rp56.139.909.040,50 Kenaikan tersebut terdiri dari penambahan sebesar Rp63.785.586.955,50 dan pengurangan sebesar (Rp7.645.677.915,00) Aset tetap tanah per 31 Desember 2020 dapat dirinci sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	**Saldo per 31 Desember 2019**	**676.000.963.496,42**
	MUTASI PENAMBAHAN	
a	Perolehan BM APBD	14.242.054.652,00
b	Perolehan BM BLUD	0,00
c	Perolehan BM BOS	0,00
d	Reklas Antar Rekening	1.699.111.914,00

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
e	Kurang Catat	26.601.486.546,50
f	Perolehan dari Brg/Jasa	0,00
g	Droping dari SKPD lain	7.470.311.968,00
h	Perolehan dari Hibah (Komite, Non APBD, dll)	13.772.621.875,00
i	Kurang Catat	0,00
j	Perolehan dari Penyesuaian	0,00
2	**TOTAL MUTASI PENAMBAHAN (Jumlah a s/d j)**	**63.785.586.955,50**
	MUTASI PENGURANGAN	
k	Penghapusan	(174.827.347,00)
l	Droping ke SKPD lain (-)	(7.470.311.968,00)
m	BM jadi barang extra comtable	0,00
n	BM tidak jadi aset	(538.600,00)
o	Penyesuaian	0,00
3	**TOTAL MUTASI PENGURANGAN (Jumlah k s/d o)**	**(7.645.677.915,00)**
	Saldo per 31 Desember 2020	**732.140.872.536,92**

Reklas antar rekening sebesar Rp.1.699.111.914,00 merupakan reklas dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan yaitu pengurugan tanah pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang sebesar Rp.1.264.138.500,00, reklas dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan berupa pengurugan tanah pada Dinas Kesehatan sebesar Rp.188.532.464,00 dan reklas dari Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan sebesar Rp.188.532.464,00.

V.3.c.2) Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 sebesar Rp967.191.357.092,24 sedangkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp852.243.174.738,62. Hal tersebut menunjukkan adanya kenaikan sebesar Rp114.948.182.353,62 Kenaikan tersebut terdiri dari penambahan sebesar Rp163.685.879.685,04 dan pengurangan sebesar (Rp48.737.697.331,42) dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	**Saldo per 31 Desember 2019**	**852.243.174.738,62**
	MUTASI PENAMBAHAN	0,00
a	Perolehan BM APBD	53.611.704.441,00
b	Perolehan BM BLUD	19.961.016.678,00
c	Perolehan BM BOS	35.007.415.903,00
d	Reklas Antar Rekening	6.187.490.882,04
e	Perolehan dari Brg/Jasa	3.286.007.592,00
f	Droping dari SKPD lain	37.954.754.691,00
g	Perolehan dari Hibah (Komite, Non APBD, dll)	7.677.489.498,00
2	**TOTAL MUTASI PENAMBAHAN (Jumlah a s/d g)**	**163.685.879.685,04**
	MUTASI PENGURANGAN	
h	Penghapusan	(2.152.765.385,00)
i	Droping ke SKPD lain (-)	(37.988.824.657,00)
j	BM jadi barang extra comtable	(2.359.278.214,00)
k	BM tidak jadi aset	(3.353.971.316,00)

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
l	Intra/Ekstra (+/-)	(499.603.759,42)
m	Kurang Catat/Lain-lain (-)	(2.383.254.000,00)
3	**TOTAL MUTASI PENGURANGAN (Jumlah h s/d m)**	**(48.737.697.331,42)**
4	**Saldo per 31 Desember 2020**	**967.191.357.092,24**

V.3.c.3) Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.719.747.611.063,33 sedangkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.660.084.205.936,78. Hal tersebut menunjukkan adanya kenaikan sebesar Rp59.663.405.126,55. Kenaikan tersebut terdiri dari penambahan sebesar Rp81.914.795.576,00 dan pengurangan sebesar (Rp22.251.390.449,45) dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	**Saldo per 31 Desember 2019**	**1.660.084.205.936,78**
	MUTASI PENAMBAHAN	0,00
a	Perolehan BM APBD	63.032.862.639,00
b	Perolehan BM BLUD	0,00
c	Perolehan BM BOS	0,00
d	Perolehan dari Brg/Jasa	1.579.638.330,00
e	Droping dari SKPD lain	10.552.946.652,00
f	Perolehan dari Hibah (Komite, Non APBD, dll)	6.699.347.955,00
g	Jadi Intra kekeliruan filter	50.000.000,00
2	**TOTAL MUTASI PENAMBAHAN (Jumlah a s/d g)**	**81.914.795.576,00**
	MUTASI PENGURANGAN	
h	Penghapusan	(696.554.000,00)
i	Droping ke SKPD lain (-)	(10.552.946.652,00)
j	BM jadi barang extra comtable	(8.834.000,00)
k	BM tidak jadi aset	(63.220.000,00)
l	Reklas Antar Rekening	(4.690.994.784,00)
m	Kurang Catat/Lain-lain (+)	(4.631.430.700,00)
n	Jadi Ekstra kekeliruan filter	(1.607.410.313,45)
3	**TOTAL MUTASI PENGURANGAN (Jumlah h s/d n)**	**(22.251.390.449,45)**
4	**Saldo per 31 Desember 2020**	**1.719.747.611.063,33**

V.3.c.4) Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.510.546.578.254,66 sedangkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp2.153.804.152.486,79. Hal tersebut menunjukkan adanya kenaikan sebesar Rp356.742.425.767,87 Kenaikan tersebut terdiri dari penambahan sebesar Rp357.100.416.767,87 dan pengurangan sebesar (Rp357.991.000,00) dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	**Saldo per 31 Desember 2019**	**2.153.804.152.486,79**
	MUTASI PENAMBAHAN	
a	Perolehan BM APBD	264.551.341.345,00
b	Perolehan BM BLUD	0,00
c	Perolehan BM BOS	0,00
d	Reklas Antar Rekening	13.680.336.380,00

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
e	Kurang Catat/Lain-lain (+)	74.490.263.123,87
f	Perolehan dari Brg/Jasa	268.842.250,00
g	Droping dari SKPD lain	179.100.000,00
h	Perolehan dari Hibah (Komite, Non APBD, dll)	3.930.533.669,00
2	**TOTAL MUTASI PENAMBAHAN (Jumlah a s/d h)**	**357.100.416.767,87**
	MUTASI PENGURANGAN	
i	Penghapusan	0,00
j	Droping ke SKPD lain (-)	(179.100.000,00)
k	BM jadi barang extra comtable	0,00
l	BM tidak jadi aset	(178.891.000,00)
3	**TOTAL MUTASI PENGURANGAN (Jumlah i s/d l)**	**(357.991.000,00)**
4	**Saldo per 31 Desember 2020**	**2.510.546.578.254,66**

V.3.c.5) Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp133.073.927.891,43 sedangkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp129.296.758.699,47. Hal tersebut menunjukkan adanya kenaikan sebesar Rp3.777.169.191,96. Kenaikan tersebut terdiri dari penambahan sebesar Rp11.958.850.220,00 dan pengurangan sebesar (Rp8.181.681.028,04) dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	**Saldo per 31 Desember 2019**	**129.296.758.699,47**
	MUTASI PENAMBAHAN	
a	Perolehan BM APBD	2.110.564.234,00
b	Perolehan BM BLUD	9.756.893.892,00
c	Perolehan BM BOS	0,00
d	Kurang Catat/Lain-lain (+)	0,00
e	Perolehan dari Brg/Jasa	0,00
f	Droping dari SKPD lain	39.158.094,00
g	Perolehan dari Hibah (Komite, Non APBD, dll)	52.234.000,00
2	**TOTAL MUTASI PENAMBAHAN (Jumlah a s/d g)**	**11.958.850.220,00**
	MUTASI PENGURANGAN	
h	Penghapusan	0,00
i	Droping ke SKPD lain (-)	(33.619.274,00)
j	BM jadi barang extra comtable	0,00
k	BM tidak jadi aset	(56.030.723,00)
l	Reklas Antar Rekening	(8.092.031.031,04)
3	**TOTAL MUTASI PENGURANGAN (Jumlah h s/d l)**	**(8.181.681.028,04)**
4	**Saldo per 31 Desember 2020**	**133.073.927.891,43**

V.3.c.6) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan dengan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp19.042.647.467,00 sedangkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp32.264.810.832,00. Hal tersebut menunjukkan adanya penurunan sebesar (Rp13.222.163.365,00). Penurunan tersebut terdiri dari penambahan sebesar Rp2.660.662.933,00 dan pengurangan sebesar (Rp15.882.826.298,00) dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	**Saldo per 31 Desember 2019**	**32.264.810.832,00**
	MUTASI PENAMBAHAN	
a	Perolehan BM APBD	0,00
b	Perolehan BM BLUD	0,00
c	Perolehan BM BOS	0,00
d	Reklas Antar Rekening	0,00
e	Kurang Catat/Lain-lain (+)	0,00
f	Perolehan dari Brg/Jasa	0,00
g	Droping dari SKPD lain	2.660.662.933,00
h	Perolehan dari Hibah (Komite, Non APBD, dll)	0,00
2	**TOTAL MUTASI PENAMBAHAN (Jumlah a s/d h)**	**2.660.662.933,00**
	MUTASI PENGURANGAN	
i	Penghapusan	0,00
j	Droping ke SKPD lain (-)	(2.660.662.933,00)
k	Reklas Antar Rekening	(13.222.163.365,00)
3	**TOTAL MUTASI PENGURANGAN (Jumlah i s/d k)**	**(15.882.826.298,00)**
4	**Saldo per 31 Desember 2020**	**19.042.647.467,00**

Konstruksi dalam Pengerjaan

Uraian	Per 31 Des. 2020 (Rp)	Per 31 Des. 2019 (Rp)
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan		
- Bangunan Gedung Tempat Kerja	496.810.000,00	0,00
- Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	0,00	298.910.000,00
Dinas Kesehatan		
- Bangunan Gedung Tempat Kerja	551.870.818,00	0,00
- Bangunan Kesehatan	0,00	870.423.150,00
BLUD RSUD Majenang (SKPD)		
- Bangunan Gedung Tempat Kerja	2.671.806.000,00	
- Bangunan Kesehatan		2.671.806.000,00
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang		
- Tanah Untuk Bangunan Gedung	49.835.000,00	0,00
- Bangunan Gedung Tempat Kerja	943.347.350,00	0,00
- Bangunan Gedung Kantor	0,00	285.798.000,00
- Bangunan Kesehatan	0,00	944.008.531,00
- Bangunan Gedung Tempat Olahraga	0,00	1.621.404.402,00
- Jalan Kabupaten/Kota	0,00	1.336.624.800,00
- Jembatan Kabupaten/Kota	0,00	22.705.972.049,00
- Jembatan	13.183.109.049,00	0,00
Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air		
- Bangunan Air Irigasi	428.297.200,00	0,00
- Bangunan Pembawa Irigasi	0,00	655.497.000,00
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan		
- Tanah Untuk Bangunan Gedung	49.974.450,00	49.974.450,00
- Tanah Kosong	0,00	148.380.950,00
- Tanah Bangunan Perairan	0,00	98.060.000,00
- Bangunan Gedung Tempat Kerja	159.456.100,00	
- Bangunan Air Irigasi	161.620.000,00	161.620.000,00
- Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	0,00	22.650.000,00
- Makam Sejarah	0,00	47.160.000,00

Uraian	Per 31 Des. 2020 (Rp)	Per 31 Des. 2019 (Rp)
BPPKAD		
- Tanah Untuk Bangunan Gedung	346.521.500,00	0,00
- Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	0,00	346.521.500,00
JUMLAH	**19.042.647.467,00**	**32.264.810.832,00**

V.3.c.7) Akumulasi Penyusutan

Akumulasi penyusutan sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar (Rp1.887.682.014.918,42) dan per 31 Desember 2019 adalah sebesar (Rp1.584.836.959.428,29) dengan rincian sebagai berikut :

NAMA REKENING	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(527.185.696.291,74)	(107.261.264.970,57)	(11.920.470.986,17)	(646.367.432.248,48)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(284.441.099.059,00)	(33.756.844.772,00)	(15.620.083.703,00)	(333.818.027.534,00)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan	(773.046.220.917,55)	(126.011.362.693,02)	(8.389.364.608,37)	(907.446.948.218,94)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(163.943.160,00)	(45.791.000,00)	160.127.243,00	(49.606.917,00)
JUMLAH	**(1.584.836.959.428,29)**	**(267.075.263.435,59)**	**(35.769.792.054,54)**	**(1.887.682.014.918,42)**

V.3.d. ASET LAINNYA

Rekening ini menggambarkan nilai perolehan aset daerah Kabupaten Cilacap, selain yang telah diklasifikasi ke dalam Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, dan dana cadangan, dengan saldo per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019, sebagai berikut:

Aset Lainnya		Per 31 Des 2020 (Rp)	Per 31 Des 2019 (Rp)
a.	Kemitraan dengan Pihak Ketiga (BOT)	17.237.186.000,00	17.237.186.000,00
b.	Aset Tidak Berwujud	11.173.105.632,00	10.816.735.632,00
	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(8.083.102.854,18)	(5.342.929.815,84)
c.	Aset Lain-lain	139.254.792.752,44	139.354.611.397,04
	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(49.182.019.519,95)	(51.145.562.630,95)
Jumlah Aset Lainnya		**110.399.962.010,31**	**110.920.040.582,25**

Saldo aset lainnya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp110.399.962.010,31 dan Rp110.920.040.582,25 dapat dijelaskan sebagai berikut:

V.3.d.1) Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Kemitraan dengan Pihak Ketiga dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap dalam rangka pengelolaan aset daerah, baik dalam bentuk kerjasama *Built, Operate, and Transfered* (BOT) untuk pembangunan/renovasi sejumlah pasar di wilayah Kabupaten Cilacap, serta kerjasama pengelolaan aset, dengan rincian saldo per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebagai berikut:

No.	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	Per 31 Des 2020 (Rp)	Per 31 Des 2019 (Rp)
1	BOT - Pasar Kroya (14.060 m²)	2.510.700.000,00	2.510.700.000,00
2	BOT - Pasar Sampang (Tanah (6.326 m²)	5.349.872.000,00	5.349.872.000,00
3	BOT - Pasar Gede	9.376.614.000,00	9.376.614.000,00
Jumlah		**17.237.186.000,00**	**17.237.186.000,00**

Berkenaan dengan kerjasama tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

V.3.d.1)a) Pasar Kroya

Kerjasama BOT-Pasar Kroya dilakukan dengan PT Tri Daya Makmur, Bekasi, Jakarta dan telah disetujui DPRD Kabupaten Cilacap sesuai dengan Keputusan Nomor 644.1/26/1998 tanggal 23 Juni 1998 tentang Persetujuan Kerjasama Pembangunan dan Pemugaran Pasar Kroya serta Pembangunan Pasar dan Pemugaran Terminal Karangmangu Kroya dengan Pihak Ketiga, namun tidak dimintakan persetujuan kepada Mendagri. Kerjasama dialihkan kepada PT Tata Daerah Mandiri, Kroya, Cilacap sesuai surat Direktur PT Tri Daya Makmur tanggal 16 April 2001 tentang Pelimpahan Pembangunan dan Pemugaran Pasar Kroya serta Pembangunan Pasar dan Terminal Karangmangu Kroya dari PT Tri Daya Makmur kepada PT Tata Daerah Mandiri.

Perjanjian kerjasama pembangunan Pasar Kroya dengan PT Tata Daerah Mandiri, dibuat tanggal 16 Januari 2002, atas dasar Berita Acara Pelimpahan Kewenangan Pembangunan dan Pemugaran Pasar Kroya serta Pembangunan Terminal Karangmangu dari PT Tri Daya Makmur kepada PT Tata Daerah Mandiri Nomor 08/SP/TDM-KRY/VI/2001 tanggal 6 Juni 2001. Pengalihan kerjasama dari PT Tri Daya Makmur kepada PT Tata Daerah Mandiri ini tidak dimintakan persetujuan kepada DPRD Kabupaten Cilacap. Jangka waktu perjanjian selama 30 tahun atau berakhir tanggal 16 Januari 2032.

Berdasarkan perjanjian tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap menyerahkan tanah seluas 14.060 m² berikut bangunan pasar lama seluruhnya senilai Rp3.125.714.000,00 untuk dibangun bangunan pasar oleh investor dengan perkiraan nilai investasi sebesar Rp33.995.000.000,00. Nilai BOT-Pasar Kroya yang disajikan dalam Neraca Daerah per 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp2.510.700.000,00 dan 2009 adalah sebesar Rp36.505.700.000,00. Penurunan Nilai tersebut merupakan koreksi penyajian atas metode penilaian aset lainnya sesuai SAP. Dibandingkan dengan nilai tanah dan bangunan sesuai perjanjian kerjasama sebesar Rp3.125.714.000,00 terdapat selisih kurang pengakuan aset sebesar Rp615.014.000,00, dikarenakan bangunan direncanakan akan dibongkar dalam pelaksanaanya namun belum ada penghapusan.

Tanah seluas 14.060 m² tersebut merupakan tanah Hak Pakai (HP) Nomor 6 atas nama Pemerintah Kabupaten Cilacap, yang kemudian diubah statusnya menjadi Hak Pengelolaan (HPL) Nomor 5 atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap. Terhadap tanah ini, kemudian diterbitkan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 78 atas nama PT Tata Daerah Mandiri selama 30 tahun terhitung sejak tanggal 30 September 2003 atau berakhir tanggal 30 September 2033. Dengan demikian, jangka waktu berakhirnya HGB atas nama investor, melebihi jangka waktu perjanjian yang berakhir tanggal 16 Januari 2032.

Pengalihan hak atas tanah dari Pemerintah Daerah kepada investor tersebut, tanpa disertai dengan pemberian kompensasi dari investor kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap. Sedangkan dalam

pelaksanaannya tanah tersebut telah dipindahtangankan oleh investor kepada para pedagang di Pasar Kroya, dengan menerima kompensasi berupa harga jual tanah dan bangunan pasar.

V.3.d.1)b) Pasar Sampang

Kerjasama BOT-Pasar Sampang dilakukan dengan PT Kencana Tunggal Bina Karya sesuai perjanjian tanggal 21 Maret 2002 atau mendahului persetujuan DPRD Kabupaten Cilacap sesuai Keputusan Nomor 644.1/00334/33 tentang Persetujuan Kerjasama Pembangunan Pasar Sampang dengan Pihak Ketiga. Jangka waktu perjanjian selama 30 tahun atau berakhir tanggal 21 Maret 2032.

Berdasarkan perjanjian tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap menyerahkan tanah seluas 5.716 m² dengan nilai Rp5.349.872.000,00 untuk dibangun bangunan pasar oleh investor dengan perkiraan nilai investasi sebesar Rp15.827.327.000,00 tersebut di atas. Dengan demikian nilai BOT-Pasar Sampang yang disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp5.349.872.000,00 dan 2009 sebesar Rp21.177.199.000,00 (Rp5.349.872.000,00 + Rp15.827.327.000,00). Penurunan nilai tersebut terjadi karena adanya perubahan penilaian yang disesuaikan dengan SAP, bahwa nilai yang diakui sebagai aset Pemerintah Kabupaten Cilacap adalah nilai aset yang diserahkan.

Untuk tanah Pasar Sampang telah diterbitkan Sertifikat HGB Nomor 6 seluas 5.716 m² atas nama PT Kencana Tunggal Bina Karya selama 30 tahun terhitung sejak tanggal 15 Juli 2003 atau berakhir tanggal 15 Juli 2033. Jangka waktu setifikat HGB atas nama investor ini melebihi jangka waktu perjanjian, yang berakhir tanggal 21 Maret 2032.

Luas tanah yang tercantum dalam HPL atas nama Pemerintah Kabupaten Cilacap Nomor 4 adalah 6.075 m² (dari eks tanah HP Nomor 6 seluas 6.326 m²). Sisa tanah seluas 359 m² (6.075 m²-5.716 m²) digunakan untuk fasilitas umum berupa jalan dan terminal antara/parkir. Pengalihan hak atas tanah dari Pemerintah Daerah kepada investor tersebut, tanpa disertai dengan pemberian kompensasi dari investor kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap. Sedangkan dalam pelaksanaannya tanah tersebut telah dipindahtangankan oleh investor kepada para pedagang di Pasar Sampang, dengan menerima kompensasi berupa harga jual tanah dan bangunan pasar.

V.3.d.1)c) Pasar Gede

Pada tahun 2008, Pemerintah Kabupaten Cilacap melakukan take over sebagian bangunan Pasar Gede. Berdasarkan dokumen Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Cilacap dengan PT Linggarjati Permai Purwokerto 510/14.1/20/2015 dan 13/LPJ/I/2015 tanggal 28 Januari 2015, Pasal 9 ayat (2) menyatakan bahwa terhadap tanah dan bangunan yang tidak dilakukan penyerahan dan pelepasan sesuai perjanjian penyerahan dan pelepasan (take over Pasar Gede) maka segala sesuatu yang berkaitan dengan Hak Guna Bangunan, Hak Mengelola dan Perjanjian Sewa yang dilakukan antara PT Linggarjati Permai

Purwokerto dengan pedagang termasuk yang masih menjadi hak PT Linggarjati Permai Purwokerto masih tetap mengacu pada ketentuan perjanjian dan saat berakhirnya perjanjian kerjasama ini adalah pada tanggal 12 November 2031. Sehingga nilai tanah yang digunakan untuk BOT dicatat dalam aset lainnya sebesar Rp9.376.614.000,00.

V.3.d.2) Aset Tidak Berwujud

Rekening ini menggambarkan nilai perolehan aset daerah Kabupaten Cilacap, selain yang telah diklasifikasi ke dalam Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, dan Dana Cadangan, dengan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp11.173.105.632,00 dengan akumulasi amortisasi sebesar minus Rp8.083.102.854,18 dan saldo aset tak berwujud per 31 Desember 2019 sebesar Rp10.816.735.632,00 dengan akumulasi amortisasi sebesar minus Rp5.342.929.815,84 yang berupa sistem informasi/program aplikasi. Adapun rincian aset tidak berwujud sebagai berikut :

KODE SKPD	SKPD	NAMA REKENING	NILAI
1 . 01 . 01 . 01	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Software	47.300.000,00
1 . 02 . 01 . 01	Dinas Kesehatan	Software	56.300.000,00
1 . 02 . 01 . 01	Dinas Kesehatan	Kajian	786.282.000,00
1 . 02 . 01 . 06	Puskesmas Cilacap Selatan I	Software	2.500.000,00
1 . 02 . 01 . 22	Puskesmas Karangpucung I	Software	37.000.000,00
1 . 02 . 01 . 39	Puskesmas Wanareja II	Software	13.500.000,00
1 . 02 . 03 . 01	BLUD RSUD Majenang (SKPD)	Software	131.562.500,00
1 . 03 . 01 . 01	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Software	332.323.450,00
1 . 03 . 01 . 01	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Kajian	2.169.064.000,00
1 . 03 . 02 . 01	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	Kajian	48.347.000,00
1 . 04 . 01 . 01	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	Kajian	1.286.584.450,00
1 . 05 . 03 . 01	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Software	51.298.000,00
1 . 06 . 01 . 01	Dinas Sosial	Kajian	32.402.000,00
2 . 01 . 01 . 01	Dinas Ketenagakerjaan Dan Perindustrian	Software	40.700.000,00
2 . 03 . 01 . 01	Dinas Pangan Dan Perkebunan	Kajian	7.100.000,00
2 . 05 . 01 . 01	Dinas Lingkungan Hidup	Kajian	191.592.600,00
2 . 06 . 01 . 01	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Lisensi dan frenchise	1.637.000.000,00
2 . 06 . 01 . 01	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Software	28.000.000,00
2 . 09 . 01 . 01	Dinas Perhubungan	Lisensi dan frenchise	244.750.000,00
2 . 09 . 01 . 01	Dinas Perhubungan	Software	489.946.000,00
2 . 09 . 01 . 01	Dinas Perhubungan	Kajian	63.701.300,00
2 . 12 . 01 . 01	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Software	199.364.500,00
2 . 13 . 01 . 01	Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata	Software	419.930.000,00
2 . 13 . 01 . 01	Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata	Kajian	47.200.000,00
2 . 18 . 01 . 01	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	Software	77.648.000,00
3 . 03 . 01 . 01	Dinas Pertanian	Kajian	236.505.000,00
3 . 06 . 01 . 01	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	Kajian	144.284.000,00
4 . 01 . 03 . 01	Sekretariat Daerah	Software	328.933.955,00
4 . 01 . 25 . 01	Kecamatan Majenang	Software	48.417.500,00
4 . 02 . 01 . 01	Inspektorat	Software	113.228.500,00
4 . 03 . 01 . 01	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Software	202.220.077,00
4 . 03 . 01 . 01	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan	Kajian	99.477.500,00

KODE SKPD	SKPD	NAMA REKENING	NILAI
	Pengembangan Daerah		
4 . 04 . 01 . 01	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (SKPD)	Software	973.981.300,00
4 . 04 . 01 . 01	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (SKPD)	Kajian	49.392.000,00
4 . 05 . 01 . 01	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah	Software	535.270.000,00
	JUMLAH		**11.173.105.632,00**

V.3.d.3) Aset Lain-lain

Saldo aset lain-lain per 31 Desember 2020 sebesar Rp139.254.792.752,44 dengan akumulasi penyusutan sebesar minus Rp49.182.019.519,9 dan saldo aset lain-lain per 31 Desember 2019 Rp139.354.611.397,04 dengan akumulasi penyusutan sebesar minus Rp51.145.562.630,95. Aset lain-lain per 31 Desember 2020 sebesar Rp138.902.903.627,44 terdiri dari Tanah Negara (untuk JJLS) sebesar Rp62.391.266.122,00 dan aset berupa Barang Kondisi Rusak Berat sebesar Rp 76.511.637.505,44. Secara lebih rinci dapat dijelaskan lebih lanjut pada **Lampiran 16**.

V.3.d.3)a) Tanah Negara (Untuk JJLS)

Di dalam aset lain-lain tersebut terdapat Tanah Negara (untuk JJLS) per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp62.391.266.122,00 dan Rp62.391.266.122,00. Untuk JJLS per 31 Desember 2020 terdiri dari :

- Reklas dari aset tidak berwujud ke aset lain-lain tahun 2017 sebesar Rp39.155.851.412,00
- Reklas dari tanah untuk jalan provinsi kegiatan pengadaan tanah untuk JJLS di Desa Cisumur dan Desa Sidaurip Kecamatan Gandrungmangu ke aset lain-lain sebesar Rp22.420.834.165,00, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian		Nilai
1	Ganti rugi tanah, tanaman, bangunan		21.714.600.000
	- Desa Cisumur (Luas : 29.619 m2)	17.905.000.000	
	- Desa Sidaurip (Luas : 9.634 m2)	3.809.600.000	
2	Biaya appraisal		195.030.000
3	Biaya patok		161.756.650
4	Biaya sewa alat ukur		13.634.500
5	Administrasi		335.813.015
	Jumlah		**22.420.834.165**

- Reklas dari aset tanah untuk bangunan jalan ke aset lain-lain kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan JJLS ruas Bantarsari tahun 2018 sebesar Rp814.580.545,00. Pemerintah Kabupaten Cilacap melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cilacap pada tahun 2018 telah melaksanakan kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan Jaringan Jalan Lintas Selatan (JJLS) yang lokasinya terletak di Desa Bantarsari Kecamatan Bantarsari dengan membebaskan tanah seluas 354 m2 dengan pihak yang berhak menerima ganti kerugian sebanyak 6 orang dengan

jumlah anggaran sebesar Rp814.580.545,00. Kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan JJLS dilaksanakan berdasarkan Keputusan Bupati Cilacap Nomor : 590/405/19/Tahun 2017 tanggal 31 Agustus 2017 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jaringan Jalan Lintas Selatan Provinsi Jawa Tengah di Kabupaten Cilacap dengan tujuan dalam upaya mengembangkan Provinsi Jawa Tengah dan mendukung pertumbuhan ekonomi khususnya Kabupaten Cilacap.

REKAP PENGADAAN TANAH
UNTUK PEMBANGUNAN JARINGAN JALAN LINTAS SELATAN
DI KABUPATEN CILACAP TAHUN 2005 – 2018

No.	Tahun	Desa / Kecamatan	Jumlah bidang	Luas tanah (m²)	Keterangan
1	2	3	4	5	7
1	2005 - 2009 APBD I	a Rawaapu,Sidamukti, Purwodadi,Patimuan Bulupayung,Kedungreja Tambakreja b Patimuan, Kedungreja	1.066	226.618	
J U M L A H			**1.066**	**226.618**	**15 Km**
2	2009 - 2012 APBD II	a Bumireja, Kaliwungu b Kedungreja	307	66.099	
J U M L A H			**307**	**66.099**	**3 Km**
3	2016 APBD II	a Cisumur b Gandrungmangu a Sidaurip b Gandrungmangu	166 47	29.516 7.107	
J U M L A H			**213**	**36.623**	**2.5 Km**
4	2017 APBD II	a Sidaurip b Gandrungmangu a Bulusari	16 13	2.280 2.186	
		b Gandrungmangu a Gandrungmanis b Gandrungmangu	213	33.558	
J U M L A H			**242**	**38.024**	**3.6 Km**
5	2017 APBD II	a Bantarsari b Bantarsari	46	5.342	
J U M L A H			**46**	**5.342**	**400 m**
6	2018 APBD II	a Bantarsari b Bantarsari	6	354	
J U M L A H			**6**	**354**	**-**
JUMLAH TOTAL			***1.874***	***373.060***	***24,5 Km***
PERKIRAAN PANJANG KM					***101 Km***
KEKURANGAN PANJANG KM					***76,5 Km***

-	Rawaapu – Tambakreja	15 km	- sudah dibangun fisik
-	Tambakreja – Bumireja	3.5 km	- sudah dibangun fisik
-	Cisumur – Bantarsari	6.5 km	- belum dibangun fisik

V.3.d.3)b) Barang Kondisi Rusak Berat

Saldo Aset Lain-lain berupa Barang Kondisi Rusak Berat yang ada di SKPD sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp76.863.526.630,44 dengan akumulasi penyusutan aset lain-lain sebesar Rp49.182.019.519,95 dan aset lain-lain per 31 Desember 2019 sebesar Rp139.354.611.397,04 dengan akumulasi penyusutan aset lain-lain sebesar Rp51.145.562.630,95 adalah merupakan aset tetap yang sudah tidak dapat digunakan lagi (rusak berat).

V.3.d.3)c) Jalan Desa

Saldo Aset Lain-lain berupa jalan desa pada tahun 2019 sudah dikeluarkan, sehingga pada tahun 2020 sudah tidak ada aset tersebut.

V.3.e. KEWAJIBAN

V.3.e.1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang perhitungan pihak ketiga (PFK) per 31 Desember 2020 sebesar Rp291.098.300,00 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp2.180.420.142,91 merupakan utang pajak dari Dana BOS SD/SMP dan BLUD RSUD Cilacap dan BLUD RSUD Majenang yang belum di setor, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama SKPD	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	1.335.499.324,27	2.293.708,00	1.335.499.324,27	2.293.708,00
2	SMP Negeri 1 Cilacap	1.407.649,64	0,00	1.407.649,64	0,00
3	SMP Negeri 2 Cilacap	107.473,00	0,00	107.473,00	0,00
4	SMP Negeri 4 Cilacap	3.211.782,00	0,00	3.211.782,00	0,00
5	SMP Negeri 5 Cilacap	9.675.772,00	0,00	9.675.772,00	0,00
6	SMP Negeri 6 Cilacap	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00
7	SMP Negeri 8 Cilacap	13.265.331,00	0,00	13.265.331,00	0,00
8	SMP Negeri 3 Kawunganten	83.800,00	0,00	83.800,00	0,00
9	SMP Negeri 4 Kawunganten Satu Atap	0	0,00	0	0,00
10	SMP Negeri 1 Cimanggu	1.962.726,00	0,00	1.962.726,00	0,00
11	SMP Negeri 4 Cimanggu Satu Atap	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
12	SMP Negeri 1 Gandrungmangu	10.057.424,00	0,00	10.057.424,00	0,00
13	SMP Negeri 2 Gandrungmangu	15.426.435,00	0,00	15.426.435,00	0,00
14	SMP Negeri 3 Gandrungmangu	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00
15	SMP Negeri 2 Jeruklegi	6.679.217,00	0,00	6.679.217,00	0,00
16	SMP Negeri 1 Dayeuhluhur	9.415.768,00	0,00	9.415.768,00	0,00
17	SMP Negeri 1 Majenang	761.364,00	0,00	761.364,00	0,00
18	SMP Negeri 2 Majenang	0,00	0,00	0,00	0,00
19	SMP Negeri 4 Majenang	7.180.965,00	0,00	7.180.965,00	0,00
20	SMP Negeri 6 Majenang Satu Atap	251.436,00	0,00	251.436,00	0,00
21	SMP Negeri 1 Cipari	2.963.161,00	0,00	2.963.161,00	0,00
22	SMP Negeri 4 Cipari	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	0,00
23	SMP Negeri 2 Sampang	116.000,00	0,00	116.000,00	0,00
24	SMP Negeri 2 Adipala	0,00	0,00	0,00	0,00

No.	Nama SKPD	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
25	SMP Negeri 1 Binangun	1.045.472,00	0,00	1.045.472,00	0,00
26	SMP Negeri 2 Binangun	5.177.735,00	0,00	5.177.735,00	0,00
27	SMP Negeri 1 Bantarsari	0,00	0,00	0,00	0,00
28	SMP Negeri 2 Bantarsari	836.362,00	0,00	836.362,00	0,00
29	SMP Negeri 3 Bantarsari	0,00	0,00	0,00	0,00
30	SMP Negeri 1 Kedungreja	19.303.226,00	0,00	19.303.226,00	0,00
31	SMP Negeri 2 Kedungreja	0,00	0,00	0,00	0,00
32	SMP Negeri 3 Kedungreja	10.023.194,00	0,00	10.023.194,00	0,00
33	SMP Negeri 5 Kroya	5.464.336,00	0,00	5.464.336,00	0,00
34	SMP Negeri 1 Kesugihan	0,00	0,00	0,00	0,00
35	SMP Negeri 1 Karangpucung	10.257.270,00	749.715,00	10.257.270,00	749.715,00
36	SMP Negeri 2 Karangpucung	4.700.727,00	0,00	4.700.727,00	0,00
37	SMP Negeri 3 Karangpucung Satu Atap	1.995.537,00	0,00	1.995.537,00	0,00
38	SMP Negeri 1 Sidareja	5.704.954,00	0,00	5.704.954,00	0,00
39	SMP Negeri 2 Sidareja	3.325.436,00	0,00	3.325.436,00	0,00
40	SMP Negeri 3 Sidareja	1.946.423,00	0,00	1.946.423,00	0,00
41	SMP Negeri 1 Wanareja Satu Atap	343.500,00	0,00	343.500,00	0,00
42	SMP Negeri 2 Nusawungu	2.504.727,00	0,00	2.504.727,00	0,00
43	SMP Negeri 3 Nusawungu	3.671.016,00	0,00	3.671.016,00	0,00
44	SMP Negeri 1 Patimuan	8.612.272,00	0,00	8.612.272,00	0,00
45	SMP Negeri 2 Maos	474.336.925,00	0,00	474.336.925,00	0,00
46	SMP Negeri 1 Kampung Laut Satu Atap	2.173.200,00	0,00	2.173.200,00	0,00
47	Dinas Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00
47	BLUD RSUD Cilacap (BLUD)	163.853.536,00	58.595.212,00	163.853.536,00	58.595.212,00
48	BLUD RSUD Majenang (BLUD)	4.000.000,00	225.831.600,00	4.000.000,00	225.831.600,00
49	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
50	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	13.678.000,00	0,00	13.678.000,00	0,00
51	Sekretariat DPRD	4.153.847,00	1.822.727,00	4.153.847,00	1.822.727,00
52	Kecamatan Cilacap Selatan	5.552.120,00	0,00	5.552.120,00	0,00
53	Kecamatan Cilacap Tengah	398.000,00	1.800.000,00	398.000,00	1.800.000,00
53	Kecamatan Sidareja	0,00	5.338,00	0,00	5.338,00
54	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (SKPD)	7.723.500,00	0,00	7.723.500,00	0,00
Jumlah		**2.180.420.142,91**	**291.098.300,00**	**2.180.420.142,91**	**291.098.300,00**

Rekap Utang dapat dilihat pada **Lampiran 18**. Utang PFK saldo awal SMP Negeri 2 Maos sebesar Rp.474.336.925,00 termasuk Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya sebesar Rp471.730.000,00 untuk membayar aset tetap dari dana BOS, yang disebabkan adanya kegagalan transfer dari bank ke pihak ketiga sehingga uang kembali ke rekening bendahara BOS. Adapun rincian IUR per nama pasien tercantum pada **Lampiran 19.**

V.3.e.2) Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.239.584.070,10 merupakan pendapatan atas Retribusi dan Pajak

yang perhitungannya berdasarkan perjanjian kerjasama dan penetapan yang jatuh tempo pembayarannya melampaui tanggal 31 Desember 2020, sedangkan pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.195.244.392,60 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

No.	SKPD	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
1	**DINAS PERIKANAN**		
	Pendapatan Diterima Dimuka Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Kapal)	10.000.000,00	10.000.000,00
2	**BPPKAD**		
	Pendapatan Diterima Dimuka Pajak Reklame	507.214.004,34	253.880.229,51
	Pendapatan Diterima Dimuka Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	229.826.648,69	192.301.550,52
3	**DISHUB**		
	Pendapatan Diterima Dimuka Pengujian Kendaraan Bermotor	15.203.166,66	376.995.000,00
	Pendapatan Diterima Dimuka Pengujian Kendaraan Bermotor Diatas Air	0	-
	Pendapatan Diterima Dimuka Ijin Trayek	221.571.666,67	21.827.666,66
4	**DPMPTSP**		
	Pendapatan Diterima Dimuka Ijin Gangguan/HO	43.953.761,63	127.600.028,61
5	**KECAMATAN CILACAP SELATAN**		
	Pendapatan Diterima Dimuka Ijin Gangguan/HO	854.687,50	2.652.500,00
6	**KECAMATAN CILACAP TENGAH**		
	Pendapatan Diterima Dimuka Ijin Gangguan/HO	3.075.370,84	7.604.545,84
7	**KECAMATAN CILACAP UTARA**		
	Pendapatan Diterima Dimuka Ijin Gangguan/HO	5.949.801,66	15.490.785,83
8	**KECAMATAN JERUKLEGI**		
	Pendapatan Diterima Dimuka Ijin Gangguan/HO	3.295.009,58	10.115.302,25
9	**KECAMATAN KAWUNGANTEN**		
	Pendapatan Diterima Dimuka Ijin Gangguan/HO	1.049.289,59	3.842.998,26
10	**KECAMATAN BANTARSARI**		
	Pendapatan Diterima Dimuka Ijin Gangguan/HO	1.046.525,00	3.861.290,60
11	**KECAMATAN KESUGIHAN**		
	Pendapatan Diterima Dimuka Ijin Gangguan/HO	10.065.404,18	22.922.887,51
12	**KECAMATAN ADIPALA**		
	Pendapatan Diterima Dimuka Ijin Gangguan/HO	3.277.394,45	6.950.165,43
13	**KECAMATAN MAOS**		
	Pendapatan Diterima Dimuka Ijin Gangguan/HO	3.257.485,83	7.903.464,58
14	**KECAMATAN SAMPANG**		
	Pendapatan Diterima Dimuka Ijin Gangguan/HO	599.462,92	1.671.077,92
15	**KECAMATAN KROYA**		
	Pendapatan Diterima Dimuka Ijin Gangguan/HO	2.911.613,33	7.431.307,50
16	**KECAMATAN BINANGUN**		
	Pendapatan Diterima Dimuka Ijin Gangguan/HO	704.316,67	2.637.850,00
17	**KECAMATAN NUSAWUNGU**		
	Pendapatan Diterima Dimuka Ijin Gangguan/HO	5.641.380,84	15.913.326,67
18	**KECAMATAN SIDAREJA**		
	Pendapatan Diterima Dimuka Ijin Gangguan/HO	454.000,00	2.038.666,67
19	**KECAMATAN KEDUNGREJA**		
	Pendapatan Diterima Dimuka Ijin Gangguan/HO	858.833,33	2.157.537,50
20	**KECAMATAN GANDRUNGMANGU**		
	Pendapatan Diterima Dimuka Ijin Gangguan/HO	796.275,42	2.082.032,09
21	**KECAMATAN PATIMUAN**		
	Pendapatan Diterima Dimuka Ijin Gangguan/HO	773.687,51	2.266.343,76

No.	SKPD	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
22	**KECAMATAN CIPARI**		
	Pendapatan Diterima Dimuka Ijin Gangguan/HO	752.874,99	2.315.891,66
23	**KECAMATAN KARANGPUCUNG**		
	Pendapatan Diterima Dimuka Ijin Gangguan/HO	3.268.386,55	9.198.908,15
24	**KECAMATAN CIMANGGU**		
	Pendapatan Diterima Dimuka Ijin Gangguan/HO	814.947,17	2.552.517,01
25	**KECAMATAN MAJENANG**		
	Pendapatan Diterima Dimuka Ijin Gangguan/HO	3.897.300,00	7.422.783,33
26	**KECAMATAN WANAREJA**		
	Pendapatan Diterima Dimuka Ijin Gangguan/HO	6.044.776,08	16.326.490,08
27	**KECAMATAN DAYEUHLUHUR**		
	Pendapatan Diterima Dimuka Ijin Gangguan/HO	1.718.716,67	4.525.566,67
28	**RSUD MAJENANG**		
	Sewa Ruang ATM	32.239.282,00	52.755.678,00
29	**RSUD CILACAP**		
	Pendapatan Sewa Ruang Kantor Kas dan Host to Host BPD	55.968.000,00	0,00
	Pendapata Sewa Ruang ATM	45.000.000,00	0,00
30	**PKM KEDUNGREJA**		
	Pendapata Sewa Ruang ATM	17.500.000,00	0,00
JUMLAH		**1.239.584.070,10**	**1.195.244.392,60**

Rincian dapat dilihat pada **Lampiran 20**.

V.3.e.3) Utang Beban

Utang Beban per 31 Desember 2020 sebesar Rp29.816.634.614,84 dan per 31 Desember 2019 sebesar Rp27.807.678.402,00 terdiri dari Utang Beban Pegawai dan Utang Beban Barang dan Jasa, dengan rincian sebagai berikut:

(a) Utang Beban Pegawai per 31 Desember 2020 sebesar Rp11.828.698.937,00 dan per 31 Desember 2019 sebesar Rp6.389.325.689,00.

No.	SKPD	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	934.275.993,00	0,00
2	Dinas Kesehatan	363.526.532,00	51.952.000,00
3	BLUD RSUD Cilacap (SKPD)	8.715.746.530,00	3.864.129.195,00
4	BLUD RSUD Majenang (SKPD)	70.579.725,00	570.000,00
5	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	10.133.430,00	0,00
6	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	3.442.158,00	0,00
7	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	5.291.679,00	0,00
8	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	3.249.114,00	0,00
9	Dinas Komunikasi Dan Informatika	7.205.637,00	0,00
10	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	16.119.013,00	218.997.500,00
11	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	86.065.000,00	150.000.000,00
12	Sekretariat Daerah	3.699.042,00	0,00
13	Sekretariat DPRD	1.849.521,00	0,00
14	Inspektorat	11.505.670,00	0,00
15	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (SKPD)	1.592.375.000,00	2103676994

No.	SKPD	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
16	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah	3.634.893,00	0,00
Jumlah		**11.828.698.937,00**	**6.389.325.689,00**

(b) Utang Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2020 sebesar Rp17.987.935.677,84 dan per 31 Desember 2019 sebesar Rp21.418.352.713,00 dengan rincian sebagaimana pada Dapat dijelaskan lebih lanjut pada **Lampiran 18** dan **21**.

V.3.e.4) Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang jangka pendek lainnya per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp362.909.092,00 dan Rp14.847.723.771,00 yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

No.	SKPD	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
1	BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap	0,00	14.383.977.581,00
2	BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Majenang	0,00	98.109.825,00
3	Dinas Pertanian	362.909.092,00	365.636.365,00
Jumlah		**362.909.092,00**	**14.847.723.771,00**

Rincian dapat dilihat pada **Lampiran 18**.

V.3.f. EKUITAS

Rekening ini menggambarkan jumlah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Cilacap, yang menunjukkan hak (claim) Pemerintah Daerah terhadap aset yang dikuasai, setelah dikurangi hak pihak ketiga terhadap aset tersebut. Hak pihak ketiga ini merupakan kewajiban yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Daerah, meliputi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Ekuitas Dana Pemerintah Kabupaten Cilacap per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp6.015.556.894.602,80 dan Rp5.689.024.722.942,02.

Ekuitas per 31 Desember 2020 sebesar Rp6.015.556.894.602,80 berasal dari saldo awal Ekuitas tahun 2020 sebesar Rp5.689.024.722.942,02 ditambah Surplus/Defisit - LO tahun 2020 sebesar Rp351.947.285.779,80 dikurangi koreksi ekuitas lainnya sebesar minus Rp25.415.114.119,02.

V.4. PENJELASAN POS - POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Pemerintah Kabupaten Cilacap yang tercermin dalam Pendapatan - LO, Beban dan Surplus/defisit operasional.

V.4.a. Pendapatan-LO

Pendapatan - LO adalah hak pemerintah Kabupaten Cilacap yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, dengan realisasi pada TA 2020 dan TA 2019 sebagai berikut.

Pendapatan – LO	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO	**627.646.430.604,53**	**1.069.258.443.938,10**
Pendapatan Pajak Daerah – LO	203.173.684.142,17	209.937.524.257,02
Pendapatan Retribusi Daerah – LO	19.245.127.710,33	42.177.585.374,36
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	67.741.858.495,77	520.739.397.545,13
Lain-lain PAD Yang Sah – LO	337.485.760.256,26	296.403.936.761,59
Pendapatan Transfer – LO	**2.077.982.870.554,00**	**2.220.322.293.526,00**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat –LO	1.764.468.226.333,00	1.923.671.199.583,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya – LO	71.923.322.000,00	46.363.857.000,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO	216.240.449.221,00	217.325.795.943,00
Bantuan Keuangan – LO	25.350.873.000,00	32.961.441.000,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO	**277.443.754.840,60**	**289.800.668.713,00**
Pendapatan Hibah – LO	**277.443.754.840,60**	289.651.060.963,00
Dana Darurat – LO	0,00	0,00
Pendapatan Lainnya – LO	0,00	149.607.750,00
Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya – LO	0,00	0,00
Alokasi Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN – LO	0,00	0,00
Jumlah	**2.983.073.055.999,13**	**3.579.381.406.177,10**

Saldo masing-masing akun pendapatan daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

V.4.a.1) Pendapatan Asli Daerah - LO

Pos ini menggambarkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk periode tahun 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp777.206.170.188,53 dan Rp1.069.258.443.938,10 dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan Asli Daerah – LO		Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
1	Pendapatan Pajak Daerah – LO	203.173.684.142,17	209.937.524.257,02
2	Pendapatan Retribusi Daerah – LO	19.245.127.710,33	42.177.585.374,36
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan – LO	67.741.858.495,77	520.739.397.545,13
4	Lain-lain PAD Yang Sah – LO	337.485.760.256,26	296.403.936.761,59
Jumlah		**627.646.430.604,53**	**1.069.258.443.938,10**

V.4.a.1)a) Pendapatan Pajak Daerah - LO

Pendapatan Pajak Daerah - LO tahun 2020 sebesar Rp203.173.684.142,17 dan tahun 2019 sebesar Rp209.937.524.257,02 dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan Pajak Daerah – LO		Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
1	Hotel – LO	3.459.383.592,00	7.022.854.069,00
2	Restoran – LO	3.709.181.254,00	5.254.844.182,00
3	Pajak Hiburan – LO	635.339.704,00	1.368.297.932,00
4	Pajak Reklame – LO	1.839.410.228,17	2.096.869.694,02
5	Pajak Penerangan Jalan – LO	74.705.725.551,00	72.398.401.433,00

Pendapatan Pajak Daerah – LO		Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
6	Pajak Parkir – LO	463.168.550,00	564.609.800,00
7	Pajak Air Tanah – LO	734.911.958,00	762.809.490,00
8	Pajak Sarang Burung Walet – LO	1.694.060,00	6.709.080,00
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan – LO	21.615.798.976,00	23.166.748.805,00
10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan - LO	77.115.146.779,00	74.130.761.403,00
11	BPHTB – LO	18.893.923.490,00	23.164.618.369,00
Jumlah		**203.173.684.142,17**	**209.937.524.257,02**

V.4.a.1)b) Pendapatan Retribusi Daerah - LO

Pendapatan Retribusi Daerah - LO tahun 2020 sebesar Rp19.245.127.710,33 dan tahun 2019 sebesar Rp42.177.585.374,36 dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan Retribusi Daerah – LO		Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan – LO	403.545.500,00	19.781.511.761,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan – LO	1.012.955.600,00	966.466.000,00
3	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat - LO	36.450.000,00	20.710.000,00
4	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum – LO	678.490.579,00	2.006.017.200,00
5	Retribusi Pelayanan Pasar – LO	3.767.680.307,00	4.052.114.904,00
6	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor – LO	1.317.343.333,33	1.791.047.133,33
7	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus – LO	62.840.000,00	70.015.000,00
8	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang – LO	134.520.500,00	152.304.000,00
9	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi – LO	1.060.521.475,00	960.726.325,00
10	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LO	3.431.204.048,83	4.090.708.691,36
11	Retribusi Terminal – LO	239.410.500,00	355.541.500,00
12	Retribusi Tempat Khusus Parkir – LO	1.627.018.014,00	1.364.675.400,00
13	Retribusi Rumah Potong Hewan – LO	120.768.000,00	135.229.000,00
14	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan – LO	67.137.500,00	60.726.000,00
15	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga- LO	181.882.762,00	454.548.102,00
16	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah – LO	336.346.250,00	346.599.000,00
17	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan – LO	3.257.662.875,00	4.918.435.347,00
18	Retribusi Izin Gangguan – LO	182.422.966,17	246.174.127,34
19	Retribusi Izin Trayek – LO	22.213.500,00	32.404.883,33
20	Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) – LO	1.304.714.000,00	371.631.000,00
Jumlah		**19.245.127.710,33**	**42.177.585.374,36**

V.4.a.1)c) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan tahun 2020 sebesar Rp67.741.858.495,77 dan tahun 2019 sebesar Rp520.739.397.545,13 yaitu bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD. Di bawah ini merupakan rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dapat dipisahkan tahun 2020 dan tahun 2019 sebagai berikut:

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO		Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
1	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PRPP – LO	4.398.350,00	0,00
2	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PD Serba Usaha – LO	254390789	63.481.521,00
3	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PT Bank Jateng – LO	14.714.392.341,00	14.644.983.297,00
4	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PD Cahaya Husada – LO	-613.646.811,43	216.521.374,00
5	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PD Grafika Indah – LO	-3.604.810.621,98	-723.415.835,00
6	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PDBPR BKK Cilacap-LO	4.487.288.876,63	4.489.745.407,00
7	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PD BKK Kesugihan– LO	0,00	-930.844.033,87
8	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PDAM Tirta Wijaya – LO	22.085.390.539,00	23.533.464.917,00
9	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PT KIW – LO	0,00	921.694.677,00
10	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PT KIC – LO	30.414.455.033,55	478.523.766.221,00
Jumlah		**67.741.858.495,77**	**520.739.397.545,13**

V.4.a.1)d) Lain-lain PAD yang Sah – LO

Lain-lain PAD yang Sah – LO tahun 2020 sebesar Rp337.485.760.256,26 dan tahun 2019 sebesar Rp296.403.936.761,59 dengan rincian sebagai berikut:

Lain-lain PAD Yang Sah – LO		Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
1	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan - LO	0,00	0,00
2	Penerimaan Jasa Giro - LO	9.389.757.795,00	18.034.637.854,07
3	Pendapatan Bunga – LO	14.174.657.517,00	10.528.195.223,00
4	Pendapatan Denda Pajak - LO	908.115.148,78	376.689.115,00
5	Pendapatan Denda Retribusi - LO	529.137.404,00	1.638.611.000,00
6	Pendapatan dari Pengembalian -LO	3.414.147.358,48	2.281.160.762,52
7	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah - LO	0,00	45.829.380,00
8	Pendapatan BLUD – LO	236.092.107.398,00	185.425.030.158,00
9	Pendapatan Dana Kapitasi JKN - LO	72.977.837.635,00	78.073.783.269,00
Jumlah		337.485.760.256,26	**296.403.936.761,59**

Pendapatan BLUD-LO meningkat dari Rp185.425.030.158,00 menjadi Rp236.092.107.398,00 karena pada tahun 2020 puskesmas menjadi BLUD. Pendapatan Dana BOS pada Tahun 2020 disajikan sebagai Pendapatan Hibah–LO pada Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah–LO yang secara rinci dapat dilihat pada catatan nomor V.4.a.3)a).

V.4.a.2) Pendapatan Transfer - LO

Pendapatan Transfer - LO untuk periode tahun 2020 dan tahun 2019 masing-masing sebesar Rp2.077.982.870.554,00 dan Rp2.220.322.293.526,00 dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan Tranfer – LO		Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat– LO	1.764.468.226.333,00	1.923.671.199.583,00
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO	71.923.322.000,00	46.363.857.000,00
3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainya - LO	216.240.449.221,00	217.325.795.943,00
4	Bantuan Keuangan	25.350.873.000,00	32.961.441.000,00
Jumlah		**2.077.982.870.554,00**	**2.220.322.293.526,00**

V.4.a.2)a) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO tahun 2020 sebesar Rp1.764.468.226.333,00 dan tahun 2019 sebesar Rp1.923.671.199.583,00 dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO		Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
1	Bagi Hasil Pajak – LO	58.459.340.126,00	54.863.027.104,00
2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam – LO	2.562.097.966,00	1.811.918.937,00
3	Dana Alokasi Umum (DAU) – LO	1.281.940.170.000,00	1.423.200.397.000,00
4	Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK) – LO	78.604.415.067,00	112.757.938.381,00
5	Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK) – LO	342.902.203.174,00	331.037.918.161,00
Jumlah		**1.764.468.226.333,00**	**1.923.671.199.583,00**

V.4.a.2)b) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya -LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO tahun 2020 sebesar Rp71.923.322.000,00 dan tahun 2019 sebesar Rp46.363.857.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO		Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
1	Tunjangan Profesi Guru PNSD – LO	0,00	0,00
2	Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD – LO	0,00	0,00
3	Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi Provinsi – LO	0,00	0,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO		Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
4	Bantuan Operasional Kesehatan – LO	0,00	0,00
5	Bantuan Operasional KB – LO	0,00	0,00
6	Dana Penyesuaian – LO	0,00	46.363.857.000,00
7	Dana Insentif Daerah –LO	71.923.322.000,00	0,00
Jumlah		**71.923.322.000,00**	**46.363.857.000,00**

V.4.a.2)c) Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainya - LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO tahun 2020 sebesar Rp216.240.449.221,00 dan tahun 2019 sebesar Rp217.325.795.943,00.

Pendapatan Tranfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO		Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor– LO	56.521.781.735,00	57.139.478.915,00
2	Pendapatan Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor– LO	28.763.077.145,00	43.060.503.982,00
3	Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor– LO	49.738.000.887,00	54.816.493.356,00
4	Pendapatan Dana Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan– LO	1.611.185.192,00	1.205.798.887,00
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok – LO	79.606.404.262,00	0,00
Jumlah		**216.240.449.221,00**	**217.325.795.943,00**

V.4.a.2)d) Bantuan Keuangan - LO

Bantuan Keuangan – LO tahun 2020 sebesar Rp25.350.873.000,00 dan tahun 2019 sebesar Rp32.961.441.000,00 yang terdiri dari:

Bantuan Keuangan – LO		Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi lainnya- LO	25.350.873.000,00	32.961.441.000,00
Jumlah		**25.350.873.000,00**	**32.961.441.000,00**

V.4.a.3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah- LO

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah untuk periode tahun 2020 dan tahun 2019 masing-masing sebesar Rp277.443.754.840,60 dan Rp289.800.668.713,00 yang terdiri atas:

V.4.a.3)a) Pendapatan Hibah-LO

Pendapatan Hibah – LO tahun 2020 sebesar Rp127.884.015.256,60 dan tahun 2019 sebesar Rp289.651.060.963,00 dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan Hibah – LO		Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
1	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah- LO	53.201.648.935,60	63.588.455.467,00
2	Pendapatan Hibah Dari Kelompok Masyarakat-LO	25.556.864.755,00	9.539.645.689,00
3	Pendapatan Hibah Dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri-LO	925.779.480,00	47.402.774.880,00
4	Pendapatan Dana BOS – LO	197.759.461.670,00	169.120.184.927,00
Jumlah		**277.443.754.840,60**	**289.651.060.963,00**

Pendapatan Hibah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

(1) Pendapatan Hibah dari Pemerintah- LO

Pendapatan Hibah dari Pemerintah sebesar Rp53.201.648.935,60 secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pendapatan Hibah Dari Pemerintah – LO		Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	1.885.114.979,00	1.396.725.000,00
2	SMP Negeri 1 Cilacap	0,00	0,00

3	SMP Negeri 5 Cilacap	0,00	941.472.000,00
4	SMP Negeri 9 Cilacap	0,00	0,00
5	SMP Negeri 1 Kawunganten	30.825.000,00	0,00
6	SMP Negeri 1 Jeruklegi	0,00	437.706.996,00
7	SMP Negeri 1 Cimanggu	0,00	239.706.996,00
8	SMP Negeri 3 Jeruklegi	182.175.000,00	239.706.996,00
9	SMP Negeri 1 Dayeuhluhur	0,00	0,00
10	SMP Negeri 1 Majenang	0,00	0,00
11	SMP Negeri 3 Majenang	0,00	0,00
12	SMP Negeri 4 Majenang	0,00	0,00
13	SMP Negeri 5 Majenang Satu Atap	0,00	0,00
14	SMP Negeri 7 Majenang Satu Atap	90.485.000,00	0,00
15	SMP Negeri 2 Cipari	90.485.000,00	0,00
16	SMP Negeri 3 Cipari Satu Atap	90.485.000,00	0,00
17	SMP Negeri 4 Cipari	90.485.000,00	0,00
18	SMP Negeri 3 Bantarsari	90.485.000,00	0,00
19	SMP Negeri 2 Kedungreja	90.485.000,00	0,00
20	SMP Negeri 3 Kedungreja	90.485.000,00	0,00
21	SMP Negeri 4 Kedungreja Satu Atap	90.485.000,00	0,00
22	SMP Negeri 3 Sidareja	90.485.000,00	0,00
23	SMP Negeri 3 Wanareja	90.485.000,00	0,00
24	SMP Negeri 1 Wanareja Satu Atap	90.485.000,00	0,00
25	SMP Negeri 1 Patimuan	142.500.000,00	0,00
26	SMP Negeri 2 Patimuan Satu Atap	90.485.000,00	0,00
27	SMP Negeri 1 Kampung Laut	90.485.000,00	0,00
28	SMP Negeri 2 Kampung Laut	12.560.000,00	0,00
29	SMP Negeri 1 Sampang	0,00	0,00
30	SMP Negeri 2 Sampang	0,00	0,00
31	SMP Negeri 1 Kroya	0,00	0,00
32	SMP Negeri 2 Kroya	0,00	0,00
33	SMP Negeri 4 Kroya	0,00	198.000.000,00
34	SMP Negeri 6 Kroya	0,00	198.000.000,00
35	SMP Negeri 1 Karangpucung	0,00	0,00
36	SMP Negeri 2 Nusawungu	0,00	90.000.000,00
37	SMP Negeri 1 Cimanggu Satu Atap	90.485.000,00	0,00
38	SMP Negeri 4 Cimanggu Satu Atap	90.485.000,00	0,00
39	SMP Negeri 2 Gandrungmangu	90.485.000,00	0,00
40	SMP Negeri 1 Gandrungmangu Satu Atap	90.485.000,00	0,00
41	SMP Negeri 1 Wanareja	0,00	0,00
42	SMP Negeri 2 Wanareja	0,00	0,00
43	SMP Negeri 2 Maos	0,00	0,00
44	SMP Negeri 2 Kampung Laut	0,00	0,00
45	Dinas Kesehatan	21.565.074.234,60	0,00
46	BLUD RSUD Cilacap	2.538.451.178,00	0,00
47	Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata	0,00	0,00
48	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	782.625.052,00	4.667.926.401,00
49	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	51.480.000,00	434.176.000,00
50	Dinas Sosial	114.926.000,00	27.688.000,00
51	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	32.870.669.036,00
52	Dinas Keluarga Berencana , Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	833.963.000,00	0,00
53	Dinas Perhubungan	6.797.732.193,00	0,00
54	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	0,00	79.783.000,00
55	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	44.328.000,00	586.966.600,00
56	Dinas Pertanian	110.275.000,00	0,00
57	Dinas Perikanan		96.252.000,00
58	Sekretariat Daerah	1.167.554.400,00	0,00

59	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	543.502.000,00	72.863.000,00
60	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (SKPKD)	14.860.317.899,00	19.610.637.598,00
61	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	0,00	1.400.175.844,00
Jumlah		**53.201.648.935,60**	**63.588.455.467,00**

Hibah yang diterima SKPD secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan SMP Negeri berupa aset tetap dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Pusat,
2. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air tersebut bangunan pengambilan air bersih/ air baku dari kementrian ESDM.
3. Dinas Perhubungan berupa Rehabilitasi dermaga penyeberangan , kapal penumpang dan kendaraan bus sekolah dari Dirjen Hubungan Darat.
4. Dinas Kesehatan berupa obat obatan dan alat kesehatan dari Provinsi Jawa Tengah.
5. Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berupa aset dan barang habis pakai dari Dinas P3AP2KB Provinsi Jawa Tengah dan sumbangan Covid.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BLUD RSUD Cilacap, Dinas Sosial, Sekretariat Daerah, DPKUKM merupakan sumbangan Covid untuk kegiatan penanganan.
7. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan berupa Lemari dan arsip pejabat dan buku umum dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
8. Dinas Pertanian berupa aset peralatan komputer dari Pemerintah Pusat.
9. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPKD) tersebut berupa Hibah IPDMIP, Hibah PDAM, Hibah IPDMIP ADB, Hibah IPDMIP AIF, Hibah IPDMIP IFAD.

(2) Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat – LO

Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat sebesar Rp25.556.864.755,00 secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut.

Pendapatan Hibah Dari Kelompok Masyarakat– LO		Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	239.657.348,00	0,00
2	SMP Negeri 1 Cilacap	0,00	26.750.000,00
3	SMP Negeri 3 Cilacap	0,00	0,00
4	SMP Negeri 4 Cilacap	0,00	0,00
5	SMP Negeri 5 Cilacap	0,00	508.670.000,00
6	SMP Negeri 6 Cilacap	33.511.750,00	176.000.000,00
7	SMP Negeri 1 Kawunganten	0,00	0,00
8	SMP Negeri 4 Kawunganten Satu Atap	0,00	0,00
9	SMP Negeri 1 Gandrungmangu	0,00	0,00
10	SMP Negeri 3 Gandrungmangu	0,00	0,00
11	SMP Negeri 1 Jeruklegi	0,00	0,00
12	SMP Negeri 2 Jeruklegi	0,00	136.580.000,00

Pendapatan Hibah Dari Kelompok Masyarakat– LO		Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
13	SMP Negeri 3 Jeruklegi	10.000.000,00	9.750.000,00
14	SMP Negeri 1 Majenang	108.270.000,00	72.750.000,00
15	SMP Negeri 2 Majenang	420.210.000,00	106.000.000,00
16	SMP Negeri 4 Majenang	0,00	96.234.000,00
17	SMP Negeri 2 Cipari	0,00	0,00
18	SMP Negeri 1 Adipala	29.634.000,00	0,00
19	SMP Negeri 2 Adipala	0,00	178.000.000,00
20	SMP Negeri 3 Binangun	0,00	0,00
21	SMP Negeri 1 Bantarsari	25.215.000,00	0,00
22	SMP Negeri 2 Bantarsari	0,00	24.768.350,00
23	SMP Negeri 1 Bantarsari Satu Atap	0,00	95.000.000,00
24	SMP Negeri 1 Kroya	0,00	0,00
25	SMP Negeri 2 Kroya	0,00	103.700.000,00
26	SMP Negeri 3 Kroya	0,00	160.000.000,00
27	SMP Negeri 5 Kroya	0,00	1.245.000.000,00
28	SMP Negeri 6 Kroya	0,00	0,00
29	SMP Negeri 3 Kesugihan	0,00	0,00
30	SMP Negeri 2 Sidareja	0,00	7.400.000,00
31	SMP Negeri 1 Wanareja	8.900.000,00	28.500.000,00
32	SMP Negeri 2 Wanareja	0,00	0,00
33	SMP Negeri 3 Wanareja	0,00	0,00
34	SMP Negeri 1 Kedungreja	0,00	15.500.000,00
35	SMP Negeri 2 Kedungreja	0,00	18.050.000,00
36	SMP Negeri 3 Karangpucung Satu Atap	0,00	55.149.000,00
37	SMP Negeri 4 Karangpucung Satu Atap	0,00	8.800.000,00
38	SMP Negeri 1 Nusawungu	0,00	150.101.500,00
39	SMP Negeri 2 Nusawungu	0,00	525.920.000,00
40	SMP Negeri 3 Nusawungu	0,00	621.827.500,00
41	SMP Negeri 1 Maos	2.750.000,00	285.135.000,00
42	SMP Negeri 2 Kampung Laut	0,00	33.400.000,00
43	Dinas Kesehatan	3.543.487.437,00	187.630.000,00
44	BLUD RSUD Cilacap	210.550.404,00	0,00
45	BLUD RSUD Majenang	416.501.724,00	0,00
46	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	18.082.509.192,00	0,00
47	Dinas Sosial	8.500.000,00	0,00
48	Dinas Pemanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.500.000,00	0,00
49	Dinas Pertanian	1.029.190.600,00	1.230.086.414,00
50	Sekretariat Daerah	-82.579.900,00	0,00
51	Kecamatan Cilacap Selatan	117.020.000,00	1.493.457.000,00
52	Kecamatan Cilacap Tengah	101.687.400,00	1.939.486.925,00
53	Kecamatan Cilacap Utara	31.381.900,00	0,00
54	Kecamatan Jeruklegi	73.407.500,00	0,00
55	Kecamatan Kawunganten	9.840.000,00	0,00
56	Kecamatan Bantarsari	2.000.000,00	0,00
57	Kecamatan Kesugihan	14.733.000,00	0,00
58	Kecamatan Maos	64.435.000,00	0,00
59	Kecamatan Sampang	26.998.000,00	0,00
60	Kecamatan Kroya	39.500.000,00	0,00
61	Kecamatan Binangun	48.400.000,00	0,00
62	Kecamatan Nusawungu	25.098.000,00	0,00
63	Kecamatan Sidareja	56.000.000,00	0,00
64	Kecamatan Kedungreja	46.425.000,00	0,00
65	Kecamatan Patimuan	63.128.800,00	0,00
66	Kecamatan Cipari	17.200.000,00	0,00
67	Kecamatan Karangpucung	50.754.100,00	0,00
68	Kecamatan Cimanggu	46.988.500,00	0,00
69	Kecamatan Majenang	49.170.000,00	0,00
70	Kecamatan Wanareja	58.135.000,00	0,00
71	Kecamatan Dayeuhluhur	62.250.000,00	0,00
72	Inspektorat	1.000.000,00	0,00
73	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	459.505.000,00	0,00
Jumlah		**25.556.864.755,00**	**9.539.645.689,00**

Hibah yang diterima oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kecamatan, inspektorat, Dinas Kesehatan, BLUD RSUD, dan SMP Negeri tersebut merupakan hibah dalam bentuk aset tetap, dari komite sekolah dan sumbangan terkait covid.

Hibah yang diterima BPPKAD berupa aset tetap terkait sumbangan covid dan hadiah pajak PBB.

Hibah yang diterima oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan adalah hibah fasum berupa tanah jalan dan drainase.

(3) Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri-LO

Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri-LO sebesar Rp925.779.480,00 secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut.dengan rincian sebagai berikut:

No.	SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	37.450.000,00
2	Dinas Kesehatan	359.638.300,00
3	BLUD RSUD Majenang	302.171.680,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	1.000.000,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	30.400.000,00
6	Dinas Komunikasi Dan Informatika	6.100.000,00
7	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	26.250.000,00
8	Dinas Perdagangan, Koprasi, Usaha Kecil Dan Menengah	77.754.500,00
9	Sekretariat DPRD	2.000.000,00
10	Kecamatan Adipala	75.040.000,00
11	Kecamatan Gandrungmangu	1.500.000,00
12	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	6.475.000,00
Jumlah		**925.779.480,00**

(4) Pendapatan Dana BOS – LO

Pendapatan Hibah Dana BOS sebesar Rp tersebut merupakan Hibah Dana BOS yang diterima oleh masing-masing sekolah dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan Hibah Dari Kelompok Masyarakat– LO		Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
1	Pendapatan Dana BOS Wilayah Kecamatan Adipala - LO	8.786.053.084,00	7.730.920.000,00
2	Pendapatan Dana BOS Wilayah Kecamatan Bantarsari - LO	7.816.661.600,00	6.076.144.385,00
3	Pendapatan Dana BOS Wilayah Kecamatan Binangun - LO	6.830.023.133,00	5.797.080.000,00
4	Pendapatan Dana BOS Wilayah Kecamatan Cilacap Selatan - LO	8.306.250.000,00	8.385.984.750,00
5	Pendapatan Dana BOS Wilayah Kecamatan Cilacap Tengah - LO	8.340.780.000,00	8.085.400.000,00
6	Pendapatan Dana BOS Wilayah Kecamatan Cilacap Utara - LO	7.297.600.000,00	7.206.040.000,00
7	Pendapatan Dana BOS Wilayah Kecamatan Cimanggu - LO	10.511.641.000,00	8.366.880.000,00
8	Pendapatan Dana BOS Wilayah Kecamatan Cipari - LO	6.877.975.000,00	5.405.155.000,00
9	Pendapatan Dana BOS Wilayah Kecamatan Dayeuhluhur - LO	6.436.510.000,00	4.438.340.000,00
10	Pendapatan Dana BOS Wilayah Kecamatan Gandrungmangu - LO	10.587.876.000,00	8.756.751.809,00
11	Pendapatan Dana BOS Wilayah Kecamatan Jeruklegi - LO	7.940.880.000,00	6.918.926.750,00
12	Pendapatan Dana BOS Wilayah Kecamatan Kawunganten - LO	8.336.033.807,00	7.207.753.000,00
13	Pendapatan Dana BOS Wilayah Kecamatan Karangpucung - LO	9.466.430.000,00	7.290.650.817,00
14	Pendapatan Dana BOS Wilayah Kecamatan Kampunglaut - LO	2.648.643.000,00	1.744.283.904,00
15	Pendapatan Dana BOS Wilayah Kecamatan Kedungreja - LO	9.073.800.000,00	7.285.220.000,00

Pendapatan Hibah Dari Kelompok Masyarakat– LO		Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
16	Pendapatan Dana BOS Wilayah Kecamatan Kesugihan - LO	11.074.871.000,00	9.838.655.000,00
17	Pendapatan Dana BOS Wilayah Kecamatan Kroya - LO	11.674.420.000,00	10.033.520.000,00
18	Pendapatan Dana BOS Wilayah Kecamatan Majenang - LO	13.755.971.000,00	11.404.714.000,00
19	Pendapatan Dana BOS Wilayah Kecamatan Maos - LO	5.279.821.046,00	5.373.025.805,00
20	Pendapatan Dana BOS Wilayah Kecamatan Nusawungu - LO	9.089.808.800,00	7.871.280.000,00
21	Pendapatan Dana BOS Wilayah Kecamatan Patimuan - LO	4.948.439.200,00	4.264.720.000,00
22	Pendapatan Dana BOS Wilayah Kecamatan Sampang - LO	4.740.970.000,00	4.146.800.000,00
23	Pendapatan Dana BOS Wilayah Kecamatan Sidareja - LO	6.618.722.000,00	5.820.216.707,00
24	Pendapatan Dana BOS Wilayah Kecamatan Wanareja - LO	11.319.282.000	9.671.723.000,00
Jumlah		**197.759.461.670,00**	**169.120.184.927,00**

Pada tahun 2020 hibah dana BOS tersebut disajikan pada Lain-lain PAD yang Sah – LO yang dijelaskan pada catatan nomor V.4.a.1)d). Penyajian sebagai Pendapatan Hibah – LO mengacu pada Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual.

Dari total Pendapatan Hibah – LO tahun 2020 sebesar Rp277.443.754.840,60 didalamnya terdapat sumbangan untuk kegiatan penanganan covid secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

NO	OPD	SUMBANGAN COVID
1	BPBD	51.480.000,00
2	DINAS P & K	2.000.000,00
3	INSPEKTORAT	1.000.000,00
4	SATPOL PP	1.000.000,00
5	BPPKAD	5.000.000,00
6	DINAS KB, PP DAN PA	821.524.000,00
7	DINAS KESEHATAN	10.618.766.500,00
8	DPMPTSP	5.500.000,00
9	DPKUKM	543.502.000,00
10	DINAS SOSIAL	114.926.000,00
11	SEKRETARIAT DAERAH	1.134.894.000,00
12	SEKRETARIAT DEWAN	2.000.000,00
13	KECAMATAN CILACAP SELATAN	117.020.000,00
14	KECAMATAN CILACAP TENGAH	101.687.400,00
15	KECAMATAN CILACAP UTARA	31.381.900,00
16	KECAMATAN JERUKLEGI	73.407.500,00
17	KECAMATAN KAWUNGANTEN	9.840.000,00
18	KECAMATAN BANTARSARI	2.000.000,00
19	KECAMATAN KESUGIHAN	14.733.000,00
20	KECAMATAN ADIPALA	75.040.000,00
21	KECAMATAN MAOS	64.435.000,00
22	KECAMATAN KROYA	39.500.000,00
23	KECAMATAN SAMPANG	26.998.000,00
24	KECAMATAN BINANGUN	48.400.000,00
25	KECAMATAN NUSAWUNGU	25.098.000,00
26	KECAMATAN SIDAREJA	56.000.000,00
27	KECAMATAN KEDUNGREJA	46.425.000,00
28	KECAMATAN GANDRUNGMANGU	1.500.000,00
29	KECAMATAN PATIMUAN	60.028.800,00
30	KECAMATAN CIPARI	17.200.000,00
31	KECAMATAN KARANGPUCUNG	50.754.100,00
32	KECAMATAN CIMANGGU	46.988.500,00
33	KECAMATAN MAJENANG	49.170.000,00
34	KECAMATAN WANAREJA	58.135.000,00
35	KECAMATAN DAYEUHLUHUR	62.250.000,00
36	BLUD RSUD CILACAP	2.473.976.310,00
37	BLUD RSUD MAJENANG	522.473.404,00
38	PUSKESMAS ADIPALA I	67.616.600,00
39	PUSKESMAS ADIPALA II	60.523.007,00
40	PUSKESMAS BANTARSARI	74.533.000,00

NO	OPD	SUMBANGAN COVID
41	PUSKESMAS BINANGUN	40.920.000,00
42	PUSKESMAS CILACAP SELATAN I	47.628.500,00
43	PUSKESMAS CILACAP SELATAN II	47.851.800,00
44	PUSKESMAS CILACAP TENGAH I	86.889.500,00
45	PUSKESMAS CILACAP TENGAH II	65.728.500,00
46	PUSKESMAS CILACAP UTARA I	64.337.000,00
47	PUSKESMAS CILACAP UTARA II	33.783.000,00
48	PUSKESMAS CIMANGGU I	61.519.500,00
49	PUSKESMAS CIMANGGU II	53.580.100,00
50	PUSKESMAS CIPARI	78.374.900,00
51	PUSKESMAS DAYEUHLUHUR I	98.911.546,00
52	PUSKESMAS DAYEUHLUHUR II	83.580.000,00
53	PUSKESMAS GANDRUNGMANGU I	94.336.001,00
54	PUSKESMAS GANDRUNGMANGU II	21.297.250,00
55	PUSKESMAS JERUKLEGI I	84.563.000,00
56	PUSKESMAS JERUKLEGI II	21.226.500,00
57	PUSKESMAS KAMPUNGLAUT	35.995.176,00
58	PUSKESMAS KARANGPUCUNG I	34.717.700,00
59	PUSKESMAS KARANGPUCUNG II	10.727.500,00
60	PUSKESMAS KAWUNGANTEN	143.140.900,00
61	PUSKESMAS KEDUNGREJA	41.028.000,00
62	PUSKESMAS KESUGIHAN I	59.301.500,00
63	PUSKESMAS KESUGIHAN II	15.344.000,00
64	PUSKESMAS KROYA I	19.030.000,00
65	PUSKESMAS KROYA II	22.521.599,00
66	PUSKESMAS MAJENANG II	20.605.000,00
67	PUSKESMAS MAJENANG I	38.324.000,00
68	PUSKESMAS MAOS	52.598.500,00
69	PUSKESMAS NUSAWUNGU I	113.439.618,00
70	PUSKESMAS NUSAWUNGU II	12.312.000,00
71	PUSKESMAS PATIMUAN	48.899.000,00
72	PUSKESMAS SAMPANG	53.696.900,00
73	PUSKESMAS SIDAREJA	71.836.500,00
74	PUSKESMAS WANAREJA I	87.640.000,00
75	PUSKESMAS WANAREJA II	34.512.640,00
	JUMLAH	**19.478.904.651,00**

V.4.a.3)b) Pendapatan Lainnya- LO

Pendapatan Lainnya – LO tahun 2020 sebesar Rp0,00 dan tahun 2019 sebesar Rp149.607.750,00.

V.4.a.3)c) Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya - LO

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya tahun 2020 sebesar Rp0,00 dan tahun 2019 sebesar Rp0,00.

V.4.a.3)d) Alokasi Dana Desa Yang Bersumber dari APBN –LO

Alokasi dana desa yang bersumber dari APBN tahun 2020 sebesar Rp0,00 dan tahun 2019 sebesar Rp0,00.

V.4.b.Beban

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyebutnya dengan belanja, sedangkan Laporan Operasional (LO) menyebut dengan beban. LRA disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas, sedangkan LO disajikan dengan prinsip akrual yang disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*). Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Belanja adalah semua pengeluaran kas umum daerah yang

mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah.

Ada beberapa perbedaan antara Beban dan Belanja, yaitu :

No.	Beban	Belanja
1.	Diukur dan diakui dengan basis akuntansi akrual	Diukur dan diakui dengan basis akuntansi kas
2.	Merupakan unsur pembentuk Laporan Operasional (LO)	Merupakan unsur pembentuk Laporan Realisasi Angaran (LRA)
3.	Menggunakan Kode Akun 9	Menggunakan Kode Akun 5

Beban - LO tahun 2020 dan tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Beban	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
Beban Pegawai – LO	1.146.165.916.755,00	1.194.222.469.671,00
Beban Persediaan	60.077.948.380,37	42.761.373.828,70
Beban Jasa	762.764.748.216,41	741.870.925.717,70
Beban Pemeliharaan	32.697.504.708,00	36.095.007.635,00
Beban Perjalanan Dinas	31.347.808.103,00	47.652.486.575,00
Beban Bunga	0,00	0,00
Beban Subsidi	0,00	400.000.000,00
Beban Hibah	85.732.680.000,90	95.436.453.099,19
Beban Bantuan Sosial	51.091.710.000,00	7.288.796.800,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	268.364.649.655,87	211.613.277.016,44
Beban Penyisihan Piutang	5.715.235.231,78	2.326.418.468,75
Beban Lain-lain	114.307.095,00	0,00
Beban Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	0,00	0,00
Beban Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	0,00	0,00
Beban Transfer	187.201.496.600,00	213.425.600.794,00
Jumlah	**2.631.274.004.746,33**	**2.593.092.809.605,78**

Rincian lebih lanjut mengenai Beban Operasi, Beban Transfer, Defisit Non Operasional, dan Beban Luar Biasa adalah sebagai berikut:

V.4.b.1) Beban Pegawai-LO

Beban Pegawai - LO pada tahun 2020 sebesar Rp1.146.165.916.755,00 dan tahun 2019 sebesar Rp1.194.222.469.671,00 dengan rincian sebagai berikut:

Beban Pegawai-LO		Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
1	Beban Gaji dan Tunjangan – LO	1.015.234.055.121,00	781.287.771.302,00
2	Beban Tambahan Penghasilan PNS – LO	112.334.589.305,00	392.651.071.470,00
3	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH – LO	9.577.300.000,00	9.417.000.000,00
4	Beban Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan – LO	0,00	0,00
5	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah	2.437.284.380,00	9.038.586.155,00
6	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	103.681.590,00	873.151.744,00
7	Beban Uang Lembur – LO	0,00	954.889.000,00
8	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	6.479.006.359,00	0,00
Jumlah		**1.146.165.916.755,00**	**1.194.222.469.671,00**

Perbedaan antara Beban Pegawai - LO dengan Belanja Pegawai- LRA adalah bahwa pada Beban Pegawai – LO memperhitungkan adanya transaksi – transaksi keuangan yang secara akrual sudah dapat mengurangi ekuitas atau menambah ekuitas tanpa menunggu adanya aliran kas masuk atau keluar sedangkan pada Belanja Pegawai untuk semua transaksi akan dicatat sebagai realisasi manakala ada aliran transaksi keluar. Transaksi–transaksi tersebut antara lain sebagai berikut :

a) Beban Gaji dan Tunjangan.

Beban Gaji dan Tunjangan pada tahun 2020 sebesar Rp1.015.234.055.121,00 naik sebesar Rp233.946.283.819,00 dari tahun 2019 sebesar Rp781.287.771.302,00.

b) Beban Tambahan Penghasilan PNS

Beban Tambahan Penghasilan PNS tahun 2020 sebesar Rp112.334.589.305,00 turun sebesar Rp280.316.482.165,00 dari tahun 2019 sebesar Rp392.651.071.470,00.

c) Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH

Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH tahun 2020 sebesar Rp9.577.300.000,00 naik sebesar Rp160.300.000,00 dari tahun 2019 sebesar Rp9.417.000.000,00.

d) Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah.

Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah tahun 2020 sebesar Rp2.437.284.380,00 turun sebesar Rp6.601.301.775,00 dari tahun 2019 sebesar Rp9.038.586.155,00.

e) Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah.

Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah tahun 2020 sebesar Rp103.681.590,00 turun sebesar Rp 769.470.154,00 dari tahun 2019 sebesar Rp873.151.744,00.

f) Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya

Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya tahun 2020 sebesar Rp6.479.006.359,00 dan tahun 2019 sebesar Rp0,00.

V.4.b.2) Beban Persediaan

Beban Persediaan pada tahun 2020 sebesar Rp60.077.948.380,37 tahun 2019 sebesar Rp42.761.373.828,70 dengan rincian sebagai berikut:

Rekening	Beban Persediaan-LO	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
9 . 1 . 2 . 01 . 01	Beban Persediaan Alat Tulis Kantor	4.791.646.230,00	7.514.261.067,00
9 . 1 . 2 . 01 . 02	Beban Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	3.094.650,00	6.017.450,00
9 . 1 . 2 . 01 . 03	Beban Persediaan Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.657.670.093,00	2.709.428.276,00
9 . 1 . 2 . 01 . 04	Beban Persediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	462.161.921,00	406.114.100,00
9 . 1 . 2 . 01 . 05	Beban Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	4.095.634.441,00	1.981.122.969,00
9 . 1 . 2 . 01 . 06	Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	2.502.454.434,00	1.776.604.392,00
9 . 1 . 2 . 01 . 07	Beban Persediaan Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	38.969.600,00	78.223.200,00
9 . 1 . 2 . 01 . 08	Beban Persediaan Pengisian Isi Tabung Gas	187.533.400,00	221.859.000,00
9 . 1 . 2 . 01 . 09	Beban Persediaan Habis Pakai Lainnya	2.038.619.653,00	9.238.063.885,00
9 . 1 . 2 . 01 . 10	Beban Persediaan Barang Cetakan Lainnya	905.900,00	7.971.960,00
9 . 1 . 2 . 01 . 11	Beban Persediaan Brg Cetakan (KTP & KK) (Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil)	109.821.250,00	0,00
9 . 1 . 2 . 01 . 12	Beban Persediaan Brg Kepend.Lain (Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil)	475.720.285,00	0,00
9 . 1 . 2 . 01 . 13	Beban Persediaan Dokumentasi	196.681.100,00	417.295.075,00
9 . 1 . 2 . 01 . 13	Beban Persediaan Dokorasi	297.634.450,00	0,00
9 . 1 . 2 . 02 . 01	Beban Persediaan Bahan Baku Bangunan	2.393.216.315,00	2.215.796.763,00

Rekening	Beban Persediaan-LO	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
9 . 1 . 2 . 02 . 02	Beban Persediaan Bahan/Bibit Tanaman	404.667.700,00	309.079.400,00
9 . 1 . 2 . 02 . 03	Beban Persediaan Bibit Ternak	166.020.518,00	124.313.400,00
9 . 1 . 2 . 02 . 04	Beban Persediaan Bahan Obat-obatan	24.637.809.526,37	10.680.136.094,90
9 . 1 . 2 . 02 . 05	Beban Persediaan Bahan Kimia dan Pupuk	597.260.169,00	750.545.333,00
9 . 1 . 2 . 02 . 06	Beban Persediaan Makanan Pokok	3.253.446.100,00	880.487.900,00
9 . 1 . 2 . 02 . 07	Beban Persediaan Bahan/Material Lainnya	0,00	3.331.071.563,80
9 . 1 . 2 . 02 . 07	Beban Persediaan Bahan untuk Pendidikan	207.512.500,00	112.982.000,00
9 . 1 . 2 . 02 . 08	Beban Persediaan Bahan Habis Pakai Lainnya	28.504.200,00	0,00
9 . 1 . 2 . 02 . 09	Beban Persediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	432.881.712,00	0,00
9 . 1 . 2 . 02 . 10	Beban Persediaan Peralatan dan Perlengkapan Laboratorium	220.698.125,00	0,00
9 . 1 . 2 . 02 . 11	Beban Persediaan Pakan Ternak	309.139.700,00	0,00
9 . 1 . 2 . 02 . 12	Beban Persediaan Peralatan dan Perlengkapan Olahraga	242.600.000,00	0,00
9 . 1 . 2 . 02 . 13	Beban Persediaan Peralatan dan Perlengkapan Kesehatan	8.325.644.408,00	0,00
9 . 1 . 2 . 20 . 01	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	0,00	0,00
9 . 1 . 2 . 20 . 02	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	0,00	0,00
9 . 1 . 2 . 33 . 01	Beban Persediaan Barang Yang Akan Diberikan Kepada Pihak Ketiga	0,00	0,00
9 . 1 . 2 . 33 . 02	Beban Persediaan Barang Yang Akan Diberikan Masyarakat	0,00	0,00
9 . 1 . 2 . 34 . 01	Beban Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	0,00	0,00
9 . 1 . 2 . 35 . 01	Beban Bantuan Sosial Barang Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/masyarakat	0,00	0,00
	Jumlah	**60.077.948.380,37**	**42.761.373.828,70**

Rincian Beban Persediaan dapat dilihat pada **Lampiran 11**.

V.4.b.3) Beban Jasa

Beban Jasa pada tahun 2020 sebesar Rp762.764.748.216,41 dan tahun 2019 sebesar Rp741.870.925.717,70 dengan rincian sebagai berikut:

Rekening	Beban Jasa	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
9 . 1 . 2 . 03 . 01	Beban Jasa telepon	648.918.625,00	821.241.356,00
9 . 1 . 2 . 03 . 02	Beban Jasa air	749.061.220,00	958.567.751,00
9 . 1 . 2 . 03 . 03	Beban Jasa listrik	33.544.207.341,00	34.412.661.273,00
9 . 1 . 2 . 03 . 04	Beban Jasa Pengumuman Lelang/ Pemenang Lelang	9.900.000,00	14.454.000,00
9 . 1 . 2 . 03 . 05	Beban Jasa Surat Kabar/Majalah	542.951.413,00	617.801.000,00
9 . 1 . 2 . 03 . 06	Beban Jasa Kawat/Faksimili/Internet	4.859.511.958,00	5.672.386.590,00
9 . 1 . 2 . 03 . 07	Beban Jasa Paket/Pengiriman	284.058.300,00	233.000,00
9 . 1 . 2 . 03 . 08	Beban Jasa Sertifikasi	300.985.400,00	78.738.400,00
9 . 1 . 2 . 03 . 09	Beban Jasa Transaksi Keuangan	217.887.617,00	0,00
9 . 1 . 2 . 03 . 11	Beban Jasa Administrasi Pungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor		3.071.700,00
9 . 1 . 2 . 03 . 12	Beban Jasa Seni dan Olahraga	3.000.000,00	59.500.000,00
9 . 1 . 2 . 03 . 13	Beban Jasa Pengetikan	42.775.000,00	348.299.000,00
9 . 1 . 2 . 03 . 15	Beban Jasa Pemeliharaan Perawatan Alat Kantor	0,00	0,00
9 . 1 . 2 . 03 . 17	Beban Jasa Pihak Ketiga	10.436.359.046,00	3.803.842.829,33
9 . 1 . 2 . 03 . 18	Beban Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	48.414.250.810,00	13.730.138.050,00
9 . 1 . 2 . 03 . 19	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan	2.262.411.933,00	55.673.201.764,00
9 . 1 . 2 . 03 . 20	Beban Jasa Kantor Lainnya	0,00	26.064.587.960,00
9 . 1 . 2 . 03 . 21	Beban Jasa Dekorasi	133.474.400,00	1.280.480.447,00
9 . 1 . 2 . 03 . 22	Transport Lokal (BOK Non Fisik)	2.395.850.000,00	0,00
9 . 1 . 2 . 03 . 23	Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Lingkungan RT/RW	2.604.600.000,00	0,00
9 . 1 . 2 . 04 . 01	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan	32.630.826.516,00	29.502.305.192,00
9 . 1 . 2 . 04 . 02	Beban Jasa Premi Asuransi Barang Milik Daerah	565.792.421,03	965.454.376,67
9 . 1 . 2 . 04 . 03	Beban Jasa Premi Asuransi Lainnya	0,00	6.600.000,00
9 . 1 . 2 . 04 . 04	Beban Jasa Premi Asuransi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	295.927.192,00	0,00
9 . 1 . 2 . 04 . 05	Beban Jasa Premi Asuransi Jaminan Kematian (JKM)	9.755.167,00	0,00
9 . 1 . 2 . 06 . 01	Beban Cetak	6.254.511.659,00	9.629.912.698,50
9 . 1 . 2 . 06 . 02	Beban Penggandaan	3.263.735.395,00	4.852.107.179,00
9 . 1 . 2 . 06 . 03	Beban Penjilidan	369.916.940,00	533.347.000,00
9 . 1 . 2 . 06 . 04	Beban Cetak dan Penggandaan Lainnya	0,00	249.287.800,00

Rekening	Beban Jasa	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
9 . 1 . 2 . 06 . 05	Beban Laminating	12.835.500,00	14.321.500,00
9 . 1 . 2 . 07 . 02	Beban Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	62.260.000,00	364.650.000,00
9 . 1 . 2 . 07 . 03	Beban Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	224.300.000,00	634.198.200,00
9 . 1 . 2 . 07 . 04	Beban Sewa Tempat Parkir/Uang Tambat/Hanggar Sarana Mobilitas	1.500.000,00	7.750.000,00
9 . 1 . 2 . 07 . 05	Beban Akomodasi dan Penginapan	1.091.785.006,00	1.656.318.729,00
9 . 1 . 2 . 08 . 01	Beban Sewa Sarana Mobilitas Darat	247.850.000,00	1.062.210.000,00
9 . 1 . 2 . 08 . 02	Beban Sewa Sarana Mobilitas Air	34.300.000,00	37.860.000,00
9 . 1 . 2 . 09 . 03	Beban Sewa Alat Berat Lainnya	0,00	0,00
9 . 1 . 2 . 10 . 01	Beban Sewa Meja Kursi	262.598.000,00	845.984.500,00
9 . 1 . 2 . 10 . 02	Beban Sewa Komputer dan Printer	10.400.000,00	0,00
9 . 1 . 2 . 10 . 04	Beban Sewa Generator	94.475.000,00	167.830.000,00
9 . 1 . 2 . 10 . 05	Beban Sewa Tenda	379.849.000,00	1.547.555.500,00
9 . 1 . 2 . 10 . 06	Beban Sewa Pakaian Adat/Tradisional	0,00	48.700.000,00
9 . 1 . 2 . 10 . 07	Beban Sewa Perlengkapan Kantor Lainnya	115.175.000,00	949.795.324,00
9 . 1 . 2 . 11 . 01	Beban Makanan dan Minuman Harian Pegawai	5.597.936.240,00	5.806.546.396,00
9 . 1 . 2 . 11 . 02	Beban Makanan dan Minuman Rapat	11.431.042.900,00	13.512.318.219,00
9 . 1 . 2 . 11 . 03	Beban Makanan dan Minuman Tamu	7.793.397.323,00	2.995.819.400,00
9 . 1 . 2 . 11 . 04	Beban Makanan dan Minuman Pelatihan	7.830.467.600,00	12.365.630.580,00
9 . 1 . 2 . 11 . 05	Beban Makanan dan Minuman Lainnya	0,00	5.345.759.150,00
9 . 1 . 2 . 12 . 01	Beban pakaian Dinas KDH dan WKDH	32.250.000,00	15.900.000,00
9 . 1 . 2 . 12 . 02	Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)	282.395.000,00	314.915.000,00
9 . 1 . 2 . 12 . 03	BebanPakaian Sipil Lengkap (PSL)	27.000.000,00	131.000.000,00
9 . 1 . 2 . 12 . 04	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	120.206.750,00	1.047.472.600,00
9 . 1 . 2 . 12 . 05	Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)	12.500.000,00	7.836.000,00
9 . 1 . 2 . 12 . 06	Beban Pakaian Dinas Lainnya	0,00	245.811.000,00
9 . 1 . 2 . 13 . 01	Beban Pakaian kerja lapangan	564.376.250,00	263.683.800,00
9 . 1 . 2 . 13 . 02	Beban Pakaian Lainnya	0,00	96.812.300,00
9 . 1 . 2 . 14 . 01	Beban Pakaian KORPRI	450.000,00	51.250.000,00
9 . 1 . 2 . 14 . 02	Beban Pakaian Adat Daerah	112.650.000,00	919.194.050,00
9 . 1 . 2 . 14 . 03	Beban Pakaian Batik Tradisional	236.685.000,00	1.304.278.001,00
9 . 1 . 2 . 14 . 04	Beban Pakaian Olahraga	190.995.000,00	818.380.200,00
9 . 1 . 2 . 14 . 05	Beban Pakaian Khusus Lainnya	0,00	500.307.100,00
9 . 1 . 2 . 19 . 01	Beban Jasa Konsultansi Penelitian	29.890.000,00	1.284.341.070,00
9 . 1 . 2 . 19 . 02	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan	929.847.520,00	3.793.577.252,00
9 . 1 . 2 . 19 . 03	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan	24.285.250,00	22.820.000,00
9 . 1 . 2 . 22 . 02	Beban Beasiswa Tugas Belajar S1	24.000.000,00	29.000.000,00
9 . 1 . 2 . 22 . 03	Beban Beasiswa Tugas Belajar S2	51.600.000,00	67.200.000,00
9 . 1 . 2 . 23 . 01	Beban Kursus-kursus Singkat/ Pelatihan	5.876.815.256,00	874.317.526,00
9 . 1 . 2 . 23 . 02	Beban Sosialisasi	1.236.668.600,00	62.622.000,00
9 . 1 . 2 . 23 . 03	Beban Bimbingan Teknis	9.988.000,00	50.529.000,00
9 . 1 . 2 . 23 . 04	Beban Uang Saku Peserta Pelatihan, Sosialisasi, dan Bintek Lainnya	0,00	9.375.855.000,00
9 . 1 . 2 . 23 . 05	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimtek Lainnya	7.392.000,00	7.978.701.694,00
9 . 1 . 2 . 24 . 02	Beban Moderator	0,00	0,00
9 . 1 . 2 . 25 . 01	Beban Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan – LO	7.869.086.850,00	10.354.433.250,00
9 . 1 . 2 . 25 . 02	Beban Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa – LO	1.224.720.000,00	1.729.112.300,00
9 . 1 . 2 . 25 . 04	Beban Honorarium Petugas Pengelola Keuangan – LO	18.188.769.500,00	16.040.387.500,00
9 . 1 . 2 . 25 . 05	Beban Honorarium Petugas Pengelola Barang – LO	4.596.772.800,00	3.716.810.000,00
9 . 1 . 2 . 25 . 06	Beban Honorarium Petugas Pembuat Gambar/Design – LO	12.500.000,00	10.550.000,00
9 . 1 . 2 . 25 . 07	Beban Honorarium Petugas Pemeriksa Barang/Pekerjaan – LO	191.030.000,00	195.900.000,00
9 . 1 . 2 . 25 . 08	Beban Honorarium PNS Lainnya – LO	0,00	0,00
9 . 1 . 2 . 26 . 01	Beban Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber – LO	0,00	0,00
9 . 1 . 2 . 26 . 02	Beban Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap – LO	31.882.021.191,00	82.432.446.920,00
9 . 1 . 2 . 26 . 03	Beban Honorarium Non PNS Lainnya - LO	46.449.683.062,00	
9 . 1 . 2 . 27 . 01	Beban Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga	0,00	1.407.000.000,00
9 . 1 . 2 . 27 . 02	Beban Uang untuk diberikan kepada Pihak Masyarakat	1.505.800.000,00	574.250.000,00
9 . 1 . 2 . 28 . 01	Beban Pegawai Dana BOS	59.954.928.603,00	24.074.758.414,00
9 . 1 . 2 . 29 . 01	Beban Barang dan Jasa Dana BOS	101.594.742.735,00	107.267.312.531,00
9 . 1 . 2 . 30 . 01	Beban yang bersumber dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional	0,00	17.726.460.133,00
9 . 1 . 2 . 31 . 01	Beban Pegawai BLUD	62.662.570.802,00	66.278.034.743,00
9 . 1 . 2 . 32 . 01	Beban Barang dan Jasa BLUD	178.571.786.932,38	109.286.340.608,00

Rekening	Beban Jasa	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
9 . 1 . 2 . 34 . 01	Beban Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	44.889.854.862,00	0,00
9 . 1 . 2 . 35 . 01	Beban Bantuan Sosial Barang Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	1.269.162.980,00	0,00
9 . 1 . 2 . 36 . 01	Beban Hadiah Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	455.847.001,00	524.245.000,00
9 . 1 . 2 . 37 . 01	Beban Aset Di Bawah Kapitalisasi	2.427.438.026,00	3.348.380.883,00
9 . 1 . 2 . 38 . 01	Beban Aset yang Diserahkan ke SKPD Lain	0,00	23.675.324.922,00
9 . 1 . 2 . 39 . 01	Beban dari Belanja Modal Yang Tidak Menambah Aset	3.217.198.324,00	7.331.908.056,20
	Jumlah	**762.764.748.216,41**	**741.870.925.717,70**

Beban dari Belanja Modal yang tidak menambah aset tetap sebesar Rp3.217.198.324,00 terdiri dari belanja modal pada:

a) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan SMP Negeri sebesar Rp1.538.964.662,00,
b) Dinas Kesehatan dan Puskesmas sebesar Rp585.081.530,00,
c) BLUD RSUD Cilacap sebesar Rp465.414.180,00,
d) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp1.288.600,00,
e) Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp139.434.752,00,
f) Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp239.560.360,00,
g) Dinas Perhubungan sebesar Rp6.000.000,00,
h) Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp27.451.240,00,
i) Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata sebesar Rp200.000,00,
j) Sekretariat DPRD sebesar Rp28.846.000,00,
k) Kecamatan Cilacap Selatan sebesar Rp178.075.000,00,
l) Kecamatan Cilacap Utara sebesar Rp2.166.000,00,
m) Kecamatan Adipala sebesar Rp120.000,00, dan
n) Kecamatan Kedungreja sebesar Rp4.596.000,00.

V.4.b.4) Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan pada tahun 2020 sebesar Rp32.697.504.708,00 dan tahun 2019 sebesar Rp36.095.007.635,00 dengan rincian sebagai berikut:

Rekening	Beban Pemeliharaan	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
9 . 1 . 2 . 05 . 01	Beban Jasa Service	2.245.561.441,00	863.797.829,00
9 . 1 . 2 . 05 . 02	Beban Penggantian Suku Cadang	2.351.362.003,00	1.238.282.231,00
9 . 1 . 2 . 05 . 03	Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	5.317.251.605,00	4.814.118.629,00
9 . 1 . 2 . 05 . 04	Beban Jasa KIR	4.541.800,00	5.692.200,00
9 . 1 . 2 . 05 . 05	Beban Pajak Kendaraan Bermotor	382.722.860,00	303.750.581,00
9 . 1 . 2 . 05 . 06	Beban Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	2.528.725,00	0,00
9 . 1 . 2 . 05 . 07	Beban Surat Tanda Nomor Kendaraan	149.778.675,00	318.061.597,00
9 . 1 . 2 . 05 . 09	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor lainnya	0,00	4.669.647.270,00
9 . 1 . 2 . 18 . 01	Beban Pemeliharan Tanah	4.391.200,00	0,00
9 . 1 . 2 . 18 . 02	Beban Pemeliharan Peralatan dan Mesin	3.987.560.325,00	3.613.449.034,00
9 . 1 . 2 . 18 . 03	Beban Pemeliharan Gedung dan Bangunan	4.161.750.410,00	4.814.224.981,00
9 . 1 . 2 . 18 . 05	Beban Pemeliharan Aset Tetap Lainnya	0,00	360.996.373,00
9 . 1 . 2 . 18 . 06	Beban Pemeliharaan Jalan	6.875.991.626,00	6.192.421.010,00
9 . 1 . 2 . 18 . 07	Beban Pemeliharan Jebatan	296.415.770,00	0,00
9 . 1 . 2 . 18 . 08	Beban Pemeliharaan Irigasi dan Drainase	6.917.648.268,00	8.900.565.900,00
	Jumlah	**32.697.504.708,00**	**36.095.007.635,00**

V.4.b.5) Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas pada tahun 2020 sebesar Rp31.347.808.103,00 dan tahun 2019 sebesar Rp47.652.486.575,00 dengan rincian sebagai berikut:

Rekening	Beban Perjalanan Dinas	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
9 . 1 . 2 . 15 . 01	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.188.611.377,00	13.817.317.862,00
9 . 1 . 2 . 15 . 02	Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.037.945.526,00	33.509.481.233,00
9 . 1 . 2 . 15 . 03	Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	121.251.200,00	325.687.480,00
	Jumlah	**31.347.808.103,00**	**47.652.486.575,00**

V.4.b.6) Beban Subsidi

Beban Subsidi pada tahun 2020 sebesar Rp 0,00 karena pada tahun 2020 tidak ada Penyelenggaraan Pasar Murah karena terkait adanya Covid. Sedangkan Beban Subsidi tahun 2019 sebesar Rp400.000.000,00.

Beban Subsidi		Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
1	Beban Subsidi kepada Perusahaan	0,00	400.000.000,00
Jumlah		**0,00**	**400.000.000,00**

V.4.b.7) Beban Hibah - LO

Beban Hibah pada tahun 2020 sebesar Rp85.732.680.000,90 dan tahun 2019 sebesar Rp95.436.453.099,19 dengan rincian sebagai berikut:

Beban Hibah		Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
1	Beban Hibah kepada Pemerintah	1.762.691.517,90	0,00
2	Beban Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMN	0,00	0,00
3	Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	0,00	37.204.503.099,19
4	Belanja Hibah Pemilu KDH/WKDH	0,00	0,00
5	Beban Hibah kepada Masyarakat/Swasta	0,00	0,00
6	Beban Hibah kepada Badan /Lembaga Organisasi	0,00	0,00
7	Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat	42.085.693.618,00	0,00
8	Beban Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat -LO	3.724.740.865,00	0,00
9	Beban Hibah kepada Badan/ Lembaga yang Bersifat Nirbala, Sukarela dan Sosial	13.762.570.000,00	20.521.850.000,00
10	Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	150.000.000,00	12.134.000.000,00
11	Beban BOP PAUD kepada Masyarakat/Swasta	21.328.200.000,00	20.676.300.000,00
12	BOP Pendidikan Kesetaraan	0,00	4.899.800.000,00
13	Beban Bantuan Keuangan Kepada PDI PERJUANGAN	589.386.000,00	0,00
14	Beban Bantuan Keuangan Kepada PARTAI GOLKAR	512.736.000,00	0,00
15	Beban Bantuan Keuangan Kepada PARTAI DEMOKRAT	179.802.000,00	0,00
16	Beban Bantuan Keuangan Kepada PARTAI AMANAT NASIONAL	227.136.000,00	0,00
17	Beban Bantuan Keuangan Kepada PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	241.278.000,00	0,00
18	Beban Bantuan Keuangan Kepada PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	407.004.000,00	0,00
19	Beban Bantuan Keuangan Kepada PARTAI KEADILAN	190.854.000,00	0,00
20	Beban Bantuan Keuangan Kepada PARTAI GERINDA	394.098.000,00	0,00
21	Beban Bantuan Keuangan Kepada PARTAI NASDEM	176.490.000,00	0,00
Jumlah		**85.732.680.000,90**	**95.436.453.099,19**

V.4.b.8) Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial pada tahun 2020 sebesar Rp51.091.710.000,00 dan tahun 2019 sebesar Rp7.288.796.800,00 yang terdiri dari:

Beban Bantuan Sosial		Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
1	Beban Bantuan Sosial	51.091.710.000,00	7.288.796.800,00
Jumlah		**51.091.710.000,00**	**7.288.796.800,00**

V.4.b.9) Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi pada tahun 2020 sebesar Rp268.364.649.655,87 dan tahun 2019 sebesar Rp211.613.277.016,44 dengan rincian sebagai berikut:

Beban Penyusutan dan Amortisasi		Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	107.261.264.970,57	79.861.349.321,50
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	33.756.844.772,00	29.824.920.096,00
3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan	126.011.362.693,02	101.509.636.993,94
4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	45.791.000,00	6.235.976,00
5	Beban Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00
6	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	1.289.386.220,28	411.134.629,00
Jumlah		**268.364.649.655,87**	**211.613.277.016,44**

V.4.b.10)Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang pada tahun 2020 sebesar Rp5.715.235.231,78 dan tahun 2019 sebesar Rp2.326.418.468,75 dengan rincian sebagai berikut:

Beban Penyisihan Piutang		Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak	3.200.274.815,33	548.162.909,81
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi	2.514.960.416,45	1.778.255.558,94
3	Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00
4	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya	0,00	0,00
Jumlah		**5.715.235.231,78**	**2.326.418.468,75**

V.4.b.11)Beban Lain-lain

Beban Lain-lain pada tahun 2020 sebesar Rp114.307.095,00 dan tahun 2019 sebesar Rp0,00. Terdiri dari Pembayaran Belanja Tidak Terduga untuk Pencairan Belanja Tidak Terduga kepada Eny Sulisningati guna Restitusi Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Tahun 2019 sebesar Rp3.250.000,00 dan Pembayaran Belanja Tidak Terduga untuk Pengembalian Sisa Anggaran Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tahun 2020 pada BPBD Kabupaten Cilacap sebesar Rp111.057.095,00.

V.4.b.12)Beban Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

Beban Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa pada tahun 2020 sebesar Rp0,00 dan tahun 2019 sebesar Rp0,00.

V.4.b.13)Beban Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

Beban Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa pada tahun 2020 sebesar Rp0,00 dan tahun 2019 sebesar Rp0,00.

V.4.b.14)Beban Transfer

Beban Tranfer pada tahun 2020 sebesar Rp187.201.496.600,00 dan tahun 2019 sebesar Rp213.425.600.794,00 dengan rincian sebagai berikut:

Beban Transfer		Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
1	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota/Desa	0,00	0,00
2	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	19.937.513.000,00	18.594.428.100,00
3	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	1.533.277.300,00	1.150.136.319,00
4	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	165.730.706.300,00	192.312.139.500,00
5	Beban Transfer Bantuan Keuangan lainnya	0,00	1.368.896.875,00
Jumlah		**187.201.496.600,00**	**213.425.600.794,00**

Beban Tranfer Bagi Hasil Pajak Daerah dan Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya tahun 2019 disajikan pada Beban Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa yang secara rinci dijelaskan pada catatan nomor V.4.b.11). Sedangkan Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa dan Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya tahun 2019 disajikan pada Beban Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa yang secara rinci dijelaskan pada catatan nomor V.4.b.12).

Beban Transfer sebesar Rp187.201.496.600,00 terdiri dari;

a) Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah sebesar Rp19.937.513.000,00 terdiri dari:
   (1) Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Eks Distrik Cilacap sebesar Rp4.692.915.000,00;
   (2) Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Eks Distrik Kroya sebesar Rp6.140.923.000,00;
   (3) Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Eks Distrik Sidareja sebesar Rp4.648.298.000,00;
   (4) Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Eks Distrik Majenang sebesar Rp 4.455.377.000;
b) Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya sebesar Rp1.533.277.300,00 terdiri dari:
   (1) Eks Distrik Cilacap sebesar Rp276.111.900,00;
   (2) Eks Distrik Kroya sebesar Rp522.494.600,00;
   (3) Eks Distrik Sidareja sebesar Rp381.484.100,00;
   (4) Eks Distrik Majenang sebesar Rp353.186.700,00;
c) Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa sebesar Rp165.730.706.300,00 terdiri dari:
   (1) Eks Distrik Cilacap sebesar Rp32.844.619.300,00;
   (2) Eks Distrik Kroya sebesar Rp51.887.868.000,00;
   (3) Eks Distrik Sidareja sebesar Rp39.940.239.000,00;
   (4) Eks Distrik Majenang sebesar Rp41.057.980.000,00;
   (5) Desa Adat yang Bersumber dari APBN ke Desa Eks Distrik Cilacap sebesar Rp0,00.
d) Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya sebesar Rp0,00.

V.4.c. Surplus/Defisit dari Operasi – LO

Surplus/Defisit dari Operasi tahun 2020 sebesar Rp351.799.051.252,80 dan tahun 2019 adalah sebesar Rp986.288.596.571,32.

V.4.d. Surplus Penjualan Aset Non Lancar – LO

Penjualan Aset Non Lancar tahun 2020 sebesar Rp789.742.600,00 dan tahun 2019 adalah sebesar Rp691.050.210,24. Surplus Penjualan Aset Non Lancar tahun 2020 sebesar Rp789.742.600,00 yang merupakan Surplus Penjualan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang dihapuskan sebesar Rp661.357.000,00, Surplus Penjualan Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang dihapuskan sebesar Rp8.190.000,00 dan Surplus Penjualan Aset NonLancar/Aset Tetap Lainnya sebesar Rp120.195.600,00.

V.4.e. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO

Surplus dari Non Operasional Lainnya tahun 2020 sebesar Rp0,00 dan tahun 2019 sebesar Rp0,00 yang merupakan pengakuan Pendapatan LO dan Piutang Ganti Kerugian Daerah sebesar Rp0,00 .

V.4.f. Defisit Penjualan Aset Non Lancar – LO

Defisit Penjualan Aset Non Lancar tahun 2020 sebesar Rp264.243.973,00 dan tahun 2019 adalah sebesar Rp2.110.536.852,57. Defisit Penjualan Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp264.243.973,00.

V.4.g. Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO

Defisit dari Non Operasional Lainnya tahun 2020 sebesar Rp0,00 dan tahun 2019 sebesar Rp0,00.

V.4.h. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Surplus/Defisit Non Operasional pada tahun 2020 sebesar Rp525.498.627,00 dan tahun 2019 sebesar minus Rp1.419.486.642,33.

V.4.i. Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa

Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa pada tahun 2020 sebesar Rp352.324.549.879,80 dan tahun 2019 sebesar Rp984.869.109.928,99.

V.4.j. Pos Luar Biasa – LO

Pendapatan Luar Biasa pada tahun 2020 sebesar Rp0,00 dan tahun 2019 sebesar Rp0,00

V.4.k. Beban Luar Biasa

Beban Luar Biasa tahun 2020 sebesar Rp377.264.100,00 dan tahun 2019 sebesar Rp0,00. Beban luar biasa sebesar Rp377.264.100,00 merupakan Dana Belanja Tidak Terduga yang digunakan untuk bencana alam sebesar Rp389.514.100,00 dan didalamnya masih menjadi persediaan sebesar Rp12.250.000,00.

V.4.l. Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa

Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa pada tahun 2020 sebesar minus Rp377.264.100,00 dan pada tahun 2019 sebesar Rp0,00.

V.5. PENJELASAN POS - POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas per 31 Desember 2020.

Ekuitas per 31 Desember 2020 sebesar Rp6.015.556.894.602,80 berasal dari saldo awal Ekuitas tahun 2020 sebesar Rp5.689.024.722.942,02 ditambah Surplus/Defisit - LO tahun 2020 sebesar Rp351.947.285.779,80 dikurangi koreksi ekuitas lainnya sebesar minus Rp25.415.114.119,02.

V.5.a. Ekuitas Awal

Ekuitas awal tahun 2020 sebesar Rp5.689.024.722.942,02 merupakan saldo ekuitas per 31 Desember 2019

V.5.b. Surplus/Defisit – LO

Surplus/Defisit – LO tahun 2020 sebesar Rp351.947.285.779,80 berasal dari Pendapatan – LO sebesar Rp2.983.073.055.999,13 dikurangi Beban sebesar Rp2.631.274.004.746,33 ditambah Surplus Kegiatan Non Operasional sebesar Rp525.498.627,00 dan dikurangi Surplus/Defisit Pos Luar Biasa sebesar Rp377.264.100,00. Penjelasan secara rinci dapat dilihat pada penjelasan atas Laporan Operasional.

V.5.c. Koreksi Ekuitas Lainnya

Koreksi ekuitas lainnya tahun 2020 sebesar minus Rp25.415.114.119,02 sedangkan tahun 2019 sebesar Rp153.292.648.038,92. Koreksi Ekuitas Lainnya tahun 2020 secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian		Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
1	Koreksi Nilai Piutang	(2.400.657.857,02)	0,00
2	Koreksi Nilai Penyertaan Modal Pemda	(73.299.153.915,00)	149.683.332.787,94
3	Koreksi Nilai Aset Tetap	88.752.053.415,20	14.984.035.390,65
4	Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan	(36.862.990.438,54)	4.542.747.493,00
5	Koreksi Nilai Aset Tidak Berwujud	(1.450.786.818,06)	232.623.450,00
6	Koreksi Nilai Aset Lain-lain	(208.206.151,60)	255.611.421,00
7	Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat	(4.256.336,00)	(16.400.559.171,66)
8	Koreksi Nilai Kewajiban Tahun Sebelumnya	58.883.982,00	(5.143.332,00)
Jumlah		**(25.415.114.119,02)**	**153.292.648.038,93**

Koreksi ekuitas lainnya diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Koreksi nilai Piutang sebesar minus Rp.2.400.657.857,02 terdiri dari:

   a) Koreksi tambah atas kurang catat piutang BPJS tahun 2019 pada BLUD Puskesmas sebesar Rp1.155.795.247,00.

   b) Koreksi tambah atas kurang catat piutang dari denda pajak dan denda retribusi tahun 2019 dan sebelumnya sebesar Rp4.323.546.895,98.

   c) Koreksi kurang atas penghapusan Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Tahun 2020 karena sudah di catat dalam neraca Kejaksaan Cilacap sebesar minus Rp7.880.000.000,00.

2) Koreksi nilai Penyertaan Modal Pemerintah daerah sebesar minus Rp73.299.153.915,00 terdiri dari:

   a) Koreksi tambah atas kurang catat nilai penyertaan modal sebesar Rp.121.463.197,00 dari laba PD. Serba Usaha berdasarkan Laporan Keuangan Audited tahun 2019 oleh Kantor Akuntan Publik yang belum dikoreksi dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2019 karena hasil audit KAP yang terlambat.

   b) Koreksi kurang atas lebih catat penyertaan modal pada PD. Kawasan Industri Cilacap sebesar minus Rp.73.420.617.112,00 berdasarkan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, koreksi disebabkan adanya kewajiban kepada pihak ketiga yang belum diakui pada Laporan Keuangan PD. Kawasan Industri Cilacap tahun 2019.

3) Koreksi nilai Aset Tetap sebesar Rp88.752.053.415,20 merupakan kurang catat, penghapusan aset tetap dan koreksi Aset Tetap, dengan rincian sebagai berikut:

   a) Koreksi tambah atas kurang catat aset tetap per 31 Desember 2019 pada SMP Negeri 5 Majenang Satu Atap sebesar Rp5.538.820,00.

   b) Koreksi tambah atas kurang atas catat aset tetap per 31 Desember 2019 pada SMP Negeri 1 Patimuan Satu Atap sebesar Rp524.683.000,00.

   c) Koreksi tambah atas kurang catat aset tetap per 31 Desember 2019

pada Puskesmas Cimanggu I sebesar Rp5.043.020,00.

d) Koreksi tambah atas kurang catat aset tetap per 31 Desember 2019 pada BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap sebesar Rp8.535.000,00.

e) Koreksi tambah atas kurang catat aset tetap per 31 Desember 2019 sebesar Rp598.245.700,00, koreksi kurang karena dobel catat gedung dan bangunan sebesar minus Rp6.696.598.000,00, koreksi kurang karena lebih catat jalan dan irigasi sebesar minus Rp6.049.916.433,13, koreksi kurang karena penghapusan aset tetap sebesar minus Rp536.917.500,00 pada Dinas Pekerjaan umum Dan Penataan Ruang.

f) Koreksi tambah atas kurang catat aset tetap sebesar Rp7.729.715.973,00 pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air.

g) Koreksi tambah atas kurang catat aset tetap sebesar Rp1.930.371.000,00 dan koreksi kurang karena penghapusan aset tetap sebesar minus Rp73.950.000,00 pada Dinas Komunikasi dan Informatika.

h) Koreksi tambah atas kurang catat aset tetap sebesar Rp405.823.000,00 pada Dinas pertanian.

i) Koreksi tambah atas kurang catat aset tetap sebesar Rp393.108.000,00 pada Kecamatan Cilacap Selatan.

j) Koreksi tambah atas kurang catat aset tetap sebesar Rp719.070.000,00 pada Kecamatan Cilacap Tengah.

k) Koreksi tambah atas kurang catat aset tetap sebesar Rp4.988.000,00 pada Kecamatan Cilacap Utara.

l) Koreksi kurang karena penghapusan aset tetap sebesar minus Rp136.000.000,00 pada Puskesmas Kawunganten.

m) Koreksi kurang atas lebih catat aset tetap Menara pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar minus Rp.2.802.600.000,00.

n) Koreksi kurang atas lebih catat aset tetap pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar minus Rp.53.276.290,00.

o) Koreksi kurang karena penghapusan aset tetap sebesar minus Rp622.604.000,00 pada Puskesmas Dayeuhluhur I.

p) Koreksi kurang karena penghapusan aset tetap sebesar minus Rp505.616.200,00 pada Dinas KB, PP dan PA.

q) Koreksi kurang karena penghapusan aset tetap sebesar minus Rp600.000.000,00 pada Dinas Perikanan.

r) Koreksi kurang karena penghapusan aset tetap sebesar minus Rp174.827.347,00 pada Kecamatan Cilacap Utara.

s) Koreksi kurang karena penghapusan aset tetap sebesar minus Rp510.231.685,00 pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

t) Koreksi kurang karena Barang Intrakompabel menjadi Ekstrakompabel akibat Kodefikasi Barang Milik Daerah berdasarkan

Permendagri 108 sebesar minus Rp.2.057.014.072,87.

u) Koreksi tambah atas kurang catat aset tetap Jalan Khusus Komplek sebesar Rp72.805.420.584,00 pada Disperkimta.

v) Koreksi tambah atas kurang catat tanah sebesar Rp.24.891.062.846,50 pada Disperkimta.

4) Koreksi nilai akumulasi penyusutan aset tetap karena adanya penghapusan aset dan koreksi sebesar minus Rp36.862.990.438,54 yang terdiri dari:

a) Koreksi tambah ekuitas karena adanya penurunan nilai akumulasi penyusutan aset tetap dari penghapusan aset dan koreksi sebesar Rp.9.169.420.700,13.

b) Koreksi kurang karena adanya penambahan akumulasi penyusutan Peralatan dan Mesin untuk menyesuaikan dengan aplikasi SIMDA BMD sebesar minus Rp.13.961.904.418,17.

c) Koreksi kurang karena adanya penambahan akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan untuk menyesuaikan dengan aplikasi SIMDA BMD sebesar minus Rp16.453.320.941,00.

d) Koreksi kurang karena adanya penambahan akumulasi penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk menyesuaikan dengan aplikasi SIMDA BMD sebesar minus Rp15.777.313.022,50.

e) Koreksi lebih karena adanya pengurangan akumulasi penyusutan Aset Tetap Lainnya untuk menyesuaikan dengan aplikasi SIMDA BMD sebesar Rp160.127.243,00.

5) Koreksi kurang ekuitas karena adanya penambahan nilai akumulasi amortisasi Aset Tidak Berwujud tahun 2019 sebesar minus Rp1.450.786.818,06.

6) Koreksi kurang ekuitas dari aset lain-lain sebesar minus Rp208.206.151,60.

7) Koreksi kurang nilai akumulasi penyusutan barang rusak berat sebesar minus Rp.4.256.336,00.

8) Koreksi tambah ekuitas atas nilai Kewajiban tahun sebelumnya sebesar Rp58.883.982,00 yang merupakan koreksi utang insentif pegawai, internet, pajak tahun sebelumnya.

V.6. PENJELASAN POS-POS LAPORAN ARUS KAS

Arus Kas menunjukkan arus masuk dan keluarnya dana Kas Daerah yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah atau Pemegang Kas Daerah (BUD/PKD), yang terkait dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris dalam tahun anggaran berkenaan. Arus Kas Bersih selama tahun anggaran berkenaan, ditambah saldo awal Kas Daerah, merupakan saldo akhir Kas Daerah yang dikuasai BUD/PKD.

Saldo akhir kas yang dikuasai BUD/PKD tidak termasuk sisa dana kas yang dikuasai oleh Pemegang Kas (PK) Satuan Kerja (Satker). Sisa kas di PK Satker adalah sisa dana yang berasal dari arus kas keluar melalui BUD/PKD, sesuai dengan SPM. Dengan demikian sisa dana kas di PK Satker merupakan sisa Uang Persediaan

(UP), yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum disetor kembali ke Kas Daerah.

Penyusunan Laporan Arus Kas pada tahun 2020 sudah mengkonsolidasi transaksi dari luar kas umum daerah yang sudah disahkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) yaitu BLUD RSUD Cilacap, BLUD RSUD Majenang, 38 BLUD Puskesmas dan Dana BOS di masing-masing sekolah dan dimasukkan sebagai aktivitas BUD. Hal ini mendasari PSAP Nomor 13 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Sehingga untuk saldo awal kas Tahun 2020 di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendaharan Pengeluaran, Kas di BLUD dan Kas di Bendahara BOS sudah sama dengan saldo akhir kas tahun 2019.

Arus Kas Bersih Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap melalui BUD/PKD TA 2020 dan 2019, dapat disajikan sebagai berikut:

Arus Kas Bersih dari:		Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
1	Aktivitas Operasi	524.456.213.139,48	661.912.233.569,59
2	Aktivitas Investasi	(480.740.577.687,00)	(683.210.405.145,20)
3	Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00
4	Aktivitas Transitoris	(1.417.591.842,91)	1.331.658.964,60
Kenaikan (Penurunan) Kas Bersih		**42.298.043.609,57**	**(19.966.512.611,01)**

Kenaikan Bersih Kas selama periode TA 2020 sebesar Rp42.298.043.609,57 dan pada TA 2019 sebesar minus Rp19.966.512.611,01.

V.6.a. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

Arus kas bersih dari aktivitas operasi meliputi arus masuk kas dan arus keluar kas, sebagai berikut:

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
1	Arus Kas Masuk	3.150.859.099.615,48	3.281.912.173.449,59
2	Arus Kas Keluar	2.626.402.886.476,00	2.619.999.939.880,00
	Arus Kas Bersih	**524.456.213.139,48**	**661.912.233.569,59**

Realisasi arus kas bersih dari aktivitas operasi TA 2020 dan TA 2019 masing-masing sebesar Rp524.456.213.139,48 dan Rp661.912.233.569,59 yang dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

V.6.a.1) Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi

Arus kas masuk dari aktivitas operasi berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Penerimaan Transfer (Dana Perimbangan) dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, dapat diikhtisarkan sebagai berikut:

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi		Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
1	Penerimaan Pajak Daerah	203.188.563.271,00	209.475.848.896,00
2	Penerimaan Retribusi Daerah	18.969.873.119,00	44.740.277.398,00
3	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	44.675.178.661,00	26.190.072.040,00
4	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	322.966.816.012,48	292.984.804.108,59
5	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	52.212.580.388,00	60.515.821.787,00
6	Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	1.931.834.025,00	1.158.788.035,00
7	Penerimaan Dana ALokasi Umum	1.281.940.170.000,00	1.423.200.397.000,00
8	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	421.506.618.241,00	443.795.856.542,00
9	Penerimaan Dana Penyesuaian	71.923.322.000,00	46.363.857.000,00
10	Penerimaan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya	0,00	0,00
11	Penerimaan Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	25.350.873.000,00	32.961.441.000,00
12	Penerimaan Pendapatan Hibah	214.835.523.320,00	191.087.575.517,00
13	Penerimaan Bantuan Keuangan	0,00	0,00

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi		Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
14	Penerimaan Pendapatan Lainnya	0,00	0,00
15	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	197.463.851.578,00	222.481.485.326,00
16	Penerimaan Alokasi Dana Desa Yang Bersumber dari APBN	293.893.896.000,00	286.955.948.800,00
Arus Kas Masuk		**3.150.859.099.615,48**	**3.281.912.173.449,59**

V.6.a.2) Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi

Arus kas keluar dari aktivitas operasi untuk Belanja Operasi (BO), dan Belanja Tak Terduga (BTT), dapat diikhtisarkan sebagai berikut:

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi		Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
1	Pembayaran Pegawai	1.145.443.814.425,00	1.193.972.479.225,00
2	Pembayaran Barang dan Jasa	881.429.804.126,00	857.565.629.480,00
3	Pembayaran Bunga	0,00	0,00
4	Pembayaran Subsidi	0,00	400.000.000,00
5	Pembayaran Hibah	40.366.842.247,00	58.596.950.000,00
6	Pembayaran Bantuan Sosial	51.091.710.000,00	5.884.050.000,00
7	Pembayaran Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	21.470.790.300,00	22.943.846.000,00
8	Pembayaran Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	459.624.602.300,00	480.636.985.175,00
9	Pembayaran Tak Terduga	26.975.323.078,00	0,00
Arus Kas Keluar		**2.626.402.886.476,00**	**2.619.999.939.880,00**

Arus kas keluar dari aktivitas operasi sebesar Rp2.626.402.886.476,00.

V.6.b.Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

Arus kas bersih dari aktivitas investasi meliputi arus kas masuk dan arus kas keluar, sebagai berikut:

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
1	Arus Kas Masuk	1.543.356.097,00	885.792.861,00
2	Arus Kas Keluar	482.283.933.784,00	684.096.198.006,20
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		**(480.740.577.687,00)**	**(683.210.405.145,20)**

Realisasi arus kas bersih dari aktivitas investasi tahun 2020 dan tahun 2019 masing-masing sebesar minus Rp480.740.577.687,00 dan minus Rp683.210.405.145,20 yang dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

V.6.b.1) Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi

Realisasi arus kas masuk dari aktivitas investasi tahun 2020 sebesar Rp1.543.356.097,00 dan tahun 2019 sebesar Rp885.792.861,00 dengan rincian sebagai berikut:

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi		Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
1	Hasil Penjualan Atas Tanah	0,00	0,00
2	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	1.414.970.497,00	601.519.761,00
3	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	8.190.000,00	284.273.100,00
4	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	120.195.600,00	0,00
Arus Kas Masuk		**1.543.356.097,00**	**885.792.861,00**

V.6.b.2) Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi

Arus kas keluar dari aktivitas investasi merupakan pengeluaran Kas Daerah untuk Belanja Modal, yang dapat diikhtisarkan sebagai berikut:

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi		Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
1	Perolehan Tanah	14.242.054.652,00	6.643.748.180,00
2	Perolehan Peralatan dan Mesin	108.580.137.022,00	108.096.788.800,00

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi		Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
3	Perolehan Gedung dan Bangunan	63.032.862.639,00	134.459.038.713,00
4	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	264.551.341.345,00	391.540.159.364,00
5	Perolehan Aset Tetap Lainnya	11.867.458.126,00	21.576.305.349,20
6	Perolehan Aset Lainnya	158.080.000,00	1.005.157.600,00
8	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	19.852.000.000,00	20.775.000.000,00
Arus Keluar Kas		**482.283.933.784,00**	**684.096.198.006,20**

V.6.c. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan meliputi arus kas masuk dan arus kas keluar, sebagai berikut:

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
1	Arus Kas Masuk	-	-
2	Arus Kas Keluar	-	-
Arus Kas Bersih		**-**	**-**

Realisasi arus kas bersih dari aktivitas pendanaan tahun 2020 sebesar Rp0,00 dan tahun 2019 sebesar Rp0,00.

V.6.d. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris

Arus kas bersih dari Aktivitas Transitoris meliputi arus kas masuk dan arus kas keluar, sebagai berikut:

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
1	Arus Kas Masuk	190.556.431.615,00	202.901.452.437,91
2	Arus Kas Keluar	191.974.023.457,91	201.569.793.473,31
Arus Kas Bersih		**1.417.591.842,91**	**1.331.658.964,60**

Realisasi arus kas bersih dari aktivitas transitoris tahun 2020 sebesar Rp1.417.591.842,91 sedangkan pada tahun 2019 sebesar Rp1.331.658.964,60 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

V.6.d.1) Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris

Arus kas masuk aktivitas transitoris berasal dari penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dengan realisasi tahun 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp190.556.431.615,00 dan Rp202.901.452.437,91 yang dapat dirinci sebagai berikut:

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris		Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
1	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	190.556.431.615,00	202.901.452.437,91
2	Pemindahbukuan ke Rekening Kas Daerah	-	-
Arus Kas Masuk		**190.556.431.615,00**	**202.901.452.437,91**

Penerimaan PFK sebesar Rp190.556.431.615,00 dengan rincian sebagai berikut:

- Potongan Iuran Wajib Pegawai (IWP) 8% sebesar Rp42.096.857.485,00, potongan Iuran Wajib Pegawai (IWP) 1% sebesar Rp9.525.409.214,
- Penerimaan Taperum dari Belanja Pegawai serta PFK pajak atas SP2D LS Pihak Ketiga yang dilakukan oleh BUD sebesar Rp744.855.000,00,
- Askes sebesar Rp39.667.642.096,00,
- Utang PPh 21 sebesar Rp48.003.613.371,00,

- Utang PPh 22 sebesar Rp1.023.986.223,00,
- Utang PPh 23 sebesar Rp122.544.335,00,
- Utang PPh 4 sebesar Rp6.761.754.996,00,
- Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp37.692.232.181,00,
- Ketenagakerjaan sebesar Rp4.626.438.414,00
- Uang Muka Covid yang Belum diakui sebagai Pendapatan (RSUD Majenang) sebesar Rp221.831.600,00,
- Uang Titipan Iur Bayar BPJS (RSUD Majenang) sebesar Rp4.000.000,00,
- Uang Titipan Pasien (RSUD Cilacap) sebesar Rp58.595.212,00,
- Pajak Terutang Dana BOS sebesar Rp3.031.423,00,
- Titipan Honor Pegawai yang masih di Rekening Bank Bendahara (Kecamatan Cilacap Tengah) sebesar Rp.1.800.000,00,
- Titipan Utang Pihak Ketiga Dana Bos sebesar Rp30.000,00,
- Titipan Sisa Uang Iuran Koperasi dan Baznas yang masih di Rekening Bendahara Gaji Kecamatan Sidareja sebesar Rp5.338,00,

Dana tersebut merupakan hak dan harus dibayarkan kepada pihak ketiga, bukan merupakan hak/pendapatan bagi Pemerintah Kabupaten Cilacap.

V.6.d.2) Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris

Arus kas keluar dari aktivitas transitoris adalah dalam rangka membayarkan kembali jumlah yang telah dipotong, sebagaimana tersebut diatas yang dapat diikhtisarkan sebagai berikut:

Arus keluar Kas dari Aktivitas Transitoris		Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
1	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	191.974.023.457,91	201.569.793.473,31
Arus Keluar Kas		**191.974.023.457,91**	**201.569.793.473,31**

Pembayaran PFK sebesar Rp191.974.023.457,91 adalah merupakan pembayaran Iuran Wajib, PPh pasal 21, dan Taperum dari belanja pegawai serta PFK pajak atas SP2D LS Pihak Ketiga secara langsung tanpa menggunakan SP2D kepada Kas Negara dengan kode mata anggaran penerimaan (MAP) sebagai berikut:

- IWP 10% = MAP 811112
- IWP 2% = MAP 811212 (gaji terusan)

Pada tahun 2020 terdapat kenaikan bersih kas sebesar Rp42.298.043.609,57 dan tahun 2019 terdapat penurunan bersih kas sebesar minus Rp19.966.512.611,01 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	524.456.213.139,48	661.912.233.569,59	137.456.020.430,11
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(480.740.577.687,00)	(683.210.405.145,20)	202.469.827.458,2
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(1.417.591.842,91)	1.331.658.964,60	85.932.878,31
Jumlah	**42.298.043.609,57**	**(19.966.512.611,01)**	**(65.099.739.906,4)**

Kenaikan arus kas bersih dari aktivitas operasi tahun 2020 dibanding tahun 2019 disebabkan oleh arus kas masuk operasi yang lebih besar daripada arus kas keluar operasi dan penurunan pada arus kas bersih dari aktivitas

investasi disebabkan oleh penurunan belanja. Sedangkan untuk arus bersih dari aktivitas transitoris mengalami penurunan disebabkan pajak terutang dana BOS dan Pihak Ketiga Lainnya mengalami penurunan karena sudah menyetorkan pajak pada tahun 2020.

V.6.e. Saldo Akhir Kas

Saldo akhir kas di Neraca per 31 Desember 2020 sebesar Rp324.872.679.809,80 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp282.574.636.200,23.

Terkait penjelasan Kas SILPA dan Neraca serta LAK sebagai berikut.

Uraian	Kas SILPA (Rp)	Kas Neraca dan LAK (Rp)	Selisih Kas Neraca/LAK dan SILPA (Rp)
Kas Di Kasda	271.885.939.063,00	271.885.939.063,00	0,00
Kas Di Bendahara Penerimaan	4.735.500,00	4.735.500,00	0,00
Kas Di Bendahara Pengeluaran	3.628.065,00	3.628.065,00	0,00
Kas Di BLUD RSUD Cilacap	17.484.038.233,00	17.484.038.233,00	0,00
Kas Di BLUD RSUD Majenang	2.573.790.228,00	2.573.790.228,00	0,00
Kas Di BLUD Puskesmas	26.603.127.805,00	26.603.127.805,00	0,00
Kas Di Bendahara FKTP	0,00	0,00	0,00
Kas Di Bendahara BOS	6.317.420.915,80	6.317.420.915,80	0,00
Uang Muka Covid yang akan dikembalikan ke Kemenkes (RSUD Majenang)	(221.831.600,00)	0,00	221.831.600,00
Uang Titipan pasien (RSUD MAJENANG)	(4.000.000,00)	0,00	4.000.000,00
Uang Titipan Pasien (RSUD CILACAP)	(58.595.212,00)	0,00	58.595.212,00
Pajak Terutang Sekretariat DPRD	(1.822.727,00)	0,00	1.822.727,00
Pajak terutang Dana BOS	(3.013.423,00)	0,00	3.013.423,00
Titipan Honor Pegawai (Kecamatan Cilacap Tengah)	(1.800.000,00)	0,00	1.800.000,00
Titipan Uang Pihak Ketiga Dana BOS	(30.000,00)	0,00	30.000,00
Titipan Uang Kecamatan Sidareja	(5.338,00)	0,00	5.338,00
Jumlah	**324.581.581.509,80**	**324.872.679.809,80**	**291.098.300,00**
SILPA	**324.581.581.509,80**		
Selisih	**0,00**		

Penjelasan atas masing-masing posisi kas tersebut dapat dilihat pada penjelasan atas Neraca:

1) Kas di Kas Daerah pada catatan nomor V.3.a.1);
2) Kas di Bendahara Penerimaan pada catatan nomor V.3.a.2);
3) Kas di Bendahara Pengeluaran pada catatan nomor V.3.a.3);
4) Kas di BLUD pada catatan nomor V.3.a.4);
5) Kas di Bendahara FKTP pada catatan nomor V.3.a.5);
6) Kas di Bendahara BOS pada catatan nomor V.3.a.6).

Saldo sisa kas SILPA adalah sebesar Rp.324.581.581.509,80, sedangkan saldo sisa kas di Neraca dan LAK sebesar Rp.324.872.679.809,80, selisih sebesar Rp.291.098.300,00 dengan rincian sebagai berikut, uang muka covid yang akan dikembalikan ke Kemenkes pada RSUD Majenang sebesar Rp.221.831.600,00, uang titipan pasien pada RSUD MAJENANG sebesar Rp.4.000.000,00, uang titipan pasien pada RSUD CILACAP sebesar Rp.58.595.212,00, pajak terutang pada Sekretariat DPRD sebesar Rp.1.822.727,00, pajak terutang dari Dana BOS sebesar Rp.3.013.423,00, titipan honor pegawai pada Kecamatan Cilacap Tengah sebesar Rp. 1.800.000,00,

titipan uang pihak ketiga dana BOS sebesar Rp.30.000,00 dan titipan uang iuran KORPRI pada Kecamatan Sidareja sebesar Rp.5.338,00.

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

VI.1. DASAR HUKUM PEMBENTUKAN KABUPATEN CILACAP

Kabupaten Cilacap dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
   Pemerintah Kabupaten Cilacap berkedudukan tetap di Jalan Jenderal Soedirman Nomor 32, Cilacap, Jawa Tengah, Kode Pos 53223.

VI.2. LETAK GEOGRAFIS

Kabupaten Cilacap merupakan salah satu bagian dari wilayah Provinsi Jawa Tengah, terletak diantara 108°4'30" - 109°30'30″ Bujur Timur dan 7°30' - 7°45'20" Lintang Selatan. Luas wilayah Kabupaten Cilacap mencapai 225.360.840 Ha, terbagi menjadi 24 kecamatan, 15 kelurahan, dan 269 desa. Batas wilayah Kabupaten Cilacap meliputi, sebelah Selatan berbatasan Laut Selatan (Samudera Indonesia), sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Banyumas dan Kabupaten

Brebes, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kebumen, dan sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat.

Wilayah tertinggi adalah Kecamatan Dayeuhluhur dengan ketinggian 198 m dari permukaan laut, dan wilayah terendah adalah Kecamatan Cilacap Tengah dengan ketinggian 6 m dari permukaan laut. Jarak terjauh dari Barat ke Timur adalah dari Dayeuhluhur sampai Ke Nusawungu sepanjang 152 Km, dan dari Utara ke Selatan adalah dari Cilacap ke Sampang sepanjang 35 Km.

Jarak dengan kota besar terdekat adalah ke Yogyakarta sepanjang ±200 Km, dan jarak ke kota-kota besar lainnya, yaitu ke Semarang sepanjang ±250 Km, ke Bandung sepanjang ±250 Km, ke Jakarta sepanjang ±500 Km, dan ke Surabaya sepanjang ±600 Km.

Kondisi wilayah Kabupaten Cilacap terdiri dari tanah sawah 30%, tanah tegalan 19%, lading/huma 1%, perkebunan 6%, ditanami pohon/hutan rakyat 3%, lainnya (tambak , hutan negara dll) 21% dan lahan bukan pertanian 20%.

VI.3. DEMOGRAFI

a. Penduduk dan Pertumbuhan Penduduk

Penduduk Kabupaten Cilacap menurut hasil registrasi penduduk pada akhir tahun 2019 mencapai 1.937.427 jiwa yang terdiri dari laki-laki 979.745 jiwa dan perempuan 957.682 jiwa. Pertumbuhan penduduk tahun 2019 sebesar 1,60 persen, lebih rendah dibanding pertumbuhan penduduk tahun 2018 yang tercatat 3,47 persen.

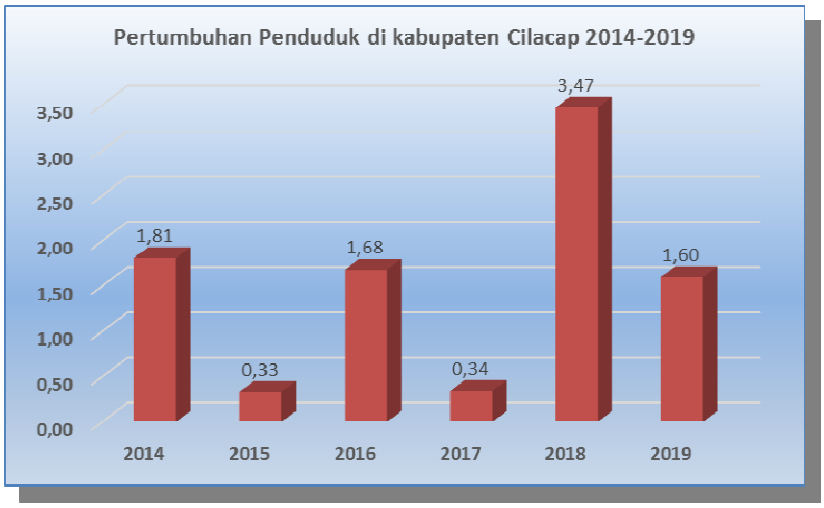

b. Penyebaran dan Kepadatan Penduduk

Distribusi penduduk menurut kecamatan, memperlihatkan Kecamatan Majenang adalah yang paling banyak penduduknya yaitu sebesar 138.476 jiwa (7,15 persen), diikuti Kecamatan Kesugihan sebesar 131.283 jiwa (6,78 persen) kemudian Kecamatan Kroya sebesar 114.119 jiwa (5,89 persen). Sedangkan yang berpenduduk paling kecil adalah Kecamatan Kampung Laut, yaitu sebesar 15.566 jiwa (0,80 persen).

Bila jumlah penduduk dibandingkan dengan luas wilayah maka dikenal suatu ukuran yaitu kepadatan penduduk. Ukuran ini dapat digunakan sebagai langkah awal guna memperoleh gambaran tentang kemampuan wilayah dalam memberikan daya tampung dan daya dukung terhadap penduduk yang ada. Bertambahnya penduduk menyebabkan kepadatan penduduk juga meningkat, yaitu dari 892 jiwa/km2 pada tahun 2018 menjadi 906 jiwa/km2 pada tahun 2019. Seperti tahun sebelumnya, penduduk yang terpadat berada di Kecamatan Cilacap Selatan (9.281 jiwa/km2). Sementara itu Kecamatan Kampung laut yang luasnya 6,8 persen dari total luas kabupaten Cilacap hanya dihuni 107 jiwa/km2 . Sebagai catatan sebagian besar wilayah Kampung Laut bukanlah tanah dataran yang ideal untuk dijadikan tempat tinggal tetapi merupakan rawa-rawa, hutan bakau dan perairan.

Tabel VI.1 Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk dan Penyebaran Penduduk di Kabupaten Cilacap Tahun 2019

Kecamatan	Luas Wilayah (Km²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Jiwa/Km²	Penyebaran (%)
1	2	3	4	5
01. Dayeuhluhur	185,06	49.188	266	2,54
02. Wanareja	189,73	104.771	552	5,41
03. Majenang	138,56	138.476	999	7,15
04. Cimanggu	167,44	104.212	622	5,38
05. Karangpucung	115,00	80.071	696	4,13
06. Cipari	121,47	65.608	540	3,39
07. Sidareja	54,95	62.305	1.134	3,22
08. Kedungreja	71,43	86.929	1.217	4,49
09. Patimuan	75,30	49.288	655	2,54

Kecamatan	Luas Wilayah (Km^2)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Jiwa/Km^2	Penyebaran (%)
1	2	3	4	5
10. Gandrungmangu	143,19	109.331	764	5,64
11. Bantarsari	95,54	73.431	769	3,79
12. Kawunganten	117,43	84.705	721	4,37
13. Kampung laut	146,14	15.566	107	0,80
14. Jeruklegi	96,80	75.156	776	3,88
15. Kesugihan	82,31	131.283	1.595	6,78
16. Adipala	61,19	93.309	1.525	4,82
17. Maos	28,05	46.672	1.664	2,41
18. Sampang	27,30	43.018	1.576	2,22
19. Kroya	58,83	114.119	1.940	5,89
20. Binangun	51,42	67.926	1.321	3,51
21. Nusawaungu	61,26	84.729	1.383	4,37
22. Cilacap Selatan *)	9,11	84.549	9.281	4,36
23. Cilacap Tengah	22,15	90.490	4.085	4,67
24. Cilacap Utara	18,84	82.295	4.368	4,25
Jumlah	**2.138,50**	**1.937.427**	**906**	**100,00**
Tahun 2018	**2.138,50**	**1.906.849**	**892**	
Tahun 2017	**2.138,50**	**1.842.913**	**862**	
Tahun 2016	**2.138,50**	**1.836.701**	**859**	

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap

c. Rasio Jenis Kelamin dan Rasio Ketergantungan Penduduk

Besar kecilnya rasio jenis kelamin di suatu daerah dipengaruhi oleh :

1) *Sex Ratio at Birth*.
   Kelahiran bayi laki-laki lebih banyak daripada bayi perempuan.
2) Pola Mortalitas antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan.
   Jika kematian laki-laki lebih besar dari pada jumlah kematian perempuan maka rasio jenis kelamin semakin kecil.
3) Pola migrasi antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan.
   Jika suatu daerah sex ratio > 100 berarti di daerah tersebut lebih banyak penduduk laki-laki. Jika sex ratio < 100 berarti lebih banyak penduduk perempuan.

Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin di tahun 2019 menunjukkan jumlah penduduk laki-laki sedikit lebih banyak dibanding penduduk perempuan, yang diindikasikan dengan angka rasio jenis kelamin sebesar 102,3. Di semua kecamatan jumlah laki-laki lebih banyak daripada penduduk perempuan kecuali di Kecamatan Dayeuhluhur dan Maos, di mana rasio jenis kelamin di Kecamatan Dayeuhluhur tercatat 97,7 dan di Kecamatan Maos 99.6. Artinya dari setiap 977 penduduk laki-laki di Kecamatan Dayeuhluhur ada 1.000 orang penduduk perempuan dan dari setiap 996 penduduk laki-laki di Kecamatan Maos ada 1.000 penduduk perempuan.

Tabel VI.2 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin di Kabupaten Cilacap Tahun 2019

Kecamatan	Laki-laki (orang)	Perempuan (orang)	Laki+Perempuan (orang)	Rasio Jenis Kelamin (%)
1	2	3	4	5
01. Dayeuhluhur	24.314	24.874	49.188	97,70
02. Wanareja	52.747	52.024	104.771	101,40
03. Majenang	69.784	68.692	138.476	101,60
04. Cimanggu	53.048	51.164	104.212	103,70
05. Karangpucung	40.681	39.390	80.071	103,30
06. Cipari	33.236	32.372	65.608	102,70
07. Sidareja	31.235	31.070	62.305	100,50
08. Kedungreja	44.056	42.873	86.929	102,80
09. Patimuan	24.836	24.452	49.288	101,60
10. Gandrungmangu	55.684	53.647	109.331	103,80
11. Bantarsari	37.305	36.126	73.431	103,30
12. Kawunganten	43.099	41.606	84.705	103,60
13. Kampung laut	8.131	7.435	15.566	109,40
14. Jeruklegi	38.089	37.067	75.156	102,80
15. Kesugihan	66.696	64.587	131.283	103,30
16. Adipala	47.309	46.000	93.309	102,80
17. Maos	23.291	23.381	46.672	99,60
18. Sampang	21.568	21.450	43.018	100,60
19. Kroya	57.687	56.432	114.119	102,20
20. Binangun	34.291	33.635	67.926	102,00
21. Nusawungu	42.873	41.856	84.729	102,40
22. Cilacap Selatan	42.585	41.964	84.549	101,50
23. Cilacap Tengah	45.688	44.802	90.490	102,00
24. Cilacap Utara	41.512	40.783	82.295	101,80
Jumlah	**979.745**	**957.682**	**1.937.427**	**102,30**
Tahun 2018	**964.101**	**942.748**	**1.906.849**	**102,30**
Tahun 2017	**934.014**	**908.899**	**1.842.913**	**102,80**
Tahun 2016	**931.270**	**905.431**	**1.836.701**	**102,90**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap

Dari umur penduduk dapat diketahui pula angka rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Cilacap tahun 2019 sebesar 43,69 persen, yang berarti tiap 100 orang usia produktif harus menanggung sekitar 44 orang usia non produktif.

Tabel VI.3 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di Kabupaten Cilacap Tahun 2016 – 2019

Kelompok Umur	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5
0 – 14	473.125	455.769	464.784	439.096
15 – 64	1.216.491	1.225.141	1.269.427	1.348.357
65 +	147.086	162.003	172.638	149.974
Rasio Ketergantungan (%)	**50,98**	**50,42**	**50.21**	**43,69**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap

VI.4. ORGANISASI

Unsur Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap meliputi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDh/WKDh), yang dipilih secara langsung oleh rakyat melalui suatu Pemilihan Umum (Pemilu). Dalam melaksanakan pemerintahan, KDh/WKDh dibantu oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

a. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

DPRD Kabupaten Cilacap terdiri dari 50 Anggota, yang berasal dari berbagai unsur Partai Politik (Parpol) pemenang Pemilu. Nama-nama Ketua dan Wakil Ketua, serta Ketua Komisi DPRD Kabupaten Cilacap periode 2019-2024, sebagai berikut:

Nama-nama Ketua dan Wakil Ketua, serta Ketua Komisi DPRD Kabupaten Cilacap periode 2019-2024

NAMA	JABATAN
H. Taufik Nurhidayat	Ketua
Sindy Syakir, S.IP, M.Si	Wakil Ketua
Saiful Musta'in	Wakil Ketua
Purwati, S.Pd	Wakil Ketua
Mitra Patriasmoro, SE	Ketua Komisi A-Bidang Pemerintahan dan Hukum
Purwanto, ST	Ketua Komisi B-Bidang Perekonomian & Keuangan
H. Taufik Urokhman Hidayat	Ketua Komisi C-Bidang Pembangunan
Didi Yudi Cahyadi	Ketua Komisi D-Bidang Kesejahteraan Rakyat

b. Kepala Daerah dan Wakil Kapala Daerah (KDh/WKDh)

Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap untuk Periode Jabatan 2017 – 2022 diikuti oleh 3 (tiga) pasang calon, yaitu :

1) Taufik Nurhidayat – Hj. Faiqoh Subky, SH, M.Pd
2) H. Tato Suwarto Pamuji dan Syamsul Aulia Rachman, SSTP, M.Si
3) H. Fran Lukman, S.Sos, MM dan Bambang Sutanto

Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Periode Jabatan 2017 – 2022 yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2017 dengan jumlah pemilih sebanyak 1.472.242 orang. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 937.929 orang (63,71 persen), dengan perolehan suara sah sebanyak 914.507 suara, dan tidak sah 23.422 suara. Hasil perolehan pasangan calon yaitu :

1) Taufik Nurhidayat – Hj. Faiqoh Subky, SH, M.Pd memperoleh 249.081 suara.
2) H.Tato Suwarto Pamuji dan Syamsul Aulia Rachman memperoleh 515.059 suara

3) H. Fran Lukman, S.Sos, MM dan Bambang Sutanto memperoleh 150.367 suara.

c. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Kabupaten Cilacap melaksanakan kewenangan wajib dalam 4 urusan yaitu urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan pemerintahan fungsi penunjang yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Bidang Kewenangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang kemudian dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022, serta Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2019. Urusan Pemerintahan tersebut mencakup 118 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), terdiri dari DPRD, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, 20 Dinas, 5 Badan, 24 Kecamatan, dan 2 lembaga lain, 2 RSUD, sebagai berikut:

1) Urusan Pendidikan, meliputi 1 Dinas dan 85 Sekolah;
2) Urusan Kesehatan, meliputi 1 Dinas, 2 Rumah Sakit Umum Daerah;
3) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, meliputi 2 Dinas;
4) Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, meliputi 1 Dinas;
5) Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, meliputi 1 Satuan dan 2 badan;
6) Urusan Sosial, meliputi 1 Dinas;
7) Urusan Tenaga Kerja, meliputi 1 Dinas;
8) Urusan Pangan, meliputi 1 Dinas;
9) Urusan Lingkungan Hidup, meliputi 1 Dinas;
10) Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipi, meliputi 1 Dinas;
11) Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa, meliputi 1 Dinas;
12) Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, meliputi 1 Dinas;
13) Urusan Perhubungan, meliputi 1 Dinas;
14) Urusan Komunikasi dan Informatika, meliputi 1 Dinas;
15) Urusan Penanaman Modal, meliputi 1 Dinas;
16) Urusan Kepemudaan dan Olahraga, meliputi 1 Dinas;
17) Urusan Kearsipan, meliputi 1 Dinas;
18) Urusan Kelautan dan Perikanan, meliputi 1 Dinas;
19) Urusan Pertanian, meliputi 1 Dinas;
20) Urusan Perdagangan, meliputi 1 Dinas;
21) Urusan Administrasi Pemerintahanan, meliputi DPRD, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, 24 Kecamatan;
22) Urusan Pengawasan, meliputi 1 Inspektorat;
23) Urusan Perencanaan, meliputi 1 Badan;
24) Urusan Keuangan, meliputi 1 Badan;
25) Urusan Kepegawaian, meliputi 1 Badan;

VI.5. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap

Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022.

a. Visi

Otonomi Daerah bertujuan memberdayakan daerah agar lebih mandiri dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa sendiri. Maka bagi Pemerintah Daerah, Otonomi Daerah bukan hanya sekedar suatu peluang (*opportunity*), tetapi juga suatu tantangan yang harus dihadapi secara cerdas. Penerapan otonomi daerah membawa konsekuensi bagi Pemerintah Daerah untuk lebih mampu menyusun kebijakan yang dapat mengakomodir aspirasi masyarakat, disamping harus mampu meningkatkan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat serta lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sejalan *dengan* hal tersebut, Kabupaten Cilacap telah menetapkan visi sebagai arah pembangunan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022, yaitu : ***" Cilacap Semakin Sejahtera dan Merata"***.

b. Misi

Untuk mencapai visi Kabupaten Cilacap tersebut, Pemerintah Kabupaten Cilacap merumuskan 5 (lima) misi sebagai berikut:

1) Meningkatkan layanan pendidikan dan kesehatan rohani dan jasmani serta kesejahteraan sosial dan keluarga
2) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang profesional bersifat *entrepreneur* dan dinamis dengan mengedepankan prinsip *Good Governance dan Clean Government*.
3) Mewujudkan demokratisasi, stabilitas keamanan, ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat
4) Mengembangkan perekonomian yang bertumpu pada potensi lokal dan regional
5) Mengembangkan dan membangun infrastruktur wilayah dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup dalam pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan

Untuk merealisasikan misi pembangunan di atas, telah dilaksanakan berbagai pogram/kegiatan di setiap bidang/sektor. Untuk mengetahui tingkat pencapaian program/kegiatan yang dijalankan maka diperlukan informasi atau indikator untuk mengukurnya. Informasi juga sangat menunjang fungsi perencanaan sebagai salah satu aspek penting dalam manajemen pembangunan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan kebutuhan informasi kuantitatif yang menyangkut potensi, situasi sosial ekonomi wilayah, ketersediaan modal ekonomi, sosial dan kultural serta ketersediaan sarana dan prasarana menjadi keharusan.

BAB VII
PENUTUP

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020, disajikan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, teknis pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.

Kami berharap penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan *(stakeholders)* serta memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi, dan *fairness* dalam pengelolaan keuangan daerah.

Cilacap, 17 Mei 2021

BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI